BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepuluan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 688I);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
dan
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut APBD Tahun Anggaran 2024 adalah rencana keuangan tahunan Daerah Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 2

(1) APBD Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp986.585.176.132,00 (sembilan ratus delapan puluh

enam miliar lima ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus tiga puluh dua rupiah).

(2) APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Pendapatan Daerah;
   b. Belanja Daerah; dan
   c. Pembiayaan Daerah.

(3) Rincian APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah		Rp976.085.176.132,00
b. Belanja Daerah		Rp984.585.176.132,00 _
Surplus/(defisit)		-Rp8.500.000.000,00
c. Pembiayaan Daerah		
1. penerimaan Pembiayaan		Rp10.500.000.000,00
2. pengeluaran Pembiayaan		Rp2.000.000.000,00 _
Pembiayaan *netto*		Rp8.500.000.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SiLPA) Rp0

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp976.085.176.132,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam miliar delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus tiga puluh dua rupiah), yang bersumber dari:

a. pendapatan asli Daerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp39.179.339.491,00 (tiga puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
   a. pajak Daerah;
   b. retribusi Daerah;
   c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
   d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.559.538.747,00 (dua puluh dua miliar lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.650.745.981,00 (empat miliar enam ratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.318.019.763,00 (satu miliar tiga ratus delapan belas juta sembilan belas ribu tujuh

ratus enam puluh tiga rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.651.035.000,00 (sepuluh miliar enam ratus lima puluh satu juta tiga puluh lima ribu rupiah).

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp934.126.336.641,00 (sembilan ratus tiga puluh empat miliar seratus dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
   a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
   b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp878.478.687.066,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh enam rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp55.647.649.575,00 (lima puluh lima miliar enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yaitu lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang direncanakan sebesar Rp2.779.500.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp984.585.176.132,00 (sembilan ratus delapan puluh empat miliar lima ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja operasional;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp741.487.510.972,00 (tujuh ratus empat puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja pegawai;
   b. belanja barang dan jasa;

c. belanja hibah; dan
d. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp392.046.754.958,00 (tiga ratus sembilan puluh dua miliar empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah).
(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp326.206.387.433,00 (tiga ratus dua puluh enam miliar dua ratus enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).
(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp23.184.368.581,00 (dua puluh tiga miliar seratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah).
(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 9

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp130.754.459.281,00 (seratus tiga puluh miliar tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja modal peralatan dan mesin;
b. belanja modal gedung dan bangunan;
c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
e. belanja modal aset lainnya.
(2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.106.904.955,00 (tiga puluh satu miliar seratus enam juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).
(3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.755.319.336,00 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).
(4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp58.861.007.991,00 (lima puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh satu juta tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah).
(5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp31.226.999,00 (tiga puluh satu juta dua ratus dua

puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 11

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp110.343.205.879,00 (seratus sepuluh miliar tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja bagi hasil; dan
   b. belanja bantuan keuangan.
(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.721.028.473,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh satu juta dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).
(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp107.622.177.406,00 (seratus tujuh miliar enam ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus enam rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
a. penerimaan Pembiayaan; dan
b. pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

(1) Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
   a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
   b. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah.
(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 14

(1) Anggaran pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), yang terdiri atas pemberian pinjaman Daerah.

(2) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 15

(1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah).
(2) Pembiayaan *netto* yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 16

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu anggaran yang diatur dalam Peraturan Bupati, yang selanjutnya dimasukan dalam laporan realisasi anggaran.
(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
    b. pelaksanaan operasional pencarian dan pertolongan; dan/atau;
    c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
    b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
    c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
    d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Ketentuan mengenai APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, antara lain:

Lampiran I ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2024;

Lampiran II	ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi tahun anggaran 2024;
Lampiran III	rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2024;
Lampiran IV	rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran tahun anggaran 2024;
Lampiran V	rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
Lampiran VI	rekapitulasi belanja untuk pemenuhan spm tahun anggaran 2024;
Lampiran VII	sinkronisasi program pada RPJMD/RPD dengan APBD tahun anggaran 2024;
Lampiran VIII	sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
Lampiran IX	sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota tahun anggaran 2024;
Lampiran X	daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan tahun anggaran 2024;
Lampiran XI	daftar piutang Daerah tahun anggaran 2024.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

SAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2023 NOMOR 98

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS, PROVINSI KEPULAUAN RIAU: 5,53/2023;

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 1384 **TAHUN 2023**

TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 181 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 harus mendapat evaluasi Gubernur Kepulauan Riau sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati Kepulauan Anambas;

b. bahwa setelah dilakukan tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

16. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/2058/SD.I/DIT.I/XII/KEUDA/2023, Tanggal 19 Desember 2023, Hal Hasil Konsultasi Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Bupati Kepulauan Anambas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memperhatikan dan menindaklanjuti Hasil Evaluasi sebagaimana disebutkan dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini untuk dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Bupati Kepulauan Anambas segera menyampaikan hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 kepada Gubernur Kepulauan Riau dan segera menetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 setelah mendapatkan nomor register dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

KEEMPAT : Bupati Kepulauan Anambas segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 kepada Gubernur Kepulauan Riau paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 21 Desember 2023

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa;
4. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau di Batam;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
7. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Lampiran I : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 1384 Tahun 2023
Tanggal : 21 Desember 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI GUBERNUR	KETERANGAN
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR.... TAHUN.... TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,	BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,	Lambang Garuda berwarna Penyempurnaan judul

Menimbang	: a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;	Menimbang	: a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
	b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi.		b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi.
	c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun		c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun

	2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;		2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;	
Mengingat :	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun	Mengingat :	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ~~sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun~~	Penyempurnaan rumusan Konsideran mengingat angka 2 dicoret sebagian karena covid tdk ada lagi

	2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Mengahadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Mengahadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem	~~2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Mengahadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);~~ 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ~~sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Mengahadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi~~	Penyempurnaan rumusan Konsideran mengingat angka 3

Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);	~~Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);~~	
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);	4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);	Tetap
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepuluan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);	5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepuluan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);	Tetap
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,	6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,	Penyempurnaan rumusan Konsideran menginat angka 6

	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	
	7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);	7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);	Tetap
	8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);	8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);	Tetap
	9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);	9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);	Tetap

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);	10. ~~Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);~~	Penyempurnaan rumusan Konsideran mengingat angka 10 dicoret karena sudah dicabut dg PP Nomor 37 Tahun 2023.....
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);	11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);	
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);	12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, TAmbahan Lembaran Negara Nomor 6057);	Penambahan dasar hukum konsideran mengingat nomor 12
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);	13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);	Tetap
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik	14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan	Tetap

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.....dst 16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023.....dst 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan	Penambahan dasar hukum konsideran mengingat angka 15 dan 16 Tetap Tetap

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara	Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri	Tetap Tetap Tetap Tetap

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah	Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia	Tetap Tetap Tetap

Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS dan BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. 3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas. 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut APBD Tahun Anggaran 2024 adalah rencana keuangan tahunan Daerah Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam	Tahun 2023 Nomor 630); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS dan BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. BAB I KETENTUAN UMUM	Tetap

periode tahun anggaran berkenaan. 6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah. 10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. BAB II RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Pasal 2 (1) APBD Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp986.585.176.132,00 (sembilan ratus delapan puluh enam miliar lima ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus tiga puluh dua rupiah). (2) APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. 3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas. 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut APBD Tahun Anggaran 2024 adalah rencana keuangan tahunan Daerah Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah. 10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk	

a. Pendapatan Daerah; b. Belanja Daerah; dan c. Pembiayaan Daerah. (3) Rincian APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut: a. Pendapatan Daerah Rp976.085.176.132,00 b. Belanja Daerah Rp984.585.176.132,00 - Surplus/(defisit) Rp8.500.000.000,00 c. Pembiayaan Daerah 1. penerimaan Pembiayaan Rp10.500.000.000,00 2. pengeluaran Pembiayaan Rp2.000.000.000,00- Pembiayaan *netto* Rp8.500.000.000,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan Rp0 Pasal 3 Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp976.085.176.132,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam miliar delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus tiga puluh dua rupiah), yang bersumber dari: a. pendapatan asli Daerah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pasal 4 (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp39.179.339.491,00 (tiga puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas: a. pajak Daerah; b. retribusi Daerah;	periode 1 (satu) tahun. BAB II RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Pasal 2 (1) APBD Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp986.585.176.132,00 (sembilan ratus delapan puluh enam miliar lima ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus tiga puluh dua rupiah). (2) APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Pendapatan Daerah; b. Belanja Daerah; dan c. Pembiayaan Daerah. (3) Rincian APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut: a. Pendapatan Daerah Rp976.085.176.132,00 b. Belanja Daerah Rp984.585.176.132,00 - Surplus/(defisit) Rp8.500.000.000,00 c. Pembiayaan Daerah 1. Penerimaan Pembiayaan Rp10.500.000.000,00 2. pengeluaran Pembiayaan Rp2.000.000.000,00 - Pembiayaan*netto* Rp8.500.000.000,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan Rp0 Pasal 3 Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp976.085.176.132,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam miliar delapan	

c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah. (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.559.538.747,00 (dua puluh dua miliar lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah). (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.650.745.981,00 (empat miliar enam ratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah). (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.318.019.763,00 (satu miliar tiga ratus delapan belas juta sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah). (5) Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.651.035.000,00 (sepuluh miliar enam ratus lima puluh satu juta tiga puluh lima ribu rupiah). Pasal 5 (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp934.126.336.641,00 (sembilan ratus tiga puluh empat miliar seratus dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas: a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan b. pendapatan transfer antar daerah. (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar	puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus tiga puluh dua rupiah), yang bersumber dari: a. pendapatan asli Daerah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pasal 4 (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp39.179.339.491,00 (tiga puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas: a. pajak Daerah; b. retribusi Daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah. (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.559.538.747,00 (dua puluh dua miliar lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah). (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.650.745.981,00 (empat miliar enam ratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah). (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.318.019.763,00 (satu miliar tiga ratus delapan belas juta sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah). (5) Lain-lain Pendapatan Aasli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d	Penyempurnaan penulisan

Rp878.478.687.066,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh enam rupiah). (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp55.647.649.575,00 (lima puluh lima miliar enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah). Pasal 6 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yaitu lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan direncanakan sebesar Rp2.779.500.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Pasal 7 Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp984.585.176.132,00 (sembilan ratus delapan puluh empat miliar lima ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus tiga puluh dua rupiah),, yang terdiri atas: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer. Pasal 8 (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp741.814.377.885,00 (tujuh ratus empat puluh satu miliar delapan ratus empat belas juta tiga ratus tujuh	direncanakan sebesar Rp10.651.035.000,00 (sepuluh miliar enam ratus lima puluh satu juta tiga puluh lima ribu rupiah). Pasal 5 (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp934.126.336.641,00 (sembilan ratus tiga puluh empat miliar seratus dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas: a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan b. pendapatan transfer antar daerah. (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp878.478.687.066,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh enam rupiah). (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp55.647.649.575,00 (lima puluh lima miliar enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah). Pasal 6 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yaitu lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan direncanakan sebesar Rp2.779.500.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).	

puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja hibah; dan d. belanja bantuan sosial. (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp398.801.887.592,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar delapan ratus satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah). (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp320.013.121.712,00 (tiga ratus dua puluh miliar tiga belas juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus dua belas rupiah). (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.949.368.581,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah). (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pasal 9 (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp130.427.594.369,00 (seratus tiga puluh miliar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas: a. belanja modal peralatan dan mesin; b. belanja modal gedung dan bangunan; c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;	Pasal 7 Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp984.585.176.132,00 (sembilan ratus delapan puluh empat miliar lima ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus tiga puluh dua rupiah),, yang terdiri atas: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer. Pasal 8 (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp741.814.377.885,00 (tujuh ratus empat puluh satu miliar delapan ratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja hibah; dan d. belanja bantuan sosial. (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp398.801.887.592,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar delapan ratus satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah). (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp320.013.121.712,00 (tiga ratus dua puluh miliar tiga belas juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus dua belas rupiah). (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.949.368.581,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh	

d. belanja modal aset tetap lainnya; dan e. belanja modal aset lainnya. (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.080.040.043,00 (tiga puluh miliar delapan puluh juta empat puluh ribu empat puluh tiga rupiah). (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.455.319.336,00 (tiga puluh delapan miliar empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah). (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp58.861.007.991,00 (lima puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh satu juta tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah). (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp31.226.999,00 (tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Pasal 10 Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pasal 11 (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud	sembilan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah). (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pasal 9 (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp130.427.594.369,00 (seratus tiga puluh miliar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas: a. belanja modal peralatan dan mesin; b. belanja modal gedung dan bangunan; c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; d. belanja modal aset tetap lainnya; dan e. belanja modal aset lainnya. (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.080.040.043,00 (tiga puluh miliar delapan puluh juta empat puluh ribu empat puluh tiga rupiah). (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.455.319.336,00 (tiga puluh delapan miliar empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah). (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp58.861.007.991,00 (lima puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh satu juta tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah).	

dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp110.343.203.878,00 (seratus sepuluh miliar tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus tiga ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan. (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.721.026.472,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh satu juta dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah). (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp107.622.177.406,00 (seratus tujuh miliar enam ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus enam rupiah). Pasal 12 Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas: a. penerimaan Pembiayaan; dan b. pengeluaran Pembiayaan. Pasal 13 (1) Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas: a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan b. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah. (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	(5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ~~c~~ d direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp31.226.999,00 (tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Pasal 10 Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pasal 11 (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp110.343.203.878,00 (seratus sepuluh miliar tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus tiga ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan. (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.721.026.472,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh satu juta dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah). (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp107.622.177.406,00 (seratus tujuh miliar enam ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus enam rupiah).	Penyempurnaan penulisan.

huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 14 (1) Anggaran pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), yang terdiri atas pemberian pinjaman Daerah. (2) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pasal 15 (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah). (2) Pembiayaan *netto* yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah). Pasal 16 (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu anggaran yang diatur dalam Peraturan Bupati, yang selanjutnya dimasukan dalam laporan realisasi anggaran.	Pasal 12 Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas: a. penerimaan Pembiayaan; dan b. pengeluaran Pembiayaan. Pasal 13 (1) Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas: a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan b. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah. (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 14 (1) Anggaran pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), yang terdiri atas pemberian pinjaman Daerah. (2) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).	

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau; c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Pasal 17 Ketentuan mengenai APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, antara lain: Lampiran I ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024; Lampiran II ringkasan APBD yang	Pasal 15 (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah). (2) Pembiayaan *netto* yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah). Pasal 16 (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu anggaran yang diatur dalam Peraturan Bupati, yang selanjutnya dimasukan dalam laporan realisasi anggaran. (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau; c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan	

	diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi tahun anggaran 2024;		sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.	
Lampiran III	rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;		Pasal 17 Ketentuan mengenai APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, antara lain:	
Lampiran IV	rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran tahun anggaran 2024;	Lampiran I	ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;	
Lampiran V	rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;	Lampiran II	ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi tahun anggaran 2024;	
Lampiran VI	rekapitulasi belanja untuk pemenuhan spm tahun anggaran 2024;	Lampiran III	rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;	
Lampiran VII	sinkronisasi program pada RPJMD/RPD dengan rancangan APBD tahun anggaran 2024;	Lampiran IV	rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran tahun anggaran 2024;	
Lampiran VIII	sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2024;	Lampiran V	rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan	
Lampiran IX	sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas			

	kabupaten/kota tahun anggaran 2024;		urusan pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;	
Lampiran X	daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan tahun anggaran 2024;	Lampiran VI	rekapitulasi belanja untuk pemenuhan spm tahun anggaran 2024;	
Lampiran XI	daftar piutang Daerah tahun anggaran 2024.	Lampiran VII	sinkronisasi program pada RPJMD/RPD dengan rancangan APBD tahun anggaran 2024;	
		Lampiran VIII	sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2024;	
		Lampiran IX	sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota tahun anggaran 2024;	
		Lampiran X	daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan tahun anggaran 2024;	
		Lampiran XI	daftar piutang Daerah tahun anggaran 2024.	
Pasal 18		Pasal 18		
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.		Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.		
BAB III KETENTUAN PENUTUP				
Pasal 19				
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.				

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Ditetapkan di Tarempa pada tanggal Desember 2023 BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS, ABDUL HARIS Diundangkan di Tarempa pada tanggal Desember 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS, SAHTIAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2023 NOMOR NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS, PROVINSI RIAU : , /2023;	BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Ditetapkan di Tarempa pada tanggal Desember 2023 BUPATI KEPULAUANANAMBAS, ABDUL HARIS Diundangkan di Tarempa pada tanggal Desember 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS, SAHTIAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2023 NOMOR NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS, PROVINSI KEPULAUAN	Penyempurnaan penulisan

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 I. UMUM APBD Tahun Anggaran 2024 adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. Kepala Daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama. Rancangan Peraturan Daerah dibahas oleh Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapatkan Persetujuan Bersama. Sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, harus dievaluasi oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, selanjutnya Kepala Daerah bersama dengan DPRD melakukan penyempurnaan atas hasil evaluasi Gubernur. Hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan oleh pimpinan DPRD dan dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.	RIAU : , /2023; ~~PENJELASAN~~ ~~ATAS~~ ~~PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS~~ ~~NOMOR TAHUN 2023~~ ~~TENTANG~~ ~~ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH~~ ~~TAHUN ANGGARAN 2024~~ ~~III.I. UMUM~~ ~~APBD Tahun Anggaran 2024 adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. Kepala Daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama. Rancangan Peraturan Daerah dibahas oleh Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapatkan Persetujuan Bersama.~~ ~~Sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, harus dievaluasi oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, selanjutnya Kepala Daerah bersama dengan DPRD melakukan penyempurnaan atas hasil evaluasi Gubernur. Hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan oleh pimpinan DPRD dan dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang~~	Penyempurnaan rumusan Penjelasan atas ranperda ini dicoret karena tdk perlukan penjelasan

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas	~~APBD Tahun Anggaran 2024.~~ ~~III.II.PASAL DEMI PASAL~~ ~~Pasal 1~~ ~~Cukup Jelas~~ ~~Pasal 2~~ ~~Cukup Jelas~~ ~~Pasal 3~~ ~~Cukup Jelas~~ ~~Pasal 4~~ ~~Cukup Jelas~~ ~~Pasal 5~~ ~~Cukup Jelas~~ ~~Pasal 6~~ ~~Cukup Jelas~~ ~~Pasal 7~~ ~~Cukup Jelas~~ ~~Pasal 8~~ ~~Cukup Jelas~~ ~~Pasal 9~~ ~~Cukup Jelas~~ ~~Pasal 10~~ ~~Cukup Jelas~~ ~~Pasal 11~~ ~~Cukup Jelas~~	

Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Cukup Jelas Pasal 18 Cukup Jelas Pasal 19 Cukup Jelas	Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Cukup Jelas Pasal 18 Cukup Jelas Pasal 19 Cukup Jelas	
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR	TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR	

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD

Lampiran II : Surat Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 1384 Tahun 2023
Tanggal : 21 Desember 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

RANCANGAN PERATURAN BUPATI	HASIL EVALUASI GUBERNUR	KETERANGAN
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR.... TAHUN.... TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,	BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR.... TAHUN.... 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,	Lambang Garuda berwarna Penyempurnaan judul

Menimbang	: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor...Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;	Menimbang	: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor...Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;	
Mengingat :	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Mengahadapi Ancaman yang Membahayakan	Mengingat :	1. ~~Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;~~ 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ~~sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Mengahadapi Ancaman yang Membahayakan~~	Penyempurnaan rumusanuntuk ranperbup tidak perlu dasar hukum UU Konsideran mengingat angka 2 penyempurnaan rumusan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Mengahadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);	~~Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);~~ 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan ~~Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Mengahadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);~~	Penyempurnaan rumusan konsideran mengingat angka 3

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);	4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);	Tetap
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepuluan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);	5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepuluan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);	Tetap
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara	6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik	Tetap

Republik Indonesia Nomor 6856); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun	Indonesia Nomor 6856); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun	Tetap Tetap Tetap

2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);	2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);	
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);	10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);	Tetap
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);	11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);	Tetap
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);	12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);	Tetap
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);	13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);	

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);	14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);	Tetap
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban	15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban	Tetap

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);	Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);	
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);	16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);	Tetap
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);	17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);	Tetap
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);	18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);	Tetap
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran	19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran	

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);	Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);	Tetap
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);	20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);	Tetap
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang	21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang	

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);	Tetap
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);	22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);	Tetap
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);	23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);	Tetap
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91).	24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91).	Tetap

	25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor....Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah .....dst)	Penambahan dasar hukum konsideran mengingat nomor 25
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:	
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.	Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.	
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM	
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. 3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas. 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut APBD Tahun Anggaran 2024 adalah rencana keuangan tahunan Daerah Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. 3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas. 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut APBD Tahun Anggaran 2024 adalah rencana keuangan tahunan Daerah Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.	

6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. BAB II RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Pasal 2 (1) APBD Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp986.585.176.132,00 (sembilan ratus delapan puluh enam miliar lima ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus tiga puluh dua rupiah). (2) APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Pendapatan Daerah; b. Belanja Daerah; dan c. Pembiayaan Daerah. (3) Rincian APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut: a. Pendapatan Daerah Rp. 976.085.176.132,00 b. Belanja Daerah Rp 984.585.176.132,00 - Surplus/ (Defisit) Rp 8.500.000.000,00	6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. BAB II RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Pasal 2 (1) APBD Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp986.585.176.132,00 (sembilan ratus delapan puluh enam miliar lima ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus tiga puluh dua rupiah). (2) APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Pendapatan Daerah; b. Belanja Daerah; dan c. Pembiayaan Daerah. (3) Rincian APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut: a. Pendapatan Daerah Rp. 976.085.176.132,00 b. Belanja Daerah Rp 984.585.176.132,00 - Surplus/ (Defisit) Rp 8.500.000.000,00	

c. Pembiayaan Daerah 1. Penerimaan Pembiayanan Rp 10.500.000.000,00 2. Pengeluaran Pembiayaan Rp 2.000.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp 8.500.000.000,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan Rp0	c. Pembiayaan Daerah 1. Penerimaan Pembiayanan Rp 10.500.000.000,00 2. Pengeluaran Pembiayaan Rp 2.000.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp 8.500.000.000,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan Rp0	
Pasal 3 (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah). (2) Pembiayaan *netto* yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah).	Pasal 3 (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah). (2) Pembiayaan *netto* yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah).	
	Penambahan Pasal 1. 2. 3. DST	Penambahan Pasal Dirincikan/dijabarkan menurut item yang ada pada ranperda APBD 2024
Pasal 4 (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu anggaran yang diatur dalam Peraturan Bupati, yang selanjutnya dimasukan dalam laporan realisasi anggaran.	~~Pasal 4~~ ~~(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu anggaran yang diatur dalam Peraturan Bupati, yang selanjutnya dimasukan dalam laporan realisasi anggaran.~~	Penyempurnaan rumusan Pasal 4 utk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak tidak di masukkan ke dlm ranperbup ini cukupd di

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau; c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Pasal 5 Ketentuan mengenai Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini antara lain: Lampiran I : ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang diklasifikasi menurut	~~(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:~~ ~~a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;~~ ~~b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau;~~ ~~c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.~~ ~~(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:~~ ~~a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;~~ ~~b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;~~ ~~c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau~~ ~~d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.~~ Pasal 5 Ketentuan mengenai Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini antara lain: Lampiran I : ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang diklasifikasi menurut	ranperda saja

		kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;				
Lampiran II	:	ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan;	Lampiran II	:	ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan;	
Lampiran III	:	daftar nama calon penerima, alamat, dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta Satuan Kerja Perangkat Daerah pemberi hibah;	Lampiran III	:	daftar nama calon penerima, alamat, dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta Satuan Kerja Perangkat Daerah pemberi hibah;	
Lampiran IV	:	Daftar nama calon penerima, alamat, dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta Satuan Kerja Perangkat Daerah pemberi bantuan sosial;	Lampiran IV	:	daftar nama calon penerima, alamat, dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta Satuan Kerja Perangkat Daerah pemberi bantuan sosial;	
Lampiran V	:	Daftar nama calon penerima, alamat, dan besaran alokasi bantuan keuangan berseifat umum yang diterima serta Satuan Kerja Perangkat Daerah pemberi bantuan keuangan;	Lampiran V	:	daftar nama calon penerima, alamat, dan besaran alokasi bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta Satuan Kerja Perangkat Daerah pemberi bantuan keuangan;	Penyempurnaan penulisan

Lampiran VI	:	Daftar nama calon penerima, alamat, dan besaran perubahan alokasi belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten, kota, dan desa;;	Lampiran VI	:	daftar nama calon penerima, alamat, dan besaran perubahan alokasi belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten, kota, dan desa;;
Lampiran VII	:	Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;	Lampiran VII	:	rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
Lampiran VIII	:	Rincian dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas bumi/tambahan DBH-minyak dan gas alam menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;	Lampiran VIII	:	rincian dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas bumi/tambahan DBH-minyak dan gas alam menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
Lampiran IX	:	Rincian dana tambahan infrasturktur menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja, dan	Lampiran IX	:	rincian dana tambahan infrasturktur menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja, dan

		pembiayaan;		pembiayaan;	
Lampiran X	:	Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabara APBD dengan program proiritas perbatasan negara.;	Lampiran X	: sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan program proiritas perbatasan negara.;	
		Pasal 6		Pasal 6	
Pelaksanaan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			Pelaksanaan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		

Pasal 7 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Ditetapkan di Tarempa pada tanggal Desember 2023 BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS ABDUL HARIS Diundangkan di Tarempa pada tanggal Desember 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS, SAHTIAR BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2023 NOMOR....	Pasal 7 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Ditetapkan di Tarempa pada tanggal Desember 2023 BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS, ABDUL HARIS Diundangkan di Tarempa pada tanggal Desember 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS, SAHTIAR BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2023 NOMOR....	

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD

Lampiran III : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 1384 Tahun 2023
Tanggal : 21 Desember 2023

TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

I. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan:

A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

B. Kepentingan umum;

C. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan

D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

II. KEBIJAKAN UMUM

Berdasarkan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan Bupati, meliputi:

A. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang telah disetujui bersama antara Bupati dan DPRD, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan jadwal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD

Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
	Nomor	Tanggal	
1	2	3	4
Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah yang telah direviu oleh APIP daerah	522/Setda.BPKPD.900/07.2023	14 Juli 2023	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Juli)
Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	235/Kdh.KKA.900/07.2023	14 Juli 2023	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Juli)
Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	KUA: 09/Kdh.KKA/MoU/VIII/2023 dan 01/DPRD.KKA/MoU/VIII/2023 PPAS: 10/Kdh.KKA/MoU/VIII/2023 dan 02/DPRD.KKA/MoU/VIII/2023	31 Agustus 2023	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
Penerbitan surat edaran Kepala Daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD	31 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2024	6 September 2023	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu III bulan Agustus)
Penyusunan dan Pembahasan RKA-SKPD oleh SKPD terkait serta verifikasi oleh TAPD dan wajib direviu oleh APIP daerah			
Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD			
Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	B/900.1.1.3/329.BPKPD/SD/09/2023	25 September 2023	Tidak Sesuai, (Paling lambat Minggu II bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu atau paling lambat Minggu IV bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu)
Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	04/BA.DPRD.KKA/XI/2023 dan 04/BA/Kdh.KKA/XI/2023	28 November 2023	Sesuai, (Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran berkenaan)
Menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi	B/900.1.1/427/Kdh/SD/11/2023	28 November 2023	Sesuai, (Paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana dimaksud pada butir D.1.a.7).h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

B. Kebijakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Selanjutnya, setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

Alokasi belanja daerah dalam APBD merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dengan memperhatikan realisasi belanja daerah tahun anggaran sebelumnya. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya, serta dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja Mandatory Spending serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana maksud butir A Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan sub Kegiatan yang konkrit dan tidak absurd untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam APBD, Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan.

Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran, sebagaimana maksud butir C.1.n.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dimaksud dianggarkan secara bruto dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Selanjutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara, merupakan 1 (satu) kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp976.085.176.132,00 harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Pendapatan Daerah dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas juga harus melakukan Reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

Tabel 2
Pendapatan Daerah

Uraian	APBD TA 2022 (Rp)	APBD TA 2023 (Rp)	R- APBD TA 2024 (Rp)
1	2	3	4
PENDAPATAN DAERAH	**900.945.548.727,00**	**1.161.200.841.061,00**	**976.085.176.132,00**
Pendapatan Asli Daerah	**40.661.242.655,00**	**41.958.839.491,00**	**39.179.339.491,00**
Pajak Daerah	20.111.726.377,00	22.559.538.747,00	22.559.538.747,00
Retribusi Daerah	4.190.950.515,00	4.650.745.981,00	4.650.745.981,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	1.318.019.763,00	1.318.019.763,00	1.318.019.763,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	15.040.535.000,00	13.430.535.000,00	10.651.035.000,00
Pendapatan Transfer	**848.486.966.072,00**	**1.119.242.001.570,00**	**934.126.336.641,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	782.306.713.718,00	1.052.395.108.748,00	878.478.687.006,00

Uraian	APBD TA 2022 (Rp)	APBD TA 2023 (Rp)	R- APBD TA 2024 (Rp)
1	2	3	4
Pendapatan Transfer Antar Daerah	66.090.252.354,00	66.846.892.822,00	55.647.649.575,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	**11.797.340.000,00**	**0,00**	**2.779.500.000,00**
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	11.797.340.000,00	0,00	2.779.500.000,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tabel 3
Tren Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	%
2022	40.661.242.655,00	900.945.548.727,00	4,51
2023	41.958.839.491,00	1.161.200.841.061,00	3,61
2024	39.179.339.491,00	976.085.176.132,00	4,01

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp39.179.339.491,00 atau 4,01% dari total pendapatan daerah Rp976.085.176.132,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Untuk itu, penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD harus terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan didasarkan pada data potensi pendapatan asli daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas serta memperhatikan perkiraan asumsi makro.

Selanjutnya, target Pendapatan Asli Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1) Pajak Daerah

Penganggaran target pendapatan pajak daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp22.559.538.747,00 atau 2,31% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan sebagai berikut:

a) Pajak Hotel Rp3.473.022.094,00;

b) Pajak Restoran Rp11.572.998.115,00;

c) Pajak Hiburan Rp173.509.307,00;

d) Pajak Reklame Rp79.500.000,00;

e) Pajak Penerangan Jalan Rp5.450.590.067,00;

f) Pajak Sarang Burung Walet Rp68.244.164,00;

g) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp639.975.000,00;

h) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp545.200.000,00;

i) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp556.500.000,00.

2) Retribusi Daerah

Penganggaran target pendapatan retribusi daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp4.650.745.981,00 atau 0,48% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan sebagai berikut:

a) Retribusi Jasa Umum Rp4.328.111.466,00;

b) Retribusi Jasa Usaha Rp272.634.515,00;

c) Retribusi Perizinan Tertentu Rp50.000.000,00.

Target Retribusi dimaksud dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 apabila peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dan besaran tarifnya harus ditetapkan dalam peraturan daerah sebagaimana ditegaskan dalam butir C.2.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, penetapan besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dan disusun berdasarkan:

1) Pasal 94 dan Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berkaitan dengan itu, dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi sebagaimana dimaksud pada butir C.2.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Penganggaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Kepulauan Anambas agar disesuaikan dengan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah Tahun 2023 dengan memperhatikan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah Tahun 2022.

Selain itu, penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 memperhatikan:

1) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2) kebijakan fiskal nasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3) insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memenuhi ketentuan penggunaan hasil penerimaan pajak untuk kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud butir C.2.a.1).p) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yakni sebagai berikut:

1) Hasil penerimaan pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum;

2) Hasil penerimaan pajak rokok baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum;

3) Hasil penerimaan pajak air tanah dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:

   a) Penanaman pohon;

   b) Pembuatan lubang atau sumur resapan;

   c) Pelestarian hutan atau pepohonan; dan

   d) Pengelolaan limbah.

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp1.318.019.763,00 atau 0,14% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Target pendapatan tersebut dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sampai dengan Tahun Anggaran 2023, dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai Badan Usaha Milik Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;

2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;

3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau

5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.

Dengan tetap memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah dan sebagaimana dimaksud pada butir C.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas juga harus melakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja bagi Badan/Lembaga/Pihak Ketiga yang tidak menunjukkan kinerja yang memadai (*performance based*), atau belum memberikan bagian laba yang signifikan atas penyertaan modal tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan disposal (penjualan aset) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dulu melakukan proses *due diligence* melalui lembaga appraisal yang *certified* terkait hak dan kewajiban perusahaan tersebut, dan/atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh atau sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp10.651.035.000,00 atau 1,09% terhadap total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, diuraikan ke dalam obyek pendapatan sebagai berikut:

1) Jasa Giro Rp1.020.000.000,00 atau 0,10% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

2) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp390.915.000,00 atau 0,04% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

3) Pendapatan Denda Pajak Daerah Rp20.400.000,00 atau 0,002% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD TA 2024 dengan memedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).j) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

4) Pendapatan Denda Retribusi Daerah Rp15.300.000,00 atau 0,002% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD TA 2024 dengan memedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf l Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).k) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

5) Pendapatan dari Pengembalian Rp9.167.700.000,00 atau 0,94% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD TA 2024 dengan memedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).m) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

6) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Rp36.720.000,00 atau 0,004% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD TA 2024 dengan memedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp934.126.336.641,00 atau 95,70% dari total pendapatan daerah Rp976.085.176.132,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 antara lain diuraikan pada jenis pendapatan Transfer:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp878.478.687.066,00 atau 90% dari total pendapatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp976.085.176.132,00, yang diuraikan pada jenis pendapatan dana perimbangan yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan:

1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp298.304.764.066,00, terdapat selisih lebih Rp160.157.714.066,00 dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;

2) Dana Alokasi Umum Rp398.812.700.000,00 agar disesuaikan rinciannya dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;

3) Dana Alokasi Khusus fisik Rp85.130.560.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;

4) Dana Alokasi Khusus Non Fisik Rp47.661.230.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;

5) Dana Desa Rp37.910.431.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;

6) Insentif fiskal Rp10.659.002.000,00, terdapat selisih lebih sebesar Rp10.659.002.000,00 dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

Tabel 4
Rekap Dana Transfer

Uraian	R-APBD TA 2024	Dasar Hukum Perpres 76 Tahun 2023 Tentang Rincian APBN TA 2024	Selisih
1	2	3	4 = 2-3
DANA TRANSFER PUSAT	**867.819.685.066,00**	**707.661.971.000,00**	**160.157.714.066,00**
DANA TRANSFER UMUM	**697.117.464.066,00**	**536.959.750.000,00**	**160.157.714.066,00**
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	**298.304.764.066,00**	**138.147.050.000,00**	**160.157.714.066,00**
Bagi Hasil Pajak	**55.926.745.000,00**	**55.918.864.000,00**	**7.881.000,00**
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan	17.173.096.000,00	17.173.096.000,00	0,00
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	38.745.768.000,00	38.745.768.000,00	0,00
Bagi Hasil dari Penerimaan Cukai Tembakau	7.881.000,00	0,00	7.881.000,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	**242.378.019.066,00**	**82.228.186.000,00**	**160.149.833.066,00**
Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	12.219.000,00	12.219.000,00	0,00
Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak & Gas Bumi	236.176.454.066,00	76.026.621.000,00	160.149.833.066,00
Bagi Hasil Dari Minerba	339.945.000,00	339.945.000,00	0,00
Bagi Hasil Dari Perikanan	5.849.401.000,00	5.849.401.000,00	0,00
Dana Alokasi Umum	**398.812.700.000,00**	**398.812.700.000,00**	**0,00**
DAU yang tidak ditentukan penggunaannya	**0,00**	**299.390.806.000,00**	**(299.390.806.000,00)**
DAU yang ditentukan penggunaannya	**0,00**	**99.421.894.000,00**	**(99.421.894.000,00)**
Penggajian Formasi PSK	0,00	6.889.788.000,00	(6.889.788.000,00)
Penduasan Kekurahan	0,00	400.000.000,00	(400.000.000,00)
Bidang Pendidikan	0,00	37.815.691.000,00	(37.815.691.000,00)
Bidang Kesehatan	0,00	18.358.729.000,00	(18.358.729.000,00)
Bidang PU	0,00	35.957.686.000,00	(35.957.686.000,00)
Dana Transfer Khusus	**132.791.790.000,00**	**132.791.790.000,00**	**0,00**
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	**85.130.560.000,00**	**85.130.560.000,00**	**0,00**
DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan	10.354.636.000,00	10.354.636.000,00	0,00
DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB	42.571.299.000,00	42.571.299.000,00	0,00
DAK Fisik Reguler Air Minum	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik Reguler	0,00	0,00	0,00

Uraian	R-APBD TA 2024	Dasar Hukum Perpres 76 Tahun 2023 Tentang Rincian APBN TA 2024	Selisih
1	2	3	4 = 2-3
Sanitasi			
DAK Fisik Reguler Perumahan dan Permukiman	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik Reguler Industri Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik Reguler Pertanian	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik Reguler Irigasi	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik Reguler Transportasi	1.276.395.000,00	1.276.395.000,00	0,00
DAK Fisik Reguler Kelautan dan Perikanan	4.989.919.000,00	4.989.919.000,00	0,00
DAK Fisik Reguler Pariwisata	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik Reguler Jalan	24.938.311.000,00	24.938.311.000,00	0,00
DAK Penugasan Bidang Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik	**47.661.230.000,00**	**47.661.230.000,00**	**0,00**
Bantuan Operasional Kesehatan Provinsi	0,00	0,00	0,00
Bantuan Operasional Kesehatan Kab/Kota	3.732.781.000,00	3.732.781.000,00	0,00
BOK Pengawasan Obat dan Makanan	341.831.000,00	341.831.000,00	0,00
BOK Puskesmas	5.121.187.000,00	5.121.187.000,00	0,00
Bantuan Operasional KB	2.231.228.000,00	2.231.228.000,00	0,00
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	0,00	362.566.000,00	(362.566.000,00)
Dana Pelayanan Kepariwisataan	0,00	0,00	0,00
Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah	0,00	0,00	0,00
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	520.000.000,00	520.000.000,00	0,00
Dana Fasilitasi Penanaman Modal	415.178.000,00	415.178.000,00	0,00
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00
Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	362.566.000,00	0,00	362.566.000,00
Bantuan Operasional Sekolah	12.047.680.000,00	12.047.680.000,00	0,00
Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	1.616.870.000,00	1.616.870.000,00	0,00
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	290.840.000,00	290.840.000,00	0,00
Tunjangan Profesi Guru	14.891.643.000,00	14.891.643.000,00	0,00
Tambahan Penghasilan Guru	992.295.000,00	992.295.000,00	0,00
Tunjangan Khusus Guru	5.097.131.000,00	5.097.131.000,00	0,00
Bantuan Operasional Museum	0,00	0,00	0,00
Bantuan Operasional Taman Budaya	0,00	0,00	0,00
Dana Desa	**37.910.431.000,00**	**37.910.431.000,00**	**0,00**
Insentif fiskal	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah menyesuaikan alokasi Dana Perimbangan dimaksud dengan alokasi yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.b.5).a).(1), butir C.2.b.5).a).(2), butir C.2.b.5).a).(3), butir C.2.b.5).a).(4) dan butir

C.2.b.5).a).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus menggunakan pendapatan dana transfer yang telah diarahkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya sesuai dan butir C.2.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal penganggaran dana Transfer Ke Daerah (TKD), penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas melakukan penyesuaian atas penggunaan dana TKD dimaksud dengan melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Berkenaan dengan hal tersebut, penyesuaian penganggaran dana TKD berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp55.647.649.575,00 yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan:
   1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Rp10.970.763.720,00;
   2) Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp7.957.166.327,00;
   3) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp25.258.857.245,00;
   4) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Rp41.291.965,00;
   5) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Rp11.419.570.318,00.

Selanjutnya, untuk penggunaan obyek pendapatan pajak daerah harus memedomani ketentuan:

1) Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari hak Kabupaten/Kota, sebesar 30% (tiga puluh persen) dari target Pajak Kendaraan Bermotor dimaksud, yaitu harus dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan dalam butir C.2.a.1).p) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

2) Pajak Rokok paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari hak Kabupaten/kota, sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari target Pajak Rokok dimaksud dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

3) Dalam rangka pelayanan kesehatan untuk masyarakat dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing masing daerah provinsi/kabupaten/kota. Pendapatan yang bersumber dari pajak rokok tersebut diutamakan digunakan dalam rangka perluasaan cakupan peserta untuk penganggaran iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan Pemerintah Daerah dalam kepesertaan program jaminan kesehatan nasional menuju *Universal Health Coverage* (UHC), selain itu dapat juga digunakan untuk penganggaran bantuan iuran pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja yang didaftarkan Pemerintah Daerah, penganggaran bantuan iuran pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja kelas 3 (tiga) mandiri serta kontribusi iuran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sebagaimana dimaksud butir C.2.a.1).p).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

   Dalam hal penetapan APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 mendahului penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada butir

C.2.b.5).b).(1).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp2.779.500.000,00 atau 0,28% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan pada jenis Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Rp2.779.500.000,00 atau 0,28% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 setelah adanya kepastian penerimaan pendapatan dimaksud, yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi serta menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan serta C.2.c.1) dan butir C.2.c.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp984.585.176.132,00, dirinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5
Belanja Daerah

Uraian	APBD TA 2022	APBD TA 2023	R- APBD TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4
BELANJA DAERAH	**930.138.458.931,00**	**1.261.746.396.658,00**	**984.585.176.132,00**
Belanja Operasi	**687.543.101.168,00**	**823.114.473.860,00**	**741.814.377.885,00**
Belanja Pegawai	352.208.184.548,00	383.068.586.166,00	398.801.887.592,00
Belanja Barang dan Jasa	324.648.626.062,00	418.416.611.661,00	320.013.121.712,00
Belanja Hibah	10.651.316.558,00	21.579.276.033,00	22.949.368.581,00
Belanja Bantuan Sosial	34.974.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00

Uraian	APBD TA 2022	APBD TA 2023	R- APBD TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4
Belanja Modal	**135.467.217.973,00**	**312.344.877.098,00**	**130.427.594.369,00**
Belanja Modal Tanah	1.000.000.000,00	1.145.000.000,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.471.068.406,00	53.658.323.730,00	31.080.040.043,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.487.994.520,00	78.404.590.140,00	38.455.319.336,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	80.418.356.748,00	178.407.059.888,00	58.861.007.991,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.089.798.299,00	729.903.340,00	2.000.000.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	31.226.999,00
Belanja Tidak Terduga	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00
Belanja Transfer	**106.128.139.790,00**	**125.287.045.700,00**	**110.343.203.878,00**
Belanja Bagi Hasil	2.430.268.790,00	2.750.000.000,00	2.721.026.472,00
Belanja Bantuan Keuangan	103.697.871.000,00	122.537.045.700,00	107.622.177.406,00

Tabel 6
Urusan Pemerintah Daerah

Urusan Pemerintahan Daerah	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**418.225.553.527,00**	**123.506.225.563,00**	**0,00**	**0,00**	**541.665.195.090,00**	**55,01**
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	213.666.288.494,00	25.179.217.176,00	0,00	0,00	238.845.505.670,00	24,26
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	213.666.288.494,00	25.179.217.176,00	0,00	0,00	238.845.505.670,00	24,26
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	138.599.788.460,00	43.745.117.861,00	0,00	0,00	182.344.906.321,00	18,52
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	120.076.091.651,00	43.153.334.706,00	0,00	0,00	163.229.426.357,00	16,58
RSUD Tarempa	4.037.090.722,00	157.113.474,00	0,00	0,00	4.194.204.196,00	0,43
Puskesmas Siantan Timur	724.147.565,00	0,00	0,00	0,00	724.147.565,00	0,07
Balai Pengelola Farmasi dan Alat Kesehatan (BPFAK)	191.534.160,00	0,00	0,00	0,00	191.534.160,00	0,02
Puskesmas Jemaja Barat	608.992.140,00	0,00	0,00	0,00	608.992.140,00	0,06
Puskesmas Siantan Utara	550.239.055,00	11.681.085,00	0,00	0,00	561.920.140,00	0,06
Puskesmas Kute Siantan	753.080.969,00	54.595.890,00	0,00	0,00	807.676.859,00	0,08
RSUD Jemaja	1.031.964.256,00	16.225.549,00	0,00	0,00	1.048.189.805,00	0,11
RSUD Palmatak	3.699.203.725,00	100.000.000,00	0,00	0,00	3.799.203.725,00	0,39
Puskesmas Siantan Tengah	1.165.697.963,00	0,00	0,00	0,00	1.165.697.963,00	0,12
Puskesmas Letung	1.097.658.989,00	74.333.546,00	0,00	0,00	1.171.992.535,00	0,12
Puskesmas Jemaja Timur	799.679.919,00	35.477.491,00	0,00	0,00	835.157.410,00	0,08
Puskesmas Palmatak	894.550.400,00	73.659.515,00	0,00	0,00	968.209.915,00	0,10
Puskesmas Tarempa	1.844.740.687,00	68.696.605,00	0,00	0,00	1.913.437.292,00	0,19

Urusan Pemerintahan Daerah	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
Puskesmas Siantan Selatan	1.125.116.259,00				1.125.116.259,00	0,11
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	26.425.554.231,00	53.232.392.318,00	0.00	0.00	79.591.362.549,00	8,08
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	25.504.924.503,00	53.159.107.026,00	0.00	0.00	78.664.031.529,00	7,99
UPTD SPAM Siantan	920.629.728,00	73.285.292,00	0.00	0.00	993.915.020,00	0,10
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	157.220.286,00	455.609.041,00	0.00	0.00	612.829.327,00	0,06
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	157.220.286,00	455.609.041,00	0.00	0.00	612.829.327,00	0,06
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	32.256.823.771,00	793.114.445,00	0.00	0.00	33.049.938.216,00	3,36
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	7.863.154.278,00	619.008.666,00	0.00	0.00	8.482.162.944,00	0,86
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.966.836.132,00	174.105.779,00	0.00	0.00	12.140.941.911,00	1,23
Satuan Polisi Pamong Praja	12.426.833.361,00		0.00	0.00	12.426.833.361,00	1,26
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	7.119.878.285,00	100.774.722,00	0.00	0.00	7.220.653.007,00	0,73
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.119.878.285,00	100.774.722,00	0.00	0.00	7.220.653.007,00	0,73
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**76.377.175.353,00**	**4.488.202.674,00**	**0.00**	**0.00**	**80.931.962.027,00**	**8,22**
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	673.860.000,00	0.00	0.00	0.00	673.860.000,00	0,07

Urusan Pemerintahan Daerah	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	673.860.000,00	0.00	0.00	0.00	673.860.000,00	0,07
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.544.703.299,00	0.00	0.00	0.00	1.544.703.299,00	0,16
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.544.703.299,00	0.00	0.00	0.00	1.544.703.299,00	0,16
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	158.687.292,00	32.301.208,00	0.00	0.00	190.988.500,00	0,02
Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	158.687.292,00	32.301.208,00	0.00	0.00	190.988.500,00	0,02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	135.151.000,00	0.00	0.00	0.00	201.735.000,00	0,02
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	135.151.000,00	0.00	0.00	0.00	135.151.000,00	0,01
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	1.046.091.211,00	39.164.950,00	0.00	0.00	1.120.896.242,00	0,11
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	568.750.411,00	39.164.950,00	0.00	0.00	607.915.361,00	0,06
UPT Pengelolaan Sampah	477.340.800,00	0.00	0.00	0.00	477.340.800,00	0,05
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.699.945.300,00	206.885.621,00	0.00	0.00	9.906.830.921,00	1,01
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.699.945.300,00	206.885.621,00	0.00	0.00	9.906.830.921,00	1,01
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.191.853.565,00	208.064.090,00	0.00	0.00	5.399.917.655,00	0,55
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.191.853.565,00	208.064.090,00	0.00	0.00	5.399.917.655,00	0,55

Urusan Pemerintahan Daerah	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.483.736.461,00	0.00	0.00	0.00	2.483.736.461,00	0,25
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.075.947.000,00	0.00	0,00	0.00	2.075.947.000,00	0,21
Puskesmas Siantan Timur	334.567.163,00	0.00	0.00	0.00	334.567.163,00	0,03
Puskesmas Palmatak	73.222.298,00	0.00	0.00	0.00	73.222.298,00	0,01
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	16.792.575.049,00	3.310.559.860,00	0.00	0.00	20.067.494.828,00	2,04
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	16.056.759.092,00	3.300.589.461,00	0.00	0.00	19.357.348.553,00	1,97
UPT Pengelolaan Transportasi	735.815.957,00	9.970.399,00	0.00	0.00	745.786.356,00	0,08
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	13.156.366.435,00	434.919.297,00	0.00	0.00	13.591.285.732,00	1,38
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	13.156.366.435,00	434.919.297,00	0.00	0.00	13.591.285.732,00	1,38
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	10.584.800.031,00	118.407.554,00	0.00	0.00	10.703.207.585,00	1,09
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	9.493.251.300,00	118.407.554,00	0.00	0.00	9.611.658.854,00	0,98
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	1.091.548.731,00	0.00	0.00	0.00	1.091.548.731,00	0,11
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.924.483.616,00	0.00	0.00	0.00	5.924.483.616,00	0,60
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.924.483.616,00	0.00	0.00	0.00	5.924.483.616,00	0,60
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4.635.174.137,00	0.00	0.00	0.00	4.635.174.137,00	0,47

Urusan Pemerintahan Daerah	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	4.635.174.137,00	0,00	0,00	0,00	4.635.174.137,00	0,47
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	161.000.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000.000,00	0,02
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	161.000.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000.000,00	0,02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	261.077.334,00	88.922.005,00	0,00	0,00	349.999.339,00	0,04
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	261.077.334,00	88.922.005,00	0,00	0,00	349.999.339,00	0,04
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	0,01
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	0,01
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3.707.503.349,00	48.978.089,00	0,00	0,00	3.756.481.438,00	0,38
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	3.707.503.349,00	48.978.089,00	0,00	0,00	3.756.481.438,00	0,38
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	90.167.274,00	0,00	0,00	0,00	90.167.274,00	0,01
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	90.167.274,00	0,00	0,00	0,00	90.167.274,00	0,01
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	**27.146.361.244,00**	**556.489.980,00**	**0,00**	**0,00**	**27.702.851.224,00**	**2,81**
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	18.899.022.981,00	253.066.562,00	0,00	0,00	19.152.089.543,00	1,95
Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	18.899.022.981,00	253.066.562,00	0,00	0,00	19.152.089.543,00	1,95
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	7.224.864.782,00	303.423.418,00	0,00	0,00	7.528.288.200,00	0,76
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	7.224.864.782,00	303.423.418,00	0,00	0,00	7.528.288.200,00	0,76
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	189.500.000,00	0,00	0,00	0,00	189.500.000,00	0,02
Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	189.500.000,00	0,00	0,00	0,00	189.500.000,00	0,02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	496.457.802,00	0,00	0,00	0,00	496.457.802,00	0,05

Urusan Pemerintahan Daerah	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	496.457.802,00	0.00	0.00	0.00	496.457.802,00	0,05
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	336.515.679,00	0.00	0.00	0.00	336.515.679,00	0,03
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	336.515.679,00	0.00	0.00	0.00	336.515.679,00	0,03
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	**86.490.321.847,00**	**397.192.334,00**	**0.00**	**0.00**	**86.887.514.181,00**	**8,82**
SEKRETARIAT DAERAH	49.510.888.094,00	209.845.292,00	0.00	0.00	49.720.733.386,00	5,05
Sekretariat Daerah	49.510.888.094,00	209.845.292,00	0.00	0.00	49.720.733.386,00	5,05
SEKRETARIAT DPRD	36.979.433.753,00	187.347.042,00	0.00	0.00	37.166.780.795,00	3,77
Sekretariat DPRD	36.979.433.753,00	187.347.042,00	0.00	0.00	37.166.780.795,00	3,77
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	**56.201.816.914,00**	**854.282.393,00**	**2.000.000.000,00**	**110.343.203.878,00**	**169.399.303.185,00**	**17,21**
PERENCANAAN	13.789.228.692,00	349.407.093,00	0.00	0.00	14.138.635.785,00	1,44
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	13.789.228.692,00	349.407.093,00	0.00	0.00	14.138.635.785,00	1,44
KEUANGAN	29.179.230.683,00	311.577.550,00	2.000.000.000,00	110.343.203.878,00	141.834.012.111,00	14,41
Badan Pengelolaan Keuangan ddan Pendapatan Daerah	29.179.230.683,00	311.577.550,00	2.000.000.000,00	110.343.203.878,00	141.834.012.111,00	14,41
KEPEGAWAIAN	8.077.327.600,00	32.316.925,00	0.00	0.00	8.109.644.525,00	0,82
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.077.327.600,00	32.316.925,00	0.00	0.00	8.109.644.525,00	0,82
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.278.694.200,00	0.00	0.00	0.00	1.278.694.200,00	0,13
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.278.694.200,00	0.00	0.00	0.00	1.278.694.200,00	0,13
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	333.215.194,00	0.00	0.00	0.00	333.215.194,00	0,03
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	333.215.194,00	0.00	0.00	0.00	333.215.194,00	0,03

Urusan Pemerintahan Daerah	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
PENGELOLAAN PERBATASAN	3.544.120.545,00	160.980.825,00	0,00	0,00	3.705.101.370,00	0,38
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	3.544.120.545,00	160.980.825,00	0,00	0,00	3.705.101.370,00	0,38
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	**13.454.376.663,00**	**174.490.412,00**	**0,00**	**0,00**	**13.628.867.075,00**	**1,38**
INSPEKTORAT DAERAH	13.454.376.663,00	174.490.412,00	0,00	0,00	13.628.867.075,00	1,38
Inspektorat Daerah	13.454.376.663,00	174.490.412,00	0,00	0,00	13.628.867.075,00	1,38
UNSUR KEWILAYAHAN	**39.406.884.862,00**	**301.037.771,00**	**0,00**	**0,00**	**39.707.922.633,00**	**4,03**
KECAMATAN	39.406.884.862,00	301.037.771,00	0,00	0,00	39.707.922.633,00	4,03
Kecamatan Siantan	4.333.279.931,00	33.128.723,00	0,00	0,00	4.366.408.654,00	0,44
Kelurahan Tarempa	1.348.403.091,00	6.741.596,00	0,00	0,00	1.355.144.687,00	0,14
Kecamatan Jemaja	5.710.325.778,00	49.665.814,00	0,00	0,00	5.759.991.592,00	0,59
Kelurahan Letung	862.352.440,00	0,00	0,00	0,00	862.352.440,00	0,09
Kecamatan Palmatak	4.801.567.194,00	0,00	0,00	0,00	4.801.567.194,00	0,49
Kecamatan Siantan Timur	3.451.777.086,00	0,00	0,00	0,00	3.451.777.086,00	0,35
Kecamatan Siantan Selatan	2.697.187.014,00	90.497.059,00	0,00	0,00	2.787.684.073,00	0,28
Kecamatan Jemaja Timur	3.311.897.306,00	0,00	0,00	0,00	3.311.897.306,00	0,34
Kecamatan Siantan Tengah	3.272.844.680,00	30.313.920,00	0,00	0,00	3.303.158.600,00	0,34
Kecamatan Siantan Utara	2.713.527.209,00	0,00	0,00	0,00	2.713.527.209,00	0,28
Kecamatan Jemaja Barat	2.893.422.997,00	32.625.865,00	0,00	0,00	2.926.048.862,00	0,30
Kecamatan Kute Siantan	4.010.300.136,00	58.064.794,00	0,00	0,00	4.068.364.930,00	0,41
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	**24.496.905.875,00**	**149.673.242,00**	**0,00**	**0,00**	**24.646.579.117,00**	**2,50**
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	24.496.905.875,00	149.673.242,00	0,00	0,00	24.646.579.117,00	2,50
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	24.496.905.875,00	149.673.242,00	0,00	0,00	24.646.579.117,00	2,50
NON URUSAN	**14.981.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.981.600,00**	**0,002**
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	14.981.600,00	0,00	0,00	0,00	14.981.600,00	0,002
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	14.981.600,00	0,00	0,00	0,00	14.981.600,00	0,002
TOTAL	**770.702.201.516,00**	**214.597.997.214,00**	**5.087.832.133,00**	**134.817.769.332,00**	**1.125.205.800.195,00**	**100**

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

1. Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 diuraikan sebagai berikut:

   a. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

      Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Rp541.665.195.090,00 atau 55,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, terdiri dari:

      1) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rp238.845.505.670,00 atau 24,26% dari total belanja daerah;

      2) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rp182.344.906.321,00 atau 18,52% dari total belanja daerah;

      3) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp79.591.362.549,00 atau 8,08% dari total belanja daerah;

      4) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp612.829.327,00 atau 0,06% dari total belanja daerah;

      5) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Rp33.049.938.216,00 atau 3,36% dari total belanja daerah; dan

      6) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Rp7.220.653.007,00 atau 0,73% dari total belanja daerah.

   b. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

      Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Rp80.931.962.027,00 atau 8,22% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, terdiri dari:

      1) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Rp673.860.000,00 atau 0,07% dari total belanja daerah;

      2) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rp1.544.703.299,00 atau 0,16% dari total belanja daerah;

      3) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Rp190.988.500,00 atau 0,02% dari total belanja daerah;

      4) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Rp201.735.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah;

5) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Rp1.120.896.242,00 atau 0,11% dari total belanja daerah;

6) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp9.906.830.921,00 atau 1,01% dari total belanja daerah;

7) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rp5.399.917.655,00 atau 0,55% dari total belanja daerah;

8) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rp2.483.736.461,00 atau 0,25% dari total belanja daerah;

9) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Rp20.067.494.828,00 atau 2,04% dari total belanja daerah;

10) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Rp13.591.285.732,00 atau 1,38% dari total belanja daerah;

11) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Rp10.703.207.585,00 atau 1,09% dari total belanja daerah;

12) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Rp5.924.483.616,00 atau 0,60% dari total belanja daerah;

13) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Rp4.635.174.137,00 atau 0,47% dari total belanja daerah;

14) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Rp161.000.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah;

15) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Rp349.999.339,00 atau 0,04% dari total belanja daerah;

16) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Rp130.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah;

17) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Rp3.756.481.438,00 atau 0,38% dari total belanja daerah; dan

18) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Rp90.167.274,00 atau 0,01% dari total belanja daerah.

c. Urusan Pemerintahan Pilihan

Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Pilihan Rp27.702.851.224,00 atau 2,81% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, terdiri dari:

1) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Rp19.152.089.543,00 atau 1,95% dari total belanja daerah;

2) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Rp7.528.288.200,00 atau 0,76% dari total belanja daerah;

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Rp189.500.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah;

4) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Rp496.457.802,00 atau 0,05% dari total belanja daerah; dan

5) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Rp336.515.679,00 atau 0,03% dari total belanja daerah.

d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Rp86.887.514.181,00 atau 8,82% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, terdiri dari:

1) Sekretariat Daerah Rp49.720.733.386,00 atau 5,05% dari total belanja daerah; dan

2) Sekretariat DPRD Rp37.166.780.795,00 atau 3,77% dari total belanja daerah.

e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Rp169.399.303.185,00 atau 17,21% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, terdiri dari:

1) Perencanaan Rp14.138.635.785,00 atau 1,44% dari total belanja daerah;

2) Keuangan Rp141.834.012.111,00 atau 14,41% dari total belanja daerah;

3) Kepegawaian Rp8.109.644.525,00 atau 0,82% dari total belanja daerah;

4) Pendidikan dan Pelatihan Rp1.278.694.200,00 atau 0,13% dari total belanja daerah;

5) Penelitian dan Pengembangan Rp333.215.194,00 atau 0,03% dari total belanja daerah; dan

6) Pengelolaan Perbatasan Rp3.705.101.370,00 atau 0,38% dari total belanja daerah.

f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Rp13.628.867.075,00 atau 1,38% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang dialokasikan pada Inspektorat Daerah Rp13.628.867.075,00 atau 1,38% dari total belanja daerah.

g. Unsur Kewilayahan

Alokasi anggaran Unsur Kewilayahan Rp39.707.922.633,00 atau 4,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang dialokasikan pada Kecamatan Rp39.707.922.633,00 atau 4,03% dari total belanja daerah.

h. Unsur Pemerintahan Umum

Alokasi anggaran Unsur Pemerintahan Umum Rp24.646.579.117,00 atau 2,50% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang dialokasikan pada Kesatuan Bangsa dan Politik Rp24.646.579.117,00 atau 2,50% dari total belanja daerah.

i. Non Urusan

Alokasi anggaran Non Unsur Rp14.981.600,00 atau 0,002% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang dialokasikan pada Urusan Pemerintahan Bidang XX Rp14.981.600,00 atau 0,002% dari total belanja daerah.

Berkenaan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mengalokasikan belanja daerah:

a. Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana maksud Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan

b. Disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut:

a. SPM bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM bidang Pendidikan Rp10.288.368.632,00 atau 4,31% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sebesar Rp238.845.505.670,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

1) SPM Pendidikan Dasar dianggarkan Rp7.901.954.237,00 harus diprioritaskan 100% setiap tahun jumlah anak usia 7–15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar;

2) SPM Pendidikan Kesetaraan dianggarkan Rp245.840.000,00, harus diprioritaskan 100% setiap tahun jumlah anak usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan;

3) SPM Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dianggarkan Rp2.140.574.395,00 harus diprioritaskan 100% setiap tahun jumlah anak usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM bidang Kesehatan Rp1.532.025.254,00 atau 0,84% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan sebesar Rp182.344.906.321,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan dengan kode rekening sebagai berikut:

1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dianggarkan Rp407.075.000,00 harus diprioritaskan sebesar 100% setiap tahun Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan kesehatan;

2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin dianggarkan Rp302.597.654,00 harus diprioritaskan sebesar 100% setiap tahun Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan;

3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir dianggarkan Rp5.280.000,00 harus diprioritaskan sebesar 100% setiap tahun Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan;

4) Pelayanan Kesehatan Balita dianggarkan Rp235.197.000,00 harus diprioritaskan sebesar 100% setiap tahun Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan;

5) Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar dianggarkan Rp160.555.000,00 harus diprioritaskan sebesar 100% setiap tahun Jumlah Warga Negara Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan;

6) Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif dianggarkan Rp261.200.600,00, harus diprioritaskan sebesar 100% setiap tahun Jumlah Warga Negara Usia Produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan;

7) Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut dianggarkan Rp18.400.000,00 harus diprioritaskan sebesar 100% setiap tahun Jumlah Warga Negara Usia Lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan;

8) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi belum dianggarkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, seharusnya diprioritaskan sebesar 100% setiap tahun Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan;

9) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus belum dianggarkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, seharusnya memprioritaskan sebesar 100% setiap tahun Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Mellitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan;

10) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat belum dianggarkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, seharusnya diprioritaskan sebesar 100% setiap tahun Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan;

11) Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis dianggarkan Rp125.400.000,00 harus diprioritaskan sebesar 100% setiap tahun Jumlah Warga Negara Terduga Tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan;

12) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV dianggarkan Rp16.320.000,00 harus diprioritaskan sebesar 100% setiap tahun Jumlah Warga Negara Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

c. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp1.451.778.445,00 atau 1,82% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp79.591.362.549,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan dengan kode rekening sebagai berikut:

1) Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari dianggarkan Rp1.138.126.345,00 harus diprioritaskan sebesar 100% setiap tahun jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari;

2) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik dianggarkan Rp313.652.100,00 harus diprioritaskan sebesar 100% setiap tahun jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan.

d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat Rp125.120.286,00 atau 20,42% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat sebesar Rp612.829.327,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan dengan kode rekening sebagai berikut:

1) Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum dianggarkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, seharusnya diprioritaskan 100% setiap tahun jumlah warga negara yang memperoleh rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

2) Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah dianggarkan Rp125.120.286,00 harus diprioritaskan 100% setiap tahun jumlah warga negara yang memperoleh rumah layak huni.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

e. SPM Trantibumlinmas

Alokasi anggaran untuk belanja SPM bidang Trantibumlinmas Rp524.170.426,00 atau 1,59% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sebesar Rp33.049.938.216,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan dengan kode rekening sebagai berikut:

1) Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dianggarkan Rp108.201.451,00, harus diprioritaskan 100% jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota;

2) Pelayanan Informasi Rawan Bencana belum dianggarkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, seharusnya diprioritaskan 100% jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana;

3) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dianggarkan Rp98.106.675,00, harus diprioritaskan 100% jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;

4) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dianggarkan Rp219.850.300,00, harus diprioritaskan 100% jumlah warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana;

5) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dianggarkan Rp98.012.000,00, harus diprioritaskan 100% jumlah warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota.

f. SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Sosial Rp233.045.000,00 atau 3,23% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial sebesar Rp7.220.653.007,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

1) Penyediaan dan Rehablitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota dan Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dianggarkan Rp233.045.000,00;

2) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota belum dianggarkan.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan di Daerah Kabupaten/Kota.

3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Prioritas Nasional (PN) Tahun 2024 meliputi:

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp1.895.969.408,00 atau 0,19% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor energi, pertanian, perikanan dan kelautan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, industri pengolahan, dan pariwisata, didukung penguatan reformasi fiskal dan sistem keuangan, peningkatan kualitas investasi, ekspor, dan partisipasi dalam rantai produksi global, perbaikan sistem logistik, digitalisasi, ekonomi hijau.

   Pada Tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan adalah sebagai berikut:

   1) Terwujudnya transisi energi dan peningkatan kualitas sumber daya ekonomi sebagai pendukung pembangunan yang berkelanjutan;

   2) Terwujudnya percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui upaya revitalisasi industri dan penguatan daya saing usaha, dan penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

   Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN1, akan dilakukan melalui 8 (delapan) Program Prioritas (PP) yaitu sebagai berikut:

   1) Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) (PP1), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024;

   2) Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi (PP2), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024;

   3) Peningkatan Ketersediaan, Akses, Dan Kualitas Konsumsi Pangan (PP3), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024;

   4) Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan (PP4), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024;

5) Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi (PP5), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024;

6) Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi Di Sektor Riil, dan Industrialisasi (PP6), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024;

7) Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (PP7), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024;

8) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (PP8), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp187.520.703,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diarahkan untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pada Tahun 2024 diarahkan pada upaya mempercepat transformasi sosial dan ekonomi, memperkuat rantai produksi dan rantai nilai di tingkat wilayah memperkuat integrasi perekonomian domestik dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar, serta meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah.

Sasaran pengembangan wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas pada periode 2020-2024 adalah menurunnya kesenjangan antar wilayah dan tetap menjaga momentum pertumbuhan.

Selain itu, pengembangan wilayah didukung oleh kontribusi dari percepatan pengembangan kawasan yang diprioritaskan serta pengembangan sektor-sektor unggulan, dengan memperhatikan tata ruang dan tata kelola pembangunan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menganggarkan pengembangan kawasan perkotaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp187.520.703,00.

c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp12.395.123.633,00 atau 1,26% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diarahkan pada pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing merupakan salah satu modal dalam percepatan transformasi ekonomi

yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan sumber daya manusia Tahun 2024 difokuskan pada percepatan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2024 melalui keberlanjutan reformasi sistem kesehatan nasional, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, percepatan pemulihan pembelajaran, reformasi pendidikan keterampilan, dan reformasi sistem perlindungan sosial.

Dalam rangka meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada Tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

1) Memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan;
2) Reformasi sistem perlindungan sosial terutama untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
3) Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
4) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
5) Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
6) Mengentaskan kemiskinan; dan
7) Meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN3 tersebut akan dilakukan melalui 7 (tujuh) PP, yaitu:

1) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan (PP1), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP2), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
3) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (PP3), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
4) Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (PP4), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
5) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (PP5), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
6) Pengentasan Kemiskinan (PP6), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
7) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (PP7), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp87.509.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diarahkan untuk Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan menjadi instrumen penting untuk membentuk karakter dan sikap mental manusia Indonesia melalui internalisasi nilai-nilai esensial, yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan diarahkan melalui pendayagunaan kearifan lokal sebagai modal dasar untuk mewujudkan bangsa gang maju, berdaulat mandiri, dan berkepribadian.

Pada Tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yaitu sebagai berikut:

1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;
2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;
3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;
4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa; dan
6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif.

Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian sasaran PN4 dilakukan melalui 4 (empat) PP, yaitu sebagai berikut:

1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter (PP1), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
2) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia (PP2), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
3) Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial (PP3), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024;

4) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter (PP4), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp51.118.083.881,00 atau 5,19% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pembangunan infrastruktur Tahun 2024, sebagai pilar pendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, difokuskan pada percepatan pembangunan infrastrukur dasar dan konektivitas karena memiliki peran penting dalam mewujudkan upaya transformasi ekonomi tersebut.

Sasaran dan indikator utama PN5 yaitu sebagai berikut:

1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;
3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;
4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan; dan
5) Meningkatnya layanan infrastruktur TIK.

Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian sasaran PN5 dilakukan melalui 5 (lima) PP, yaitu sebagai berikut:

1) Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
2) Infrastruktur Ekonomi (PP2), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
3) Infrastruktur Perkotaan (PP3), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
4) Energi dan Ketenagalistrikan (PP4), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
5) Transformasi Digital (PP5), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024;

f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang difokuskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pelestarian lingkungan

hidup, pencegahan kerusakan sumber daya alam, serta pengurangan risiko dan tangguh bencana, guna menopang produktivitas menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada Tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim yaitu sebagai berikut:

1) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim;
3) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap *baseline*.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran (PN6) terdiri dari 3 (tiga) PP, yaitu:

1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PP1), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (PP2), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
3) Pembangunan Rendah Karbon (PP3), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024;

g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp21.240.076.723,00 atau 2,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diarahkan pada upaya mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui perbaikan sistem hukum untuk mendorong kemudahan berusaha dan optimalisasi diplomasi ekonomi melalui penguatan kerja sama bilateral, regional, maupun global, termasuk kerja sama pembangunan internasional. Percepatan transformasi ekonomi juga didukung dengan pengelenggaraan pertahanan dan keamanan yang responsif, penguatan pengawasan sistem merit dari netralitas Aparatur Sipil Negara, pemindahan Aparatur Sipil Negara ke Ibu Kota Nusantara, serta fokus pada peningkatan kualitas demokrasi khususnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak.

Pada Tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik (PN7) yaitu sebagai berikut:

1) Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal;

2) Optimalnya Kebijakan Luar Negeri;

3) Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap;

4) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik; dan

5) Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN7 akan dilakukan melalui 5 (lima) PP, yaitu:

1) Konsolidasi Demokrasi (PP1), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024;

2) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (PP2), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024;

3) Penegakan Hukum Nasional (PP3), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024;

4) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (PP4), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024;

5) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (PP5), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mengalokasikan anggaran kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 agar merinci masing-masing Prioritas Nasional ke dalam Program Prioritas, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

4. Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 tersebut, yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 7
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

No	Prioritas Nasional	Total Anggaran dalam R-APBD 2024 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.895.969.408,00	0,19

No	Prioritas Nasional	Total Anggaran dalam R-APBD 2024 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	187.520.703,00	0,02
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	12.395.123.633,00	1,26
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	87.509.000,00	0,01
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	51.118.083.881,00	5,19
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	0,00	0,00
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	21.240.076.723,00	2,16
Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD		86.924.283.348,00	8,83
Total Belanja Daerah		984.585.176.132,00	

Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada tabel di atas, harus diupayakan untuk ditingkatkan dalam rangka mendukung sasaran utama pengembangan 2024 meliputi:

a. Puliihnya pertumbuhan ekonomi wilayah;

b. Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan;

c. Meningkatnya kesempatan kerja, dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka.

5. Alokasi Anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas Pemerintah Provinsi Tahun 2024 yang diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 8
Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Berdasarkan Prioritas Provinsi Tahun 2024

No	Prioritas Provinsi	Total Anggaran dalam R-APBD 2024 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
1	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	4.423.391.419,00	0,45
2	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	70.422.700,00	0,01
3	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	60.461.522.353,00	6,14
Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD		64.955.336.472,00	6,60
Total Belanja Daerah		984.585.176.132,00	

6. Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024.

   Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas daerah Tahun 2024 yang diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 9
Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2024

No	Prioritas Daerah	Total Anggaran dalam R-APBD 2024 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
1	Pemantapan Kualitas SDM yang Sehat, Unggul dan Berdaya Saing.	141.584.031.368,00	14,38
2	Pengembangan dan Pemantapan Sumber Daya Ekonomi dan Investasi Daerah	6.002.930.135,00	0,61
3	Peningkatan Infrastruktur Dasar dalam Mendukung Perekonomian Daerah	75.564.341.050,00	7,67
4	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	711.095.023.861,00	72,22
Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD		934.246.326.414,00	94,89
Total Belanja Daerah		984.585.176.132,00	

7. Dalam rangka pengendalian inflasi di daerah, serta mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat mengalokasikan anggaran tersebut secara memadai dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran pengendalian inflasi di daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp9.740.178.505,00 atau 0,99% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Sub Kegiatan sebagai tabel berikut:

Tabel 10
Pengendalian Inflasi di Daerah

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp) R-APBD TA 2024
1	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	71.820.400,00

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp) R-APBD TA 2024
2	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	80.000.000,00
3	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	159.165.600,00
4	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	397.192.866,00
5	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	480.746.481,00
6	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	210.000.000,00
7	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal	210.000.000,00
8	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	8.131.253.158,00
Jumlah		9.740.178.505,00

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD TA 2024 dengan berpedoman pada butir E.2.ab.3).a). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

8. Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

   Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

   a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

      Jumlah alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan sebesar Rp244.388.876.938,00 atau 24,82% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp984.585.176.132,00, yang diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 11
Alokasi Fungsi Pendidikan

No		Komponen Perhitungan			R-APBD TA 2024 (Rp)	% dari Total Anggaran Fungsi Pendidikan
1.	a.	Urusan Bidang Pendidikan:			238.845.505.670,00	97,73
		1)	Belanja Operasi:		213.666.288.494,00	87,43
			a.	belanja pegawai:	147.898.935.343,00	60,52
			b.	belanja barang dan jasa	63.934.643.151,00	26,16

No	Komponen Perhitungan				R-APBD TA 2024 (Rp)	% dari Total Anggaran Fungsi Pendidikan
			c.	belanja hibah	1.832.710.000,00	0,75
			d.	belanja bantuan sosial	0,00	-
		2)	Belanja Modal		25.179.217.176,00	10,30
	b.	Urusan Bidang Kebudayaan:			130.000.000,00	0,05
		1)	Belanja Operasi:		130.000.000,00	0,05
			a.	belanja pegawai	0,00	-
			b.	belanja barang dan jasa	130.000.000,00	0,05
			c.	belanja hibah	0,00	-
			d.	belanja bantuan sosial	0,00	-
		2)	Belanja Modal		0,00	-
	c.	Urusan Bidang Perpustakaan:			916.072.068,00	0,37
		1)	Belanja Operasi:		916.072.068,00	0,37
			a.	belanja pegawai	0,00	-
			b.	belanja barang dan jasa	916.072.068,00	0,37
			c.	belanja hibah	0,00	-
			d.	belanja bantuan sosial	0,00	-
		2)	Belanja Modal		0,00	-
	d.	Urusan Bidang Kepemudaaan dan Olahraga:			4.497.299.200,00	1,84
		1)	Belanja Operasi:		4.497.299.200,00	1,84
			a.	belanja pegawai	0,00	-
			b.	belanja barang dan jasa	4.130.541.019,00	1,69
			c.	belanja hibah	366.758.181,00	0,15
			d.	belanja bantuan sosial	0,00	-
		2)	Belanja Modal		0,00	-
	e.	Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat di bidang Pendidikan.			0,00	-
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)				244.388.876.938,00	
3.	Total Belanja Daerah				984.585.176.132,00	
4.	Rasio anggaran Pendidikan (2:3) x 100%				24,82%	

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir E.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah, yang diprioritaskan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

b. Alokasi Anggaran untuk Infrastruktur Pelayanan Publik

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengalokasikan Belanja infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan uraian perhitungan tabel berikut:

Tabel 12
Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

No.	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)
1	Total Belanja Daerah	984.585.176.132,00
	Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa:	
	a) belanja bagi hasil	2.721.026.472,00
	b) belanja bantuan keuangan	107.622.177.406,00
2	Jumlah (a+b)	110.343.203.878,00
3	Selisih (1-2)	874.241.972.254,00
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	349.696.788.901,60

Tabel 13
Belanja Infrastruktur Daerah

No.	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)
1	a) Belanja Modal	130.427.594.369,00
	1) Tanah	0,00
	2) Peralatan dan Mesin	31.080.040.043,00
	3) Bangunan dan Gedung	38.455.319.336,00
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	58.861.007.991,00
	5) Aset tetap lainnya	2.000.000.000,00
	6) Aset lainnya	31.226.999,00
	b) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*)	0,00
	c) Belanja pemeliharaan	4.151.367.245,00
2	a) Belanja Hibah (hanya yang berdimensi infrastruktur)	0,00
	b) Belanja Bantuan Sosial (hanya yang berdimensi infrastruktur)	0,00
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	134.578.961.614,00

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024 mengalokasikan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

yaitu Belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp134.578.961.614,00 atau 15,39% dari yang seharusnya Rp349.696.788.901,60, sesuai maksud butir E.1.c.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat menyesuaikan porsi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sekurang- kurangnya 40% (empat puluh persen) sampai dengan Tahun Anggaran 2027.

c. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas setelah dikurangi gaji sebesar Rp10.745.911.891,00 atau 1,09% dari total belanja daerah sebesar Rp984.585.176.132,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, antara lain tercantum pada:

1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Rp250.000.000,00;

2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Rp1.078.864.191,00;

3) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Rp860.831.828,00.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah memenuhi alokasi anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, untuk mendanai program dan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan, meliputi kegiatan Pengawasan, Kegiatan Non Pengawasan, Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Kegiatan Reviu DAK Fisik yang bersumber dari alokasi 5% (lima persen) alokasi dana penunjang DAK Fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung peningkatan integritas bagi penyelenggara Pemerintah Daerah guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan untuk pelaksanaan survei penilaian integritas dalam APBD

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada butir E.2.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Berkaitan dengan itu, untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan dimaksud, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari total belanja daerah, sebagaimana ditegaskan pada butir E.2.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, Kabupaten Kepulauan Anambas mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

1) Kegiatan pengawasan, yaitu:
   a) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja;
   b) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi Rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, RKA-SKPD;
   c) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
   d) Reviu Laporan Keuangan;
   e) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi Probity Audit, Reviu Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
   f) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, pelaksanaan survei penilaian integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi, Operasionalisasi sapu bersih

pungutan liar, Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP Pengawasan prioritas nasional meliputi *monitoring* dan evaluasi Dana Desa, dan BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsive gender, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan, tindak lanjut perjanjian kerja sama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;

2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP.

3) Sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.

Sebagaimana ditegaskan pada butir E.2.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

d. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran yang tercantum pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia setelah dikurangi belanja pegawai dan belanja pemeliharaan sebesar Rp2.270.720.302,00 atau 0,23% dari total belanja daerah sebesar Rp984.585.176.132,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah, sebagaimana ditegaskan pada butir E.2.e. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun sebelumnya telah melebihi perhitungan tersebut di atas, pengalokasian anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran dimaksud.

9. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

   a. Alokasi Anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)

      Penyediaan Anggaran TP-PKK sebesar Rp441.872.989,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dapat dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten/Kota melalui:

      1) Upaya percepatan penurunan stunting melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar;

      2) Dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti trafficking, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual;

      3) Mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan perkoperasian;

      4) Mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka stunting, pencapaian pola pangan harapan dan antisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumah tangga;

      5) Dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan digital untuk ibu/anak, Antropometri, Thermometer, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga,

peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat;

6) Pemberdayaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, yang meliputi:
   a) Penghayatan dan pengamalan Pancasila;
   b) Gotong royong;
   c) Pangan;
   d) Sandang;
   e) Perumahan dan tata laksana rumah tangga;
   f) Pendidikan dan keterampilan;
   g) Kesehatan;
   h) Pengembangan kehidupan berkoperasi;
   i) Kelestarian lingkungan hidup;
   j) Perencanaan sehat;
7) Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8) Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi TP-PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan Stunting, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumah tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat TP-PKK Kabupaten, serta kegiatan lainnya.
9) Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan

berpedoman pada tabel pemetaan sebagaimana dimaksud pada butir E.2.ae Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

b. Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)

Penyediaan Anggaran sebesar Rp268.093.100,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan dan Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan.

Dapat dianggarkan guna mendukung Peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Kabupaten, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Camat di wilayah kerja masing-masing sebagaimana amanat butir E.3.ai.4).i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

c. Alokasi Anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama

Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebesar Rp200.000.000,00 atau 0,02% dari total belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Telah memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, namun alokasi anggaran tersebut dinilai belum cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus mengupayakan penyediaan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan FKUB dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

d. Alokasi Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah

Penyediaan Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp450.080.716.081,00 atau 99,92% dari Barang jasa dan belanja modal selain tanah sebesar Rp450.440.716.081,00, telah memenuhi alokasi anggaran penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah, sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tanggal 30 Maret 2022 dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Tanggal 25 Februari 2022.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mengalokasikan alokasi anggaran penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tanggal 30 Maret 2022.

e. Alokasi Anggaran untuk Penurunan Stunting

Penyediaan anggaran untuk Penurunan Stunting Rp1.618.184.602,00 atau 0,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dalam rangka untuk penurunan stunting melalui:

1) Kegiatan yang mendukung intervensi gizi spesifik seperti pemberian suplemen dan makanan tambahan bagi ibu hamil, bayi dan balita;

2) Kegiatan yang mendukung intervensi gizi sensitive seperti penyediaan akses air minum layak, akses sanitasi layak, akses layanan kesehatan dan keluarga berencana dan pendampingan keluarga rawan stunting,

3) Kegiatan pendukung penanganan stunting, seperti kegiatan fasilitasi penataan dan pemberdayaan kelembagaan;

dengan memprioritaskan belanja utamanya untuk kegiatan yang mendukung pemberian makanan tambahan dan suplemen gizi terutama untuk ibu hamil, bayi dan balita dengan berpedoman pada butir C.1.m.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

f. Alokasi Anggaran untuk Bantuan Hukum

Penyediaan anggaran yang tercantum pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Rp215.338.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada butir E.3.ad Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

g. Alokasi Anggaran untuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Penyediaan anggaran Belanja Hibah kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Anambas Rp100.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada butir E.2.w.8 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

h. Penyediaan anggaran yang bersumber dari BLUD, antara lain tercantum pada:

1) Belanja Pegawai BLUD Rp2.029.080.735,00;

2) Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp7.075.381.676,00;

3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp404.655.396,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta butir E.2.s Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

i. Penyediaan anggaran yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), antara lain tercantum pada:

1) Belanja Barang dan Jasa BOS Rp6.500.000.000,00;

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Rp3.500.000.000,00;

3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Rp2.000.000.000,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah dan butir C.2.b.5).a).(5).(e).ii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mengalokasikan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja antar SD dan SMP agar memedomani Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 258/P/2023 tentang Sekolah Penerima BOS Kinerja untuk Sekolah Penggerak dan Sekolah Berprestasi Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 259/P/2023 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Bagi Sekolah yang Memiliki Kemajuan Terbaik Tahun Anggaran 2023.

j. Pendanaan sub kegiatan yang tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran sub kegiatan.

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp282.842.004,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek "Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat" Rp13.830.438,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp127.124.526,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek "Belanja Modal Meja Kerja Pejabat" Rp12.064.790,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp993.915.020,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek "Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga" Rp58.162.889,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari suatu sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja

kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

k. Pendanaan kegiatan yang tidak menggambarkan proporsi capaian kinerja sub kegiatan.

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

1) Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rp2.192.007.300,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Biasa" Rp1.879.082.000,00 pada Sekretariat DPRD, diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan;

2) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik Rp587.197.300,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Biasa" Rp363.956.000,00 dan "Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota" Rp87.500.000,00 pada Sekretariat DPRD, diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan;

3) Sub Kegiatan Pembahasan APBD Rp426.224.400,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Biasa" Rp325.132.000,00 pada Sekretariat DPRD, diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan;

4) Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan Rp390.009.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Biasa" Rp325.132.000,00 pada Sekretariat DPRD, diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan;

5) Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD Rp1.521.609.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Biasa" Rp1.250.393.000,00 pada Sekretariat DPRD, diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan;

6) Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD Rp440.883.476,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Biasa" Rp429.977.000,00 pada Sekretariat DPRD, diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan;

7) Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah Rp1.096.361.100,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Biasa" Rp741.038.000,00 dan "Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota" Rp343.100.000,00 pada Sekretariat DPRD, diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan

8) Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Rp518.812.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Biasa" Rp407.800.000;00 pada Sekretariat DPRD, diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan;

9) Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rp1.760.444.900,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota" Rp1.097.078.000,00 pada Sekretariat DPRD, diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan;

10) Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Rp4.462.500.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Biasa" Rp4.397.180.000,00 pada Sekretariat DPRD, diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan;

11) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp225.424.210,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek "Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor" Rp29.467.600,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan;

12) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp265.894.126,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek "Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor" Rp61.408.840,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan;

13) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp97.736.269,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek "Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor" Rp37.608.465,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan;

14) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp85.750.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek "Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor" Rp18.146.200,00 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan;

15) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp118.306.853,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek "Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor" Rp51.479.269,00 pada Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan, diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan;

16) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp178.923.234,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek "Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor" Rp39.918.570,00 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan;

tidak memiliki korelasi langsung dan tidak mendukung keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memformulasikan kembali alokasi anggaran tersebut dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran, sehingga mendukung keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud dengan berpedoman pada Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

10. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi Rp741.814.377.885,00 atau 75,34% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Anambas Rp984.585.176.132,00 dalam APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada obyek belanja:

a. Belanja Pegawai

Jumlah alokasi Belanja Pegawai Rp398.801.887.592,00 atau 40,50% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, selanjutnya alokasi belanja pegawai di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD belum memenuhi ketentuan Rp381.001.152.632,00 atau 38,70% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah. sebagaimana dimaksud pada butir C.3.a.1).f), Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain tercantum pada:

1) Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN Rp173.339.981.766,00 atau 17,61% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran agar memperhitungkan kebutuhan aggaran dimaksud secara cukup untuk kebutuhan 1 (satu) tahun anggaran dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2024, kewajiban penggajian pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun sebelumnya sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai butir C.3.a.1).h).(3), butir C.3.a.1).h).(4), butir C.3.a.1).h).(5) dan butir C.3.a.1).h).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

2) Penganggaran Belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian yang tercantum pada:

a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta ASN sebagai berikut:

(1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp11.632.848.116,00 yang diperuntukkan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 14
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

No.	Komponen Perhitungan		Rancangan APBD TA 2024
1	Belanja		(Rp)
	a.	Belanja Gaji Pokok ASN	121.087.391.710,00
	b.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	12.705.398.619,00

No.	Komponen Perhitungan		Rancangan APBD TA 2024
	c.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.463.144.487,00
	d.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	10.905.850.036,00
	e.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.736.759.225,00
	f.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	181.814.540.576,00
2	Jumlah Belanja		332.713.084.653,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Belanja x 4%)		13.308.523.386,12
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN pada APBD		11.632.848.116,00
Selisih Kurang (angka 4 - angka 3)			1.675.675.270,12

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, besaran alokasi anggaran iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan ASN seharusnya Rp13.308.523.386,12 atau terdapat selisih kurang Rp1.675.675.270,12.

(2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD Rp40.874.000,00, yang diperuntukkan bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 15
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD

No.	Komponen Perhitungan	Rancangan APBD TA 2024
1	Belanja	(Rp)
	a. Belanja Uang Representasi DPRD	462.572.250,00
	b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	92.514.450,00
	c. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	654.370.500,00
	d. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	74.358.900,00
	e. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	24.481.800,00
2	Jumlah Belanja	1.308.297.900,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Belanja x 4%)	52.331.916,00
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD pada APBD	40.874.000,00
Selisih Kurang (angka 4 - angka 3)		11.457.916,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, besaran alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, belum sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD seharusnya Rp52.331.916,00 atau terdapat selisih kurang Rp11.457.916,00.

(3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp8.100.000,00 yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 16

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH

No.	Komponen Perhitungan		Rancangan APBD TA 2024
1	Belanja		(Rp)
	a.	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	66.400.000,00
	b.	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.150.000,00
	c.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	99.500.000,00
2	Jumlah Belanja		171.050.000,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Belanja x 4%)		6.842.000,00
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH pada APBD		8.100.000,00
Selisih Lebih (angka 4 - angka 3)			1.258.000,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, besaran alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH seharusnya Rp6.842.000,00 atau terdapat selisih lebih Rp1.258.000,00.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas agar menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN, pimpinan dan anggota DPRD dan KDH/WKDH dengan memedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir

C.3.a.1).h).(4) serta butir C.3.a.1).h).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta ASN sebagai berikut:

(1) Penyediaan alokasi anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, diuraikan pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp265.000.000,00;

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp685.000.000,00;

belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN seharusnya:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, yaitu 0,24% dari gaji pokok Rp290.609.740,10 atau terdapat selisih kurang Rp25.609.740,10;

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN, yaitu 0,72% dari gaji pokok Rp871.829.220,31 atau terdapat selisih kurang Rp186.829.220,31.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas agar menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian bagi ASN dengan berpedoman pada Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan butir C.3.a.1).h).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

(2) Penyediaan alokasi anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH dan DPRD, diuraikan pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Rp112.320,00;

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH Rp336.960,00;

(c) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD Rp2.000.000,00;

(d) Belanja Jaminan Kematian DPRD Rp4.500.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan butir C.3.a.1).h).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

c) Penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan DPRD; Rp220.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7807/SJ tanggal 2 November 2017 Hal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban

Dana Operasional, sesuai butir C.3.a.2).c).(2).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain:

a) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp10.812.313.520,00, yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain diuraikan pada:

(1) Belanja Uang Representasi DPRD Rp462.572.250,00;

(2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp654.370.500,00;

(3) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp74.358.900,00;

(4) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD Rp24.481.800,00;

(5) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp2.520.000.000,00;

(6) Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp630.000.000,00;

(7) Penyediaan alokasi belanja yang tercantum dalam rincian objek belanja:

(a) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD Rp3.001.200.000,00;

(b) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp3.042.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memedomani pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional. Sepanjang Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD memedomani ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, serta dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek

efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, alokasi anggaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi juga harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

b) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp201.600.000,00, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Alokasi anggaran Dana Operasional Pimpinan DPRD dimaksud dalam rangka menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, dengan memedomani amanat Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

4) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Rp317.805.560,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, terdapat selisih lebih anggar sebesar Rp4.370.844,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus menyesuaikan Kembali Belanja Dana Operasional KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan penentuan besarannya disesuaikan dengan berpedoman dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu di atas Rp20.000.000.000,00 s/d Rp50.000.000.000,00 paling rendah Rp300.000.000,00 dan paling tinggi 0,80% dari target PAD sebesar Rp39.179.339.491,00 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

5) Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp181.814.540.576,00 atau 18,47% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp94.506.336.360,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.3.a.1).c).(7).(a), butir C.3.a.1).c).(7).(b), butir C.3.a.1).c).(7).(c), butir C.3.a.1).c).(7).(d), dan butir C.3.a.1).c).(7).(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, alokasi anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Tahun Anggaran 2024 Rp181.814.540.576,00, dalam rangka tertib administrasi dan kepastian pemberian TPP kepada ASN, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tidak lagi mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri apabila tidak terdapat perubahan besaran nominal alokasi TPP ASN TA 2024 sebagaimana butir C.3.a.1).c).(7).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Selain itu, kebijakan pemberian TPP ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 juga memperhatikan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sesuai butir C.3.a.1).c).(7).(b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp30.047.214.280,00 atau 3,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

   a) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Rp12.896.945.760,00;

   b) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASN Rp3.881.789.200,00,00;

   c) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASN Rp1.022.000.000,00;

   d) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN Rp439.315.062,00;

   e) Belanja Honorarium Rp10.348.074.016,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

      (1) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp9.925.712.000,00;

      (2) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp2.720.000,00;

      (3) Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Rp419.642.016,00.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran dimaksud agar lebih rasional dan memperhitungkan kebutuhan aggaran dimaksud secara cukup untuk kebutuhan 1 (satu) tahun anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada:

a) Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk insentif pajak daerah dan retribusi daerah.

   Selanjutnya, Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2024 melalui DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa belanja jasa pengelolaan BMD serta honorarium yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan

salah satu penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada butir C.2.b.5).a).(5).(e).iii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Berkaitan dengan itu, pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah hanya dapat diberikan kepada penerima insentif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk insentif pajak daerah dan retribusi daerah apabila terlibat dalam kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta dalam pelaksanaannya berdasarkan kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

b) Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan butir C.1.m.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Berkaitan dengan itu, penganggaran honorarium agar memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, dan kewajaran dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa Rp320.013.121.712,00 atau 32,50% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.3.a.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang antara lain tercantum pada objek belanja:

1) Belanja Barang

Penganggaran Belanja Barang Rp65.663.846.891,00 atau 6,67% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:

- Belanja Barang Pakai Habis Rp64.607.391.925,00 atau 6,56% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja:
  (1) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp3.825.505.021,00;
  (2) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran Rp643.428.504,00;
  (3) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp1.086.178.744,00;
  (4) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan *Cover* Rp1.778.703.880,00;
  (5) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp3.416.064.011,00;
  (6) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp646.726.723,00;
  (7) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp1.317.731.544,00;
  (8) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp631.880.374,00;
  (9) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp3.518.584.226,00;
  (10) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata Rp696.286.940,00;
  (11) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp1.209.251.000,00;
  (12) Belanja Obat-Obatan-Obat Rp7.431.619.392,00,00;
  (13) Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya Rp5.590.171.625,00;
  (14) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp14.756.816.855,00;

(15) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp100.000.000,00;

(16) Belanja Natura dan Pakan-Natura Rp2.331.921.583,00;

(17) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp4.987.862.051,00;

(18) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp2.020.106.883,00;

(19) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp4.642.028.672,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya memedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan butir C.3.a.2).c).(1).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Penyediaan anggaran tersebut tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp14.756.816.855,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD serta memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan berpedoman pada Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, sebagaimana dimaksud pada butir C.3.a.2).c).(1).(a), butir C.3.a.2).c).(1).(b) dan butir C.3.a.2).c).(1).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Penyediaan alokasi anggaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp873.780.000,00 atau 0,09% dari total belanja daerah, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp594.980.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
   - Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Rp414.680.000,00;
b) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp278.800.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
   - Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp203.800.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam butir C.3.a.2).c).(5).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan, sebagaimana dimaksud pada butir C.3.a.2).c).(5).(d)

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

2) Belanja Jasa

Belanja Jasa Rp177.586.260.063,00 atau 18,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:

a) Belanja Jasa Kantor Rp150.522.245.015,00 atau 15,29% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja:

(1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp3.600.382.450,00;

(2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp5.745.440.000,00;

(3) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Rp612.046.938,00;

(4) Honorarium Rohaniwan Rp773.700.000,00;

(5) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Rp738.000.000,00;

(6) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Rp14.944.865.711,00;

(7) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Rp900.063.864,00;

(8) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Rp5.728.223.112,00;

(9) Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Rp2.575.023.520,00;

(10) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana Rp4.608.270.168,00;

(11) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan Rp1.849.514.280,00;

(12) Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp73.355.065.717,00;

(13) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp4.252.619.864,00;

(14) Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp3.639.887.160,00;

(15) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp7.295.498.625,00;

(16) Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp1.486.947.200,00;

(17) Belanja Jasa Tenaga Supir Rp1.523.258.612,00;

(18) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Rp4.477.200.000,00;

(19) Belanja Jasa Operator Kapal Rp2.190.050.912,00;

(20) Belanja Tagihan Listrik Rp3.792.002.012,00;

(21) Belanja Kawat/Faximili/Internet/TV Berlangganan Rp3.172.290.752,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 namun dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan sub kegiatan. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya, dalam mengalokasikan anggaran dimaksud memperhitungkan kebutuhan anggaran secara cukup untuk kebutuhan 1 (satu) tahun anggaran, mengingat penyediaan anggaran tersebut merupakan belanja yang sifatnya rutinitas dan merupakan kewajiban kepada pihak ke tiga yang harus dipenuhi dan diselesaikan oleh Pemerintah daerah setiap bulannya yang penganggarannya pada masing-masing pada SKPD Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana dimaksud pada butir C.3.a.2).c).(2).(a).i.ii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Selain itu, penyediaan anggaran yang tercantum dalam sub rincian obyek belanja Honorarium Rohaniwan Rp773.700.000,00 hanya diperkenankan untuk mencatat honorarium rohaniwan yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah Jabatan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar menyesuaikan kembali menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp13.132.362.317,00 atau 1,33% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja:

(1) Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI Rp3.591.457.168,00;

(2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 Rp705.600.000,00;

Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), bagi seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain peserta JKN yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan JKN guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana dimaksud pada butir C.3.a.2).c).(2).(b).v.vii) dan C.3.a.2).c).(2).(b).vi Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas belum menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam bentuk Penganggaran iuran jaminan kesahatan sebagaimana dimaksud butir C.3.c.2.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Selanjutnya Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

(1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp7.874.608.638,00;

(2) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp478.607.311,00;

(3) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp482.089.200,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 bagi pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah antara lain Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan kesehatan, perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat, serta sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud pada butir C.3.a.2).c).(2).(b).i, butir C.3.a.2).c).(2).(d) dan butir C.3.a.2).c).(2).(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

(1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp2.368.025.153,00 atau 0,24% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja:

- Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Rp1.978.817.000,00;

(2) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp5.425.758.922,00 atau 0,55% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja:

(a) Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor Rp3.347.821.107,00;

(b) Belanja Sewa Bangunan Gudang Rp1.002.206.214,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik

daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan untuk mendanai kegiatan prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, terutama difokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah dan pada jenis belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sebagaimana amanat Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah serta pada butir C.3.a.2).c).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

d) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp3.676.654.716,00 atau 0,37% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

  (a) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Rp680.765.568,00;

  (b) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Rp1.368.708.010,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan

kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya penganggaran belanja jasa konsultansi kontruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, sebagaimana dimaksud pada butir C.3.a.2).c).(2).(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

e) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Rp120.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 Rp120.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, namun dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan aspek efektivitas, efisiensi, serta kepatutan kepada penerima beasiswa dalam rangka menunjang Prioritas Daerah dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 yaitu pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 dan butir C.3.a.2).c).(2).(i).1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

f) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp2.224.425.918,00 atau 0,23% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang salah satu diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja:

- Belanja Bimbingan Teknis Rp958.643.918,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran, mengingat untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar diprioritaskan pelaksanaannya di wilayah yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud pada butir C.3.a.2).c).(2).(i).ii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektifitas penggunaan anggaran daerah.

Selanjutnya, dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi serta efisiensi pembiayaan dalam kegiatan kedinasan seperti konsultasi, rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual maupun hybrid sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(i).iv. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

3) Belanja Pemeliharaan Rp4.151.367.245,00 atau 0,42% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD TA 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:

a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp2.954.915.899,00 atau 0,30%, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja:

(1) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya Rp606.800.000,00;

(2) Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya Rp547.985.820,00;

b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp1.144.281.346,00 atau 0,12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja:

- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp929.147.446,00;

c) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp52.170.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja:

- Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya Rp52.170.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir C.3.a.2).c).(3).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

4) Belanja Perjalanan Dinas Rp58.162.485.837,00 atau 5,91% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp58.063.699.006,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp712.460.000,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;

(2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp881.268.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat pada Sekretariat Daerah;

(3) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp892.380.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu pada Sekretariat Daerah;

(4) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp1.902.990.000,00 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Sekretariat Daerah;

(5) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp1.879.082.000,00 pada Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pada Sekretariat DPRD;

(6) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp1.250.393.000,00 pada Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD pada Sekretariat DPRD;

(7) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp1.097.078.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses pada Sekretariat DPRD;

(8) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp4.397.180.000,00 pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD pada Sekretariat DPRD;

Selanjutnya, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp38.856.111.468,00;

(2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp19.146.497.538,00;

(3) Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota Rp61.090.000,00;

b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Rp98.786.831,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri Rp98.786.831,00:

harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting, dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan butir C.3.a.2).c).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Penyediaan anggaran pada belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta sesuai butir C.3.a.2).c).(4).(a).vi Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 untuk kegiatan yang bersifat *urgent* dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, antara lain telah memiliki perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan pihak luar negeri dan dalam pelaksanaannya juga harus berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(4).(b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran perjalanan dinas pada:

a) Sekretariat Daerah Rp2.402.488.900,00 atau 5,22% dari total belanja pada Sekretariat Daerah Rp46.044.095.386,00;

b) Sekretariat DPRD Rp4.560.511.000,00 atau 15,98% dari total belanja pada Sekretariat DPRD Rp28.543.047.795,00;

dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya; hasil rasionalisasi Belanja Perjalanan Dinas dimaksud dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi, mengalokasikan anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa, serta memenuhi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari total belanja daerah di luar belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

1) Belanja Hibah

Penganggaran Belanja Hibah Rp22.949.368.581,00 atau 2,33% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

a) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya Rp1.276.395.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya Rp1.276.395.000,00;

b) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp21.275.844.481,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp20.454.136.481,00;

(2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp216.708.000,00;

(3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp245.000.000,00;

(4) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp360.000.000,00;

c) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp397.129.100,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp397.129.100,00;

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas wajib menganggarkan belanja hibah untuk mendukung Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Tahun Anggaran 2024 sebesar 60% (enam puluh persen) atau sebesar Rp14.112.000.000,00 dari besaran total dana hibah yang disepakati bersama sebesar Rp23.520.000.000,00. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ Tanggal 29 September 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2) Belanja Bantuan Sosial

Penganggaran Belanja Bantuan Sosial Rp50.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Anambas tentang APBD TA 2024, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga Rp50.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta butir C.3.a.5).a) dan butir C.3.a.5).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas belum memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas serta untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi, mengalokasikan anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa, serta memenuhi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari total belanja daerah di luar belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas serta yang terkait langsung dengan pelayanan dasar kepada masyarakat, penyediaan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, serta memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut Objek, rincian Objek dan sub rincian Objek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta butir C.3.a.5).a) dan butir C.3.a.5).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian prosea evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, belanja hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum sedangkan belanja hibah yang sifatnya bukan menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah.

Khusus untuk nomenklatur nama penerima dan alamat dari belanja hibah dan bantuan sosial juga harus berpedoman pada nomenklatur belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang tercantum pada kelompok belanja operasi dalam RKPD, KUA dan PPAS. Berkaitan dengan itu belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Rp397.129.100,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik serta sebagaimana dimaksud pada butir C.3.a.5).a).(7).(b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

d. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal Rp130.427.594.369,00 atau 13,25% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp984.585.176.132,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana dimaksud pada butir C.3.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas minimal kapitalisasi aset, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dengan berpedoman pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.3.b.3) dan butir D.16.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada:

1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada; dan

2) Standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga.

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan butir C.3.b.8) dan butir D.16.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada:

1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp31.080.040.043,00 atau 3,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:
   a) Belanja Modal Alat Besar Rp2.694.235.425,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
      (1) Belanja Modal Alat Besar Darat Rp1.692.301.631,00;
      (2) Belanja Modal Alat Besar Apung Rp328.408.803,00;
      (3) Belanja Modal Alat Bantu Rp673.524.991,00.
   b) Belanja Modal Alat Angkutan Rp3.188.748.178,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
      (1) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp3.180.059.683,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
         (a) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang Rp156.020.500,00;
         (b) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp856.451.730,00;
         (c) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Rp117.587.453,00;
         (d) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus Rp2.050.000.000,00.
      (2) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Rp6.820.497,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
         - Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya Rp6.820.497,00;
   c) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp1.961.381.155,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
      (1) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp1.069.335.040,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
         (a) Belanja Modal Mebel Rp167.851.498,00;
         (b) Belanja Modal Alat Pendingin Rp512.278.758,00;
         (c) Belanja Modal Alat Dapur Rp16.808.138,00;
         (d) Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran Rp372.396.646,00;

(2) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp594.738.610,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek:

(a) Belanja Modal Meja Kerja Pejabat Rp288.723.967,00;

(b) Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat Rp190.817.001,00;

(c) Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Rp13.830.438,00;

(d) Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat Rp101.367.204,00;

d) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp116.685.719,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Alat Komunikasi Rp113.906.725,00;

(2) Belanja Modal Peralatan Pemancar Rp2.778.994,00;

e) Belanja Modal Komputer Rp5.222.981.689,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Komputer Unit Rp4.400.804.793,00;

(2) Belanja Modal Peralatan Komputer Rp822.176.896,00;

f) Belanja Modal Rambu-Rambu Rp188.353.165,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Rp188.353.165,00;

2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp38.455.319.336,00 atau 3,91% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam objek belanja:

- Belanja Modal Bangunan Gedung Rp38.455.319.336,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp38.455.319.336,00;

3) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp58.861.007.991,00 atau 5,98% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam objek belanja:

a) Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp45.651.316.378,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Jalan Rp42.729.514.354,00, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Modal Jalan Kabupaten Rp41.274.107.053,00;

(b) Belanja Modal Jalan Desa Rp1.455.407.301,00;

(2) Belanja Modal Jembatan Rp2.921.802.024,00, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek belanja:

- Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal Rp2.921.802.024,00;

b) Belanja Modal Bangunan Air Rp13.209.691.613,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp2.324.489.900,00, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi Rp2.324.489.900,00;

(2) Belanja Modal Bangunan Air Kotor Rp10.885.201.713,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor Rp10.885.201.713,00;

4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp2.000.000.000,00 atau 0,20% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS;

5) Belanja Modal Aset Lainnya Rp31.226.999,00 atau 0,003% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah dan butir C.3.b.10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel

dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp13.763.214.579,00 atau 1,40% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
   - Belanja Modal Alat Kedokteran Rp13.763.214.579,00;
2) Belanja Modal Alat Laboratorium Rp27.397.200,00 atau 0,003% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
   - Belanja Modal Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Rp27.397.200,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan serta penghematan penggunaan anggaran, serta menggunakan Pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan Keluaran yang diharapkan dari kegiatan, hasil dan manfaat yang diharapkan dan efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.

e. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada butir C.3.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga Rp2.000.000.000,00 atau 0,20% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2023 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat dipredikasi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

f. Belanja Transfer

Penganggaran Belanja Transfer Rp110.343.203.878,00 atau 11,21% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam objek belanja:

1) Belanja Bagi Hasil Rp2.721.026.472,00 atau 0,28% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja;

   - Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Rp2.721.026.472,00;

   Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas agar menyesuaikan alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa dimaksud sesuai dengan target pajak daerah yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan pelampauan target pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada Pemerintah Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Bab II Pasal 2 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa dan butir C.3.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

   Selanjutnya, besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dimaksud dianggarkan secara bruto sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.3.d.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

2) Belanja Bantuan Keuangan Rp107.622.177.406,00 atau 10,93% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

   a) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa Rp37.910.431.000,00;

   b) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa Rp69.711.746.406,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain, sebagaimana dimaksud Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, dalam pelaksanaannya agar Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan, sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hasil dari penghematan penggunaan anggaran tersebut dapat dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi, mengalokasikan anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa, serta memenuhi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari total belanja daerah di luar belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan

Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud butir C.3.d.2).b).14) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penyediaan alokasi pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp123.000.000.000,00, dirinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 17
Pembiayaan Daerah

Uraian	APBD TA 2022 (Rp)	APBD TA 2023 (Rp)	R-APBD TA 2024 (Rp)
1	2	3	4
PEMBIAYAAN DAERAH	**29.192.910.204,00**	**100.545.555.597,00**	**8.500.000.000,00**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**30.192.910.204,00**	**102.545.555.597,00**	**10.500.000.000,00**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	29.692.910.204,00	102.045.555.597,00	10.000.000.000,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjamana Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**1.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**
Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan pembiayaan Rp10.500.000.000,00. Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Rp10.000.000.000,00 atau 1,02% dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjamana Daerah sebesar Rp500.000.000,00 dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp984.585.176.132,00.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2024 dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada butir C.4.a.2).a).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS

Jumlah program dan kegiatan dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Tabel 18 sebagai berikut:

Tabel 18

Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RKPD, KUA dan PPAS

No.	Keterangan	RPJMD	RKPD 2024	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	KUA PPAS	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	R-APBD 2024	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)
1.	Jumlah Program	137	137	1.080.256.707.797,00	137	816.726.687.132,00	100	984.585.176.132,00
2.	Jumlah Kegiatan	-	245		243		168	
3.	Jumlah Sub Kegiatan	-	726		722		437	

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, terhadap kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan RKPD serta KUA dan PPAS, diuraikan pada kegiatan/sub kegiatan yang terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, KUA dan PPAS tetapi tidak terdapat dalam RKPD, antara lain pada:

1. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang tercantum pada Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan diuraikan pada Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya pada KUA dan PPAS sebesar Rp2.746.248.026,00 dan pada R-APBD sebesar Rp32.790.457.622,00;
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang tercantum pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dan diuraikan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan tugas Paskibraka pada KUA dan PPAS sebesar Rp499.999.988,00 dan pada R-APBD sebesar Rp1.200.067.707,00.

Selanjutnya terdapat kegiatan/sub kegiatan yang terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 tetapi tidak terdapat dalam KUA dan PPAS serta RKPD, antara lain pada:

1. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang tercantum pada Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota dan diuraikan pada Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan sebesar Rp10.581.530.873,00,00;
2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang tercantum pada Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal dan diuraikan pada Sub Kegiatan Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada *Stakeholders* dan Mitra Kerja sebesar Rp430.000.000,00.

Tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas agar konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan, KUA dan PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 disetujui bersama, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RPJMD

Kesesuaian program dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan RPJMD sebagaimana maksud Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan jumlah anggaran, yang tercantum dalam RPJMD pada Tahun 2024 Rp16.007.848.168.382,00 sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp984.585.176.132,00; dan

2. Jumlah program yang tercantum dalam RPJMD pada Tahun 2024 sejumlah 137 program dan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sejumlah 100 program.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas memperhatikan:

1. Jumlah anggaran dalam RPJMD bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daerah setiap tahun dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan program prioritas daerah dan dukungan terhadap prioritas nasional; dan
2. Jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada hasil fasilitasi RKPD Tahun 2024 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya, agar penyesuaian program mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Makro (IKM), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024-2028.

VI. REKOMENDASI

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga berpedoman pada antara lain sebagai berikut:

A. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam penyusunan rancangan RKPD, rancangan KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud pada butir C.1.k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

B. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor *riil* serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas menyediakan anggaran untuk:

1. Mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada butir E.2.ab.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
2. Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui Belanja Tidak Terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan;

sebagaimana maksud butir E.2:ab.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

C. Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan berpedoman pada Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

D. Penganggaran target pendapatan daerah dalam APBD meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

E. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

F. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia sesuai amanat Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

G. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mengalokasikan anggaran harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan serta penganggaran yang tidak tepat penggunaaanya agar disesuaikan kembali. Selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut agar dialihkan untuk mendanai kegiatan prioritas sesuai

kewenanagan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

H. Dalam hal terdapat peningkatan prognosis target pendapatan, rasionalisasi atas belanja, dan/atau sub rincian objek belanja yang tidak memiliki korelasi, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas agar mengalihkan penggunaannya untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi, mengalokasikan anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa, serta memenuhi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari total belanja daerah di luar belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Dalam hal terdapat penurunan prognosis target pendapatan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas memprioritaskan penggunaan alokasi anggaran untuk mendanai program dan kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD, RKPD serta KUA dan PAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas menganggarkan Tambahan Penghasilan ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada:

   1. Menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS.
   2. Mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP ASN.
   3. Pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP.

4. Mengingat relatif tingginya risiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mengacu kepada hasil evaluasi jabatan.

J. Alokasi anggaran percepatan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di Luar Belanja Modal Tanah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

K. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (*value for money*), Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus melakukan langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan melakukan lelang barang/jasa pada awal tahun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

L. Dalam rangka optimalisasi percepatan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk melakukan langkah-langkah strategis, antara lain:

1. Mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, secara bertahap melalui pengelolaan pajak dan retribusi dengan berbasis teknologi informasi.
2. Menyusun rencana kegiatan/sub kegiatan (*roadmap*) dengan penjadwalan secara periodik, konsisten, dan terukur.
3. Melakukan percepatan realisasi dengan tidak menunda administrasi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.
4. Untuk melakukan asistensi dan *monitoring* terhadap yang masih rendah penyerapan anggarannya.

dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

M. Dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai *(battery electric vehicle)* sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai *(Battery Electric Vehicle)* Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

N. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus mencantumkan kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Keadaan darurat meliputi:

1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak meliputi:

1. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

O. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, antara lain untuk:

1. Alokasi anggaran kesehatan dianggarkan dalam APBD, yang diarahkan untuk mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagaimana dimaksud butir E.1.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
2. Pencapaian SDG's, seperti: penanggulangan stunting, kesetaraan gender, penanggulangan HIV/AIDS, tuberculosis (TBC), malaria, penanggulangan kemiskinan, dan akses penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud butir E.1.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
3. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM sebagaimana dimaksud dalam butir E.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

4. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 dalam bentuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Alokasi anggaran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dianggarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.6.4/16779/Keuda tanggal 30 Oktober 2023 Hal Dukungan Anggaran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Tahun 2024;

6. Peningkatan efektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh gubernur, bupati/wali kota, dan camat di wilayah kerja masing-masing sebagaimana maksud dalam butir E.2.v.1).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

7. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mengalokasikan anggaran dalam rangka penurunan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (under weight) pada anak balita dan menurunnya prevalensi wasting (kurus) pada anak balita sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah;

8. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi/Kabupaten/Kota melalui:

   a. Upaya percepatan penurunan stunting melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar;

   b. Dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era *Digital* yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti *trafficking*, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual;

c. Mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan perkoperasian;

d. Mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka stunting, pencapaian pola pangan harapan dan antisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumah tangga;

e. Dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan *digital* untuk ibu/anak, Antropometri, *Thermometer*, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan norma keluarga kecil bahagia sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga, peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat;

f. Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Provinsi/Kabupaten/Kota dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi dan berpedoman pada nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi TP-PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan Stunting, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumah tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat TP-PKK Provinsi/Kabupaten/Kota, serta kegiatan lainnya; dan

h. Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah;

9. Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada Tahun 2024 berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

   a. Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah Kabupaten/Kota melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:

      1) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial;

      2) Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar;

      3) Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan;

      4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat;

      5) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota;

   b. Menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah Desa/Kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah Desa/Kelurahan melalui kegitan/sub kegiatan antara lain:

      1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;

      2) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

   c. Menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta mengalokasikan anggaran pada APBD Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (*by name by address*):

      1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;

      2) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota;

      3) Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi;

   d. Memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat;

   e. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali;

10. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 antara lain untuk Madrasah, pondok pesantren serta Pendidikan agama dan keagamaan di bawah binaan Kementerian Agama sebagai bagian

integral pendidikan nasional dan pengembangan budaya keagamaan dalam rangka peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

11. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rangka pelayanan kepada umat serta mewujudkan peningkatan kualitas akidah dan akhlak di daerah dalam bentuk belanja hibah, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan MUI;
12. Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional terutama untuk percepatan pemulihan ekonomi Nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menyediakan alokasi anggaran terkait dukungan percepatan pengembangan ekonomi syariah di daerah antara lain mendorong percepatan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), penyusunan peraturan daerah terkait pengembangan Ekonomi Syariah, memfasilitasi penyelenggaraan Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/Kota dalam bentuk belanja hibah sebagaimana maksud butir E.2.w.8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

P. Penganggaran kegiatan tahun jamak merupakan kegiatan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Kegiatan tahun jamak tersebut harus memenuhi kriteria paling sedikit:

1. Pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
2. Pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.

Selanjutnya, penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS, serta paling sedikit memuat:

1. nama Kegiatan;
2. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
3. jumlah anggaran; dan
4. alokasi anggaran per tahun.

Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Q. Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/ perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran dapat terjadi akibat:

1. Keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan;
2. Perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;
3. Keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan;
4. Kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap;

sebagaimana maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

R. Alokasi anggaran pendanaan kegiatan pemilihan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024 yang dibebankan pada APBD dianggarkan secara proporsional, sesuai beban kerja berdasarkan pelaksanaan tahapan, jadwal, dan program kegiatan pemilihan yang dimulai Tahun 2022, pada perangkat daerah Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan unsur Pemerintahan Umum di daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memelihara stabilitas politik dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penyediaan dana hibah Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, wajib dianggarkan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran total dana hibah yang disepakati bersama sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 29 September 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

S. Dalam rangka melaksanakan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk melaksanakan sekurang-kurangnya meliputi:

1. Menyelenggarakan DBON secara bertahap dengan berpedoman pada peta jalan DBON berdasarkan periode DBON.
2. Mengelola paling sedikit 1 (satu) cabang olahraga unggulan berdasarkan DBON.
3. Membentuk tim koordinasi tingkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan DBON di daerah.
4. Menyediakan anggaran yang bersumber dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian DBON yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Menyediakan dukungan anggaran dalam APBD dalam rangka pengukuran *Sport Development Index* (SDI) di daerah.

T. Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Kepulauan Riau ini, menjadi dasar penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

U. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur Kepulauan Riau ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Kepulauan Riau ini, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan kebenaran atas informasi dalam dokumen dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 BERDASARKAN HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD;

b. bahwa Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1384 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 telah dibahas bersama oleh Kepala Daerah yang melalui TAPD dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Persetujuan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Hasil Penyempurnaan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan anatara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tenang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Tahun 2020 Nomor 522);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 BERDASARKAN HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024.
KESATU	:	Persetujuan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Hasil Penyempurnaan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024.
KEDUA	:	Persetujuan Penetapan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
KETIGA	:	Penyempurnaan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daeeerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEEMPAT	:	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
KELIMA	:	Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 27 Desember 2023

KETUA DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

HASNIDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

JOHN AQUARIUS PUTRA, S.E., M.Si
NIP. 19730122 200312 1 007

Lampiran : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 5 Tahun 2023
Tanggal : 27 Desember 2023

PEMBAHASAN HASIL EVALUASI GUBERNUR TENTANG RANPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2024

NO	HASIL EVALUASI	HASIL PEMBAHASAN / PENYEMPURNAAN
1	2	3
I.	**TUJUAN EVALUASI** Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan: A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; B. Kepentingan umum; C. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).	
II.	**KEBIJAKAN UMUM** Berdasarkan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan Bupati, meliputi: A. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran	**II. KEBIJAKAN UMUM** Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam Menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 merujuk pada PP 12 Tahun 2019, Permendagri 77 Tahun 2020 dan Permendagri 15 Tahun 2023 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya.

	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang telah disetujui bersama antara Bupati dan DPRD, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan jadwal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana dimaksud pada butir D.1.a.7).h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. B. Kebijakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Selanjutnya, setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Alokasi belanja daerah dalam APBD merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dengan memperhatikan realisasi belanja daerah tahun anggaran sebelumnya. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dan tidak dilakukan berdasarkan	

		pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya, serta dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja Mandatory Spending serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana maksud butir A Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan sub Kegiatan yang konkrit dan tidak absurd untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam APBD, Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran, sebagaimana maksud butir C.1.n.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dimaksud dianggarkan secara bruto dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Selanjutnya, Anggaran	

		Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara, merupakan 1 (satu) kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.	

III.	**KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM**	**III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM**
	A. Kebijakan Pendapatan Daerah Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp976.085.176.132,00 harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Pendapatan Daerah dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas juga harus melakukan Reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi. kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri dari: 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp39.179.339.491,00 atau 4,01% dari total pendapatan daerah Rp976.085.176.132,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.	1. Penganggaran target PAD dalam Ranperda APBD Kabupaten Kepulauan Anambas TA. 2024 sudah melalui proses secara terukur berdasarkan potensi dari setiap sumber PAD yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perkiraan asumsi makro ekonomi dan dengan memperhitungkan realisasi PAD pada tahun-tahun sebelumnya.

		Untuk itu, penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD harus terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan didasarkan pada data potensi pendapatan asli daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas serta memperhatikan perkiraan asumsi makro. Selanjutnya, target Pendapatan Asli Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri dari: a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 1) Pajak Daerah Penganggaran target pendapatan pajak daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp22.559.538.747,00 atau 1,94% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan sebagai berikut: 1) Pajak Hotel Rp3.473.022.094,00; 2) Pajak Restoran Rp11.572.998.115,00; 3) Pajak Hiburan Rp173.509.307,00; 4) Pajak Reklame Rp79.500.000,00; 5) Pajak Penerangan Jalan Rp5.450.590.067,00; 6) Pajak Sarang Burung Walet Rp68.244.164,00; 7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp639.975.000,00; 8) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp545.200.000,00; 9) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp556.500.000,00. 2) Retribusi Daerah Penganggaran target pendapatan retribusi daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan	a. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sudah sampai pada tahapan evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Penganggaran target Pajak dan Retribusi Daerah pada Ranperda APBD Kabupaten Kepulauan Anambas TA. 2024 sudah mempodomani Ranperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah dimaksud, adapun pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi pada tahun anggaran 2024 akan dilakukan setelah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

	Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp4.650.745.981,00 atau 0,48% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan sebagai berikut: 1) Retribusi Jasa Umum Rp4.328.111.466,00; 2) Retribusi Jasa Usaha Rp272.634.515,00; 3) Retribusi Perizinan Tertentu Rp50.000.000,00. Target Retribusi dimaksud dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 apabila peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dan besaran tarifnya harus ditetapkan dalam peraturan daerah sebagaimana ditegaskan dalam butir C.2.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya, penetapan besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar	

		pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dan disusun berdasarkan: 1) Pasal 94 dan Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berkaitan dengan itu, dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi sebagaimana dimaksud pada butir C.2.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Penganggaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Kepulauan Anambas agar disesuaikan dengan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah Tahun 2023 dengan memperhatikan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah Tahun 2022. Selain itu, penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 memperhatikan: 1) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan	

		Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2) kebijakan fiskal nasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3) insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memenuhi ketentuan penggunaan hasil penerimaan pajak untuk kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud butir C.2.a.1).p) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yakni sebagai berikut: 1) Hasil penerimaan pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum; 2) Hasil penerimaan pajak rokok baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum;	

	3) Hasil penerimaan pajak air tanah dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi: a) Penanaman pohon; b) Pembuatan lubang atau sumur resapan; c) Pelestarian hutan atau pepohonan; dan d) Pengelolaan limbah. b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penganggaran target pendapatan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp1.318.019.763,00 atau 0,14% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Target pendapatan tersebut dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sampai dengan Tahun Anggaran 2023, dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi: 1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai Badan Usaha Milik Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;	

		2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu; 3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; 4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau 5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah. Dengan tetap memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah dan sebagaimana dimaksud pada butir C.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas juga harus melakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja bagi Badan/Lembaga/Pihak Ketiga yang tidak menunjukkan kinerja yang memadai (*performance based*), atau belum memberikan bagian laba yang signifikan atas penyertaan modal tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan disposal (penjualan aset) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dulu melakukan proses *due diligence* melalui lembaga approisal yang *certified* terkait hak dan kewajiban perusahaan tersebut, dan/atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh atau sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu	

lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp10.651.035.000,00 atau 1,09% terhadap total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, diuraikan ke dalam obyek pendapatan sebagai berikut:

1) Jasa Giro Rp1.020.000.000,00 atau 0,10% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman

		Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 2) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp390.915.000,00 atau 0,04% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 3) Pendapatan Denda Pajak Daerah Rp20.400.000,00 atau 0,002% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD TA 2024 dengan memedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).j) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 4) Pendapatan Denda Retribusi Daerah Rp15.300.000,00 atau 0,002% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan	

	Anambas tentang APBD TA 2024 dengan memedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf l Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).k) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 5) Pendapatan dari Pengembalian Rp9.167.700.000,00 atau 0,94% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD TA 2024 dengan memedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).m) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Rp36.720.000,00 atau 0,004% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD TA 2024 dengan memedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. 2. Pendapatan Transfer Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten	

Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp934.126.336.641,00 atau 95,70% dari total pendapatan daerah Rp976.085.176.132,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 antara lain diuraikan pada jenis pendapatan Transfer:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp878.478.687.066,00 atau 90% dari total pendapatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp976.085.176.132,00, yang diuraikan pada jenis pendapatan dana perimbangan yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan:

    1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp298.304.764.066,00, terdapat selisih lebih Rp160.157.714.066,00 dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;

    2) Dana Alokasi Umum Rp398.812.700.000,00 agar disesuaikan rinciannya dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;

    3) Dana Alokasi Khusus fisik Rp85.130.560.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;

    4) Dana Alokasi Khusus Non Fisik Rp47.661.230.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan

	Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024; 5) Dana Desa Rp37.910.431.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024; 6) Insentif fiskal Rp10.659.002.000,00, terdapat selisih lebih sebesar Rp10.659.002.000,00 dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah menyesuaikan alokasi Dana Perimbangan dimaksud dengan alokasi yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.b.5).a).(1), butir C.2.b.5).a).(2), butir C.2.b.5).a).(3), butir C.2.b.5).a).(4) dan butir C.2.b.5).a).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus menggunakan pendapatan dana transfer yang telah diarahkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya sesuai dan butir C.2.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.	

		Dalam hal penganggaran dana Transfer Ke Daerah (TKD), penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas melakukan penyesuaian atas penggunaan dana TKD dimaksud dengan melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Berkenaan dengan hal tersebut, penyesuaian penganggaran dana TKD berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp55.647.649.575,00 yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan: 1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Rp10.970.763.720,00; 2) Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp7.957.166.327,00; 3) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp25.258.857.245,00;	

		4) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Rp41.291.965,00; 5) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Rp11.419.570.318,00. Selanjutnya, untuk penggunaan obyek pendapatan pajak daerah harus memedomani ketentuan: 1) Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari hak Kabupaten/Kota, sebesar 30% (tiga puluh persen) dari target Pajak Kendaraan Bermotor dimaksud, yaitu harus dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan dalam butir C.2.a.1).p) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. 2) Pajak Rokok paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari hak Kabupaten/kota, sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari target Pajak Rokok dimaksud dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 3) Dalam rangka pelayanan kesehatan untuk masyarakat dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing masing daerah	

provinsi/kabupaten/kota. Pendapatan yang bersumber dari pajak rokok tersebut diutamakan digunakan dalam rangka perluasan cakupan peserta untuk penganggaran iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan Pemerintah Daerah dalam kepesertaan program jaminan kesehatan nasional menuju *Universal Health Coverage* (UHC), selain itu dapat juga digunakan untuk penganggaran bantuan iuran pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja yang didaftarkan Pemerintah Daerah, penganggaran bantuan iuran pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja kelas 3 (tiga) mandiri serta kontribusi iuran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sebagaimana dimaksud butir C.2.a.1).p).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

4) Dalam hal penetapan APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 mendahului penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada butir C.2.b.5).b).(1).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp2.779.500.000,00 atau 0,28% dari total

		pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan pada jenis Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Rp2.779.500.000,00 atau 0,28% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 setelah adanya kepastian penerimaan pendapatan dimaksud, yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi serta menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan serta C.2.c.1) dan butir C.2.c.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.	

B. Kebijakan Belanja Daerah

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp984.585.176.132,00.

Kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

1. Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 diuraikan sebagai berikut:

   a. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

      Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Rp541.665.195.090,00 atau 55,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, terdiri dari:

      1) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rp238.845.505.670,00 atau 24,26% dari total belanja daerah;

      2) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rp182.344.906.321,00 atau 18,52% dari total belanja daerah;

      3) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp79.591.362.549,00 atau 8,08% dari total belanja daerah;

      4) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp612.829.327,00 atau 0,06% dari total belanja daerah;

	5) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Rp33.049.938.216,00 atau 3,36% dari total belanja daerah; dan 6) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Rp7.220.653.007,00 atau 0,73% dari total belanja daerah. b. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Rp80.931.962.027,00 atau 8,22% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, terdiri dari: 1) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Rp673.860.000,00 atau 0,07% dari total belanja daerah; 2) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rp1.544.703.299,00 atau 0,16% dari total belanja daerah; 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Rp190.988.500,00 atau 0,02% dari total belanja daerah; 4) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Rp201.735.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah; 5) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Rp1.120.896.242,00 atau 0,11% dari total belanja daerah; 6) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp9.906.830.921,00 atau 1,01% dari total belanja daerah; 7) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rp5.399.917.655,00 atau 0,55% dari total belanja daerah;	

	8) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rp2.483.736.461,00 atau 0,25% dari total belanja daerah; 9) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Rp20.067.494.828,00 atau 2,04% dari total belanja daerah; 10) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Rp13.591.285.732,00 atau 1,38% dari total belanja daerah; 11) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Rp10.703.207.585,00 atau 1,09% dari total belanja daerah; 12) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Rp5.924.483.616,00 atau 0,60% dari total belanja daerah; 13) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Rp4.635.174.137,00 atau 0,47% dari total belanja daerah; 14) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Rp161.000.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah; 15) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Rp349.999.339,00 atau 0,04% dari total belanja daerah; 16) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Rp130.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah; 17) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Rp3.756.481.438,00 atau 0,38% dari total belanja daerah; dan 18) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Rp90.167.274,00 atau 0,01% dari total belanja daerah. c. Urusan Pemerintahan Pilihan Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Pilihan Rp27.702.851.224,00 atau 2,81% dari total belanja daerah	

dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, terdiri dari:

1) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Rp19.152.089.543,00 atau 1,95% dari total belanja daerah;

2) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Rp7.528.288.200,00 atau 0,76% dari total belanja daerah;

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Rp189.500.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah;

4) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Rp496.457.802,00 atau 0,05% dari total belanja daerah; dan

5) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Rp336.515.679,00 atau 0,03% dari total belanja daerah.

d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Rp86.887.514.181,00 atau 8,82% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, terdiri dari:

1) Sekretariat Daerah Rp49.720.733.386,00 atau 5,05% dari total belanja daerah; dan

2) Sekretariat DPRD Rp37.166.780.795,00 atau 3,77% dari total belanja daerah.

e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Rp169.399.303.185,00 atau 17,21% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, terdiri dari:

1) Perencanaan Rp14.138.635.785,00 atau 1,44% dari total belanja daerah;

	2) Keuangan Rp141.834.012.111,00 atau 14,41% dari total belanja daerah; 3) Kepegawaian Rp8.109.644.525,00 atau 0,82% dari total belanja daerah; 4) Pendidikan dan Pelatihan Rp1.278.694.200,00 atau 0,13% dari total belanja daerah; 5) Penelitian dan Pengembangan Rp333.215.194,00 atau 0,03% dari total belanja daerah; dan 6) Pengelolaan Perbatasan Rp3.705.101.370,00 atau 0,38% dari total belanja daerah. f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Alokasi anggaran Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Rp13.628.867.075,00 atau 1,38% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang dialokasikan pada Inspektorat Daerah Rp13.628.867.075,00 atau 1,38% dari total belanja daerah. g. Unsur Kewilayahan Alokasi anggaran Unsur Kewilayahan Rp39.707.922.633,00 atau 4,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang dialokasikan pada Kecamatan Rp39.707.922.633,00 atau 4,03% dari total belanja daerah. h. Unsur Pemerintahan Umum Alokasi anggaran Unsur Pemerintahan Umum Rp24.646.579.117,00 atau 2,50% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang dialokasikan pada Kesatuan Bangsa dan Politik Rp24.646.579.117,00 atau 2,50% dari total belanja daerah.	

	i. Non Urusan Alokasi anggaran Non Unsur Rp14.981.600,00 atau 0,002% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang dialokasikan pada Urusan Pemerintahan Bidang XX Rp14.981.600,00 atau 0,002% dari total belanja daerah. Berkenaan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mengalokasikan belanja daerah: a. Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana maksud Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan b. Disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut:	2. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan melakukan verifikasi kembali pendanaan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal, diantaranya: 2. SPM Bidang Pendidikan 3. SPM Bidang Kesehatan 4. SPM Bidang Pekerjaan Umum 5. SPM Bidang Perumahan Rakyat 6. SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 7. SPM Bidang Sosial

	a. SPM bidang Pendidikan Alokasi anggaran untuk belanja SPM bidang Pendidikan Rp10.288.368.632,00 atau 4,31% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sebesar Rp238.845.505.670,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut: 1) SPM Pendidikan Dasar dianggarkan Rp7.901.954.237,00 harus diprioritaskan 100% setiap tahun jumlah anak usia 7–15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar; 2) SPM Pendidikan Kesetaraan dianggarkan Rp245.840.000,00, harus diprioritaskan 100% setiap tahun jumlah anak usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan; 3) SPM Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dianggarkan Rp2.140.574.395,00 harus diprioritaskan 100% setiap tahun jumlah anak usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. b. SPM Kesehatan Alokasi anggaran untuk belanja SPM bidang Kesehatan Rp1.532.025.254,00 atau 0,84% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan sebesar Rp182.344.906.321,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan dengan kode rekening sebagai berikut:	

		1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dianggarkan Rp407.075.000,00 harus diprioritaskan sebesar 100% setiap tahun Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan kesehatan; 2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin dianggarkan Rp302.597.654,00 harus diprioritaskan sebesar 100% setiap tahun Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan; 3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir dianggarkan Rp5.280.000,00 harus diprioritaskan sebesar 100% setiap tahun Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan; 4) Pelayanan Kesehatan Balita dianggarkan Rp235.197.000,00 harus diprioritaskan sebesar 100% setiap tahun Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan; 5) Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar dianggarkan Rp160.555.000,00 harus diprioritaskan sebesar 100% setiap tahun Jumlah Warga Negara Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan; 6) Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif dianggarkan Rp261.200.600,00, harus diprioritaskan sebesar 100% setiap tahun Jumlah Warga Negara Usia Produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan; 7) Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut dianggarkan Rp18.400.000,00 harus diprioritaskan sebesar 100% setiap tahun Jumlah Warga Negara Usia Lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan; 8) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi belum dianggarkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, seharusnya diprioritaskan sebesar 100% setiap tahun Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan;	

	9) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus belum dianggarkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, seharusnya memprioritaskan sebesar 100% setiap tahun Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Mellitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan; 10) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat belum dianggarkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, seharusnya diprioritaskan sebesar 100% setiap tahun Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan; 11) Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis dianggarkan Rp125.400.000,00 harus diprioritaskan sebesar 100% setiap tahun Jumlah Warga Negara Terduga Tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan; 12) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV dianggarkan Rp16.320.000,00 harus diprioritaskan sebesar 100% setiap tahun Jumlah Warga Negara Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. c. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Alokasi anggaran untuk belanja SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp1.451.778.445,00 atau 1,82% dari total belanja Urusan	

		Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp79.591.362.549,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan dengan kode rekening sebagai berikut: 1) Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari dianggarkan Rp1.138.126.345,00 harus diprioritaskan sebesar 100% setiap tahun jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari; 2) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik dianggarkan Rp313.652.100,00 harus diprioritaskan sebesar 100% setiap tahun jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan. d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Alokasi anggaran untuk belanja SPM Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat Rp125.120.286,00 atau 20,42% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat sebesar Rp612.829.327,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan dengan kode rekening sebagai berikut: 1) Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum dianggarkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, seharusnya diprioritaskan 100% setiap tahun jumlah warga negara	

	yang memperoleh rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 2) Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah dianggarkan Rp125.120.286,00 harus diprioritaskan 100% setiap tahun jumlah warga negara yang memperoleh rumah layak huni. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. e. SPM Trantibumlinmas Alokasi anggaran untuk belanja SPM bidang Trantibumlinmas Rp524.170.426,00 atau 1,59% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sebesar Rp33.049.938.216,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan dengan kode rekening sebagai berikut: 1) Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dianggarkan Rp108.201.451,00, harus diprioritaskan 100% jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota; 2) Pelayanan Informasi Rawan Bencana belum dianggarkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, seharusnya diprioritaskan 100% jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana;	

		3) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dianggarkan Rp98.106.675,00, harus diprioritaskan 100% jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; 4) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dianggarkan Rp219.850.300,00, harus diprioritaskan 100% jumlah warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana; 5) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dianggarkan Rp98.012.000,00, harus diprioritaskan 100% jumlah warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota. f. SPM Sosial Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Sosial Rp233.045.000,00 atau 3,23% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial sebesar Rp7.220.653.007,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut: 1) Penyediaan dan Rehablitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota dan Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dianggarkan Rp233.045.000,00;	

	2) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota belum dianggarkan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan di Daerah Kabupaten/Kota.	
	3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Prioritas Nasional (PN) Tahun 2024 meliputi: a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp1.895.969.408,00 atau 0,19% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor energi, pertanian, perikanan dan kelautan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, industri pengolahan, dan pariwisata, didukung penguatan reformasi fiskal dan sistem keuangan, peningkatan kualitas investasi, ekspor, dan partisipasi dalam rantai produksi global, perbaikan sistem logistik, digitalisasi, ekonomi hijau.	3. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 di dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024.

		Pada Tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan adalah sebagai berikut: 1) Terwujudnya transisi energi dan peningkatan kualitas sumber daya ekonomi sebagai pendukung pembangunan yang berkelanjutan; 2) Terwujudnya percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui upaya revitalisasi industri dan penguatan daya saing usaha, dan penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN1, akan dilakukan melalui 8 (delapan) Program Prioritas (PP) yaitu sebagai berikut: 1) Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) (PP1), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024; 2) Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi (PP2), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024; 3) Peningkatan Ketersediaan, Akses, Dan Kualitas Konsumsi Pangan (PP3), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024; 4) Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan (PP4), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024; 5) Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi (PP5), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024;	

	6) Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi Di Sektor Riil, dan Industrialisasi (PP6), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024; 7) Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (PP7), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024; 8) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (PP8), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024. b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp187.520.703,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diarahkan untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pada Tahun 2024 diarahkan pada upaya mempercepat transformasi sosial dan ekonomi, memperkuat rantai produksi dan rantai nilai di tingkat wilayah memperkuat integrasi perekonomian domestik dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar, serta meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah. Sasaran pengembangan wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas pada periode 2020-2024 adalah menurunnya kesenjangan antar wilayah dan tetap menjaga momentum pertumbuhan. Selain itu, pengembangan wilayah didukung oleh kontribusi dari percepatan pengembangan kawasan yang diprioritaskan serta pengembangan sektor-sektor unggulan, dengan memperhatikan tata ruang dan tata kelola pembangunan, Pemeriantah Kabupaten Kepulauan Anambas menganggarkan pengembangan kawasan perkotaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten	

	Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp187.520.703,00. c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp12.395.123.633,00 atau 1,26% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diarahkan pada pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing merupakan salah satu modal dalam percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan sumber daya manusia Tahun 2024 difokuskan pada percepatan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2024 melalui keberlanjutan reformasi sistem kesehatan nasional, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, percepatan pemulihan pembelajaran, reformasi pendidikan keterampilan, dan reformasi sistem perlindungan sosial. Dalam rangka meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada Tahun 2024, yaitu sebagai berikut: 1) Memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan; 2) Reformasi sistem perlindungan sosial terutama untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; 3) Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 4) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; 5) Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; 6) Mengentaskan kemiskinan; dan 7) Meningkatkan produktivitas dan daya saing.	

		Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN3 tersebut akan dilakukan melalui 7 (tujuh) PP, yaitu: 1) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan (PP1), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024; 2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP2), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024; 3) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (PP3), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024; 4) Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (PP4), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024; 5) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (PP5), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024; 6) Pengentasan Kemiskinan (PP6), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024; 7) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (PP7), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024. d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp87.509.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diarahkan untuk Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan menjadi instrumen penting untuk membentuk karakter dan sikap mental	

		manusia Indonesia melalui internalisasi nilai-nilai esensial, yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan diarahkan melalui pendayagunaan kearifan lokal sebagai modal dasar untuk mewujudkan bangsa gang maju, berdaulat mandiri, dan berkepribadian. Pada Tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yaitu sebagai berikut: 1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya; 2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan; 3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial; 4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat; 5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa; dan 6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif. Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian sasaran PN4 dilakukan melalui 4 (empat) PP, yaitu sebagai berikut: 1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter (PP1), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024; 2) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia (PP2), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024;	

	3) Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial (PP3), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024; 4) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter (PP4), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024. e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp51.118.083.881,00 atau 5,19% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pembangunan infrastruktur Tahun 2024, sebagai pilar pendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, difokuskan pada percepatan pembangunan infrastrukur dasar dan konektivitas karena memiliki peran penting dalam mewujudkan upaya transformasi ekonomi tersebut. Sasaran dan indikator utama PN5 yaitu sebagai berikut: 1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar; 2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar; 3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan; 4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan; dan 5) Meningkatnya layanan infrastruktur TIK. Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian sasaran PN5 dilakukan melalui 5 (lima) PP, yaitu sebagai berikut: 1) Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024;	

	2) Infrastruktur Ekonomi (PP2), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024; 3) Infrastruktur Perkotaan (PP3), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024; 4) Energi dan Ketenagalistrikan (PP4), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024; 5) Transformasi Digital (PP5), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024; f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang difokuskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pelestarian lingkungan hidup, pencegahan kerusakan sumber daya alam, serta pengurangan risiko dan tangguh bencana, guna menopang produktivitas menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan. Pada Tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim yaitu sebagai berikut: 1) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; 2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim; 3) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap *baseline*.	

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran (PN6) terdiri dari 3 (tiga) PP, yaitu:

1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PP1), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (PP2), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
3) Pembangunan Rendah Karbon (PP3), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024;

g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp21.240.076.723,00 atau 2,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diarahkan pada upaya mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui perbaikan sistem hukum untuk mendorong kemudahan berusaha dan optimalisasi diplomasi ekonomi melalui penguatan kerja sama bilateral, regional, maupun global, termasuk kerja sama pembangunan internasional. Percepatan transformasi ekonomi juga didukung dengan pengelenggaraan pertahanan dan keamanan yang responsif, penguatan pengawasan sistem merit dan netralitas Aparatur Sipil Negara, pemindahan Aparatur Sipil Negara ke lbu Kota Nusantara, serta fokus pada peningkatan kualitas demokrasi khususnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak.

Pada Tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik (PN7) yaitu sebagai berikut:

1) Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga

	Demokrasi dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal; 2) Optimalnya Kebijakan Luar Negeri; 3) Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap; 4) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik; dan 5) Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN7 akan dilakukan melalui 5 (lima) PP, yaitu: 1) Konsolidasi Demokrasi (PP1), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024; 2) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (PP2), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024; 3) Penegakan Hukum Nasional (PP3), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024; 4) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (PP4), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024; 5) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (PP5), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mengalokasikan anggaran kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 agar merinci masing-masing Prioritas Nasional ke dalam Program Prioritas, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dan dan Peraturan	

	Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. 4. Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 tersebut. harus diupayakan untuk ditingkatkan dalam rangka mendukung sasaran utama pengembangan 2024 meliputi: a. Pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah; b. Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan; c. Meningkatnya kesempatan kerja, dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka. 5. Alokasi Anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas Pemerintah Provinsi Tahun 2024. 6. Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas daerah Tahun 2024 .	

	7. Dalam rangka pengendalian inflasi di daerah, serta mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat mengalokasikan anggaran tersebut secara memadai dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran pengendalian inflasi di daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp9.740.178.505,00 atau 0,99% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD TA 2024 dengan berpedoman pada butir E.2.ab.3).a). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. 8. Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut: a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan Jumlah alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan sebesar Rp244.388.876.938,00 atau 24,82% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp984.585.176.132,00.	8. Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. a. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi Pendidikan sekurangkurangnya 20% dari total belanja daerah.

		Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir E.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah, yang diprioritaskan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Anambas. b. Alokasi Anggaran untuk Infrastruktur Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengalokasikan Belanja infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024 mengalokasikan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik yaitu Belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah paling	b. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan menyesuaikan porsi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yaitu paling lambat sampai dengan Tahun Anggaran 2027.

	rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp134.578.961.614,00 atau 15,39% dari yang seharusnya Rp349.696.788.901,60, sesuai maksud butir E.1.c.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat menyesuaikan porsi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sekurang- kurangnya 40% (empat puluh persen) sampai dengan Tahun Anggaran 2027 c. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas setelah dikurangi gaji sebesar Rp10.745.911.891,00 atau 1,09% dari total belanja daerah sebesar Rp984.585.176.132,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, antara lain tercantum pada: 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Rp250.000.000,00; 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Rp1.078.864.191,00; 3) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Rp860.831.828,00. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah memenuhi alokasi anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, untuk mendanai program dan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan, meliputi kegiatan Pengawasan, Kegiatan Non Pengawasan, Sarana dan Prasarana Pengawasan	c. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran Pengawasan sekurangkurangnya 1% dari total belanja daerah.

		dan Kegiatan Reviu DAK Fisik yang bersumber dari alokasi 5% (lima persen) alokasi dana penunjang DAK Fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam rangka mendukung peningkatan integritas bagi penyelenggara Pemerintah Daerah guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan untuk pelaksanaan survei penilaian integritas dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada butir E.2.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Berkaitan dengan itu, untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan dimaksud, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari total belanja daerah, sebagaimana ditegaskan pada butir E.2.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya, Kabupaten Kepulauan Anambas mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi: 1) Kegiatan pengawasan, yaitu: a) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja;	

		b) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi Rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, RKA-SKPD; c) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah; d) Reviu Laporan Keuangan; e) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi Probity Audit, Reviu Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; f) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, pelaksanaan survei penilaian integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP Pengawasan prioritas nasional meliputi *monitoring* dan evaluasi Dana Desa, dan BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsive gender, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan, tindak lanjut	

	perjanjian kerja sama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi; 2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP. 3) Sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain. Sebagaimana ditegaskan pada butir E.2.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. d. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah Penyediaan anggaran yang tercantum pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia setelah dikurangi belanja pegawai dan belanja pemeliharaan sebesar Rp2.270.720.302,00 atau 0,23% dari total belanja daerah sebesar Rp984.585.176.132,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah, sebagaimana ditegaskan pada butir E.2.e. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun sebelumnya telah melebihi perhitungan tersebut di atas, pengalokasian anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah Tahun Anggaran	d. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 0,16% dari total belanja daerah.

	2024 Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran dimaksud. 9. Anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut: a. Alokasi Anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Penyediaan Anggaran TP-PKK sebesar Rp441.872.989,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dapat dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten/Kota melalui: 1) Upaya percepatan penurunan *stunting* melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar; 2) Dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti trafficking, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual; 3) Mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan perkoperasian; 4) Mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi	a. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).

		pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka stunting, pencapaian pola pangan harapan dan antisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumah tangga; 5) Dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan digital untuk ibu/anak, Antropometri, Thermometer, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga, peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat; 6) Pemberdayaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, yang meliputi: a) Penghayatan dan pengamalan Pancasila; b) Gotong royong; c) Pangan; d) Sandang; e) Perumahan dan tata laksana rumah tangga; f) Pendidikan dan keterampilan; g) Kesehatan; h) Pengembangan kehidupan berkoperasi;	

	i) Kelestarian lingkungan hidup; j) Perencanaan sehat; 7) Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8) Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi TP-PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan *Stunting*, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumah tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat TP-PKK Kabupaten, serta kegiatan lainnya. 9) Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memprioritaskan	

	melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada tabel pemetaan sebagaimana dimaksud pada butir E.2.ae Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. b. Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Penyediaan Anggaran sebesar Rp268.093.100,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan dan Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan. Dapat dianggarkan guna mendukung Peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Kabupaten, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Camat di wilayah kerja masing-masing sebagaimana amanat butir E.3.ai.4).i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. c. Alokasi Anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebesar Rp200.000.000,00 atau 0,02% dari total belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Telah memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, namun alokasi	b. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA). c. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk Pelaksanaan Forum Forum Kerukunan Umat Beragama.

	anggaran tersebut dinilai belum cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Kepulauan Anambas. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus mengupayakan penyediaan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan FKUB dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. d. Alokasi Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah Penyediaan Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp450.080.716.081,00 atau 99,92% dari Barang jasa dan belanja modal selain tanah sebesar Rp450.440.716.081,00, telah memenuhi alokasi anggaran penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah, sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tanggal 30 Maret 2022 dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada	d. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah.

	Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Tanggal 25 Februari 2022. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mengalokasikan alokasi anggaran penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tanggal 30 Maret 2022. e. Alokasi Anggaran untuk Penurunan Stunting Penyediaan anggaran untuk Penurunan Stunting Rp1.618.184.602,00 atau 0,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dalam rangka untuk penurunan stunting melalui. 1) Kegiatan yang mendukung intervensi gizi spesifik seperti pemberian suplemen dan makanan tambahan bagi ibu hamil, bayi dan balita; 2) Kegiatan yang mendukung intervensi gizi sensitive seperti penyediaan akses air minum layak, akses sanitasi layak, akses layanan kesehatan dan keluarga berencana dan pendampingan keluarga rawan stunting; 3) Kegiatan pendukung penanganan stunting, seperti kegiatan fasilitasi penataan dan pemberdayaan kelembagaan; dengan memprioritaskan belanja utamanya untuk kegiatan yang mendukung pemberian makanan tambahan dan suplemen gizi terutama untuk ibu hamil, bayi dan balita dengan berpedoman	e. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran dalam rangka penurunan prevalensi stunting. f. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan mempertahankan secara terus menerus dan konsisten

	pada butir C.1.m.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. f. Alokasi Anggaran untuk Bantuan Hukum Penyediaan anggaran yang tercantum pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Rp215.338.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada butir E.3.ad Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. g. Alokasi Anggaran untuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Penyediaan anggaran Belanja Hibah kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Anambas Rp100.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada butir E.2.w.8 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. h. Penyediaan anggaran yang bersumber dari BLUD, antara lain tercantum pada: 1) Belanja Pegawai BLUD Rp2.029.080.735,00; 2) Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp7.075.381.676,00; 3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp404.655.396,00; dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun	dalam mengalokasikan anggaran untuk Bantuan Hukum. g. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan dalam menganggarkan Belanja Hibah kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Anambas telah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. h. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan dalam menganggarkan Penyediaan anggaran yang bersumber dari BLUD telah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

	2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta butir E.2.s Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. i. Penyediaan anggaran yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), antara lain tercantum pada: 1) Belanja Barang dan Jasa BOS Rp6.500.000.000,00; 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Rp3.500.000.000,00; 3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Rp2.000.000.000,00; dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah dan butir C.2.b.5).a).(5).(e).ii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mengalokasikan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja antar SD dan SMP agar memedomani Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 258/P/2023 tentang Sekolah Penerima BOS Kinerja untuk Sekolah Penggerak dan Sekolah Berprestasi Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 259/P/2023 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Bagi Sekolah yang Memiliki Kemajuan Terbaik Tahun Anggaran 2023. j. Pendanaan sub kegiatan yang tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran sub kegiatan. Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:	i. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan dalam menganggarkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. j. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan melakukan verifikasi belanja tersebut sesuai dengan hasil evaluasi rancangan perda APBD TA. 2024.

	1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp282.842.004,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek "Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat" Rp13.830.438,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp127.124.526,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek "Belanja Modal Meja Kerja Pejabat" Rp12.064.790,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp993.915.020,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek "Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga" Rp58.162.889,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari suatu sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. k. Pendanaan kegiatan yang tidak menggambarkan proporsi capaian kinerja sub kegiatan. Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada: 1) Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rp2.192.007.300,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Biasa" Rp1.879.082.000,00 pada Sekretariat DPRD, diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan; 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik Rp587.197.300,00 yang antara lain	k. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan melakukan verifikasi belanja tersebut sesuai dengan hasil evaluasi rancangan perda APBD TA. 2024.

		diuraikan ke dalam sub rincian objek “Belanja Perjalanan Dinas Biasa” Rp363.956.000,00 dan “Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota” Rp87.500.000,00 pada Sekretariat DPRD, diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan; 3) Sub Kegiatan Pembahasan APBD Rp426.224.400,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek “Belanja Perjalanan Dinas Biasa” Rp325.132.000,00 pada Sekretariat DPRD, diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan; 4) Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan Rp390.009.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek “Belanja Perjalanan Dinas Biasa” Rp325.132.000,00 pada Sekretariat DPRD, diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan; 5) Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD Rp1.521.609.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek “Belanja Perjalanan Dinas Biasa” Rp1.250.393.000,00 pada Sekretariat DPRD, diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan; 6) Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD Rp440.883.476,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek “Belanja Perjalanan Dinas Biasa” Rp429.977.000,00 pada Sekretariat DPRD, diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan; 7) Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah Rp1.096.361.100,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek “Belanja Perjalanan Dinas Biasa” Rp741.038.000,00 dan “Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota” Rp343.100.000,00 pada Sekretariat DPRD, diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan	

	8) Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Rp518.812.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek “Belanja Perjalanan Dinas Biasa” Rp407.800.000,00 pada Sekretariat DPRD, diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan; 9) Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rp1.760.444.900,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek “Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota” Rp1.097.078.000,00 pada Sekretariat DPRD, diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan; 10) Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Rp4.462.500.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek “Belanja Perjalanan Dinas Biasa” Rp4.397.180.000,00 pada Sekretariat DPRD, diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan; 11) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp225.424.210,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek “Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor” Rp29.467.600,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan; 12) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp265.894.126,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek “Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor” Rp61.408.840,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan; 13) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp97.736.269,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek “Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor” Rp37.608.465,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,	

	diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan; 14) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp85.750.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek "Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor" Rp18.146.200,00 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan; 15) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp118.306.853,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek "Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor" Rp51.479.269,00 pada Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan, diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan; 16) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp178.923.234,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek "Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor" Rp39.918.570,00 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan; tidak memiliki korelasi langsung dan tidak mendukung keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memformulasikan kembali alokasi anggaran tersebut dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran, sehingga mendukung keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud dengan berpedoman pada Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	

	10. Belanja Operasi Penyediaan anggaran Belanja Operasi Rp741.814.377.885,00 atau 75,34% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Anambas Rp984.585.176.132,00 dalam APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada obyek belanja: a. Belanja Pegawai Jumlah alokasi Belanja Pegawai Rp398.801.887.592,00 atau 40,50% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, selanjutnya alokasi belanja pegawai di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD belum memenuhi ketentuan Rp381.001.152.632,00 atau 38,70% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. sebagaimana dimaksud pada butir C.3.a.1).f), Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.	a. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mengalokasikan Belanja Pegawai sesuai kebutuhan nyata selama satu tahun anggaran dengan mempertimbangkan rencana kenaikan gaji pokok, pemberian gaji 13, THR, kenaikan pangkat PNS, kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga dan pengangkatan PPPK. Dalam hal persentase belanja pegawai daerah yang melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Penganggaran jaminan kesehatan, kecelakaan kerja dan kematian juga sudah dihitung kebutuhannya selama satu tahun anggaran. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan mengalokasikan belanja jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kdh/WKdh dan Anggota DPRD. Penganggaran TPP PNS telah mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

		Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain tercantum pada: 1) Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN Rp173.339.981.766,00 atau 17,61% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran agar memperhitungkan kebutuhan aggaran dimaksud secara cukup untuk kebutuhan 1 (satu) tahun anggaran dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2024, kewajiban penggajian pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun sebelumnya sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai butir C.3.a.1).h).(3), butir C.3.a.1).h).(4), butir C.3.a.1).h).(5) dan butir C.3.a.1).h).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. 2) Penganggaran Belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian yang tercantum pada:	Penganggaran Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah dihitung sesuai dengan kebutuhannya nyata selama satu tahun anggaran dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

	a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta ASN sebagai berikut: 1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp11.632.848.116,00 yang diperuntukkan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024. besaran alokasi anggaran iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan ASN seharusnya Rp13.308.523.386,12 atau terdapat selisih kurang Rp1.675.675.270,12. 2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD Rp40.874.000,00, yang diperuntukkan bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Besaran alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD seharusnya Rp52.331.916,00 atau terdapat selisih kurang Rp11.457.916,00. 3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp8.100.000,00 yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Besaran alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, belum sesuai dengan ketentuan	

		peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH seharusnya Rp6.842.000,00 atau terdapat selisih lebih Rp1.258.000,00. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas agar menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN, pimpinan dan anggota DPRD dan KDH/WKDH dengan memedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir C.3.a.1).h).(4) serta butir C.3.a.1).h).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas agar dapat menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam bentuk Penganggaran iuran jaminan kesahatan sebagaimana dimaksud butir C.3.c.2.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;	

		b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta ASN sebagai berikut: (1) Penyediaan alokasi anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, diuraikan pada: (a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp265.000.000,00; (b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp685.000.000,00; belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN seharusnya: (a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, yaitu 0,24% dari gaji pokok Rp290.609.740,10 atau terdapat selisih kurang Rp25.609.740,10; (b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN, yaitu 0,72% dari gaji pokok Rp871.829.220,31 atau terdapat selisih kurang Rp186.829.220,31. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas agar menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian bagi ASN dengan berpedoman pada Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah	

		diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan butir C.3.a.1).h).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. (2) Penyediaan alokasi anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH dan DPRD, diuraikan pada: (a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Rp112.320,00; (b) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH Rp336.960,00; (c) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD Rp2.000.000,00; (d) Belanja Jaminan Kematian DPRD Rp4.500.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang	

		Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan butir C.3.a.1).h).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. c) Penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan DPRD; Rp220.000.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7807/SJ tanggal 2 November 2017 Hal Penjelasan terhadap lmplementasi Substansi serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana	

	Operasional, sesuai butir C.3.a.2).c).(2).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain: a) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp10.812.313.520,00, yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain diuraikan pada: (1) Belanja Uang Representasi DPRD Rp462.572.250,00; (2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp654.370.500,00; (3) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp74.358.900,00; (4) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD Rp24.481.800,00; (5) Belanja Tunjangan Komunikasi lntensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp2.520.000.000,00; (6) Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp630.000.000,00; (7) Penyediaan alokasi belanja yang tercantum dalam rincian objek belanja: (a) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD Rp3.001.200.000,00; (b) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp3.042.000.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memedomani pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam	

		Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional. Sepanjang Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD memedomani ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, serta dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, alokasi anggaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi juga harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah. b) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp201.600.000,00, dalam Rancangan Peraturan Daerah	

		Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Alokasi anggaran Dana Operasional Pimpinan DPRD dimaksud dalam rangka menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, dengan memedomani amanat Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional. 4) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Rp317.805.560,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, terdapat selisih lebih anggar sebesar Rp4.370.844,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus menyesuaikan Kembali Belanja Dana Operasional KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan penentuan besarannya disesuaikan dengan berpedoman dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor	

		109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu di atas Rp20.000.000.000,00 s/d Rp50.000.000.000,00 paling rendah Rp300.000.000,00 dan paling tinggi 0,80% dari target PAD sebesar Rp39.179.339.491,00 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 5) Tambahan Penghasilan ASN Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp181.814.540.576,00 atau 18,47% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek belanja: - Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp94.506.336.360,00; dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.3.a.1).c).(7).(a), butir C.3.a.1).c).(7).(b), butir C.3.a.1).c).(7).(c), butir C.3.a.1).c).(7).(d), dan butir C.3.a.1).c).(7).(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.	

		Selanjutnya, alokasi anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Tahun Anggaran 2024 Rp181.814.540.576,00, dalam rangka tertib administrasi dan kepastian pemberian TPP kepada ASN, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tidak lagi mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri apabila tidak terdapat perubahan besaran nominal alokasi TPP ASN TA 2024 sebagaimana butir C.3.a.1).c).(7).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Selain itu, kebijakan pemberian TPP ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 juga memperhatikan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sesuai butir C.3.a.1).c).(7).(b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. 6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp30.047.214.280,00 atau 3,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Rp12.896.945.760,00;	

		b) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASN Rp3.881.789.200,00,00; c) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASN Rp1.022.000.000,00; d) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN Rp439.315.062,00; e) Belanja Honorarium Rp10.348.074.016,00yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp9.925.712.000,00; (2) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp2.720.000,00; (3) Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Rp419.642.016,00. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran dimaksud agar lebih rasional dan memperhitungkan kebutuhan aggaran dimaksud secara cukup untuk kebutuhan 1 (satu) tahun anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada: a) Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk insentif pajak daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya, Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2024 melalui DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi	

		daerah, insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa belanja jasa pengelolaan BMD serta honorarium yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada butir C.2.b.5).a).(5).(e).iii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Berkaitan dengan itu, pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah hanya dapat diberikan kepada penerima insentif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk insentif pajak daerah dan retribusi daerah apabila terlibat dalam kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta dalam pelaksanaannya berdasarkan kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah. b) Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan butir C.1.m.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.	

	Berkaitan dengan itu, penganggaran honorarium agar memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, dan kewajaran dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah b. Belanja Barang dan Jasa Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa Rp320.013.121.712,00 atau 32,50% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.3.a.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang antara lain tercantum pada objek belanja: 1) Belanja Barang Penganggaran Belanja Barang Rp65.663.846.891,00 atau 6,67% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan	1) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mengalokasikan belanja barang telah memperhitungkan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD Tahun Anggaran 2024.

		Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja: - Belanja Barang Pakai Habis Rp64.607.391.925,00 atau 6,56% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja: (1) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp3.825.505.021,00; (2) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran Rp643.428.504,00; (3) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp1.086.178.744,00; (4) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan *Cover* Rp1.778.703.880,00; (5) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp3.416.064.011,00; (6) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp646.726.723,00; (7) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp1.317.731.544,00; (8) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp631.880.374,00; (9) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp3.518.584.226,00; (10) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata Rp696.286.940,00;	

		(11) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp1.209.251.000,00; (12) Belanja Obat-Obatan-Obat Rp7.431.619.392,00,00; (13) Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya Rp5.590.171.625,00; (14) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp14.756.816.855,00; (15) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp100.000.000,00; (16) Belanja Natura dan Pakan-Natura Rp2.331.921.583,00; (17) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp4.987.862.051,00; (18) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp2.020.106.883,00; (19) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp4.642.028.672,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya memedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas	

		Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan butir C.3.a.2).c).(1).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Penyediaan anggaran tersebut tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp14.756.816.855,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD serta memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan berpedoman pada Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana dimaksud pada butir C.3.a.2).c).(1).(a), butir C.3.a.2).c).(1).(b) dan butir C.3.a.2).c).(1).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana	

		dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penyediaan alokasi anggaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp873.780.000,00 atau 0,09% dari total belanja daerah, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp594.980.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: - Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Rp414.680.000,00; b) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp278.800.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: - Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp203.800.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam butir C.3.a.2).c).(5).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman	

	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan, sebagaimana dimaksud pada butir C.3.a.2).c).(5).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. 2) Belanja Jasa Belanja Jasa Rp177.586.260.063,00 atau 18,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja: a) Belanja Jasa Kantor Rp150.522.245.015,00 atau 15,29% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja: (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp3.600.382.450,00; (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp5.745.440.000,00; (3) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Rp612.046.938,00; (4) Honorarium Rohaniwan Rp773.700.000,00;	2) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mengalokasikan belanja jasa telah memperhitungkan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.

		(5) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Rp738.000.000,00; (6) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Rp14.944.865.711,00; (7) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Rp900.063.864,00; (8) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Rp5.728.223.112,00; (9) Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Rp2.575.023.520,00; (10) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana Rp4.608.270.168,00; (11) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan Rp1.849.514.280,00; (12) Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp73.355.065.717,00; (13) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp4.252.619.864,00; (14) Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp3.639.887.160,00; (15) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp7.295.498.625,00; (16) Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp1.486.947.200,00; (17) Belanja Jasa Tenaga Supir Rp1.523.258.612,00; (18) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Rp4.477.200.000,00; (19) Belanja Jasa Operator Kapal Rp2.190.050.912,00; (20) Belanja Tagihan Listrik Rp3.792.002.012,00;	

		(21) Belanja Kawat/Faximili/Internet/TV Berlangganan Rp3.172.290.752,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 namun dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya, belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan sub kegiatan. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya, dalam mengalokasikan anggaran dimaksud memperhitungkan kebutuhan anggaran secara cukup untuk kebutuhan 1 (satu) tahun anggaran, mengingat penyediaan anggaran tersebut merupakan belanja yang sifatnya rutinitas dan merupakan kewajiban kepada pihak ke tiga yang harus dipenuhi dan diselesaikan oleh Pemerintah daerah setiap bulannya yang penganggarannya	

		pada masing-masing pada SKPD Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana dimaksud pada butir C.3.a.2).c).(2).(a).i.ii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Selain itu, penyediaan anggaran yang tercantum dalam sub rincian obyek belanja Honorarium Rohaniwan Rp773.700.000,00 hanya diperkenankan untuk mencatat honorarium rohaniwan yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah Jabatan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar menyesuaikan kembali menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp13.132.362.317,00 atau 1,33% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang	

		APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja: (1) Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI Rp3.591.457.168,00; (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 Rp705.600.000,00; Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), bagi seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain peserta JKN yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan JKN guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana dimaksud pada butir C.3.a.2).c).(2).(b).v.vii) dan C.3.a.2).c).(2).(b).vi Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya Penyediaan anggaran yang tercantum pada: (1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp7.874.608.638,00; (2) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp478.607.311,00; (3) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp482.089.200,00;	

		dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 bagi pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah antara lain Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan kesehatan, perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat, serta sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud pada butir C.3.a.2).c).(2).(b).i, butir C.3.a.2).c).(2).(d) dan butir C.3.a.2).c).(2).(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada: (1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp2.368.025.153,00 atau 0,24% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja: - Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Rp1.978.817.000,00; (2) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp5.425.758.922,00 atau 0,55% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja: (a) Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor Rp3.347.821.107,00;	

		(b) Belanja Sewa Bangunan Gudang Rp1.002.206.214,00; dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan untuk mendanai kegiatan prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, terutama difokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah dan pada jenis belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sebagaimana amanat Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun	

		2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah serta pada butir C.3.a.2).c).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. d) Penyediaan anggaran yang tercantum pada: - Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp3.676.654.716,00 atau 0,37% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (a) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Rp680.765.568,00; (b) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Rp1.368.708.010,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik di bidang perencanaan dan pelaksanaan	

		pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya penganggaran belanja jasa konsultansi kontruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, sebagaimana dimaksud pada butir C.3.a.2).c).(2).(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. e) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Rp120.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: - Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 Rp120.000.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, namun dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan aspek efektivitas, efisiensi, serta kepatutan kepada penerima beasiswa dalam rangka menunjang Prioritas Daerah dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 yaitu pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 dan butir C.3.a.2).c).(2).(i).i. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman	

		Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. f) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp2.224.425.918,00 atau 0,23% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang salah satu diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja: - Belanja Bimbingan Teknis Rp958.643.918,00; dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran, mengingat untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar diprioritaskan pelaksanaannya di wilayah yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud pada butir C.3.a.2).c).(2).(i).ii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi	

	narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektifitas penggunaan anggaran daerah. Selanjutnya, dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi serta efisiensi pembiayaan dalam kegiatan kedinasan seperti konsultasi, rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual maupun hybrid sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(i).iv. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. 3) Belanja Pemeliharaan Rp4.151.367.245,00 atau 0,42% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD TA 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja: a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp2.954.915.899,00 atau 0,30%, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja: (1) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya Rp606.800.000,00; (2) Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya Rp547.985.820,00; b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp1.144.281.346,00 atau 0,12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Anambas	3) Pemerintah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mengalokasikan belanja pemeliharaan telah memperhitungkan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD Tahun Anggaran 2024.

		tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja: - Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp929.147.446,00; c) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp52.170.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja: - Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya Rp52.170.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir C.3.a.2).c).(3).(a) Lampiran	4) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan melakukan verifikasi ulang terkait belanja tersebut sesuai dengan hasil evaluasi rancangan perda APBD Tahun 2024.

	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. 4) Belanja Perjalanan Dinas Rp58.162.485.837,00 atau 5,91% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp58.063.699.006,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp712.460.000,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana; (2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp881.268.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat pada Sekretariat Daerah; (3) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp892.380.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu pada Sekretariat Daerah; (4) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp1.902.990.000,00 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Sekretariat Daerah; (5) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp1.879.082.000,00 pada Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pada Sekretariat DPRD; (6) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp1.250.393.000,00 pada Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD pada Sekretariat DPRD;	

	(7) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp1.097.078.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses pada Sekretariat DPRD; (8) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp4.397.180.000,00 pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD pada Sekretariat DPRD; Selanjutnya, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp38.856.111.468,00; (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp19.146.497.538,00; (3) Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota Rp61.090.000,00; b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Rp98.786.831,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri Rp98.786.831,00: harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting, dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya	

		dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan butir C.3.a.2).c).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Penyediaan anggaran pada belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta sesuai butir C.3.a.2).c).(4).(a).vi Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 untuk kegiatan yang bersifat *urgent* dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, antara lain telah memiliki perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan pihak luar negeri dan dalam pelaksanaannya juga harus berpedoman	

		pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(4).(b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran perjalanan dinas pada: a) Sekretariat Daerah Rp2.402.488.900,00 atau 5,22% dari total belanja pada Sekretariat Daerah Rp46.044.095.386,00; b) Sekretariat DPRD Rp4.560.511.000,00 atau 15,98% dari total belanja pada Sekretariat DPRD Rp28.543.047.795,00; dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya, hasil rasionalisasi Belanja Perjalanan Dinas dimaksud dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi, mengalokasikan anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling	

	rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa, serta memenuhi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari total belanja daerah di luar belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial 1) Belanja Hibah Penganggaran Belanja Hibah Rp22.949.368.581,00 atau 2,33% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya Rp1.276.395.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya Rp1.276.395.000,00; b) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp21.275.844.481,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: (1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp20.454.136.481,00; (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp216.708.000,00;	c. Penganggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Rancangan APBD Tahun 2024 telah mempertimbangkan berdasarkan hasil verifikasi dari perangkat daerah terkait. Untuk penganggaran belanja hibah untuk pendanaan pilkada tahu 2024, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah menganggarkan belanja hibah untuk mendukung Pendanaan Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati pada Tahun Anggaran 2024 sebesar 60% (enam puluh persen) atau sebesar Rp14.112.000.000,00 dari besaran total dana hibah yang disepakati bersama sebesar Rp23.520.000.000,00 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ Tanggal 29 September 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

	(3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp245.000.000,00; (4) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp360.000.000,00; c) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp397.129.100,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: - Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp397.129.100,00; Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas wajib menganggarkan belanja hibah untuk mendukung Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Tahun Anggaran 2024 sebesar 60% (enam puluh persen) atau sebesar Rp14.112.000.000,00 dari besaran total dana hibah yang disepakati bersama sebesar Rp23.520.000.000,00. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ Tanggal 29 September 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 2) Belanja Bantuan Sosial Penganggaran Belanja Bantuan Sosial Rp50.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan	

	Daerah Kabupaten Anambas tentang APBD TA 2024, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga Rp50.000.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta butir C.3.a.5).a) dan butir C.3.a.5).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas belum memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas serta untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan/atau dalam rangka	

		pemenuhan alokasi belanja di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi, mengalokasikan anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa, serta memenuhi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari total belanja daerah di luar belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas serta yang terkait langsung dengan pelayanan dasar kepada masyarakat, penyediaan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, serta memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut Objek, rincian Objek dan sub rincian Objek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-	

		Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta butir C.3.a.5).a) dan butir C.3.a.5).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, belanja hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum sedangkan belanja hibah yang sifatnya bukan menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah. Khusus untuk nomenklatur nama penerima dan alamat dari belanja hibah dan bantuan sosial juga harus berpedoman pada nomenklatur belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang tercantum pada kelompok belanja operasi dalam RKPD, KUA dan PPAS. Berkaitan dengan itu belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	

		Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Rp397.129.100,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik serta sebagaimana dimaksud pada butir C.3.a.5).a).(7).(b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. d. Belanja Modal Penyediaan anggaran Belanja Modal Rp130.427.594.369,00 atau 13,25% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp984.585.176.132,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang	d. Pemerintah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mengalokasikan belanja modal telah memperhitungkan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD Tahun Anggaran 2024 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

		terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana dimaksud pada butir C.3.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas minimal kapitalisasi aset, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dengan berpedoman pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.3.b.3) dan butir D.16.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada: 1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada; dan 2) Standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan butir	

C.3.b.8) dan butir D.16.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada:

1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp31.080.040.043,00 atau 3,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:
   a) Belanja Modal Alat Besar Rp2.694.235.425,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
      (1) Belanja Modal Alat Besar Darat Rp1.692.301.631,00;
      (2) Belanja Modal Alat Besar Apung Rp328.408.803,00;
      (3) Belanja Modal Alat Bantu Rp673.524.991,00.
   b) Belanja Modal Alat Angkutan Rp3.188.748.178,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
      (1) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp3.180.059.683,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
         (a) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang Rp156.020.500,00;
         (b) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp856.451.730,00;
         (c) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Rp117.587.453,00;
         (d) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus Rp2.050.000.000,00.

(2) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Rp6.820.497,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

-Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya Rp6.820.497,00;

c) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp1.961.381.155,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp1.069.335.040,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Modal Mebel Rp167.851.498,00;

(b) Belanja Modal Alat Pendingin Rp512.278.758,00;

(c) Belanja Modal Alat Dapur Rp16.808.138,00;

(d) Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran Rp372.396.646,00;

(2) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp594.738.610,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek:

(a) Belanja Modal Meja Kerja Pejabat Rp288.723.967,00;

(b) Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat Rp190.817.001,00;

(c) Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Rp13.830.438,00;

(d) Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat Rp101.367.204,00;

	d) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp116.685.719,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: (1) Belanja Modal Alat Komunikasi Rp113.906.725,00; (2) Belanja Modal Peralatan Pemancar Rp2.778.994,00; e) Belanja Modal Komputer Rp5.222.981.689,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: (1) Belanja Modal Komputer Unit Rp4.400.804.793,00; (2) Belanja Modal Peralatan Komputer Rp822.176.896,00; f) Belanja Modal Rambu-Rambu Rp188.353.165,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek belanja: - Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Rp188.353.165,00; 2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp38.455.319.336,00 atau 3,91% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam objek belanja: - Belanja Modal Bangunan Gedung Rp38.455.319.336,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek belanja: - Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp38.455.319.336,00; 3) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp58.861.007.991,00 atau 5,98% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam objek belanja:	

a) Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp45.651.316.378,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Jalan Rp42.729.514.354,00, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Modal Jalan Kabupaten Rp41.274.107.053,00;

(b) Belanja Modal Jalan Desa Rp1.455.407.301,00;

(2) Belanja Modal Jembatan Rp2.921.802.024,00, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek belanja:

- Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal Rp2.921.802.024,00;

b) Belanja Modal Bangunan Air Rp13.209.691.613,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp2.324.489.900,00, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi Rp2.324.489.900,00;

(2) Belanja Modal Bangunan Air Kotor Rp10.885.201.713,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor Rp10.885.201.713,00;

4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp2.000.000.000,00 atau 0,20% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS;

		5) Belanja Modal Aset Lainnya Rp31.226.999,00 atau 0,003% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah dan butir C.3.b.10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan	

		Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada: 1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp13.763.214.579,00 atau 1,40% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: - Belanja Modal Alat Kedokteran Rp13.763.214.579,00; 2) Belanja Modal Alat Laboratorium Rp27.397.200,00 atau 0,003% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: - Belanja Modal Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Rp27.397.200,00; dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan serta penghematan penggunaan anggaran, serta menggunakan Pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan Keluaran yang diharapkan dari kegiatan, hasil dan manfaat yang diharapkan dan efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	e. Pemerintah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mengalokasikan belanja tidak terduga telah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

	Selain itu, dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat. e. Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada butir C.3.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga Rp2.000.000.000,00 atau 0,20% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2023 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. f. Belanja Transfer Penganggaran Belanja Transfer Rp110.343.203.878,00 atau 11,21% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan	f. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan melakukan verifikasi ulang terkait belanja tersebut sesuai dengan hasil evaluasi rancangan perda APBD Tahun 2024.

		Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam objek belanja: 1) Belanja Bagi Hasil Rp2.721.026.472,00 atau 0,28% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja; - Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Rp2.721.026.472,00; Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas agar menyesuaikan alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa dimaksud sesuai dengan target pajak daerah yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan pelampauan target pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada Pemerintah Desa, sebagaimana maksud Pasal 94 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bab II Pasal 2 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa dan butir C.3.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya, besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dimaksud dianggarkan secara bruto sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.3.d.2).a) Lampiran	

	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. 2) Belanja Bantuan Keuangan Rp107.622.177.406,00 atau 10,93% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa Rp37.910.431.000,00; b) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa Rp69.711.746.406,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain, sebagaimana dimaksud Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya agar Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan, sebagaimana	

	dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil dari penghematan penggunaan anggaran tersebut dapat dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi, mengalokasikan anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa, serta memenuhi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari total belanja daerah di luar belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud butir C.3.d.2).b).14) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. C. Kebijakan Pembiayaan Daerah Penyediaan alokasi pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp10.500.000.000,00.	C. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah melakukan verifikasi perhitungan secara cermat dan rasional terkait proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2024 dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran 2023.

	Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan pembiayaan Rp10.500.000.000,00. Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Rp10.000.000.000,00 atau 1,02% dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjamana Daerah sebesar Rp500.000.000,00 dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp984.585.176.132,00. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2024 dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada butir C.4.a.2).a).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.	
IV.	**KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS** Jumlah program dan kegiatan dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024. terhadap kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan RKPD serta KUA dan PPAS, diuraikan pada kegiatan/sub kegiatan yang terdapat	

	dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, KUA dan PPAS tetapi tidak terdapat dalam RKPD, antara lain pada: 1. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang tercantum pada Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan diuraikan pada Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya pada KUA dan PPAS sebesar Rp2.746.248.026,00 dan pada R-APBD sebesar Rp32.790.457.622,00; 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang tercantum pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dan diuraikan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan tugas Paskibraka pada KUA dan PPAS sebesar Rp499.999.988,00 dan pada R-APBD sebesar Rp1.200.067.707,00. Selanjutnya terdapat kegiatan/sub kegiatan yang terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 tetapi tidak terdapat dalam KUA dan PPAS serta RKPD, antara lain pada: 1. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang tercantum pada Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota dan diuraikan pada Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan sebesar Rp10.581.530.873,00,00; 2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang tercantum pada Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal dan diuraikan pada Sub Kegiatan Advokasi Program Bangga kencana oleh	1. Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan sub kegiatan untuk mengakomodir kegiatan yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus. 2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan amanat peraturan perundang-undangan, sehingga Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas wajib menganggarkan kegiatan tersebut. 1. Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan sub kegiatan untuk penanganan pasca bencana banjir di Kota Tarempa, yang apabila tidak dilaksanakan dikhawatirkan akan menimbulkan bencana serupa di kemudian hari. 2. Sub Kegiatan Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja pada Dinas

	pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja sebesar Rp430.000.000,00. Tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas agar konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan, KUA dan PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 disetujui bersama, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk	Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan sub kegiatan untuk mengakomodir kegiatan yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus.

	selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
V.	**KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RPJMD** Kesesuaian program dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan RPJMD sebagaimana maksud Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut: 1. Terdapat perbedaan jumlah anggaran, yang tercantum dalam RPJMD pada Tahun 2024 Rp16.007.848.168.382,00 sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp984.585.176.132,00; dan 2. Jumlah program yang tercantum dalam RPJMD pada Tahun 2024 sejumlah 137 program dan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sejumlah 100 program. Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas memperhatikan: 1. Jumlah anggaran dalam RPJMD bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daerah setiap tahun dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan program prioritas daerah dan dukungan terhadap prioritas nasional; dan 2. Jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada hasil fasilitasi RKPD Tahun 2024 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya, agar penyesuaian program mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Makro (IKM), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD)	1. Jumlah anggaran yang tercantum dalam RPJMD adalah sebesar Rp1.080.256.707.797,00. Adapun angka Rp16.007.848.168.382,00 merupakan penjumlahan keseluruhan anggaran program di masing-masing urusan pemerintahan pada lampiran VII ranperda APBD TA. 2024 dimana di setiap urusan terdapat Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang anggarannya terakumulasi dalam penjumlahan. 2. Penurunan jumlah program dari RPJMD ke Ranperda APBD TA. 2024 sebagai akibat dari menurunnya alokasi anggaran yang tersedia dalam Ranperda APBD TA. 2024.

	sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024-2028**.**	
VI.	**REKOMENDASI** Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga berpedoman pada antara lain sebagai berikut: A. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam penyusunan rancangan RKPD, rancangan KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud pada butir C.1.k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang	A. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam penyusunan rancangan RKPD, rancangan KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 telah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.	
	B. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor *riil* serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas menyediakan anggaran untuk: 1. mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada butir E.2.ab.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 2. pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui Belanja Tidak Terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan; sebagaimana maksud butir E.2.ab.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.	B. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan melakukan verifikasi kembali terkait penganggaran TPID dan pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat sesuai rekomendasi hasil evaluasi Ranperda APBD Tahun Anggaran 2024.
	C. Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan berpedoman pada Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.	C. Penganggaran jenis pajak dan retribusi daerah telah berpedoman pada Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
	D. Penganggaran target pendapatan daerah dalam APBD meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.	D. Penganggaran target pendapatan daerah dalam APBD telah berpedoman pada Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
	E. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan	E. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang

	Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	APBD Tahun Anggaran 2024 telah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	F. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia sesuai amanat Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	F. Dalam melakukan pengeluaran untuk belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan berpedoman pada Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
	G. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mengalokasikan anggaran harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan serta penganggaran yang tidak tepat penggunaaanya agar disesuaikan kembali. Selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut agar dialihkan untuk mendanai kegiatan prioritas sesuai kewenanagan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	G. Alokasi anggaran pada Ranperda APBD TA. 2024, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan.
	H. Dalam hal terdapat peningkatan prognosis target pendapatan, rasionalisasi atas belanja, dan/atau sub rincian objek belanja yang tidak memiliki korelasi, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas agar mengalihkan penggunaannya untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi, mengalokasikan anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling	H. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas akan mengalihkan penggunaannya untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024.

	rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa, serta memenuhi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari total belanja daerah di luar belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terdapat penurunan prognosis target pendapatan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas memprioritaskan penggunaan alokasi anggaran untuk mendanai program dan kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD, RKPD serta KUA dan PAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. I. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas menganggarkan Tambahan Penghasilan ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada: 1. Menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS. 2. Mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP ASN. 3. Pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP. 4. Mengingat relatif tingginya risiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dan/atau	I. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menganggarkan Tambahan Penghasilan ASN sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

	ASN di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mengacu kepada hasil evaluasi jabatan.	
	J. Alokasi anggaran percepatan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di Luar Belanja Modal Tanah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;	J. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menganggarkan Tambahan Penghasilan ASN sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	K. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (*value for money*), Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus melakukan langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan melakukan lelang barang/jasa pada awal tahun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	K. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah menganggarkan dan akan melakukan percepatan proses lelang barang jasa dan belanja modal sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	L. Dalam rangka optimalisasi percepatan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk melakukan langkah-langkah strategis, antara lain: 1. Mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, secara bertahap melalui pengelolaan pajak dan retribusi dengan berbasis teknologi informasi. 2. Menyusun rencana kegiatan/sub kegiatan (*roadmap*) dengan penjadwalan secara periodik, konsisten, dan terukur.	L. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas akan melakukan langkah-langkah strategis Dalam rangka optimalisasi percepatan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

	3. Melakukan percepatan realisasi dengan tidak menunda administrasi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan. 4. Untuk melakukan asistensi dan *monitoring* terhadap yang masih rendah penyerapan anggarannya. dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	M. Dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai *(battery electric vehicle)* sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai *(Battery Electric Vehicle)* Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.	M. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan mengikuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	N. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus mencantumkan kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Keadaan darurat meliputi: 1. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; 2. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 3. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Keperluan mendesak meliputi: 1. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 2. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;	N. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas akan mencantumkan kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

	3. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau 4. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. O. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024, antara lain untuk: 1. Alokasi anggaran kesehatan dianggarkan dalam APBD, yang diarahkan untuk mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagaimana dimaksud butir E.1.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 2. Pencapaian SDG's, seperti: penanggulangan stunting, kesetaraan gender, penanggulangan HIV/AIDS, tuberculosis (TBC), malaria, penanggulangan kemiskinan, dan akses penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud butir E.1.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 3. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM sebagaimana dimaksud dalam butir E.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 4. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 dalam bentuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perangkat	O. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 telah berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	Daerah terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. Alokasi anggaran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dianggarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.6.4/16779/Keuda tanggal 30 Oktober 2023 Hal Dukungan Anggaran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Tahun 2024; 6. Peningkatan efektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh gubernur, bupati/wali kota, dan camat di wilayah kerja masing-masing sebagaimana maksud dalam butir E.2.v.1).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 7. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mengalokasikan anggaran dalam rangka penurunan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (under weight) pada anak balita dan menurunnya prevalensi wasting (kurus) pada anak balita sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah; 8. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi/Kabupaten/Kota melalui:	

	a. Upaya percepatan penurunan *stunting* melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar; b. Dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era *Digital* yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti *trafficking*, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual; c. Mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan perkoperasian; d. Mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka stunting, pencapaian pola pangan harapan dan antisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumah tangga; e. Dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan digital untuk ibu/anak, Antropometri, Thermometer, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan norma keluarga kecil bahagia sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga, peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk	

	tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat; f. Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Provinsi/Kabupaten/Kota dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi dan berpedoman pada nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi TP-PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan *Stunting*, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumah tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat TP-PKK Provinsi/Kabupaten/Kota, serta kegiatan lainnya; dan h. Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah; 9. Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada Tahun 2024 berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut: a. Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah Kabupaten/Kota melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:	9. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas telah menganggarkan alokasi dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia.

	1) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial; 2) Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar; 3) Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan; 4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat; 5) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota; b. Menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah Desa/Kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah Desa/Kelurahan melalui kegitan/sub kegiatan antara lain: 1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota; 2) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; c. Menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta mengalokasikan anggaran pada APBD Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (*by name by address*): 1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; 2) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota; 3) Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi; d. Memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat; e. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali;	

	10. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 antara lain untuk Madrasah, pondok pesantren serta Pendidikan agama dan keagamaan di bawah binaan Kementerian Agama sebagai bagian integral pendidikan nasional dan pengembangan budaya keagamaan dalam rangka peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 11. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rangka pelayanan kepada umat serta mewujudkan peningkatan kualitas akidah dan akhlak di daerah dalam bentuk belanja hibah, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan MUI; 12. Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional terutama untuk percepatan pemulihan ekonomi Nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menyediakan alokasi anggaran terkait dukungan percepatan pengembangan ekonomi syariah di daerah antara lain mendorong percepatan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), penyusunan peraturan daerah terkait pengembangan Ekonomi Syariah, memfasilitasi penyelenggaraan Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 13. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/Kota dalam bentuk belanja hibah sebagaimana maksud butir E.2.w.8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;	10. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas telah menganggarkan kegiatan dalam mendukung pengembangan budaya keagamaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

	P. Penganggaran kegiatan tahun jamak merupakan kegiatan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Kegiatan tahun jamak tersebut harus memenuhi kriteria paling sedikit: 1. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau 2. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran. Selanjutnya, penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS, serta paling sedikit memuat: 1. nama Kegiatan; 2. jangka waktu pelaksanaan kegiatan; 3. jumlah anggaran; dan 4. alokasi anggaran per tahun. Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Q. Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/ perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran dapat terjadi akibat: 1. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan;	P. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tidak memiliki kegiatan tahun jamak.

	2. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa; 3. keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan; 4. kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap; sebagaimana maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. R. Alokasi anggaran pendanaan kegiatan pemilihan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024 yang dibebankan pada APBD dianggarkan secara proporsional, sesuai beban kerja berdasarkan pelaksanaan tahapan, jadwal, dan program kegiatan pemilihan yang dimulai Tahun 2022, pada perangkat daerah Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan unsur Pemerintahan Umum di daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memelihara stabilitas politik dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penyediaan dana hibah Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, wajib dianggarkan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran total dana hibah yang disepakati bersama sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 29 September 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024; S. Dalam rangka melaksanakan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021	R. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah menganggarkan dalam rangka pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak pada tahun 2024 sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

	tentang Desain Besar Olahraga Nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk melaksanakan sekurang-kurangnya meliputi: 1. Menyelenggarakan DBON secara bertahap dengan berpedoman pada peta jalan DBON berdasarkan periode DBON. 2. Mengelola paling sedikit 1 (satu) cabang olahraga unggulan berdasarkan DBON. 3. Membentuk tim koordinasi tingkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan DBON di daerah. 4. Menyediakan anggaran yang bersumber dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian DBON yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. 5. Menyediakan dukungan anggaran dalam APBD dalam rangka pengukuran *Sport Development Index* (SDI) di daerah. T. Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Kepulauan Riau ini, menjadi dasar penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. U. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur Kepulauan Riau ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. V. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Kepulauan Riau ini, berdasarkan	T. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan hasil evaluasi yang tertuang dalam Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Ranperbup tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024.

	dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan kebenaran atas informasi dalam dokumen dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.	

Ditetapkan di Tarempa
Pada Tanggal 27 Desember 2023

KETUA DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

HASNIDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

JHON AQUARIUS PUTRA, SE, M.Si
NIP. 19730122 200312 1 007

Lampiran I : Peraturan Daerah
Nomor : 05 Tahun 2023
Tanggal : 29 Desember 2023

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	**PENDAPATAN DAERAH**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**39.179.339.491,00**
4.1.01	Pajak Daerah	22.559.538.747,00
4.1.02	Retribusi Daerah	4.650.745.981,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.318.019.763,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.651.035.000,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**934.126.336.641,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	878.478.687.066,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	55.647.649.575,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**2.779.500.000,00**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2.779.500.000,00
	Jumlah Pendapatan	**976.085.176.132,00**
5	**BELANJA DAERAH**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**741.487.510.972,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	392.046.754.958,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	326.206.387.433,00
5.1.05	Belanja Hibah	23.184.368.581,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	50.000.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**130.754.459.281,00**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.106.904.955,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.755.319.336,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	58.861.007.991,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.000.000.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	31.226.999,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**2.000.000.000,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**110.343.205.879,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.721.028.473,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	107.622.177.406,00
	Jumlah Belanja	**984.585.176.132,00**
	Total Surplus/(Defisit)	**-8.500.000.000,00**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**10.500.000.000,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.000.000.000,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000,00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**2.000.000.000,00**
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	2.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**2.000.000.000,00**
	Pembiayaan Netto	**8.500.000.000,00**
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Kepulauan Anambas, 29 Desember 2023

Bupati

NIDUL HARIS

Lampiran II : Peraturan Daerah
Nomor : 05 Tahun 2023
Tanggal : 29 Desember 2023

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.077.611.466,00	421.237.618.317,00	123.724.160.773,00	0,00	0,00	544.961.779.090,00
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	0,00	213.666.288.494,00	25.179.217.176,00	0,00	0,00	238.845.505.670,00
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	0,00	213.666.288.494,00	25.179.217.176,00	0,00	0,00	238.845.505.670,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	7.027.611.466,00	141.611.853.250,00	43.733.053.071,00	0,00	0,00	185.344.906.321,00
1	02	1.02.2.14.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.027.611.466,00	123.088.156.441,00	43.153.334.706,00	0,00	0,00	166.241.491.147,00
1	02	1.02.2.14.0.00.01.1	RSUD Tarempa	0,00	4.037.090.722,00	145.048.684,00	0,00	0,00	4.182.139.406,00
1	02	1.02.2.14.0.00.01.10	Puskesmas Siantan Timur	0,00	724.147.565,00	0,00	0,00	0,00	724.147.565,00
1	02	1.02.2.14.0.00.01.11	Balai Pengelola Farmasi dan Alat Kesehatan (BPFAK)	0,00	191.534.160,00	0,00	0,00	0,00	191.534.160,00
1	02	1.02.2.14.0.00.01.12	Puskesmas Jemaja Barat	0,00	608.992.140,00	0,00	0,00	0,00	608.992.140,00
1	02	1.02.2.14.0.00.01.13	Puskesmas Siantan Utara	0,00	550.239.055,00	11.681.085,00	0,00	0,00	561.920.140,00
1	02	1.02.2.14.0.00.01.14	Puskesmas Kute Siantan	0,00	753.080.969,00	54.595.890,00	0,00	0,00	807.676.859,00
1	02	1.02.2.14.0.00.01.2	RSUD Jemaja	0,00	1.031.964.256,00	16.225.549,00	0,00	0,00	1.048.189.805,00
1	02	1.02.2.14.0.00.01.3	RSUD Palmatak	0,00	3.699.203.725,00	100.000.000,00	0,00	0,00	3.799.203.725,00
1	02	1.02.2.14.0.00.01.4	Puskesmas Siantan Tengah	0,00	1.165.697.963,00	0,00	0,00	0,00	1.165.697.963,00
1	02	1.02.2.14.0.00.01.5	Puskesmas Letung	0,00	1.097.658.989,00	74.333.546,00	0,00	0,00	1.171.992.535,00
1	02	1.02.2.14.0.00.01.6	Puskesmas Jemaja Timur	0,00	799.679.919,00	35.477.491,00	0,00	0,00	835.157.410,00
1	02	1.02.2.14.0.00.01.7	Puskesmas Palmatak	0,00	894.550.400,00	73.659.515,00	0,00	0,00	968.209.915,00
1	02	1.02.2.14.0.00.01.8	Puskesmas Tarempa	0,00	1.844.740.687,00	68.696.605,00	0,00	0,00	1.913.437.292,00
1	02	1.02.2.14.0.00.01.9	Puskesmas Siantan Selatan	0,00	1.125.116.259,00	0,00	0,00	0,00	1.125.116.259,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	50.000.000,00	26.425.554.231,00	53.462.392.318,00	0,00	0,00	79.887.946.549,00
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	50.000.000,00	25.504.924.503,00	53.389.107.026,00	0,00	0,00	78.894.031.529,00
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0001	UPTD SPAM SIANTAN	0,00	920.629.728,00	73.285.292,00	0,00	0,00	993.915.020,00
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	157.220.286,00	455.609.041,00	0,00	0,00	612.829.327,00
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	157.220.286,00	455.609.041,00	0,00	0,00	612.829.327,00
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0,00	32.256.823.771,00	793.114.445,00	0,00	0,00	33.049.938.216,00
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	0,00	7.863.154.278,00	619.008.666,00	0,00	0,00	8.482.162.944,00
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	11.966.836.132,00	174.105.779,00	0,00	0,00	12.140.941.911,00
1	05	1.05.8.01.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	12.426.833.361,00	0,00	0,00	0,00	12.426.833.361,00
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	0,00	7.119.878.285,00	100.774.722,00	0,00	0,00	7.220.653.007,00
1	06	1.06.2.08.0.00.03.0000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	7.119.878.285,00	100.774.722,00	0,00	0,00	7.220.653.007,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	709.309.030,00	77.696.507.114,00	4.488.202.674,00	0,00	0,00	82.184.709.788,00
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	0,00	848.244.000,00	0,00	0,00	0,00	848.244.000,00
2	07	2.17.2.07.3.30.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	0,00	848.244.000,00	0,00	0,00	0,00	848.244.000,00
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	1.694.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.694.000.000,00
2	08	1.06.2.08.0.00.03.0000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	1.694.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.694.000.000,00
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	0,00	158.687.292,00	32.301.208,00	0,00	0,00	190.988.500,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
2	09	3.25.3.27.2.09.01.0000	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN	0,00	158.687.292,00	32.301.208,00	0,00	0,00	190.988.500,00
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	0,00	135.151.000,00	0,00	0,00	0,00	135.151.000,00
2	10	1.03.1.04.2.10.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	135.151.000,00	0,00	0,00	0,00	135.151.000,00
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	0,00	1.046.091.211,00	39.164.950,00	0,00	0,00	1.085.256.161,00
2	11	2.15.2.11.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	568.750.411,00	39.164.950,00	0,00	0,00	607.915.361,00
2	11	2.15.2.11.0.00.01.2	UPT PENGELOLAAN SAMPAH	0,00	477.340.800,00	0,00	0,00	0,00	477.340.800,00
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	9.699.945.300,00	206.885.621,00	0,00	0,00	9.906.830.921,00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	9.699.945.300,00	206.885.621,00	0,00	0,00	9.906.830.921,00
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	5.837.504.625,00	208.064.090,00	0,00	0,00	6.045.568.715,00
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	5.837.504.625,00	208.064.090,00	0,00	0,00	6.045.568.715,00
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	2.483.736.461,00	0,00	0,00	0,00	2.483.736.461,00
2	14	1.02.2.14.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	2.075.947.000,00	0,00	0,00	0,00	2.075.947.000,00
2	14	1.02.2.14.0.00.01.10	Puskesmas Siantan Timur	0,00	334.567.163,00	0,00	0,00	0,00	334.567.163,00
2	14	1.02.2.14.0.00.01.7	Puskesmas Palmatak	0,00	73.222.298,00	0,00	0,00	0,00	73.222.298,00
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	100.000.000,00	16.792.575.049,00	3.310.559.860,00	0,00	0,00	20.103.134.909,00
2	15	2.15.2.11.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	100.000.000,00	16.056.759.092,00	3.300.589.461,00	0,00	0,00	19.357.348.553,00
2	15	2.15.2.11.0.00.01.1	UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI	0,00	735.815.957,00	9.970.399,00	0,00	0,00	745.786.356,00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	13.356.366.435,00	434.919.297,00	0,00	0,00	13.791.285.732,00
2	16	2.16.2.21.2.20.01.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	0,00	13.356.366.435,00	434.919.297,00	0,00	0,00	13.791.285.732,00
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	609.309.030,00	10.584.800.031,00	118.407.554,00	0,00	0,00	10.703.207.585,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
2	17	2.17.2.07.3.30.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	304.654.515,00	9.493.251.300,00	118.407.554,00	0,00	0,00	9.611.658.854,00
2	17	2.17.2.07.3.30.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	304.654.515,00	1.091.548.731,00	0,00	0,00	0,00	1.091.548.731,00
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	0,00	5.924.483.616,00	0,00	0,00	0,00	5.924.483.616,00
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	5.924.483.616,00	0,00	0,00	0,00	5.924.483.616,00
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0,00	4.635.174.137,00	0,00	0,00	0,00	4.635.174.137,00
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	0,00	4.635.174.137,00	0,00	0,00	0,00	4.635.174.137,00
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	0,00	161.000.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000.000,00
2	20	2.16.2.21.2.20.01.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	0,00	161.000.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000.000,00
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	0,00	261.077.334,00	88.922.005,00	0,00	0,00	349.999.339,00
2	21	2.16.2.21.2.20.01.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	0,00	261.077.334,00	88.922.005,00	0,00	0,00	349.999.339,00
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	0,00	280.000.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000.000,00
2	22	3.26.2.22.0.00.01.0000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	0,00	280.000.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000.000,00
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	0,00	3.707.503.349,00	48.978.089,00	0,00	0,00	3.756.481.438,00
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	0,00	3.707.503.349,00	48.978.089,00	0,00	0,00	3.756.481.438,00
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	0,00	90.167.274,00	0,00	0,00	0,00	90.167.274,00
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	0,00	90.167.274,00	0,00	0,00	0,00	90.167.274,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	0,00	27.076.361.244,00	626.489.980,00	0,00	0,00	27.702.851.224,00
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	18.899.022.981,00	253.066.562,00	0,00	0,00	19.152.089.543,00
3	25	3.25.3.27.2.09.01.0000	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN	0,00	18.899.022.981,00	253.066.562,00	0,00	0,00	19.152.089.543,00
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	0,00	7.154.864.782,00	373.423.418,00	0,00	0,00	7.528.288.200,00
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	0,00	7.154.864.782,00	373.423.418,00	0,00	0,00	7.528.288.200,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	0,00	189.500.000,00	0,00	0,00	0,00	189.500.000,00
3	27	3.25.3.27.2.09.01.0000	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN	0,00	189.500.000,00	0,00	0,00	0,00	189.500.000,00
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	0,00	496.457.802,00	0,00	0,00	0,00	496.457.802,00
3	30	2.17.2.07.3.30.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	0,00	496.457.802,00	0,00	0,00	0,00	496.457.802,00
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	0,00	336.515.679,00	0,00	0,00	0,00	336.515.679,00
3	31	2.17.2.07.3.30.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	0,00	336.515.679,00	0,00	0,00	0,00	336.515.679,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	86.451.392.145,00	436.122.036,00	0,00	0,00	86.887.514.181,00
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	0,00	49.471.958.392,00	248.774.994,00	0,00	0,00	49.720.733.386,00
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	49.471.958.392,00	248.774.994,00	0,00	0,00	49.720.733.386,00
4	02		SEKRETARIAT DPRD	0,00	36.979.433.753,00	187.347.042,00	0,00	0,00	37.166.780.795,00
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	0,00	36.979.433.753,00	187.347.042,00	0,00	0,00	37.166.780.795,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	968.602.910.151,00	51.562.783.152,00	854.282.393,00	2.000.000.000,00	110.343.205.879,00	164.760.271.424,00
5	01		PERENCANAAN	0,00	13.789.228.692,00	349.407.093,00	0,00	0,00	14.138.635.785,00
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	13.789.228.692,00	349.407.093,00	0,00	0,00	14.138.635.785,00
5	02		KEUANGAN	968.602.910.151,00	24.540.196.921,00	311.577.550,00	2.000.000.000,00	110.343.205.879,00	137.194.980.350,00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	968.602.910.151,00	24.540.196.921,00	311.577.550,00	2.000.000.000,00	110.343.205.879,00	137.194.980.350,00
5	03		KEPEGAWAIAN	0,00	8.077.327.600,00	32.316.925,00	0,00	0,00	8.109.644.525,00
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	8.077.327.600,00	32.316.925,00	0,00	0,00	8.109.644.525,00
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0,00	1.278.694.200,00	0,00	0,00	0,00	1.278.694.200,00
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	1.278.694.200,00	0,00	0,00	0,00	1.278.694.200,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	333.215.194,00	0,00	0,00	0,00	333.215.194,00
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	333.215.194,00	0,00	0,00	0,00	333.215.194,00
5	06		PENGELOLAAN PERBATASAN	0,00	3.544.120.545,00	160.980.825,00	0,00	0,00	3.705.101.370,00
5	06	5.06.0.00.0.00.04.0000	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	0,00	3.544.120.545,00	160.980.825,00	0,00	0,00	3.705.101.370,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	13.454.376.663,00	174.490.412,00	0,00	0,00	13.628.867.075,00
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	0,00	13.454.376.663,00	174.490.412,00	0,00	0,00	13.628.867.075,00
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT DAERAH	0,00	13.454.376.663,00	174.490.412,00	0,00	0,00	13.628.867.075,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	0,00	39.496.584.862,00	301.037.771,00	0,00	0,00	39.797.622.633,00
7	01		KECAMATAN	0,00	39.496.584.862,00	301.037.771,00	0,00	0,00	39.797.622.633,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN SIANTAN	0,00	4.343.279.931,00	33.128.723,00	0,00	0,00	4.376.408.654,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.01	KELURAHAN TAREMPA	0,00	1.348.403.091,00	6.741.596,00	0,00	0,00	1.355.144.687,00
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN JEMAJA	0,00	5.720.325.778,00	49.665.814,00	0,00	0,00	5.769.991.592,00
7	01	7.01.0.00.0.00.02.01	KELURAHAN LETUNG	0,00	862.352.440,00	0,00	0,00	0,00	862.352.440,00
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN PALMATAK	0,00	4.811.567.194,00	0,00	0,00	0,00	4.811.567.194,00
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN SIANTAN TIMUR	0,00	3.451.777.086,00	0,00	0,00	0,00	3.451.777.086,00
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN SIANTAN SELATAN	0,00	2.707.187.014,00	90.497.059,00	0,00	0,00	2.797.684.073,00
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN JEMAJA TIMUR	0,00	3.321.897.306,00	0,00	0,00	0,00	3.321.897.306,00
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN SIANTAN TENGAH	0,00	3.282.544.680,00	30.313.920,00	0,00	0,00	3.312.858.600,00
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN SIANTAN UTARA	0,00	2.723.527.209,00	0,00	0,00	0,00	2.723.527.209,00
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN JEMAJA BARAT	0,00	2.903.422.997,00	32.625.865,00	0,00	0,00	2.936.048.862,00
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN KUTE SIANTAN	0,00	4.020.300.136,00	58.064.794,00	0,00	0,00	4.078.364.930,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0,00	24.496.905.875,00	149.673.242,00	0,00	0,00	24.646.579.117,00
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	24.496.905.875,00	149.673.242,00	0,00	0,00	24.646.579.117,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
X	D1	1.05.8.01.0.00.02.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	24.496.905.675,00	148.673.242,00	0,00	0,00	24.645.579.117,00
X			NON URUSAN	0,00	14.981.600,00	0,00	0,00	0,00	14.981.600,00
X	XX		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	0,00	14.981.600,00	0,00	0,00	0,00	14.981.600,00
X	XX	1.01.2.19.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	0,00	14.981.600,00	0,00	0,00	0,00	14.981.600,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	25	3.25.3.27.2.09.01.1	UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	25	3.25.3.27.2.09.01.2	UPT BALAI BENIH PERTANIAN TERPADU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	25	3.25.3.27.2.09.01.3	UPT PERBENIHAN IKAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	876.388.830.847,00	741.487.910.972,00	130.794.489.281,00	2.000.000.000,00	110.343.395.879,00	984.585.176.132,00

Kab. Kepulauan Anambas, 29 Desember 2023
Bupati

ABDUL HARIS

Lampiran III : Peraturan Daerah
Nomor : 05 Tahun 2023
Tanggal : 29 Desember 2023

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

PENDAPATAN DAERAH			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**	**DASAR HUKUM**
4	PENDAPATAN DAERAH	976.085.176.132,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	39.179.339.491,00	
4.1.01	Pajak Daerah	22.559.538.747,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	4.650.745.981,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.318.019.763,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.651.035.000,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	934.126.336.641,00	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	878.478.687.066,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	55.647.649.575,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.779.500.000,00	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2.779.500.000,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
Bidang Urusan	: 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		
Unit Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		
Program	: 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
Indikator Hasil	: Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/Paket B - - Angka Partisipasi Sekolah SD/Mi/Paket A Persentase jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) Persentase jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		
Kegiatan	: 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	217.708.738,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	868.315.018,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	300.000.009,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.819.438.626,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.292.522,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.096.290.975,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.992.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.265.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23.721.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0013 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.480.919,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.808.944.622,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.734.932,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.534.307.380,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	679.109.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.977.850,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.999.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	649.999.680,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.999.693,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.500.000.000,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.500.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	499.999.950,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	499.999.625,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	499.999.050,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	749.548.572,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.023.129,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	717.525.166,00	
Kegiatan	: 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
Indikator Keluaran	: Tersedianya pengelolaan pendidikan menengah pertama		

Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.726.067,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.550.110.711,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	990.745.568,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	330.000.652,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	753.910.193,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.649.761.952,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.177.414,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.560.332.384,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.992.400,00	

Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	445.658.221,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.343.500,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.162.843.488,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.297.468.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0034 Perlengkapan Belajar Peserta Didik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.901.925,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.936.340,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.932.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	649.999.096,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.999.950,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.000.000.000,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	500.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.043.188,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.095.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.180.000,00	
Kegiatan	: 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
Indikator Keluaran	: Tersedianya pengelolaan PAUD Tersedianya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		

Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	552.874.542,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	492.941.932,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0003 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.368.795,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.950.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.639.326,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.700.646,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah	1.586.870.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0013 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	202.411.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.924.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
Indikator Keluaran	: Tersedianya pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah	245.840.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Program	: 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		

Indikator Hasil	: Terlakasananya pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidika Terlaksananya pemerataan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan		
Kegiatan	: 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonfornal/kesetaraan		
Sub Kegiatan	: 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	341.600.000,00	
Program	: 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		
Indikator Hasil	: Persentase Lembaga Pendidikan(PAUD-Pendidikan dasar non formal) yang memiliki izin		
Kegiatan	: 1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Tersedianya penerbitan izin PAUD dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyaraka		
Sub Kegiatan	: 1.01.05.2.02.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
Program	: 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Jumlah dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang disusun Jumlah dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang disusun		
Kegiatan	: 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD disusun Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun Jumlah Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.828.100,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersediannya Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	146.579.055.343,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	1.319.880.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersediannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.891.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya operasional kantor		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.093.266,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	124.748.738,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.962.322,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	418.834.195,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.510.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	849.320.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.424.210,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.380.883.736,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.342.320,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.778.994,00	
Bidang Urusan	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		

Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
Unit Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Persentase Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi sarana dan prasarananya		
Kegiatan	: 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi saranan dan prasarananya		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.447.730.957,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.220.816.670,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.797.420.095,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.324.489.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.621.800,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.653.768.223,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.488.913.430,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan		

Indikator Keluaran	: Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.654.830,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah desa/kelurahan UCI disatu wilayah pada kurun waktu tertentu Jumlah Masyarakat Ber PHBS Jumlah Masyarakat Yang Telah Mendapatkan Vaksin Covid- 19 Jumlah Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah Kasus Malaria yang dimonfirmasi 1 Tahun Kasus Penduduk Usia produktif yang melakukan screening Faktotr Resiko PTM		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.115.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.459.054,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.810.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.043.650,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	489.152.720,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.645.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.485.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.790.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	444.081.002,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.397.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.828.297.565,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.340.952,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.376.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.590.000,00	
Program	: 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		
Indikator Hasil	: Persentase sdmk yang terlatih sesuai dengan mutu dan standar kompetensi tenaga kesehatan		
Kegiatan	: 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDMK yang terlatih sesuai dengan mutu dan standar kompetensi tenaga kesehatan		
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	552.764.200,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun		
Kegiatan	: 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.762.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan melaksanakan administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	65.455.415.237,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	1.054.170.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Barang Milik Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.545.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.055.890,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	121.101.666,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.021.973,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.569.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	460.097.200,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	265.894.126,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.370.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.235.877.238,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.001.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	316.066.269,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.280.000,00	
Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		

Unit Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.1 RSUD Tarempa		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Persentase Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi sarana dan prasarananya		
Kegiatan	: 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi saranan dan prasarananya		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.300.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Kegiatan	: 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.336.938,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.499.291,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	92.560.445,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.626.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	292.846.627,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.524.970,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.554.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.736.269,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.337.800,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.678.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	341.788.166,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	557.412.986,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.949.448.775,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.488.239,00	
Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
Unit Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.10 Puskesmas Siantan Timur		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Angka Annual Parasite Insidens (API) Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Masyarakat Yang Telah Mendapatkan Vaksin Covid-19 Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat Ber PHBS Kasus Malaria yang dimonfirmasi 1 Tahun "Kasus Penduduk Usia produktif yang melakukan screening Faktotr Resiko PTM"		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.020.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.280.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.280.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.520.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.170.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.120.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.230.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.705.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.280.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.180.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.405.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	60.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.289.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.700.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan melaksanakan administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Kegiatan	: 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan melaksanakan administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.273.565,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.025.000,00	
Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
Unit Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.11 Balai Pengelola Farmasi dan Alat Kesehatan (BPFAK)		
Kegiatan	: 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.408.220,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.928.140,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.228.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.060.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.851.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.528.600,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.140.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.490.000,00	
Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
Unit Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.12 Puskesmas Jemaja Barat		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM Angka Annual Parasite Insidens (API) Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Masyarakat Yang Telah Mendapatkan Vaksin Covid-19		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah desa/kelurahan UCI disatu wilayah pada kurun waktu tertentu Jumlah Masyarakat Ber PHBS Jumlah Masyarakat Yang Telah Mendapatkan Vaksin Covid- 19 Jumlah Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah Kasus Malaria yang dimonfirmasi 1 Tahun Usia produktif yang melakukan screening Faktotr Resiko PTM		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.180.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		

Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.380.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.414.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.298.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.330.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	38.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Kegiatan	: 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.891.050,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.989.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.940.110,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.010.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.700.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.054.990,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.394.490,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.010.000,00	
Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
Unit Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.13 Puskesmas Siantan Utara		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Angka Annual Parasite Insidens (API) Persentase Masyarakat Yang Telah Mendapatkan Vaksin Covid-19		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah desa/kelurahan UCI disatu wilayah pada kurun waktu tertentu/Jumla h desa Jumlah Masyarakat Ber PHBS Jumlah Masyarakat Yang Telah Mendapatkan Vaksin Covid- 19/ Jumlah Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah Kasus Malaria yang dimonfirmasi 1 Tahun Kasus Penduduk Usia produktif yang melakukan screening Faktotr Resiko PTM		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.890.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.021.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.412.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.940.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.361.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.860.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.513.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.780.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.742.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.195.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.116.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	30.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.728.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.980.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Kegiatan	: 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.222.325,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.681.085,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.984.389,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.986.680,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.590.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.980.961,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.472.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.962.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		

Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
Unit Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.14 Puskesmas Kute Siantan		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara erintegrasi di perangkat daerah Angka Annual Parasite Insidens (API) Persentase Masyarakat Yang Telah Mendapatkan Vaksin Covid-19 Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah desa/kelurahan UCI disatu wilayah pada kurun waktu tertentu Jumlah Masyarakat Ber PHBS Jumlah Masyarakat Yang Telah Mendapatkan Vaksin Covid-19 "Jumlah Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah" Kasus Malaria yang dimonfirmasi 1 Tahun "Kasus Penduduk Usia produktif yang melakukan screening Faktotr Resiko PTM"		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.975.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.310.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.082.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.580.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.104.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.396.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	102.115.062,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.964.677,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.695.280,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Kegiatan	: 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.158.450,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.253.280,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.900.610,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.136.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.234.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.350.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.271.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: "Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	
Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
Unit Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.2 RSUD Jemaja		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Persentase Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi sarana dan prasarananya		
Kegiatan	: 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi saranan dan prasarananya		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.685.820,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Kegiatan	: 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.665.170,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.225.549,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.999.616,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.188.224,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.204.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: "Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.638.926,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.851.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: "Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.380.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.151.500,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	180.500.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.500.000,00	
Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
Unit Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.3 RSUD Palmatak		
Kegiatan	: 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.189.382,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.756.640,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	301.286.203,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.250.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: "Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.105.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.381.400,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: "Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	642.579.980,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.315.655.120,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	
Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
Unit Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.4 Puskesmas Siantan Tengah		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Angka Annual Parasite Insidens (API) Persentase Masyarakat Yang Telah Mendapatkan Vaksin Covid-19 Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara erintegrasi di perangkat daerah		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah desa/kelurahan UCI disatu wilayah pada kurun waktu tertentu Jumlah Masyarakat Ber PHBS Jumlah Masyarakat Yang Telah Mendapatkan Vaksin Covid-19 "Jumlah Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah" Kasus Malaria yang dimonfirmasi 1 Tahun "Kasus Penduduk Usia produktif yang melakukan screening Faktotr Resiko PTM"		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.655.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		

Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.170.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.038.772,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.310.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.725.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.540.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	67.200.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.095.228,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Kegiatan	: 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.569.778,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.119.225,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	271.274.960,00	
Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
Unit Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.5 Puskesmas Letung		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Angka Annual Parasite Insidens (API) Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase Masyarakat Yang Telah Mendapatkan Vaksin Covid-19 Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara erintegrasi di perangkat daerah		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah desa/kelurahan UCI disatu wilayah pada kurun waktu tertentu Jumlah Masyarakat Ber PHBS Jumlah Masyarakat Yang Telah Mendapatkan Vaksin Covid-19 "Jumlah Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah" Kasus Malaria yang dimonfirmasi 1 Tahun "Kasus Penduduk Usia produktif yang melakukan screening Faktotr Resiko PTM"		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.840.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.360.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.070.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.450.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		

Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.120.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.760.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.350.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.330.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.068.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.810.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.790.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	60.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Kegiatan	: 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.207.106,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.327.403,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.991.116,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.225.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: "Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.463.910,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.570.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.031.300,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: "Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.962.700,00	

Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	439.832.454,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.333.546,00	
Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
Unit Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.6 Puskesmas Jemaja Timur		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara erintegrasi di perangkat daerah Angka Annual Parasite Insidens (API) Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase Masyarakat Yang Telah Mendapatkan Vaksin Covid-19		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah desa/kelurahan UCI disatu wilayah pada kurun waktu tertentu Jumlah Masyarakat Ber PHBS Jumlah Masyarakat Yang Telah Mendapatkan Vaksin Covid-19 "Jumlah Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah" Kasus Malaria yang dimonfirmasi 1 Tahun "Kasus Penduduk Usia produktif yang melakukan screening Faktotr Resiko PTM"		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.570.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.040.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.450.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.825.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.385.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.090.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.635.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	40.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.350.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.960.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Kegiatan	: 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	260.225,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.148.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.897.875,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.775.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: "Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.117.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.479.600,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: "Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.350.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.420.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	111.259.250,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.367.669,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.477.491,00	
Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
Unit Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.7 Puskesmas Palmatak		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		

Indikator Hasil	: Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Angka Annual Parasite Insidens (API) Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase Masyarakat Yang Telah Mendapatkan Vaksin Covid-19 Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM Persentase Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara erintegrasi di perangkat daerah		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah desa/kelurahan UCI disatu wilayah pada kurun waktu tertentu Jumlah Masyarakat Ber PHBS Jumlah Masyarakat Yang Telah Mendapatkan Vaksin Covid-19 "Jumlah Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah" Kasus Malaria yang dimonfirmasi 1 Tahun "Kasus Penduduk Usia produktif yang melakukan screening Faktotr Resiko PTM"		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.870.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.060.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.354.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.096.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.110.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.975.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	652.335.400,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.659.515,00	
Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
Unit Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.8 Puskesmas Tarempa		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Persentase Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara erintegrasi di perangkat daerah Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Angka Annual Parasite Insidens (API) Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Masyarakat Yang Telah Mendapatkan Vaksin Covid-19 Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		

Indikator Keluaran	: Jumlah desa/kelurahan UCI disatu wilayah pada kurun waktu tertentu Jumlah Masyarakat Ber PHBS Jumlah Masyarakat Yang Telah Mendapatkan Vaksin Covid-19 "Jumlah Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah" Kasus Malaria yang dimonfirmasi 1 Tahun "Kasus Penduduk Usia produktif yang melakukan screening Faktotr Resiko PTM"		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.222.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.300.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.757.180,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.248.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	42.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.346.820,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Kegiatan	: 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.402.233,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: "Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.120.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	440.175.571,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	671.518.883,00	
5.2	BELANJA MODAL		

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.696.605,00	
Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
Unit Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.9 Puskesmas Siantan Selatan		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Persentase Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara erintegrasi di perangkat daerah Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Angka Annual Parasite Insidens (API) Persentase Masyarakat Yang Telah Mendapatkan Vaksin Covid-19 Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah desa/kelurahan UCI disatu wilayah pada kurun waktu tertentu Jumlah Masyarakat Ber PHBS Jumlah Masyarakat Yang Telah Mendapatkan Vaksin Covid-19 "Jumlah Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah" Kasus Malaria yang dimonfirmasi 1 Tahun "Kasus Penduduk Usia produktif yang melakukan screening Faktotr Resiko PTM"		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.170.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.205.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.745.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.105.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.085.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.130.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.420.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.359.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.070.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.925.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.380.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	70.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.842.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Kegiatan	: 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	254.690.385,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.538.429,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: "Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.245,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: "Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.416.800,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	97.152.948,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.881.252,00	
Bidang Urusan	: 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
Organisasi	: 1.03.1.04.2.10.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
Unit Organisasi	: 1.03.1.04.2.10.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
Program	: 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		
Indikator Hasil	: Terlaksananya Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		
Kegiatan	: 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM		
Sub Kegiatan	: 1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	217.484.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		
Indikator Keluaran	: Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	911.872.745,00	
Program	: 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		
Indikator Hasil	: terselenggaranya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah		
Kegiatan	: 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: terselenggaranya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah		
Sub Kegiatan	: 1.03.05.2.01.0022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman		
Indikator Keluaran	: Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.450.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	245.000.000,00	
Program	: 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		
Indikator Hasil	: terselenggaranya pengelolaan dan pengembangan sistem Drainase		
Kegiatan	: 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: terselenggaranya pengelolaan dan pengembangan sistem Drainase		
Sub Kegiatan	: 1.03.06.2.01.0024 Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.750.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.885.201.713,00	
Program	: 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		
Indikator Hasil	: terselenggaranya penataan bangunan dan lingkungannya		
Kegiatan	: 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		
Indikator Keluaran	: terselenggaranya penataan bangunan dan lingkungannya		
Sub Kegiatan	: 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.727.248.706,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.689.050,00	
Program	: 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		
Indikator Hasil	: Terselenggaranya Program Penyelenggaraaan Jalan		
Kegiatan	: 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terselenggaranya Program Penyelenggaraaan Jalan		
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan		

Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	681.106.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17.083.002.987,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Direkonstruksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.184.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	24.781.973.827,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.843.200,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	408.928.499,00	
Program	: 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		
Indikator Hasil	: Terselenggaranya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		
Kegiatan	: 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		
Indikator Keluaran	: Terselenggaranya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		
Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.04.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.995.900,00	
Program	: 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.987.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.046.000,00	
Kegiatan	: 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.979.115,00	
Program	: 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.000.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	8.607.147.114,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	1.111.008.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	855.243.395,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.504.378.622,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.165.709.952,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.801.924,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.999.480,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	230.000.000,00	
Organisasi	: 1.03.1.04.2.10.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
Unit Organisasi	: 1.03.1.04.2.10.01.0001 UPTD SPAM SIANTAN		
Kegiatan	: 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	920.629.728,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.285.292,00	
Bidang Urusan	: 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
Organisasi	: 1.03.1.04.2.10.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
Unit Organisasi	: 1.03.1.04.2.10.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
Program	: 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	2.040.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.080.286,00	
Program	: 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.100.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	455.609.041,00	
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
Program	: 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		
Indikator Hasil	: Tingkat Waktu Tanggap Respons Time Kejadian Kebakaran		
Kegiatan	: 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	98.012.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.128.168,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	280.473.595,00	
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Kegiatan	: 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.01	Belanja Pegawai	4.301.575.850,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	106.320.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	10.788.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.138.838,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.996.708,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	120.361.097,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.623.170,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.005.693,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	288.102.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.424.564,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.737.410,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.038.700,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.410.575,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.112.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.716.725.520,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.915.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.273.656,00	
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
Program	: 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		
Indikator Hasil	: Cakupan penanggulangan bencana		
Kegiatan	: 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana		
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)		
Indikator Keluaran	: Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.201.451,00	

Kegiatan	: 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
Indikator Keluaran	: Persentase terpenuhinya Pelayanan pencegahan dan kesiagaan terhadap bencana		
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.0017 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.106.675,00	
Kegiatan	: 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
Indikator Keluaran	: Persentase terpenuhinya Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: 0		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.738.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.371.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.741.000,00	
Kegiatan	: 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		
Indikator Keluaran	: Persentase terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.722.000,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	50.000.000,00	
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten		
Kegiatan	: 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.402.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	5.404.265.544,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	173.976.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.692.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.642.540,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.775.956,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.828.390,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.364.760,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.207.990,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.836.680,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	258.137.540,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.271.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.821.725,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.484.854,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.535.734,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.276.094,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.510.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.823.938.488,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daearah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.138.330,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.954.960,00	
Organisasi	: 1.05.8.01.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		

Unit Organisasi	: 1.05.8.01.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
Program	: 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: Persentase Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan terselesaikan		
Kegiatan	: 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelanggaran Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah yang ditindaklanjuti		
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.095.600,00	
Kegiatan	: 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelanggaran Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah yang ditangani		
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.876.000,00	
Kegiatan	: 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase PPNS yang aktif		
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.942.000,00	
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Kegiatan	: 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Dokumen Perencanaan yang Tersusun		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.836.300,00	

Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.444.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang terselesaikan		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	4.940.118.104,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	128.280.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.309.500,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Dokumen Administrasi BMD yang Terselesaikan		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	33.564.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terselesaikan		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.330.009,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.285.234,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.559.968,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.017.240,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.005.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	246.751.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	366.183.300,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.350.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.017.808.576,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.317.530,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.760.000,00	
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
Organisasi	: 1.06.2.08.0.00.03.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
Unit Organisasi	: 1.06.2.08.0.00.03.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
Program	: 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		
Indikator Hasil	: persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS		
Kegiatan	: 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: jumlah PSM yang terintefikasi, yang mendapatkan pembinaan		
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		

Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.790.000,00	
Program	: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
Indikator Hasil	: persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
Kegiatan	: 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		
Indikator Keluaran	: jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	233.045.000,00	
Program	: 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		
Indikator Hasil	: Persentase data fakir miskin yang terdata dan terkelola		
Kegiatan	: 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata		
Sub Kegiatan	: 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.135.842,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.000.000,00	
Program	: 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA		
Indikator Hasil	: Persentase penanganan bencana		
Kegiatan	: 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Sinergitas dan Keterpaduan Stekholder Dalam Penanggulangan Bencana di Kab. Kepulauan Anambas		
Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.955.000,00	
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: persentase perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana diambil dari perda rpjmd 2021-2026		
Kegiatan	: 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: diambil dari renstra Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.444.500,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	4.743.886.576,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	150.120.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.028.992,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		

Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	25.200.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.893.175,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.774.722,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.101.005,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.325.450,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.933.200,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	486.893.124,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	588.976.361,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.680.060,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.420.000,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		
Organisasi	: 2.17.2.07.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
Unit Organisasi	: 2.17.2.07.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
Program	: 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		
Indikator Hasil	: Persentase besaran kasus yang diselesaikan		
Kegiatan	: 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya regulasi yang tersusun		
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	848.244.000,00	
Bidang Urusan	: 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
Organisasi	: 1.06.2.08.0.00.03.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
Unit Organisasi	: 1.06.2.08.0.00.03.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
Program	: 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		
Indikator Hasil	: Persentase perangkat daerah memiliki focal poin aktif		
Kegiatan	: 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Kantor Pemerintah dan Fasilitas umum di Kabupaten Kepulauan Anambas yan Responsif Gender		
Sub Kegiatan	: 2.08.02.2.01.0004 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.000.000,00	
Kegiatan	: 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.08.02.2.03.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	
Program	: 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	
Kegiatan	: 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	301.600.000,00	
Kegiatan	: 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.08.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.400.000,00	
Program	: 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		
Indikator Hasil	: Persentase kecamatan layak anak		
Kegiatan	: 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: keterwakilan Forum Anak kabupaten kepulauan anambas di jambore anak provinsi dan hari anak nasional		
Sub Kegiatan	: 2.08.06.2.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	
Program	: 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.000.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	360.000.000,00	
Bidang Urusan	: 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		
Organisasi	: 3.25.3.27.2.09.01.0000 DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN		
Unit Organisasi	: 3.25.3.27.2.09.01.0000 DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN		
Program	: 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Konsumsi Pangan		
Kegiatan	: 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		
Indikator Keluaran	: Target Konsumsi Pangan Per Kapita		
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.509.092,00	

5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.301.208,00	
Program	: 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		
Indikator Hasil	: Persentase penanganan kerawanan pangan		
Kegiatan	: 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah penanganan kerawanan pangan desa kelurahan		
Sub Kegiatan	: 2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.876.000,00	
Program	: 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		
Indikator Hasil	: Persentase Rekomendasi Pengawasan Keamanan Pangan yang diterbitkan		
Kegiatan	: 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar		
Sub Kegiatan	: 2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.302.200,00	
Bidang Urusan	: 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		
Organisasi	: 1.03.1.04.2.10.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
Unit Organisasi	: 1.03.1.04.2.10.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
Program	: 2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.10.10.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.151.000,00	
Bidang Urusan	: 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
Organisasi	: 2.15.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		

Unit Organisasi	: 2.15.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		
Program	: 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		
Indikator Hasil	: Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
Kegiatan	: 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 2.11.02.2.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Program	: 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		
Indikator Hasil	: Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup		
Kegiatan	: 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aksi Pemantauan Kualitas Lingkungan yang dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.150.000,00	
Program	: 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		
Indikator Hasil	: Persentase Perlindungan Lingkungan Hidup		
Kegiatan	: 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah aksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		
Indikator Keluaran	: Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.690.735,00	
Program	: 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		
Indikator Hasil	: Persentase Pembinaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
Kegiatan	: 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Penaatan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 2.11.06.2.01.0005 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
Indikator Keluaran	: Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.840.490,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.164.950,00	
Program	: 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Persentase Peran Serta Sekolah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
Kegiatan	: 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah penghargaan sekolah Adiwiyata yang diberikan		
Sub Kegiatan	: 2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.257.360,00	
Program	: 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		
Indikator Hasil	: Persentase Pengelolaan Persampahan yang Berwawasan Lingkungan		
Kegiatan	: 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aksi Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0013 Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah		
Indikator Keluaran	: Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.870.360,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0015 Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah		
Indikator Keluaran	: Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	223.941.466,00	
Organisasi	: 2.15.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		
Unit Organisasi	: 2.15.2.11.0.00.01.2 UPT PENGELOLAAN SAMPAH		
Program	: 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Kegiatan	: 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	846.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.406.280,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.880.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.700.280,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.177.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.400.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.720.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.077.273,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya Barang Milik Daerah SKPD		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	417.623.067,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.510.900,00	
Bidang Urusan	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
Unit Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
Program	: 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		
Indikator Hasil	: Persentase kepemilikan KTP el (%)		
Kegiatan	: 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk		
Indikator Keluaran	: Persentase terpenuhinya Hak Masyarakat dalam Kepemilikan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan		
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.01.0005 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.671.205,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.01.0007 Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	680.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.620.000,00	
Program	: 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL		
Indikator Hasil	: Persentase kepemilikan dokumen akte kelahiran 0- 18 Tahun (%)		
Kegiatan	: 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil		
Indikator Keluaran	: Persentase terpenuhinya Hak Masyarakat dalam Kepemilikan Dokumen atas Hasil Pencatatan Sipil		
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.437.700,00	
Program	: 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		
Indikator Hasil	: Persentase informasi database kependuduk an yang disampaikan		
Kegiatan	: 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Persentase Tersusunnya Dokumen Tata Kelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang memadai		
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.887.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.03.0008 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.117.200,00	
Program	: 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		

Indikator Hasil	: Persentase publikasi Profil Kependudukan		
Kegiatan	: 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyediaan Buku profil Kependudukan		
Sub Kegiatan	: 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.387.600,00	
Program	: 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah		
Kegiatan	: 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase dokumen perencanaan, dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perudang-undangan		
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pengelolaan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	5.730.909.381,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.01	Belanja Pegawai	138.816.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	744.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.800.000,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan rapat, aktivitas lapangan, dan pelayanan tamu, dan perjalanan dinas		
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	206.885.621,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.998.922,00	

Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.801.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.582.608,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.375.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	397.582.000,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran dan langganan lainnya		
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.704.460,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.118.377.824,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase barang milik daerah berkondisi baik		
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.810.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.343.400,00	
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
Organisasi	: 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
Unit Organisasi	: 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
Program	: 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA		
Indikator Hasil	: Persentase Penataan Desa		
Kegiatan	: 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Desa yang di lakukan pembinaan penyelenggaraan penataan desa		
Sub Kegiatan	: 2.13.02.2.01.0001 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.180.000,00	
Program	: 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		

Indikator Hasil	: Persentase pembinaan pemerintahan desa		
Kegiatan	: 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa		
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.135.783.022,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.708.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0015 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Program	: 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		
Indikator Hasil	: Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif		
Kegiatan	: 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Desa Yang Mengikuti Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.099.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.352.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	441.872.989,00	
Program	: 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah		
Kegiatan	: 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya Adminstrasi Keuangan		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	2.331.677.040,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	122.040.000,00	
Kegiatan	: 2.13.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	16.800.000,00	
Kegiatan	: 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		

Indikator Keluaran	: Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.659.423,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	208.064.090,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.458.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.860.121,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	302.035.000,00	
Kegiatan	: 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
Kegiatan	: 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.066.370,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	428.356.440,00	
Kegiatan	: 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.056.920,00	
Bidang Urusan	: 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
Unit Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
Program	: 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		
Indikator Hasil	: Persentase sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan		
Kegiatan	: 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil		
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0015 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain		

Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.400.000,00	
Program	: 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		
Indikator Hasil	: Persentase mitra kerja program KKBPK yang aktif dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB		
Kegiatan	: 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		
Indikator Keluaran	: Jumlah mitra kerja program KKBPK yang aktif /Jumlah mitra kerja program KKBPK yang sudah terbentuk		
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	218.120.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	430.000.000,00	
Kegiatan	: 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Peserta KB aktif modern / Pasangan Usia Subur		
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	291.600.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	327.577.000,00	
Kegiatan	: 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		
Indikator Keluaran	: Jumlah peran serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat kecamatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber KB/ Jumlah Kecamatan yang ada		
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.04.0004 Pembinaan Terpadu Kampung KB		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.750.000,00	
Program	: 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		
Indikator Hasil	: Persentase Kader BKB BKR, PPKA, PIK - R Yang diberi pelatihan Persentase Mitra dan Organisasi yang dilakukan Peningkatan Kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan hteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPK S)		
Kegiatan	: 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kader BKB BKR, PPKA, PIK - R Yang diberi pelatihan dibagi Jumlah Kader BKB BKR, PPKA, PIK - R yang ada Jumlah Mitra dan Organisasi yang dilakukan Peningkatan Kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan hteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPK S)		
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.02.0003 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	365.400.000,00	
Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
Unit Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.10 Puskesmas Siantan Timur		
Program	: 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.14.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	334.567.163,00	
Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
Unit Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.7 Puskesmas Palmatak		
Kegiatan	: 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.704.798,00	
Kegiatan	: 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: "Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"		
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.517.500,00	
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		
Organisasi	: 2.15.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		
Unit Organisasi	: 2.15.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		
Indikator Hasil	: Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana serta Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		
Kegiatan	: 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Sarana dan Prasrana Perlengkapan Jalan Yang Berkeselamatan		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.420.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.793.162,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	218.843.935,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.675.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.160.000,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peningkatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.510.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.162.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.250.000,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		

Indikator Keluaran	: Persentase Ketersedian Angkutan Umum Yang Memenuhi Standar Keselamatan		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.621.465,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	655.273,00	
5.1.05	Belanja Hibah	1.276.395.000,00	
Program	: 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		
Indikator Hasil	: Persentase ketersedian sarana dan prasarana transportasi angkutan laut		
Kegiatan	: 2.15.03.2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		
Indikator Keluaran	: Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana angkutan laut		
Sub Kegiatan	: 2.15.03.2.12.0002 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	582.290.257,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.247.725,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.553.607.592,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.03.2.12.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.086.976,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	368.194.432,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.03.2.12.0005 Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.616.603,00	
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Kegiatan	: 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Layanan Administrasi Keuangan		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	5.595.891.133,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	359.592.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.420.985,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.466.918,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	110.695.777,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.463.956,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.567.250,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	396.232.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.527.920,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.686.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.267.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.745.480.864,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya Barang Milik Daerah SKPD		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	247.267.530,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.509.800,00	
Organisasi	: 2.15.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		
Unit Organisasi	: 2.15.2.11.0.00.01.1 UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI		
Kegiatan	: 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		

Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.230.174,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.970.399,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.083.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	396.881.958,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.174.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.700.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.970.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.036.237,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.360.288,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.960.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya Barang Milik Daerah SKPD		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.140.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.080.000,00	
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		
Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		
Program	: 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		
Indikator Hasil	: Persentase Keterbukaan Informasi Publik		
Kegiatan	: 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Informasi yang Terpublikasi		
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0002 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.187.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0004 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	269.283.427,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.716.573,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0006 Pelayanan Informasi Publik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0007 Layanan Hubungan Media		
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Hubungan Media		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.648.526.922,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0010 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0013 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.024.400,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.905.162,00	
Program	: 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		
Indikator Hasil	: Persentase Layanan SPBE Pemerintah Daerah Yang diterapkan Oleh Perangkat Daerah		
Kegiatan	: 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah Kab. Kep. Anambas		
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.01.0002 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.01.0003 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.888.094.314,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	268.242.600,00	
Kegiatan	: 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Sistem Informasi/ Aplikasi Perkantoran Elektronik yang tersedia disetiap Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0002 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.500.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0003 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.964.387,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.836.962,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.500.000,00	
Program	: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Kegiatan	: 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Dokumen Perencanaan, Dokumen Laporan Kinerja Dilaksanakan Tepat Waktu dan Hasil Pengendalian Evaluasi Sesuai Peraturan Perudang-undangan		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.237.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.719.500,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bulan Ketersediaan Gaji dan Tunjangan		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	4.411.147.767,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	197.040.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	33.564.000,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Kebutuhan Bahan Perkantoran, Kebutuhan Rapat, Aktivitas Lapangan, Pelayanan Tamu, serta Perjalanan Dinas		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.111.623,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.912.368,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.752.152,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.880.230,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.673.250,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.520.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	368.431.000,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.218.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.223.712,00	

Kegiatan	: 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran dan Langganan Lainnya		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.432.279,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.360.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	759.846.008,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah Berkondisi Baik		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.364.996,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.970.000,00	
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
Organisasi	: 2.17.2.07.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
Unit Organisasi	: 2.17.2.07.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
Program	: 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		
Indikator Hasil	: Persentase pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil		

Kegiatan	: 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan Fasilitasi		
Sub Kegiatan	: 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	641.553.295,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	118.407.554,00	
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah		
Kegiatan	: 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Layanan Administrasi Keuangan		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	7.267.198.283,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan administrasi umum kantor		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.584.499.722,00	
Organisasi	: 2.17.3.30.2.07.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
Unit Organisasi	: 2.17.3.30.2.07.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
Program	: 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		
Indikator Hasil	: Persentase UMKM yang mendapatkan pembinaan		
Kegiatan	: 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		
Indikator Keluaran	: Peningkatan jumlah usaha mikro yang mendapatkan pemberdayaan		
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.592.208,00	
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah		
Kegiatan	: 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Layanan Administrasi Keuangan		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	203.880.000,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan administrasi umum kantor		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.709.965,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.812.171,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.483.255,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.404.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.428.057,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	389.409.640,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan administrasi umum kantor		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.306.853,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.245.000,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemeliharaan BMD		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.403.082,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.874.000,00	

Bidang Urusan	: 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		
Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
Unit Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
Program	: 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		
Indikator Hasil	: Rasio Peningkatan Investasi PMDN dan PMA		
Kegiatan	: 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas/insentif di Bidang Penanaman Modal yang ditetapkan atau diberikan		
Sub Kegiatan	: 2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	257.939.825,00	
Program	: 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	334.122.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.280.000,00	
Program	: 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		
Indikator Hasil	: Tingkat Kepatuhan Perusahaan dalam menyampaikan LKPM		
Kegiatan	: 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya kualitas pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		
Sub Kegiatan	: 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.276.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	228.349.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.553.000,00	
Program	: 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan layanan Penunjang urusan urusan Pemerintah Daerah		
Kegiatan	: 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase terlaksananya administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	3.767.989.590,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	145.080.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.021.035,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penatusahaan Barang Milik daerah pada SKPD		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	19.056.000,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.780.740,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.505.750,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.156,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.805.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.907.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	311.080.000,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.803.100,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.777.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.520.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	519.741.920,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.325.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.070.000,00	
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		
Unit Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		
Program	: 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		
Indikator Hasil	: - Tersedianya kegiatan pembinaan kapasitas kepemudaan		
Kegiatan	: 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Tersedianya pemberdayaan dan pengembangan pemuda		
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.01.0006 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
Program	: 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		
Indikator Hasil	: Tersedianya sarana dan prasarana penunjang olahraga dan pengembangan atlet Tersedianya sarana dan prasarana penunjang olahraga dan pengembangan atlet		
Kegiatan	: 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Tersedianya penyelenggaraan kejuaraan tingkat daerah kab/kota Tersedianya penyelenggaraan kejuaraan tingkat daerah kabupaten/kota		
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.02.0003 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	702.505.440,00	
Kegiatan	: 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Tersedianya pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat provinsi		
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.03.0003 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	221.854.592,00	
Kegiatan	: 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga		
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.04.0002 Pengembangan Organisasi Keolahragaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.292.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	166.708.000,00	
Kegiatan	: 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi		
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.05.0003 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.074.297.112,00	
Program	: 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		
Indikator Hasil	: Persentase pemenuhan pengembangan kapasitas kepramukaan		
Kegiatan	: 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan		
Sub Kegiatan	: 2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.600.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	200.050.181,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.04.2.01.0003 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	377.939.742,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.04.2.01.0008 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	278.052.133,00	
Program	: 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan layanan pemerintahan		
Kegiatan	: 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah		
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.874.937,00	
Bidang Urusan	: 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		
Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		
Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		
Program	: 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		
Indikator Hasil	: Persentase Laju Pemanfaatan Data Sektoral		
Kegiatan	: 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Dokumen Ketersediaan Data Sektoral Untuk Perencanaan Pembangunan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.20.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.20.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		

Indikator Keluaran	: Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.20.02.2.01.0003 Membangun Metadata Statistik Sektoral		
Indikator Keluaran	: Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
Bidang Urusan	: 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		
Program	: 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		
Indikator Hasil	: Persentase Pelaksanaan Keamanan Digital Perangkat Daerah		
Kegiatan	: 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		
Sub Kegiatan	: 2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.545.834,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.454.000,00	
Kegiatan	: 2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi		
Sub Kegiatan	: 2.21.02.2.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.531.500,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.468.005,00	
Bidang Urusan	: 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
Organisasi	: 3.26.2.22.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
Unit Organisasi	: 3.26.2.22.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
Program	: 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		

Indikator Hasil	: Persentase pelaku seni untuk mengenal, memahami, menghargai dan ikut melestarikan nilai budaya		
Kegiatan	: 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan		
Sub Kegiatan	: 2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.000.000,00	
Bidang Urusan	: 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		
Organisasi	: 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		
Unit Organisasi	: 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		
Program	: 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan Keperpustakaan		
Kegiatan	: 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan		
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0002 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.899.630,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0006 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.445.850,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.575.000,00	
Kegiatan	: 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya		
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.02.0001 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat		

Indikator Keluaran	: Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.133.470,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.569.740,00	
Program	: 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Kegiatan	: 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	1.594.374.784,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	79.812.000,00	
Kegiatan	: 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.629.080,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.874.084,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.403.890,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.535.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	273.809.756,00	
Kegiatan	: 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang DisediakanJumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.978.089,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.026.363,00	
Kegiatan	: 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.235.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	401.179.702,00	
Bidang Urusan	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		
Program	: 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		
Indikator Hasil	: Persentase Tersusunnya Arsip yang sesuai standar		
Kegiatan	: 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.193.677,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.973.597,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Organisasi	: 3.25.3.27.2.09.01.0000 DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN		
Unit Organisasi	: 3.25.3.27.2.09.01.0000 DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN		
Program	: 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap		
Kegiatan	: 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah KUB yang dibina, didampingi dan difasilitasi		
Sub Kegiatan	: 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.045.785.552,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.439.950,00	
Program	: 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		
Indikator Hasil	: Persentase Produksi Perikanan Budidaya		
Kegiatan	: 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.190.100,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.809.900,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.275.578,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	132.724.422,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.04.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	883.778.980,00	
Program	: 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		
Indikator Hasil	: Persentase produksi Pengolahan perikanan		
Kegiatan	: 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen data pengolahan hasil perikanan dan pemasaran		
Sub Kegiatan	: 3.25.06.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		

Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	
Kegiatan	: 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Poklahsar Terbina		
Sub Kegiatan	: 3.25.06.2.02.0001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.283.200,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.717.039,00	
Kegiatan	: 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan sarana dan prasarana olahan perikanan yang dilakukan		
Sub Kegiatan	: 3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Kegiatan	: 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan keuangan dinas		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.01	Belanja Pegawai	8.315.130.693,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	254.280.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan Administrasi BMD		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	43.800.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan kepegawaian		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan administrasi umum		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.479.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.531.750,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.561.350,00	

Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.448.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.692.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	330.330.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	31.226.999,00	
Kegiatan	: 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase tersedianya BMD		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.861.831,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.122.700,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.165.021,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	345.276.095,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	
Kegiatan	: 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase tersedianya jasa penunjang urusan Pemda		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.772.521,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.676.445,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.314.429,00	

Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.889.733.816,00	
Kegiatan	: 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemeliharaan BMD		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.822.515,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.388.857,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.270.000,00	
Bidang Urusan	: 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
Organisasi	: 3.26.2.22.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
Unit Organisasi	: 3.26.2.22.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
Program	: 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		
Indikator Hasil	: Persentase destinasi pariwisata yang dilakukan peningkatan		
Kegiatan	: 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata yang dilaksanakan oleh daerah		
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	187.000.000,00	
Program	: 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		
Indikator Hasil	: Persentase objek destinasi dan event pariwisata yang dipasarkan		
Kegiatan	: 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Kegiatan Pemasaran yang dilaksanakan oleh daerah		
Sub Kegiatan	: 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
Program	: 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan layanan Pemerintahan		
Kegiatan	: 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan		
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236.808.000,00	
Kegiatan	: 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Kualitas Administrasi Keuangan Di dinas Pariwsata Dan Kebudayaan		
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	3.638.036.916,00	

Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	190.920.000,00	
Kegiatan	: 3.26.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Kualitas SDM Di dinas Pariwsata Dan Kebudayaan		
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.050.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	301.607.000,00	
Kegiatan	: 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Kualitas administrasi umum Di dinas Pariwsata Dan Kebudayaan		
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.156.908,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.843.092,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.063.022,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	336.464.143,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Kegiatan	: 3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Sarana Dan Prasarana Di dinas Pariwsata Dan Kebudayaan		
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	156.020.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.559.826,00	
Kegiatan	: 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Jasa Penunjang Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan		

Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.345.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.369.265,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.834.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	990.507.998,00	
Kegiatan	: 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemeliharaan Barang Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan		
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.242.530,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.460.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		

Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	
Bidang Urusan	: 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		
Organisasi	: 3.25.3.27.2.09.01.0000 DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN		
Unit Organisasi	: 3.25.3.27.2.09.01.0000 DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN		
Program	: 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Persentase Penyediaan Sarana Pertanian		
Kegiatan	: 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan,Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
Program	: 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian		
Kegiatan	: 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah kawasan yang menghasilkan produk pertanian, peternakan, perkebunan dan biogas untuk memenuhi kebutuhan lokal kecamatan		
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.01.0016 Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
Kegiatan	: 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana Pertanian		
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	
Program	: 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		
Indikator Hasil	: Persentase kesehatan hewan ternak dan kesmavet		
Kegiatan	: 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah pelayanan jasa medik veteriner		
Sub Kegiatan	: 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	
Program	: 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan pemberdayaan kelompok tani		
Kegiatan	: 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah pelaksanaan penyuluhan pertanian		
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.500.000,00	
Bidang Urusan	: 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
Organisasi	: 2.17.3.30.2.07.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
Unit Organisasi	: 2.17.3.30.2.07.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
Program	: 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		
Indikator Hasil	: Persentase perizinan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan		
Kegiatan	: 3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		
Sub Kegiatan	: 3.30.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.004.802,00	
Program	: 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		
Indikator Hasil	: Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang dikelola dengan baik		

Kegiatan	: 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Dostribusi Perdagangan		
Sub Kegiatan	: 3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	390.000.000,00	
Program	: 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		
Indikator Hasil	: Persentase kestabilan harga barang		
Kegiatan	: 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ketersediaan Bapokting (Hari)		
Sub Kegiatan	: 3.30.04.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.453.000,00	
Bidang Urusan	: 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		
Organisasi	: 2.17.3.31.3.32.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
Unit Organisasi	: 2.17.3.31.3.32.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
Program	: 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		
Indikator Hasil	: Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Industri		
Kegiatan	: 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Pertumbuhan Pelaku Usaha Industri Yang tumbuh di Kawasan SIKM		
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	336.515.679,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH		
Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH		
Unit Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH		
Program	: 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		

Indikator Hasil	: persentase tercapainya kegiatan kesejahteraan rakyat dalam membentuk akhlakul karimah		
Kegiatan	: 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan		
Indikator Keluaran	: persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan		
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.843.724,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.925.200,00	
Kegiatan	: 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.327.934.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	1.230.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.254.719.376,00	
Kegiatan	: 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		
Indikator Keluaran	: persentase pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi hukum		
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	385.441.700,00	

Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	592.538.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.465.000,00	
Program	: 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		
Indikator Hasil	: jumlah kebijakan yang diterbitkan dalam pengendalian perekonomian dan pembangunan jumlah kebijakan yang diterbitkan dalam pengendalian perekonomian dan pembangunan persentase kebijakan yang diterbitkan dalam pengendalian perekonomian dan pembangunan		
Kegiatan	: 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		
Indikator Keluaran	: persentasen pelaksanaan kebijakan perekonomian		
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.608.750,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.244.360,00	
Kegiatan	: 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.085.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	575.191.200,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.439.700,00	
Kegiatan	: 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.449.456,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	311.203.875,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.199.700,00	
Kegiatan	: 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		
Indikator Keluaran	: persentase pelaksanaan pemantauan kebijakan sumber daya alam		
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.350.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.000.000,00	
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan layanan pemerintahan		
Kegiatan	: 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penyediaan Administrasi Keuangan		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	20.210.671.207,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	788.940.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.366.200,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyediaan Barang/ Jasa Rutinitas Perkantoran		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.193.255,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.879.421,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.197.825.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.765.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	995.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.706.000.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	264.571.644,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	248.774.994,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.489.760,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.549.324.640,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	295.561.344,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.965.621.608,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	310.750.120,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.350.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	608.255.288,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	194.913.655,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.01	Belanja Pegawai	400.014.935,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.744.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi		
Indikator Keluaran	: Persentase Penataan Organisasi		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.528.381,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.279.610,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.278.790,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	305.110.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	258.308.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.177.493,00	
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD		
Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD		
Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD		
Program	: 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		
Indikator Hasil	: capaian penetapan perda		
Kegiatan	: 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Pembentukan Peraturan Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.192.007.300,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	587.197.300,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Pembahasan Kebijakan Anggaran		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.242.500,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.229.400,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	426.224.400,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	390.009.000,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Peningkatan Kapasitas DPRD		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.521.609.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Ahli Fraksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	618.036.240,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	440.883.476,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.223.695.551,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Presentase Pemenuhan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.096.361.100,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	518.812.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses		
Indikator Keluaran	: Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.760.444.900,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Fasilitasi Tugas DPRD		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.462.500.000,00	
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Kegiatan	: 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.787.700,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.620,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.919.660,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.949.900,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.513.300,00	

Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.645.100,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.064.500,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	4.160.291.983,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	207.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.668.300,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.441.800,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.628.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.552.926,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	108.735.842,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.577.245,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.582.040,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.231.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	494.646.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.611.200,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.923.234,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.916.625,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.162.958.968,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.183.296,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.990.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	212.921.069,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	11.013.913.520,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	563.389.800,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	697.095.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.16.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.009.700,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	251.480.300,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN		
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
Program	: 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD		
Kegiatan	: 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		
Indikator Keluaran	: Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu dan sesuai konten		
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	427.869.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.180.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.412.750.850,00	
Kegiatan	: 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase ketersediaan data untuk perencanaan		
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.172.000,00	
Kegiatan	: 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase indikator kinerja sasaran daerah pada RPJMD yang dievaluasi capaian realisasinya		
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	243.744.600,00	
Program	: 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase Dokumen Perancanaan Perangkat Daerah yang berkualitas		
Kegiatan	: 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		

Indikator Keluaran	: Persentase pelaksanaan koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia		
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.926.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.734.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.875.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.576.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.198.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.375.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Kegiatan	: 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		
Indikator Keluaran	: Persentase pelaksanaan koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang perekonomian		
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.317.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.792.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.410.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.918.310,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.792.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.375.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Kegiatan	: 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
Indikator Keluaran	: Persentase pelaksanaan koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan		
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.721.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.692.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.675.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.050.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.896.700,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.975.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.580.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Program	: 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah		
Kegiatan	: 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase dokumen perencanaan, dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perudang-undangan		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.165.700,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.845.045,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	5.847.835.704,00	

Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	306.960.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.690.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.656.000,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan rapat, aktivitas lapangan, dan pelayanan tamu, perjalanan dinas serta dukungan SPBE		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.192.130,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.942.798,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.516.936,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.247.625,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.529.852,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	683.785.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.000.000,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	253.002.483,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.154.315,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.941.585,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	300.252.778,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.366.560,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran dan langganan lainnya		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.634.858,00	

Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.830.680.936,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase barang milik daerah berkondisi baik		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.038.020,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN		
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
Program	: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase silpa terhadap APBD		
Kegiatan	: 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.410.860,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.700.000,00	

Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.351.150,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	733.732.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	757.933.920,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0010 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.459.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.167.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0012 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.736.100,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	214.634.100,00	
Kegiatan	: 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	247.525.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.116.000,00	
Kegiatan	: 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.658.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	414.402.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.784.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.090.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.761.760,00	
Kegiatan	: 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		
Indikator Keluaran	: Laporan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA		
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.4	BELANJA TRANSFER		
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.721.028.473,00	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	107.622.177.406,00	
Kegiatan	: 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.05.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	972.960.960,00	
Program	: 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		
Indikator Hasil	: Cakupan pengelolaan asset daerah		
Kegiatan	: 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Standar Harga yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	720.289.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		

[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	891.061.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase tingkat pertumbuhan PAD		
Kegiatan	: 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah Laporan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.429.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.977.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.099.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.824.500,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Kegiatan	: 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	550.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	12.244.547.601,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	817.920.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.212.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.125.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Pengadaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.947.133,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	171.341.708,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.903.380,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.540.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	329.037.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.874.900,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104.360.942,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.302.445,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.799.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.089.028,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.417.658.184,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.337.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.780.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.094.000,00	
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN		
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase jumlah pemenuhan ASN berdasarkan Anjab dan ABK		
Kegiatan	: 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.381.238,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.588.053,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.316.925,00	
Kegiatan	: 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrasi, Fungsional dan Pelaksana		
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.931.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.195.900,00	
Kegiatan	: 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN		

Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Menempuh Pendidikan Lanjutan		
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.584.000,00	
Kegiatan	: 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		
Indikator Keluaran	: Persentase Aparatur Berkinerja Baik		
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.034.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.097.000,00	
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Kegiatan	: 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai peraturan perudang-undangan		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		

Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	5.666.024.223,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	160.080.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.694.884,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.430.524,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.561.742,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.527.660,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.904.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.040.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	380.958.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.503.169,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.450.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.011.500,00	

Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	761.550.632,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.350.075,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.680.000,00	
Bidang Urusan	: 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
Program	: 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
Indikator Hasil	: Persentase Cakupan Pengembangan Aparatur		
Kegiatan	: 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		
Sub Kegiatan	: 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.278.694.200,00	
Bidang Urusan	: 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
Program	: 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		
Indikator Keluaran	: -		

Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.01.0014 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.526.000,00	
Kegiatan	: 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi		
Indikator Keluaran	: Persentase pengembangan inovasi dan teknologi yang dimanfaatkan		
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.679.250,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.009.944,00	
Bidang Urusan	: 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN		
Organisasi	: 5.06.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH		
Unit Organisasi	: 5.06.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH		
Program	: 5.06.02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN		
Indikator Hasil	: Persentase terlaksananya kerjasama pembangunan Kawasan perbatasan Persentase capaian penyusunan perencanaan pembangunan berdasarkan lokpri		
Kegiatan	: 5.06.02.2.01 Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama		
Indikator Keluaran	: Persentase Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama		
Sub Kegiatan	: 5.06.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.580.535,00	
Kegiatan	: 5.06.02.2.02 Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan urusan Kewilayahan di Kecamatan Lokpri		
Sub Kegiatan	: 5.06.02.2.02.0003 Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.663.137,00	
Kegiatan	: 5.06.02.2.03 Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi		
Sub Kegiatan	: 5.06.02.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.671.970,00	
Program	: 5.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah Cakupan layanan pemerintahan		
Kegiatan	: 5.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun		
Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	
Kegiatan	: 5.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	2.349.722.531,00	
Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	112.440.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.634.700,00	
Kegiatan	: 5.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	7.308.000,00	
Kegiatan	: 5.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Kegiatan	: 5.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.090.625,00	
Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.480.000,00	

Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.457.805,00	
Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.206.000,00	
Kegiatan	: 5.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	79.614.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.988.859,00	
Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.575.488,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.377.966,00	
Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.155.840,00	
Kegiatan	: 5.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.971.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.545.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.764.464,00	
Kegiatan	: 5.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.232.650,00	
Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.120.000,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan	: 6.01 INSPEKTORAT DAERAH		

Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH		
Unit Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH		
Program	: 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		
Indikator Hasil	: Persentase Terlaksananya Program Penyelenggaran Pengawasan		
Kegiatan	: 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal		
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal		
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.056.500,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	218.890.691,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.917.000,00	
Kegiatan	: 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksanannya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.135.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	
Program	: 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		
Indikator Hasil	: Persentase perangkat daerah yang sudah dinilai SPIP		
Kegiatan	: 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Kegiatan	: 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi		
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksanannya Pendampingan dan Asistensi		
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.554.118,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.492.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	573.109.610,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.676.100,00	
Program	: 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Kegiatan	: 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.474.100,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.990.000,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		

Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	8.248.403.184,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	141.480.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.399.000,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksannya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	48.000.000,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.999.900,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	385.000.000,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksanannya Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.216.200,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.338.412,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.870.375,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.011.095,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.655.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	426.766.500,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksanannya Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	106.152.000,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.197.484,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.318.901.372,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya Pemeliharaa Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	279.981.434,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN		
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN		
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN SIANTAN		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN SIANTAN		
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan		
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Indikator Keluaran	: Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.144.342,00	

Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Indikator Hasil	: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.614.088,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.681.150,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.757.300,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.769.231,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah		
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase terlaksananya Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.008.046,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.268.600,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	2.678.451.038,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	184.476.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.046.400,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.068.600,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.570.131,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.252.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.721.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.442.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.938.600,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.165.127,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.550.400,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.217.400,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.423.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.942.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.128.723,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.764.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.356.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	661.762.478,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.560.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		

Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.530.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.200.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN SIANTAN		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.01 KELURAHAN TAREMPA		
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan		
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.082.100,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.365.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.138.150.376,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.741.596,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pencegahan COVID-19 di Tingkat Desa dan kelurahan		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.05.0001 Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah		
Kegiatan	: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.481.273,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.977.782,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.522.175,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.225.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.700.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.330.220,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.613.165,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.360.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.100.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN JEMAJA		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN JEMAJA		
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Indikator Hasil	: Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan (Kecamatan Jemaja)		
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang dilaksanakan tiap kecamatan (Kecamatan Jemaja)		
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Indikator Keluaran	: Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.767.368,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: Persentase kasus keamanan Ketentraman Dan Ketertiban yang ditangani (Kecamatan Jemaja)		
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
Indikator Keluaran	: Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.197.200,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Indikator Hasil	: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kecamatan Jemaja)		
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.901.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.008.000,00	

Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kecamatan Jemaja)		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.680.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.146.488,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.746.438,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan layanan pemerintahan		
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.157.150,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.181.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.991.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.229.900,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.838.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	572.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	348.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	3.661.162.525,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	172.380.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.681.740,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	569.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.792.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.130.486,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.783.115,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.086.432,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.210.620,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.674.400,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.760.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.393.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.882.699,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.228.600,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.318.048,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.097.274.248,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.570.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.880.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.335,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN JEMAJA		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.02.01 KELURAHAN LETUNG		
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang dilaksanakan tiap kecamatan (Kecamatan Jemaja) Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang dilaksanakan tiap kecamatan (Kecamatan Jemaja)		
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.184.700,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.432.492,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	508.792.000,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.898.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.020.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.223.220,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.952.300,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.998.928,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.570.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.460.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.820.800,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN PALMATAK		

Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN PALMATAK		
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang dilaksanakan tiap kecamatan (Kecamatan Palmatak)		
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.284.270,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Indikator Hasil	: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.297.075,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Desa yang di Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.592.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.249.000,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah		

Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	2.624.953.186,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	96.600.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	26.760.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.622.546,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.613.658,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.883.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.560.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.695.971,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.268.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.293.188.488,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SIANTAN TIMUR		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SIANTAN TIMUR		
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Indikator Hasil	: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		

Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	335.606.594,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	28.696.400,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	152.169.611,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan Pemerintahan		
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.364.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.843.500,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	1.652.463.335,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	93.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.560.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	18.600.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.249.100,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	7.101.060,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.315.540,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	194.180.200,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	60.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	225.901.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	72.790.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	23.712.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	560.473.146,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN SIANTAN SELATAN		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN SIANTAN SELATAN		
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan		
Kegiatan	: 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.120.662,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Indikator Hasil	: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kecamatan Siantan Selatan)		
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.312.190,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kecamatan Siantan Selatan)		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Persentase Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.624.400,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.505.400,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan layanan pemerintahan		
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ketersediaan Gaji dan tunjangan ASN		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	1.606.534.578,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	93.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	22.800.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Umum		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.574.050,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.231.284,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.795.126,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.038.960,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.022.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.210.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pegadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.741.320,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.755.739,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.066.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	296.596.224,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah/Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.626.140,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.850.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.380.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN JEMAJA TIMUR		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN JEMAJA TIMUR		
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang dilaksanakan tiap kecamatan (Jemaja Timur) Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		
Kegiatan	: 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.515.400,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.600.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.500.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayah		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.515.400,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.600.000,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Tersedianya Dokumen/Laporan Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.832.823,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.761.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.855.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.932.200,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.855.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.840.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Smesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Smesteran SKPD Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	1.951.283.210,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	129.930.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.489.400,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.489.400,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Rekonlisiasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.565.110,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.700.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Di Sediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang di Sediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Sediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang di Sediakan		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.219.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.617.235,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.074.700,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.740.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.072.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	602.784.224,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di Pelihara dan di Bayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesinlainya yang di Pelihara		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.987.704,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.568.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN SIANTAN TENGAH		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN SIANTAN TENGAH		
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang dilaksanakan tiap kecamatan (Siantan Tengah)		
Kegiatan	: 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamata		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.611.176,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: PERSENTASE PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		

Indikator Keluaran	: Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.032.400,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Indikator Hasil	: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Siantan Tengah)		
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.440.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kecamatan Siantan Tengah)		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.350.000,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan layanan pemerintahan		
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.690.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.135.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.280.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	1.754.992.549,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	112.056.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.286.703,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.825.205,00	
5.2	BELANJA MODAL		

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.445.922,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.750.403,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.867.998,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.667.970,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.983.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.686.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.420.450,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	949.555.024,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.330.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.370.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN SIANTAN UTARA		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN SIANTAN UTARA		
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		

Indikator Hasil	: Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Kecamatan Siantan Utara) Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.110.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: Tersedianya Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan		
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.249.500,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Indikator Hasil	: Meningkatnya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.650.655,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.464.200,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		

Indikator Keluaran	: Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.203.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.056.000,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	1.503.816.858,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	87.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	10.788.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.673.425,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.545.938,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.264.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.802.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.772.885,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.259.940,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.688.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.037.398,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	525.727.040,00	

Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.368.370,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN JEMAJA BARAT		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN JEMAJA BARAT		
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang dilaksanakan tiap kecamatan (Kecamatan Jemaja Barat)		
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Indikator Keluaran	: Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.520.703,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Indikator Hasil	: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kecamatan Jemaja Barat)		
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.314.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kecamatan Jemaja Barat)		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.971.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.384.615,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan layanan pemerintahan		
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.380.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.035.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.380.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	828.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	966.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.380.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.480.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	1.814.742.237,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	96.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.336.600,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.212.400,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.235.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.380.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terlaksananya Kegiatan Yg dihasilkan		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.006.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.810.959,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.456.089,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.704.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.714.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.625.865,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.236.976,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.018.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	394.953.332,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.456.506,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.521.580,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN KUTE SIANTAN		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN KUTE SIANTAN		
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang dilaksanakan tiap kecamatan (Kecamatan Kute Siantan)		
Kegiatan	: 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.653.477,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.320.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: Persentase kasus keamanan Ketentraman Dan Ketertiban yang ditangani (Kute Siantan)		
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
Indikator Keluaran	: Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.077.090,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Indikator Hasil	: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kecamatan Kute Siantan)		
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.460.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.801.200,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kecamatan Kute Siantan)		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.283.200,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.474.964,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Tersedianya Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.330.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.116.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.418.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.870.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		

Indikator Keluaran	: Persentase Tersedianya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	2.112.722.565,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	107.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.990.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.160.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Tersedianya Laporan Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.722.900,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.930.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.876.200,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.837.556,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.640.283,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.297.474,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.823.360,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.984.595,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.955.890,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.480.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.767.320,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.686.875,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.650.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.030.824.966,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.080.015,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.480.000,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
Bidang Urusan	: 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
Organisasi	: 1.05.8.01.0.00.02.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
Unit Organisasi	: 1.05.8.01.0.00.02.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
Program	: 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		
Indikator Hasil	: indeks kepuasan masyrakat bidang ideologi dan wawasan kebangsaan		
Kegiatan	: 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah monitoring dan evaluasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, dan Pembauran Kebangsaan Jumlah pelajar yang memperoleh pendidikan/ pemahaman Bela Negara Terbentuknya pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Terbentuknya Tim GNRM Kabupaten Kepulauan Anambas Terlaksananya kegiatan GNRM Terlaksananya kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya rapat koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan Tersalurnya bantuan dana hibah Untuk Forum Pembauran Kebangsaan		
Sub Kegiatan	: 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	
Program	: 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		
Indikator Hasil	: rata-rata tingkat partisipasi pemilih pada pemilu dan pilkada		
Kegiatan	: 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat yang memperoleh penguatan pendidikan politik Jumlah partai politik yang mendapatkan bantuan dana hibah Jumlah Pemilih Muda yang memperoleh penguatan pendidikan politik Jumlah pengurus parpol yang memperoleh penguatan pendidikan politik Jumlah Perempuan yang memperoleh penguatan pendidikan politik Jumlah rapat komunikasi dan koordinasi Partai Politik dan Pemerintah Daerah Terlaksananya rapat koordinasi penguatan ideologi pancasila, wawasan kebangsaan dan pendidikan politik		
Sub Kegiatan	: 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah	17.023.505.400,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.03.2.01.0006 Pelaksanaan tugas Paskibraka		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.067.307,00	
Program	: 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		
Indikator Hasil	: indeks kepuasan masyrakat bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya		
Kegiatan	: 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan/ Peraturan/ pedoman/ rekomendasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Jumlah monitoring dan evaluasi di bidang ketahanan ekonomi sosial budaya Terbentuknya pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Terlaksananya dialog antar umat beragama Terlaksananya kegiatan RAN P4GN Terlaksananya rapat koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama Tersalurnya bantuan dana hibah Untuk Forum Kerukunan Umat Beragama Terselenggaranya kegiatan Sosial Budaya masyarakat		
Sub Kegiatan	: 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	
Program	: 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		

Indikator Hasil	: persentase isu kewaspadaan/ konflik sosial yg berhasil ditangani		
Kegiatan	: 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		
Indikator Keluaran	: - Jumlah fasilitasi pelak sanaan rapat koordinasi terkait kewaspadaan dini dan penanganan konflik di daerah		
Sub Kegiatan	: 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah	500.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	268.093.100,00	
Program	: 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase Urusan Pemerintahan terselesaikan		
Kegiatan	: 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelaksanaan dan pelaporan administrasi keuangan		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	3.780.838.173,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	171.720.000,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	16.428.000,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelaksanaan administrasi umum		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.995.800,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.992.566,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.920.030,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.072.952,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.918.751,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.318.000,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pengadaan sarana dan prasarna sesuai kebutuhan		

Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	147.600.290,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.764.059,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.804.375,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.395.490,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	506.144.824,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: X NON URUSAN		
Bidang Urusan	: X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX		
Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		
Unit Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		
Program	: X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan layanan pemerintahan		

Kegiatan	X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah		
Sub Kegiatan	X.XX.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.981.600,00	

PEMBIAYAAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	10.500.000.000,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.000.000.000,00	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000,00	
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	2.000.000.000,00	

Kab. Kepulauan Anambas, 29 Desember 2023

Bupati

ABDUL HARIS

Lampiran IV : Peraturan Daerah
Nomor : 05 Tahun 2023
Tanggal : 29 Desember 2023

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

TAHUN ANGGARAN 2024

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/Paket B - - Angka Partisipasi Sekolah SD/Mi/Paket A Persentase jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) Persentase jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	99 % 0 0 0 0 100 % 100 % 50,1 %							
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Tersedianya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	53 %							
1	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)									
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	4 Unit	217.708.738,00	0,00	0,00	0,00	217.708.738,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah									
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	868.315.018,00	4.119.438.635,00	0,00	0,00	4.987.753.653,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	162.292.522,00	3.096.290.975,00	0,00	0,00	3.258.583.497,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	0,00	24.992.400,00	0,00	0,00	24.992.400,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah									
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	5.265.000,00	23.721.600,00	0,00	0,00	28.986.600,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah									
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	132.480.919,00	1.808.944.622,00	0,00	0,00	1.941.425.541,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah									
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	10 Paket	97.734.932,00	1.534.307.380,00	0,00	0,00	1.632.042.312,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
8	1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar									
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	300 Peserta Didik	679.109.000,00	0,00	0,00	0,00	679.109.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
9	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	30 Peserta Didik	249.977.850,00	0,00	0,00	0,00	249.977.850,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
10	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar									
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	10 Orang	199.999.200,00	0,00	0,00	0,00	199.999.200,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
11	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang	649.999.680,00	0,00	0,00	0,00	649.999.680,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
12	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah									
			Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	66 Satuan Pendidikan	199.999.693,00	0,00	0,00	0,00	199.999.693,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
13	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	66 Orang	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
14	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	66 Dokumen	499.999.950,00	0,00	0,00	0,00	499.999.950,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
15	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan									
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	499.999.625,00	0,00	0,00	0,00	499.999.625,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
16	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan									
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	5 Komunitas	499.999.050,00	0,00	0,00	0,00	499.999.050,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
17	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan									
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	66 Orang	749.548.572,00	0,00	0,00	0,00	749.548.572,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah									
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	55.023.129,00	717.525.166,00	0,00	0,00	772.548.295,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya pengelolaan pendidikan menengah pertama	29 Ruang/Sekolah/Unit/Buah/Set/Siswa/Orang/Tahun							
19	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU									
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	10 Ruang	191.726.067,00	1.550.110.711,00	0,00	0,00	1.741.836.778,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
20	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah									
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang	990.745.568,00	330.000.652,00	0,00	0,00	1.320.746.220,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
21	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium									
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	2 Ruang	753.910.193,00	2.649.761.952,00	0,00	0,00	3.403.672.145,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
22	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	20 Unit	74.177.414,00	1.560.332.384,00	0,00	0,00	1.634.509.798,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
23	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah									
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	24.992.400,00	0,00	0,00	0,00	24.992.400,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
24	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	3.000.000,00	445.658.221,00	0,00	0,00	448.658.221,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
25	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah									
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	10 Paket	14.343.500,00	1.162.843.488,00	0,00	0,00	1.177.186.988,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
26	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama									
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 Peserta Didik	1.297.468.000,00	0,00	0,00	0,00	1.297.468.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
27	1.01.02.2.02.0034	Perlengkapan Belajar Peserta Didik									
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	30 Paket	349.901.925,00	0,00	0,00	0,00	349.901.925,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
28	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50 Peserta Didik	249.936.340,00	0,00	0,00	0,00	249.936.340,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
29	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama									
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	10 Orang	199.932.200,00	0,00	0,00	0,00	199.932.200,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
30	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama									
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 Orang	649.999.096,00	0,00	0,00	0,00	649.999.096,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
31	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	27 Satuan Pendidikan	199.999.950,00	0,00	0,00	0,00	199.999.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
32	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama									
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	25 Satuan Pendidikan	2.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
33	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	25 Dokumen	244.043.188,00	0,00	0,00	0,00	244.043.188,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
34	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU									
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	2.095.000,00	21.180.000,00	0,00	0,00	23.275.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tersedianya pengelolaan PAUD Tersedianya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	9 Unit/Ruang/Lembaga/Orang/Tahun 9 Unit/Ruang/Lembaga/O							
35	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD									
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	5 Unit	552.874.542,00	492.941.932,00	0,00	0,00	1.045.816.474,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
36	1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD									
			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	200.368.795,00	0,00	0,00	0,00	200.368.795,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
37	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	2 Paket	6.950.000,00	13.639.326,00	0,00	0,00	20.589.326,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
38	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD									
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	0 Paket	55.700.646,00	0,00	0,00	0,00	55.700.646,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
39	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD									
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	250 Peserta Didik	1.586.870.000,00	0,00	0,00	0,00	1.586.870.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
40	1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD									
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	50 Peserta Didik	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
41	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD									
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 Orang	202.411.600,00	0,00	0,00	0,00	202.411.600,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
42	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD									
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	5 Satuan Pendidikan	150.924.000,00	0,00	0,00	0,00	150.924.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
43	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD									
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	25 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
44	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan	9 Lembaga/ Orang							
45	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan									
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	50 Peserta Didik	245.840.000,00	0,00	0,00	0,00	245.840.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
46	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan									
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	10 Satuan Pendidikan	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Terlakasananya pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidika Terlaksananya pemerataan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan	50 Orang/Sekolah 50 Orang/Sekolah							
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonfornal/kesetaraan	50 Orang/Sekolah							
47	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 Laporan	341.600.000,00	0,00	0,00	0,00	341.600.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Lembaga Pendidikan(PAUD-Pendidikan dasar non formal) yang memiliki izin	2 Persen							
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Tersedianya penerbitan izin PAUD dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyaraka	2 Sekolah							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	5 Dokumen	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang disusun Jumlah dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang disusun	8 Dokumen 8 Dokumen							
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD disusun Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun Jumlah Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen							
49	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	100.828.100,00	0,00	0,00	0,00	100.828.100,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersediannya Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	100 Persen							
50	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	860 Orang/bulan	146.579.055.343,00	0,00	0,00	0,00	146.579.055.343,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
51	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	1.319.880.000,00	0,00	0,00	0,00	1.319.880.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersediannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	61.891.000,00	0,00	0,00	0,00	61.891.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya operasional kantor	1 Tahun							
53	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	118.093.266,00	124.748.738,00	0,00	0,00	242.842.004,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
54	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	51.962.322,00	0,00	0,00	0,00	51.962.322,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
55	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	418.834.195,00	0,00	0,00	0,00	418.834.195,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
56	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	58.510.700,00	0,00	0,00	0,00	58.510.700,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
57	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	849.320.000,00	0,00	0,00	0,00	849.320.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1 Tahun							
58	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	225.424.210,00	0,00	0,00	0,00	225.424.210,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
59	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	42.380.883.736,00	0,00	0,00	0,00	42.380.883.736,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah	1 Tahun							
60	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	194.342.320,00	2.778.994,00	0,00	0,00	197.121.314,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	- Tersedianya kegiatan pembinaan kapasitas kepemudaan	0 60 Orang/Paket/Mitra							
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tersedianya pemberdayaan dan pengembangan pemuda	60 Orang/Paket							
61	2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor									
			Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	50 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
62	2.19.02.2.01.0006	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	25 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang olahraga dan pengembangan atlet Tersedianya sarana dan prasarana penunjang olahraga dan pengembangan atlet	3 Cabor/Paket/Event/Atlet/Club/Jenis 3 Persen/Cabor/Paket/Event/Atlet/Club/Jenis							
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya penyelenggaraan kejuaraan tingkat daerah kab/kota Tersedianya penyelenggaraan kejuaraan tingkat daerah kabupaten/kota	3 Cabor/Event 3 Cabor/Event							
63	2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan									
			Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	30 Orang	702.505.440,00	0,00	0,00	0,00	702.505.440,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat provinsi	5 Atlet							
64	2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota									
			Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	30 Orang	221.854.592,00	0,00	0,00	0,00	221.854.592,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga	3 Club							
65	2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	4 Organisasi	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	2 Event/Jenis							
66	2.19.03.2.05.0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	50 Unit	2.074.297.112,00	0,00	0,00	0,00	2.074.297.112,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase pemenuhan pengembangan kapasitas kepramukaan	40 %							
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	10 %							
67	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah									
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	2 Organisasi	242.650.181,00	0,00	0,00	0,00	242.650.181,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
68	2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah									
			Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	50 Orang	377.939.742,00	0,00	0,00	0,00	377.939.742,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
69	2.19.04.2.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan									
			Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	5 Organisasi	278.052.133,00	0,00	0,00	0,00	278.052.133,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan pemerintahan	1 Tahun							
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1 Tahun							
70	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	137.874.937,00	0,00	0,00	0,00	137.874.937,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	X	NON URUSAN									
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan pemerintahan	1 Tahun							
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah	1 Tahun							
71	X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	14.981.600,00	0,00	0,00	0,00	14.981.600,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi sarana dan prasarananya	100,07 %							
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi saranan dan prasarananya	100 %							
72	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	15 Unit	3.447.730.957,00	29.342.726.665,00	0,00	0,00	32.790.457.622,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
73	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan									
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	13 Unit	4.621.800,00	13.653.768.223,00	0,00	0,00	13.658.390.023,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
74	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	13 Unit	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
75	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan									
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	21 Paket	13.488.913.430,00	0,00	0,00	0,00	13.488.913.430,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
76	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan									
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	21 Paket	147.654.830,00	0,00	0,00	0,00	147.654.830,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa/kelurahan UCI disatu wilayah pada kurun waktu tertentu Jumlah Masyarakat Ber PHBS Jumlah Masyarakat Yang Telah Mendapatkan Vaksin Covid- 19 Jumlah Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah Kasus Malaria yang dimonfirmasi 1 Tahun Kasus Penduduk Usia produktif yang melakukan screening Faktotr Resiko PTM	100 % 50 % 90,87 % 98,44 % 0,25 0/000 100 %							
77	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	880 Orang	63.115.000,00	0,00	0,00	0,00	63.115.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
78	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	835 Orang	141.459.054,00	0,00	0,00	0,00	141.459.054,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
79	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif									
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	37,653 Orang	147.810.000,00	0,00	0,00	0,00	147.810.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
80	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2,80% Dokumen	147.043.650,00	0,00	0,00	0,00	147.043.650,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
81	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7 Dokumen	489.152.720,00	0,00	0,00	0,00	489.152.720,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
82	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	8 Puskesmas Dokumen	163.645.600,00	0,00	0,00	0,00	163.645.600,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
83	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	59.485.000,00	0,00	0,00	0,00	59.485.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
84	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA									
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	7 Orang	49.790.000,00	0,00	0,00	0,00	49.790.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	11 Dokumen	444.081.002,00	27.397.200,00	0,00	0,00	471.478.202,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
86	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	36316 Dokumen	8.828.297.565,00	8.340.952,00	0,00	0,00	8.836.638.517,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
87	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional									
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	50 Paket	57.950.000,00	0,00	0,00	0,00	57.950.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
88	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	77.376.000,00	0,00	0,00	0,00	77.376.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
89	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	7 Laporan	8.590.000,00	0,00	0,00	0,00	8.590.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase sdmk yang terlatih sesuai dengan mutu dan standar kompetensi tenaga kesehatan	85 %							
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDMK yang terlatih sesuai dengan mutu dan standar kompetensi tenaga kesehatan	85 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	80 Orang	552.764.200,00	0,00	0,00	0,00	552.764.200,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100 %							
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100 undefined							
91	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	45.762.000,00	0,00	0,00	0,00	45.762.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan melaksanakan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %							
92	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	549 Orang/bulan	65.455.415.237,00	0,00	0,00	0,00	65.455.415.237,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
93	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50 Dokumen	1.054.170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.054.170.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Barang Milik Daerah	100 %							
94	1.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %							
95	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.545.700,00	0,00	0,00	0,00	10.545.700,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
96	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.055.890,00	121.101.666,00	0,00	0,00	134.157.556,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
97	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	15.550.000,00	0,00	0,00	0,00	15.550.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
98	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	197.021.973,00	0,00	0,00	0,00	197.021.973,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
99	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	86.569.000,00	0,00	0,00	0,00	86.569.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
100	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	460.097.200,00	0,00	0,00	0,00	460.097.200,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
101	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	265.894.126,00	0,00	0,00	0,00	265.894.126,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
102	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
103	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	32.370.000,00	0,00	0,00	0,00	32.370.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
104	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	26.235.877.238,00	0,00	0,00	0,00	26.235.877.238,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
105	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	50.001.000,00	0,00	0,00	0,00	50.001.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
106	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
107	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	316.066.269,00	0,00	0,00	0,00	316.066.269,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %							
108	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	10 Unit Kerja	35.280.000,00	0,00	0,00	0,00	35.280.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	100 %							
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil	100 %							
109	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain									
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	1 Unit	194.400.000,00	0,00	0,00	0,00	194.400.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase mitra kerja program KKBPK yang aktif dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah mitra kerja program KKBPK yang aktif /Jumlah mitra kerja program KKBPK yang sudah terbentuk	100 %							
110	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK									
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	64 Laporan	218.120.000,00	0,00	0,00	0,00	218.120.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
111	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja									
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	1 Organisasi	430.000.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peserta KB aktif modern / Pasangan Usia Subur	36 %							
112	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya									
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	16 Laporan	23.100.000,00	0,00	0,00	0,00	23.100.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
113	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB									
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 Unit	291.600.000,00	0,00	0,00	0,00	291.600.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
114	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya									
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	10 Laporan	327.577.000,00	0,00	0,00	0,00	327.577.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah peran serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat kecamatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber KB/ Jumlah Kecamatan yang ada	100 %							
115	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB									
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	1 Laporan	225.750.000,00	0,00	0,00	0,00	225.750.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kader BKB BKR, PPKA, PIK - R Yang diberi pelatihan Persentase Mitra dan Organisasi yang dilakukan Peningkatan Kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan hteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPK S)	100 % 100 %							
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kader BKB BKR, PPKA, PIK - R Yang diberi pelatihan dibagi Jumlah Kader BKB BKR, PPKA, PIK - R yang ada Jumlah Mitra dan Organisasi yang dilakukan Peningkatan Kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan hteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPK S)	100 % 100 %							
116	2.14.04.2.02.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)									
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	54 Organisasi	365.400.000,00	0,00	0,00	0,00	365.400.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
		RSUD Tarempa									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi sarana dan prasarananya	100 %							
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi saranan dan prasarananya	100 %							
117	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan									
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1 Unit	255.300.000,00	0,00	0,00	0,00	255.300.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
118	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	21.336.938,00	0,00	0,00	0,00	21.336.938,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
119	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.499.291,00	92.560.445,00	0,00	0,00	115.059.736,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
120	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	43.626.000,00	0,00	0,00	0,00	43.626.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
121	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	292.846.627,00	0,00	0,00	0,00	292.846.627,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
122	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	60.524.970,00	0,00	0,00	0,00	60.524.970,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
123	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	48.554.000,00	0,00	0,00	0,00	48.554.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
124	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	97.736.269,00	0,00	0,00	0,00	97.736.269,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
125	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	220.000.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
126	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	40.337.800,00	0,00	0,00	0,00	40.337.800,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
127	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	85.678.900,00	0,00	0,00	0,00	85.678.900,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	341.788.166,00	0,00	0,00	0,00	341.788.166,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-							
129	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.506.861.761,00	52.488.239,00	0,00	0,00	2.559.350.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD
		Puskesmas Siantan Timur									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Angka Annual Parasite Insidens (API) Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Masyarakat Yang Telah Mendapatkan Vaksin Covid-19 Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah	100 % 96 % 0,25 % 50 % 90,8 7 % 98,4 4 %							
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat Ber PHBS Kasus Malaria yang dimonfirmasi 1 Tahun "Kasus Penduduk Usia produktif yang melakukan screening Faktotr Resiko PTM"	50 % 0,25 % 100 %							
130	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	32.020.000,00	0,00	0,00	0,00	32.020.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
131	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	6.280.000,00	0,00	0,00	0,00	6.280.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
132	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir									
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	5.280.000,00	0,00	0,00	0,00	5.280.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
133	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita									
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	45.520.000,00	0,00	0,00	0,00	45.520.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
134	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	11.170.000,00	0,00	0,00	0,00	11.170.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
135	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif									
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	10.920.000,00	0,00	0,00	0,00	10.920.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
136	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	21.120.000,00	0,00	0,00	0,00	21.120.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
137	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	10.230.000,00	0,00	0,00	0,00	10.230.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
138	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	150.705.000,00	0,00	0,00	0,00	150.705.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
139	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	5.280.000,00	0,00	0,00	0,00	5.280.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
140	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	43.180.000,00	0,00	0,00	0,00	43.180.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
141	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	16.405.000,00	0,00	0,00	0,00	16.405.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
142	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	35.750.000,00	0,00	0,00	0,00	35.750.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
143	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	95.289.000,00	0,00	0,00	0,00	95.289.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
144	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	18.700.000,00	0,00	0,00	0,00	18.700.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan melaksanakan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan melaksanakan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %							
145	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	151.273.565,00	0,00	0,00	0,00	151.273.565,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Nyamuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
146	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	65.025.000,00	0,00	0,00	0,00	65.025.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Nyamuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	2.14.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-							
147	2.14.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	334.567.163,00	0,00	0,00	0,00	334.567.163,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD
		Balai Pengelola Farmasi dan Alat Kesehatan (BPFAK)									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
148	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.408.220,00	0,00	0,00	0,00	1.408.220,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
149	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7.928.140,00	0,00	0,00	0,00	7.928.140,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
150	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.228.000,00	0,00	0,00	0,00	8.228.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
151	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	18.900.000,00	0,00	0,00	0,00	18.900.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
152	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	21.060.000,00	0,00	0,00	0,00	21.060.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
153	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	16.851.200,00	0,00	0,00	0,00	16.851.200,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
154	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	99.528.600,00	0,00	0,00	0,00	99.528.600,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
155	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	7.140.000,00	0,00	0,00	0,00	7.140.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
156	1.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya									
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	10.490.000,00	0,00	0,00	0,00	10.490.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		Puskesmas Jemaja Barat									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM Angka Annual Parasite Insidens (API) Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Masyarakat Yang Telah Mendapatkan Vaksin Covid-19	96 % 100 % 0,25 % 98,4 4 % 50 % 90,8 7 %							
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa/kelurahan UCI disatu wilayah pada kurun waktu tertentu Jumlah Masyarakat Ber PHBS Jumlah Masyarakat Yang Telah Mendapatkan Vaksin Covid- 19 Jumlah Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah Kasus Malaria yang dimonfirmasi 1 Tahun Usia produktif yang melakukan screening Faktotr Resiko PTM	96 % 50 % 90,8 7 % 98,4 4 % 0,25 % 100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	52.900.000,00	0,00	0,00	0,00	52.900.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
158	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	10.180.000,00	0,00	0,00	0,00	10.180.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
159	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
160	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif									
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
161	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	21.380.000,00	0,00	0,00	0,00	21.380.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
162	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
163	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	142.414.000,00	0,00	0,00	0,00	142.414.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
165	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	28.298.000,00	0,00	0,00	0,00	28.298.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
166	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	22.330.000,00	0,00	0,00	0,00	22.330.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
167	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	77.300.000,00	0,00	0,00	0,00	77.300.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
168	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	53.550.000,00	0,00	0,00	0,00	53.550.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
169	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.891.050,00	0,00	0,00	0,00	5.891.050,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
171	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.989.500,00	0,00	0,00	0,00	5.989.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
172	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	39.940.110,00	0,00	0,00	0,00	39.940.110,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
173	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.010.000,00	0,00	0,00	0,00	10.010.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
174	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	24.700.000,00	0,00	0,00	0,00	24.700.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
175	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.054.990,00	0,00	0,00	0,00	10.054.990,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	33.394.490,00	0,00	0,00	0,00	33.394.490,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
177	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.010.000,00	0,00	0,00	0,00	50.010.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		Puskesmas Siantan Utara									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Angka Annual Parasite Insidens (API) Persentase Masyarakat Yang Telah Mendapatkan Vaksin Covid-19	undefined % 100 % 50 % 96 undefined 0,25 % 90,8 7 %							
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa/kelurahan UCI disatu wilayah pada kurun waktu tertentu/Jumla h desa Jumlah Masyarakat Ber PHBS Jumlah Masyarakat Yang Telah Mendapatkan Vaksin Covid- 19/ Jumlah Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah Kasus Malaria yang dimonfirmasi 1 Tahun Kasus Penduduk Usia produktif yang melakukan screening Faktotr Resiko PTM	96 % 55 % 90,8 7 % 98,4 4 % 0,25 % 100 %							
178	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	11.890.000,00	0,00	0,00	0,00	11.890.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
179	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	21.021.600,00	0,00	0,00	0,00	21.021.600,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
180	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita									
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	11.412.000,00	0,00	0,00	0,00	11.412.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
181	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	6.940.000,00	0,00	0,00	0,00	6.940.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
182	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif									
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	20.361.600,00	0,00	0,00	0,00	20.361.600,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
183	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	13.860.000,00	0,00	0,00	0,00	13.860.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
184	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	129.513.600,00	0,00	0,00	0,00	129.513.600,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
185	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	10.780.000,00	0,00	0,00	0,00	10.780.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
186	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	8.742.000,00	0,00	0,00	0,00	8.742.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
187	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	46.195.200,00	0,00	0,00	0,00	46.195.200,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
188	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	45.116.000,00	0,00	0,00	0,00	45.116.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
189	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	70.728.000,00	0,00	0,00	0,00	70.728.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
190	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
191	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.222.325,00	0,00	0,00	0,00	1.222.325,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
192	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	11.681.085,00	0,00	0,00	11.681.085,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
193	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7.984.389,00	0,00	0,00	0,00	7.984.389,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
194	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	26.986.680,00	0,00	0,00	0,00	26.986.680,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
195	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
196	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	39.590.000,00	0,00	0,00	0,00	39.590.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
197	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	46.980.961,00	0,00	0,00	0,00	46.980.961,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
198	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.472.000,00	0,00	0,00	0,00	2.472.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
199	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	3.962.700,00	0,00	0,00	0,00	3.962.700,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
200	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		Puskesmas Kute Siantan									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara erintegrasi di perangkat daerah Angka Annual Parasite Insidens (API) Persentase Masyarakat Yang Telah Mendapatkan Vaksin Covid-19 Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100 % 50 % 98,44 % 0,25 % 90,87 % 0,25 96 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa/kelurahan UCI disatu wilayah pada kurun waktu tertentu Jumlah Masyarakat Ber PHBS Jumlah Masyarakat Yang Telah Mendapatkan Vaksin Covid-19 "Jumlah Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah" Kasus Malaria yang dimonfirmasi 1 Tahun "Kasus Penduduk Usia produktif yang melakukan screening Faktotr Resiko PTM"	0,25 96 % 50 % 90,87 % 98,44 % 0,25 % 100 %							
201	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	17.700.000,00	0,00	0,00	0,00	17.700.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
202	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	22.975.000,00	0,00	0,00	0,00	22.975.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
203	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita									
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	19.700.000,00	0,00	0,00	0,00	19.700.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
204	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	4.310.000,00	0,00	0,00	0,00	4.310.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
205	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif									
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
206	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	18.400.000,00	0,00	0,00	0,00	18.400.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
207	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
208	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
209	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	118.082.200,00	0,00	0,00	0,00	118.082.200,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
210	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	6.580.000,00	0,00	0,00	0,00	6.580.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
211	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	17.104.000,00	0,00	0,00	0,00	17.104.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
212	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	96.396.000,00	0,00	0,00	0,00	96.396.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
213	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	258.079.739,00	42.695.280,00	0,00	0,00	300.775.019,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
214	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
215	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.158.450,00	0,00	0,00	0,00	5.158.450,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
216	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	21.253.280,00	11.900.610,00	0,00	0,00	33.153.890,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
217	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.136.500,00	0,00	0,00	0,00	10.136.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
218	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
219	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.234.500,00	0,00	0,00	0,00	9.234.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
220	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	27.350.000,00	0,00	0,00	0,00	27.350.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"	100 %							
221	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	18.271.300,00	0,00	0,00	0,00	18.271.300,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
222	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"	100 %							
223	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		RSUD Jemaja									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi sarana dan prasarananya	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi saranan dan prasarananya	100 %							
224	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan									
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1 Unit	42.685.820,00	0,00	0,00	0,00	42.685.820,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
225	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.665.170,00	0,00	0,00	0,00	14.665.170,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
226	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	16.225.549,00	0,00	0,00	16.225.549,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
227	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	40.999.616,00	0,00	0,00	0,00	40.999.616,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
228	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	225.188.224,00	0,00	0,00	0,00	225.188.224,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
229	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.204.000,00	0,00	0,00	0,00	6.204.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
230	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"	100 %							
231	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	42.638.926,00	0,00	0,00	0,00	42.638.926,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
232	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	118.200.000,00	0,00	0,00	0,00	118.200.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
233	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	26.851.000,00	0,00	0,00	0,00	26.851.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"	100 %							
234	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	28.380.000,00	0,00	0,00	0,00	28.380.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.151.500,00	0,00	0,00	0,00	50.151.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-							
236	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	361.000.000,00	0,00	0,00	0,00	361.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD
		RSUD Palmatak									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
237	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	28.189.382,00	0,00	0,00	0,00	28.189.382,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
238	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	138.756.640,00	0,00	0,00	0,00	138.756.640,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
239	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	301.286.203,00	0,00	0,00	0,00	301.286.203,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
240	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	26.250.000,00	0,00	0,00	0,00	26.250.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"	100 %							
241	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.105.000,00	0,00	0,00	0,00	6.105.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
242	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	190.381.400,00	0,00	0,00	0,00	190.381.400,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"	100 %							
243	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-							
244	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.958.235.100,00	100.000.000,00	0,00	0,00	3.058.235.100,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD
		Puskesmas Siantan Tengah									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Angka Annual Parasite Insidens (API) Persentase Masyarakat Yang Telah Mendapatkan Vaksin Covid-19 Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara erintegrasi di perangkat daerah	100 % 96 % 0,25 % 90,87 % 50 % 98,44 %							
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa/kelurahan UCI disatu wilayah pada kurun waktu tertentu Jumlah Masyarakat Ber PHBS Jumlah Masyarakat Yang Telah Mendapatkan Vaksin Covid-19 "Jumlah Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah" Kasus Malaria yang dimonfirmasi 1 Tahun "Kasus Penduduk Usia produktif yang melakukan screening Faktotr Resiko PTM"	96 % 50 % 90,87 % 98,44 % 0,25 % 100 %							
245	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	61.000.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
246	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	8.655.000,00	0,00	0,00	0,00	8.655.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
247	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	12.170.000,00	0,00	0,00	0,00	12.170.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
248	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	215.038.772,00	0,00	0,00	0,00	215.038.772,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
250	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	21.310.000,00	0,00	0,00	0,00	21.310.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
251	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	11.725.000,00	0,00	0,00	0,00	11.725.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
252	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	20.500.000,00	0,00	0,00	0,00	20.500.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
253	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	121.540.000,00	0,00	0,00	0,00	121.540.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
254	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	119.295.228,00	0,00	0,00	0,00	119.295.228,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
255	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
256	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	226.569.778,00	0,00	0,00	0,00	226.569.778,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
257	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	60.119.225,00	0,00	0,00	0,00	60.119.225,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-							
258	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	271.274.960,00	0,00	0,00	0,00	271.274.960,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD
		Puskesmas Letung									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Annual Parasite Insidens (API) Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase Masyarakat Yang Telah Mendapatkan Vaksin Covid-19 Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara erintegrasi di perangkat daerah	0,25 % 100 % 96 % 90,87 % 50 % 98,44 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa/kelurahan UCI disatu wilayah pada kurun waktu tertentu Jumlah Masyarakat Ber PHBS Jumlah Masyarakat Yang Telah Mendapatkan Vaksin Covid-19 "Jumlah Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah" Kasus Malaria yang dimonfirmasi 1 Tahun "Kasus Penduduk Usia produktif yang melakukan screening Faktotr Resiko PTM"	96 % 50 % 90,87 % 98,44 % 0,25 % 100 %							
259	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	20.840.000,00	0,00	0,00	0,00	20.840.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
260	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	26.360.000,00	0,00	0,00	0,00	26.360.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
261	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita									
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	36.070.000,00	0,00	0,00	0,00	36.070.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
262	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	16.450.000,00	0,00	0,00	0,00	16.450.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
263	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif									
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	30.120.000,00	0,00	0,00	0,00	30.120.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
264	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	13.760.000,00	0,00	0,00	0,00	13.760.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
265	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	190.350.000,00	0,00	0,00	0,00	190.350.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
266	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	9.330.000,00	0,00	0,00	0,00	9.330.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
267	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	35.068.000,00	0,00	0,00	0,00	35.068.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
268	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	6.810.000,00	0,00	0,00	0,00	6.810.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
269	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	71.790.000,00	0,00	0,00	0,00	71.790.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
270	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
271	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
272	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.207.106,00	0,00	0,00	0,00	4.207.106,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
273	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	15.327.403,00	0,00	0,00	0,00	15.327.403,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
274	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	37.991.116,00	0,00	0,00	0,00	37.991.116,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
275	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
276	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	9.225.000,00	0,00	0,00	0,00	9.225.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"	100 %							
277	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	14.463.910,00	0,00	0,00	0,00	14.463.910,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
278	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	37.570.000,00	0,00	0,00	0,00	37.570.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
279	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.031.300,00	0,00	0,00	0,00	2.031.300,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"	100 %							
280	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	3.962.700,00	0,00	0,00	0,00	3.962.700,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-							
281	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	439.832.454,00	74.333.546,00	0,00	0,00	514.166.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD
		Puskesmas Jemaja Timur									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara erintegrasi di perangkat daerah Angka Annual Parasite Insidens (API) Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase Masyarakat Yang Telah Mendapatkan Vaksin Covid-19	50 % 98,44 % 0,25 % 100 % 96 % 90,87 %							
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa/kelurahan UCI disatu wilayah pada kurun waktu tertentu Jumlah Masyarakat Ber PHBS Jumlah Masyarakat Yang Telah Mendapatkan Vaksin Covid-19 "Jumlah Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah" Kasus Malaria yang dimonfirmasi 1 Tahun "Kasus Penduduk Usia produktif yang melakukan screening Faktotr Resiko PTM"	96 % 50 % 90,87 % 98,44 % 0,25 % 100 %							
282	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	26.570.000,00	0,00	0,00	0,00	26.570.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
283	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	6.040.000,00	0,00	0,00	0,00	6.040.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
284	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	5.450.000,00	0,00	0,00	0,00	5.450.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
285	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
286	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	185.825.000,00	0,00	0,00	0,00	185.825.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
287	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	12.385.000,00	0,00	0,00	0,00	12.385.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
288	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	34.090.000,00	0,00	0,00	0,00	34.090.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
289	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	82.635.000,00	0,00	0,00	0,00	82.635.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
290	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	82.350.000,00	0,00	0,00	0,00	82.350.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
291	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	3.960.000,00	0,00	0,00	0,00	3.960.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
292	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	260.225,00	0,00	0,00	0,00	260.225,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
293	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	49.148.000,00	0,00	0,00	0,00	49.148.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
294	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.897.875,00	0,00	0,00	0,00	8.897.875,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
295	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	8.775.000,00	0,00	0,00	0,00	8.775.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"	100 %							
296	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	22.117.300,00	0,00	0,00	0,00	22.117.300,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
297	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	26.479.600,00	0,00	0,00	0,00	26.479.600,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	33.350.000,00	0,00	0,00	0,00	33.350.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
299	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	13.420.000,00	0,00	0,00	0,00	13.420.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-							
300	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	194.626.919,00	35.477.491,00	0,00	0,00	230.104.410,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD
		Puskesmas Palmatak									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Angka Annual Parasite Insidens (API) Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase Masyarakat Yang Telah Mendapatkan Vaksin Covid-19 Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM Persentase Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara erintegrasi di perangkat daerah	50 % 0,25 % 96 % 90,87 % 100 % 98,44 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa/kelurahan UCI disatu wilayah pada kurun waktu tertentu Jumlah Masyarakat Ber PHBS Jumlah Masyarakat Yang Telah Mendapatkan Vaksin Covid-19 "Jumlah Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah" Kasus Malaria yang dimonfirmasi 1 Tahun "Kasus Penduduk Usia produktif yang melakukan screening Faktotr Resiko PTM"	96 % 50 % 90,87 % 98,44 % 0,25 % 100 %							
301	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	43.870.000,00	0,00	0,00	0,00	43.870.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
302	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	21.200.000,00	0,00	0,00	0,00	21.200.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
303	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita									
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	36.550.000,00	0,00	0,00	0,00	36.550.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
304	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	11.060.000,00	0,00	0,00	0,00	11.060.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
305	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif									
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	15.354.000,00	0,00	0,00	0,00	15.354.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
306	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	16.096.000,00	0,00	0,00	0,00	16.096.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
307	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	39.110.000,00	0,00	0,00	0,00	39.110.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
308	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	58.975.000,00	0,00	0,00	0,00	58.975.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-							
309	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	652.335.400,00	73.659.515,00	0,00	0,00	725.994.915,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
310	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	27.704.798,00	0,00	0,00	0,00	27.704.798,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"	100 %							
311	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	45.517.500,00	0,00	0,00	0,00	45.517.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		Puskesmas Tarempa									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara erintegrasi di perangkat daerah Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Angka Annual Parasite Insidens (API) Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Masyarakat Yang Telah Mendapatkan Vaksin Covid-19 Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM	98,44 % 96 % 0,25 % 50 % 90,87 % 100 %							
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa/kelurahan UCI disatu wilayah pada kurun waktu tertentu Jumlah Masyarakat Ber PHBS Jumlah Masyarakat Yang Telah Mendapatkan Vaksin Covid-19 "Jumlah Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah" Kasus Malaria yang dimonfirmasi 1 Tahun "Kasus Penduduk Usia produktif yang melakukan screening Faktotr Resiko PTM"	96 % 50 % 90,87 % 98,44 % 0,25 % 100 %							
312	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
313	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	14.222.000,00	0,00	0,00	0,00	14.222.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
314	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita									
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	22.200.000,00	0,00	0,00	0,00	22.200.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
315	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	76.700.000,00	0,00	0,00	0,00	76.700.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
316	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif									
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
317	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	10.300.000,00	0,00	0,00	0,00	10.300.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
318	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
319	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	178.757.180,00	0,00	0,00	0,00	178.757.180,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
320	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
321	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
322	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	29.248.000,00	0,00	0,00	0,00	29.248.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
323	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	123.750.000,00	0,00	0,00	0,00	123.750.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
324	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	105.346.820,00	0,00	0,00	0,00	105.346.820,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
325	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
326	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	34.402.233,00	0,00	0,00	0,00	34.402.233,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"	100 %							
327	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	60.120.000,00	0,00	0,00	0,00	60.120.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-							
328	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.111.694.454,00	68.696.605,00	0,00	0,00	1.180.391.059,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD
		Puskesmas Siantan Selatan									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara erintegrasi di perangkat daerah Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Angka Annual Parasite Insidens (API) Persentase Masyarakat Yang Telah Mendapatkan Vaksin Covid-19 Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	98,44 % 50 0,25 96 90,87 100 % 0,25 % 90,87 % 100 % 96 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa/kelurahan UCI disatu wilayah pada kurun waktu tertentu Jumlah Masyarakat Ber PHBS Jumlah Masyarakat Yang Telah Mendapatkan Vaksin Covid-19 "Jumlah Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah" Kasus Malaria yang dimonfirmasi 1 Tahun "Kasus Penduduk Usia produktif yang melakukan screening Faktotr Resiko PTM"	96 % 50 0,25 96 90,87 100 % 90,87 % 98,44 % 0,25 % 100 %							
329	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	44.170.000,00	0,00	0,00	0,00	44.170.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
330	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	24.205.000,00	0,00	0,00	0,00	24.205.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
331	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita									
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	63.745.000,00	0,00	0,00	0,00	63.745.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
332	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	12.105.000,00	0,00	0,00	0,00	12.105.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
333	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif									
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	13.085.000,00	0,00	0,00	0,00	13.085.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
334	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	25.130.000,00	0,00	0,00	0,00	25.130.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
335	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	9.420.000,00	0,00	0,00	0,00	9.420.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
336	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	144.359.200,00	0,00	0,00	0,00	144.359.200,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
337	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	37.070.000,00	0,00	0,00	0,00	37.070.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
338	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	15.925.000,00	0,00	0,00	0,00	15.925.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
339	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	71.380.000,00	0,00	0,00	0,00	71.380.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
340	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	104.842.000,00	0,00	0,00	0,00	104.842.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
341	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	254.690.385,00	0,00	0,00	0,00	254.690.385,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
342	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	5.538.429,00	0,00	0,00	0,00	5.538.429,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"	100 %							
343	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	20.000.245,00	0,00	0,00	0,00	20.000.245,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"	100 %							
344	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.416.800,00	0,00	0,00	0,00	5.416.800,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-							
345	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	274.034.200,00	0,00	0,00	0,00	274.034.200,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD
		DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Terlaksananya Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	2 Paket							
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	30 SR 3 Unit							
346	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)									
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	3 Dokumen	217.484.000,00	0,00	0,00	0,00	217.484.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
347	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan									
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	6 Liter/Detik	911.872.745,00	0,00	0,00	0,00	911.872.745,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	terselenggaranya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	100 Unit							
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	terselenggaranya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	100 Unit							
348	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman									
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	0 M^3/Hari	309.450.000,00	0,00	0,00	0,00	309.450.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	terselenggaranya pengelolaan dan pengembangan sistem Drainase	100 Unit							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	terselenggaranya pengelolaan dan pengembangan sistem Drainase	1 KM							
349	1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan									
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	0 Sistem Drainase Perkotaan	36.750.000,00	10.885.201.713,00	0,00	0,00	10.921.951.713,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	terselenggaranya penataan bangunan dan lingkungannya	100 Unit							
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	terselenggaranya penataan bangunan dan lingkungannya	1 paket							
350	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	6.727.248.706,00	0,00	0,00	0,00	6.727.248.706,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
351	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG									
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1 Dokumen	175.689.050,00	0,00	0,00	0,00	175.689.050,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Terselenggaranya Program Penyelenggaraaan Jalan	100 Unit							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Program Penyelenggaraaan Jalan	25 KM							
352	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan									
			Panjang Jalan yang Dibangun	0 KM	681.106.000,00	17.083.002.987,00	0,00	0,00	17.764.108.987,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
353	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan									
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi	2,5 KM	210.184.000,00	24.781.973.827,00	0,00	0,00	24.992.157.827,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
354	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan									
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	2 KM	34.843.200,00	408.928.499,00	0,00	0,00	443.771.699,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Terselenggaranya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 Paket							
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terselenggaranya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 Paket							
355	1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota									
			Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	1 Badan Usaha	119.995.900,00	0,00	0,00	0,00	119.995.900,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-	-							
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
356	1.03.12.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	0 Dokumen	99.987.300,00	0,00	0,00	0,00	99.987.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
357	1.03.12.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	0 Dokumen	100.046.000,00	0,00	0,00	0,00	100.046.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
358	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang									
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	0 Dokumen	116.979.115,00	0,00	0,00	0,00	116.979.115,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-							
359	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	156.000.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Tarempa Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-							
360	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	8.607.147.114,00	0,00	0,00	0,00	8.607.147.114,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Tarempa Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
361	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	1.111.008.000,00	0,00	0,00	0,00	1.111.008.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Tarempa Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
362	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	855.243.395,00	0,00	0,00	0,00	855.243.395,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
363	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	1.504.378.622,00	0,00	0,00	0,00	1.504.378.622,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
364	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	3.165.709.952,00	0,00	0,00	0,00	3.165.709.952,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Tarempa Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
365	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	163.801.924,00	0,00	0,00	0,00	163.801.924,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
366	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	199.999.480,00	230.000.000,00	0,00	0,00	429.999.480,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Tarempa Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-							
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-							
367	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana									
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	0 Unit Rumah	125.120.286,00	0,00	0,00	0,00	125.120.286,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-	-							
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	-							
368	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian									
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	0 Lokasi	32.100.000,00	455.609.041,00	0,00	0,00	487.709.041,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									
	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	-	-							
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
369	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah									
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0 Laporan	135.151.000,00	0,00	0,00	0,00	135.151.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		UPTD SPAM SIANTAN									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
370	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	920.629.728,00	73.285.292,00	0,00	0,00	993.915.020,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat Waktu Tanggap Respons Time Kejadian Kebakaran	100 %							
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan							
371	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	12 Dokumen	0,00	98.012.000,00	0,00	0,00	98.012.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
372	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	12 Unit	38.128.168,00	280.473.595,00	0,00	0,00	318.601.763,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
373	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	4.301.575.850,00	0,00	0,00	0,00	4.301.575.850,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
374	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	106.320.000,00	0,00	0,00	0,00	106.320.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	12 Laporan							
375	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	10.788.000,00	0,00	0,00	0,00	10.788.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan							
376	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.138.838,00	0,00	0,00	0,00	2.138.838,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
377	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	22.996.708,00	120.361.097,00	0,00	0,00	143.357.805,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
378	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	53.623.170,00	0,00	0,00	0,00	53.623.170,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
379	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	49.005.693,00	0,00	0,00	0,00	49.005.693,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
380	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	288.102.000,00	0,00	0,00	0,00	288.102.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan							
381	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	0,00	59.424.564,00	0,00	0,00	59.424.564,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
382	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	0,00	60.737.410,00	0,00	0,00	60.737.410,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
383	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	150.038.700,00	0,00	0,00	0,00	150.038.700,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan							
384	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	58.410.575,00	0,00	0,00	0,00	58.410.575,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
385	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	24.112.000,00	0,00	0,00	0,00	24.112.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
386	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.716.725.520,00	0,00	0,00	0,00	2.716.725.520,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan							
387	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	11.915.400,00	0,00	0,00	0,00	11.915.400,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
388	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	29.273.656,00	0,00	0,00	0,00	29.273.656,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan penanggulangan bencana	57 Persen							
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100 persen							
389	1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	4800 Orang	108.201.451,00	0,00	0,00	0,00	108.201.451,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase terpenuhinya Pelayanan pencegahan dan kesiagaan terhadap bencana	100 persen							
390	1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota									
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 laporan	98.106.675,00	0,00	0,00	0,00	98.106.675,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase terpenuhinya Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 persen							
391	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota									
			0	0 0	24.738.000,00	40.371.300,00	0,00	0,00	65.109.300,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
392	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota									
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	150 Orang	154.741.000,00	0,00	0,00	0,00	154.741.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 persen							
393	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota									
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	15 Kegiatan	105.722.000,00	0,00	0,00	0,00	105.722.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 persen							
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen							
394	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	89.402.000,00	0,00	0,00	0,00	89.402.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen							
395	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	5.404.265.544,00	0,00	0,00	0,00	5.404.265.544,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
396	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	235.668.000,00	0,00	0,00	0,00	235.668.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen							
397	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.642.540,00	0,00	0,00	0,00	8.642.540,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
398	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	98.775.956,00	0,00	0,00	0,00	98.775.956,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
399	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	7.828.390,00	10.364.760,00	0,00	0,00	18.193.150,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
400	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	52.207.990,00	0,00	0,00	0,00	52.207.990,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
401	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	39.836.680,00	0,00	0,00	0,00	39.836.680,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
402	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	258.137.540,00	0,00	0,00	0,00	258.137.540,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen							
403	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	0,00	43.271.900,00	0,00	0,00	43.271.900,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
404	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	0,00	29.821.725,00	0,00	0,00	29.821.725,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
405	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	244.484.854,00	0,00	0,00	0,00	244.484.854,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
406	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	103.535.734,00	50.276.094,00	0,00	0,00	153.811.828,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen							
407	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	51.510.000,00	0,00	0,00	0,00	51.510.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
408	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.823.938.488,00	0,00	0,00	0,00	4.823.938.488,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daearah	100 persen							
409	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	8.138.330,00	0,00	0,00	0,00	8.138.330,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
410	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	48.954.960,00	0,00	0,00	0,00	48.954.960,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan terselesaikan	100 Persen 90 Persen							
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelanggaran Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah yang ditindaklanjuti	90 Persen							
411	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan									
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	35 laporan	134.095.600,00	0,00	0,00	0,00	134.095.600,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Pelanggaran Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah yang ditangani	90 %							
412	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	10 Laporan	69.876.000,00	0,00	0,00	0,00	69.876.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase PPNS yang aktif	50 %							
413	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS									
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	3 Laporan	128.942.000,00	0,00	0,00	0,00	128.942.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen							
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang Tersusun	100 Persen							
414	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	20.836.300,00	0,00	0,00	0,00	20.836.300,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
415	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	22.444.000,00	0,00	0,00	0,00	22.444.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang terselesaikan	100 Persen							
416	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	4.940.118.104,00	0,00	0,00	0,00	4.940.118.104,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
417	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	70 Dokumen	128.280.000,00	0,00	0,00	0,00	128.280.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
418	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	4.309.500,00	0,00	0,00	0,00	4.309.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi BMD yang Terselesaikan	100 Persen							
419	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	33.564.000,00	0,00	0,00	0,00	33.564.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terselesaikan	100 Persen							
420	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	5.330.009,00	0,00	0,00	0,00	5.330.009,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
421	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	88.285.234,00	0,00	0,00	0,00	88.285.234,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
422	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	12.559.968,00	0,00	0,00	0,00	12.559.968,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
423	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	83.017.240,00	0,00	0,00	0,00	83.017.240,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
424	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	10.005.000,00	0,00	0,00	0,00	10.005.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
425	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	246.751.000,00	0,00	0,00	0,00	246.751.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen							
426	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	366.183.300,00	0,00	0,00	0,00	366.183.300,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
427	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	43.350.000,00	0,00	0,00	0,00	43.350.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
428	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6.017.808.576,00	0,00	0,00	0,00	6.017.808.576,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 Persen							
429	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	60.317.530,00	0,00	0,00	0,00	60.317.530,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
430	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	10.760.000,00	0,00	0,00	0,00	10.760.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	indeks kepuasan masyrakat bidang ideologi dan wawasan kebangsaan	76,85 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah monitoring dan evaluasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, dan Pembauran Kebangsaan Jumlah pelajar yang memperoleh pendidikan/ pemahaman Bela Negara Terbentuknya pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Terbentuknya Tim GNRM Kabupaten Kepulauan Anambas Terlaksananya kegiatan GNRM Terlaksananya kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya rapat koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan Tersalurnya bantuan dana hibah Untuk Forum Pembauran Kebangsaan	4 Kali 50 Orang 0 Forum 0 Tim 2 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali							
431	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	30 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	rata-rata tingkat partisipasi pemilih pada pemilu dan pilkada	85,5 Persen							
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Masyarakat yang memperoleh penguatan pendidikan politik Jumlah partai politik yang mendapatkan bantuan dana hibah Jumlah Pemilih Muda yang memperoleh penguatan pendidikan politik Jumlah pengurus parpol yang memperoleh penguatan pendidikan politik Jumlah Perempuan yang memperoleh penguatan pendidikan politik Jumlah rapat komunikasi dan koordinasi Partai Politik dan Pemerintah Daerah Terlaksananya rapat koordinasi penguatan ideologi pancasila, wawasan kebangsaan dan pendidikan politik	60 Orang 10 Partai 60 Orang 20 Orang 60 Orang 1 Rapat 4 Rapat							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
432	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	200 Orang	17.023.505.400,00	0,00	0,00	0,00	17.023.505.400,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
433	8.01.03.2.01.0006	Pelaksanaan tugas Paskibraka									
			Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	1 Kegiatan	1.200.067.307,00	0,00	0,00	0,00	1.200.067.307,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	indeks kepuasan masyrakat bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	76,85 Persen							
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kebijakan/ Peraturan/ pedoman/ rekomendasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Jumlah monitoring dan evaluasi di bidang ketahanan ekonomi sosial budaya Terbentuknya pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Terlaksananya dialog antar umat beragama Terlaksananya kegiatan RAN P4GN Terlaksananya rapat koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama Tersalurnya bantuan dana hibah Untuk Forum Kerukunan Umat Beragama Terselenggaranya kegiatan Sosial Budaya masyarakat	2 kebijakan/ peraturan/edaran 4 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali							
434	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	31 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	persentase isu kewaspadaan/ konflik sosial yg berhasil ditangani	80 Persen							
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	- Jumlah fasilitasi pelak sanaan rapat koordinasi terkait kewaspadaan dini dan penanganan konflik di daerah	1 Kegiatan 10 Kali							
435	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah									
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	20 Orang	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
436	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	268.093.100,00	0,00	0,00	0,00	268.093.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Pemerintahan terselesaikan	100 Persen							
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan dan pelaporan administrasi keuangan	100 %							
437	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	3.780.838.173,00	0,00	0,00	0,00	3.780.838.173,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
438	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25 Dokumen	171.720.000,00	0,00	0,00	0,00	171.720.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	100 %							
439	8.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	16.428.000,00	0,00	0,00	0,00	16.428.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum	100 Persen							
440	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	19.995.800,00	0,00	0,00	0,00	19.995.800,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
441	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	5.992.566,00	0,00	0,00	0,00	5.992.566,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
442	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	67.920.030,00	2.072.952,00	0,00	0,00	69.992.982,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
443	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	16.918.751,00	0,00	0,00	0,00	16.918.751,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
444	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	349.318.000,00	0,00	0,00	0,00	349.318.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan sarana dan prasarna sesuai kebutuhan	100 Persen							
445	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	0,00	147.600.290,00	0,00	0,00	147.600.290,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
446	8.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	177.764.059,00	0,00	0,00	0,00	177.764.059,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %							
447	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	22.804.375,00	0,00	0,00	0,00	22.804.375,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
448	8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	69.395.490,00	0,00	0,00	0,00	69.395.490,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
449	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	506.144.824,00	0,00	0,00	0,00	506.144.824,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS	69,23 persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	jumlah PSM yang terintefikasi, yang mendapatkan pembinaan	3 orang							
450	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang	61.790.000,00	0,00	0,00	0,00	61.790.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	71 persen							
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	86 orang							
451	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan									
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Orang	233.045.000,00	0,00	0,00	0,00	233.045.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase data fakir miskin yang terdata dan terkelola	100 persen							
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	3295 orang							
452	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	1000 Orang	155.135.842,00	0,00	0,00	0,00	155.135.842,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
453	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1141 Keluarga	98.000.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan bencana	78,85 Persen							
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Sinergitas dan Keterpaduan Stekholder Dalam Penanggulangan Bencana di Kab. Kepulauan Anambas	95 %							
454	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana									
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Orang	51.955.000,00	0,00	0,00	0,00	51.955.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana diambil dari perda rpjmd 2021-2026	95 persen 100 persen							
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	diambil dari renstra Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 persen 2 Dokumen							
455	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	18.444.500,00	0,00	0,00	0,00	18.444.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Dokumen 1 Laporan 29 Orang/bulan							
456	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	4.743.886.576,00	0,00	0,00	0,00	4.743.886.576,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
457	1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	150.120.000,00	0,00	0,00	0,00	150.120.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
458	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15.028.992,00	0,00	0,00	0,00	15.028.992,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan							
459	1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 Laporan	25.200.000,00	0,00	0,00	0,00	25.200.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen							
460	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 Paket	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
461	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	17.893.175,00	100.774.722,00	0,00	0,00	118.667.897,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
462	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 Paket	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
463	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket	12.101.005,00	0,00	0,00	0,00	12.101.005,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
464	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	7.325.450,00	0,00	0,00	0,00	7.325.450,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
465	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	225.933.200,00	0,00	0,00	0,00	225.933.200,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4 unit							
466	1.06.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	486.893.124,00	0,00	0,00	0,00	486.893.124,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen							
467	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	85.750.000,00	0,00	0,00	0,00	85.750.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
468	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100.300.000,00	0,00	0,00	0,00	100.300.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
469	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	588.976.361,00	0,00	0,00	0,00	588.976.361,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 unit							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
470	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	14.680.060,00	0,00	0,00	0,00	14.680.060,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
471	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	16.420.000,00	0,00	0,00	0,00	16.420.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perangkat daerah memiliki focal poin aktif	65 Persen							
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kantor Pemerintah dan Fasilitas umum di Kabupaten Kepulauan Anambas yan Responsif Gender	40 %							
472	2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG									
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Perangkat Daerah	179.000.000,00	0,00	0,00	0,00	179.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-							
473	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-	-							
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
474	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Dokumen	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-							
475	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Layanan	301.600.000,00	0,00	0,00	0,00	301.600.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
476	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	58 Orang	88.400.000,00	0,00	0,00	0,00	88.400.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase kecamatan layak anak	80 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	keterwakilan Forum Anak kabupaten kepulauan anambas di jambore anak provinsi dan hari anak nasional	3							
477	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	-							
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
478	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	25 Orang	495.000.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan KTP el (%)	100 %							
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase terpenuhinya Hak Masyarakat dalam Kepemilikan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	100 %							
479	2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan									
			Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	1000 Dokumen	188.671.205,00	0,00	0,00	0,00	188.671.205,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
480	2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	10 Laporan	181.300.000,00	0,00	0,00	0,00	181.300.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen akte kelahiran 0- 18 Tahun (%)	100 %							
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase terpenuhinya Hak Masyarakat dalam Kepemilikan Dokumen atas Hasil Pencatatan Sipil	100 %							
481	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting									
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	1000 Dokumen	172.437.700,00	0,00	0,00	0,00	172.437.700,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase informasi database kependuduk an yang disampaikan	100 %							
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Tersusunnya Dokumen Tata Kelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang memadai	100 %							
482	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan									
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dokumen	155.887.000,00	0,00	0,00	0,00	155.887.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
483	2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan									
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	3 Dokumen	75.117.200,00	0,00	0,00	0,00	75.117.200,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase publikasi Profil Kependudukan	100 %							
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Penyediaan Buku profil Kependudukan	100 %							
484	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	100 Dokumen	58.387.600,00	0,00	0,00	0,00	58.387.600,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %							
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perudang-undangan	100 %							
485	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
486	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	100 %							
487	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	5.730.909.381,00	0,00	0,00	0,00	5.730.909.381,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
488	2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500 Dokumen	139.560.000,00	0,00	0,00	0,00	139.560.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
489	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100 %							
490	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	88.800.000,00	0,00	0,00	0,00	88.800.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan rapat, aktivitas lapangan, dan pelayanan tamu, dan perjalanan dinas	100 %							
491	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
492	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	206.885.621,00	0,00	0,00	209.885.621,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
493	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	12.998.922,00	0,00	0,00	0,00	12.998.922,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
494	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.801.000,00	0,00	0,00	0,00	19.801.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
495	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	29.582.608,00	0,00	0,00	0,00	29.582.608,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
496	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	12.375.000,00	0,00	0,00	0,00	12.375.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
497	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	397.582.000,00	0,00	0,00	0,00	397.582.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran dan langganan lainnya	100 %							
498	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	90.704.460,00	0,00	0,00	0,00	90.704.460,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
499	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
500	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.118.377.824,00	0,00	0,00	0,00	2.118.377.824,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah berkondisi baik	100 %							
501	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
502	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	12.810.000,00	0,00	0,00	0,00	12.810.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
503	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	34.343.400,00	0,00	0,00	0,00	34.343.400,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Penataan Desa	73 %							
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang di lakukan pembinaan penyelenggaraan penataan desa	21 Desa							
504	2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa									
			Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	52 Desa	151.180.000,00	0,00	0,00	0,00	151.180.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan pemerintahan desa	69 %							
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	100 %							
505	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa									
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1.135.783.022,00	0,00	0,00	0,00	1.135.783.022,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
506	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	116.708.000,00	0,00	0,00	0,00	116.708.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
507	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	33.500.000,00	0,00	0,00	0,00	33.500.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
508	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa									
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	52 Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	90 %							
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Yang Mengikuti Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota	38 Desa							
509	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat									
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	52 Lembaga	130.099.000,00	0,00	0,00	0,00	130.099.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
510	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	116.352.300,00	0,00	0,00	0,00	116.352.300,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
511	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	441.872.989,00	0,00	0,00	0,00	441.872.989,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %							
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Adminstrasi Keuangan	95 %							
512	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	2.331.677.040,00	0,00	0,00	0,00	2.331.677.040,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
513	2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	122.040.000,00	0,00	0,00	0,00	122.040.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %							
514	2.13.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %							
515	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
516	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	37.659.423,00	208.064.090,00	0,00	0,00	245.723.513,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
517	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	21.458.000,00	0,00	0,00	0,00	21.458.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
518	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	36.860.121,00	0,00	0,00	0,00	36.860.121,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
519	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	302.035.000,00	0,00	0,00	0,00	302.035.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %							
520	2.13.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %							
521	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	88.066.370,00	0,00	0,00	0,00	88.066.370,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
522	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Tarempa Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
523	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	428.356.440,00	0,00	0,00	0,00	428.356.440,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %							
524	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	42.056.920,00	0,00	0,00	0,00	42.056.920,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 Persen							
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang dilaksanakan	1 Kajian							
525	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD									
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	100 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Aksi Pemantauan Kualitas Lingkungan yang dilaksanakan	3 Kali							
526	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut									
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	26.150.000,00	0,00	0,00	0,00	26.150.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Perlindungan Lingkungan Hidup	100 Persen							
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah aksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang dilaksanakan	3 Kali							
527	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)									
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Ha	58.690.735,00	0,00	0,00	0,00	58.690.735,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 Persen							
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penaatan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	4 Kegiatan							
528	2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup									
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	3 Badan Usaha	103.840.490,00	39.164.950,00	0,00	0,00	143.005.440,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peran Serta Sekolah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 Persen							
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan sekolah Adiwiyata yang diberikan	2 Sekolah							
529	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup									
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	5 Dokumen	56.257.360,00	0,00	0,00	0,00	56.257.360,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Persampahan yang Berwawasan Lingkungan	100 Persen							
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah Aksi Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan	6 Kali							
530	2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah									
			Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	3 Ton	99.870.360,00	0,00	0,00	0,00	99.870.360,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
531	2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah									
			Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	730 Unit	223.941.466,00	0,00	0,00	0,00	223.941.466,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana serta Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	100 Persen							
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Sarana dan Prasrana Perlengkapan Jalan Yang Berkeselamatan	5 Kilometer							
532	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	3 Unit	5.420.000,00	0,00	0,00	0,00	5.420.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
533	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Unit	167.793.162,00	218.843.935,00	0,00	0,00	386.637.097,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
534	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan									
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 Unit	3.675.000,00	0,00	0,00	0,00	3.675.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
535	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan									
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 Unit	27.160.000,00	0,00	0,00	0,00	27.160.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen							
536	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	18.510.000,00	0,00	0,00	0,00	18.510.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
537	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas									
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	2 Dokumen	5.162.000,00	0,00	0,00	0,00	5.162.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
538	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	1 Laporan	8.250.000,00	0,00	0,00	0,00	8.250.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersedian Angkutan Umum Yang Memenuhi Standar Keselamatan	100 Persen							
539	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	27.621.465,00	0,00	0,00	0,00	27.621.465,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
540	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Unit	1.277.050.273,00	0,00	0,00	0,00	1.277.050.273,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase ketersedian sarana dan prasarana transportasi angkutan laut	100 Persen							
	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana angkutan laut	6 Unit							
541	2.15.03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal									
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	3 Unit	582.290.257,00	2.602.855.317,00	0,00	0,00	3.185.145.574,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
542	2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal									
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	2 Unit	69.086.976,00	368.194.432,00	0,00	0,00	437.281.408,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
543	2.15.03.2.12.0005	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal									
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia	2 Unit	25.616.603,00	0,00	0,00	0,00	25.616.603,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen							
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	5 Dokumen							
544	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
545	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Layanan Administrasi Keuangan	12 Bulan							
546	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	5.595.891.133,00	0,00	0,00	0,00	5.595.891.133,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
547	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	359.592.000,00	0,00	0,00	0,00	359.592.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan							
548	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	5.420.985,00	0,00	0,00	0,00	5.420.985,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
549	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	4.466.918,00	110.695.777,00	0,00	0,00	115.162.695,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
550	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	95.463.956,00	0,00	0,00	0,00	95.463.956,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
551	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	79.567.250,00	0,00	0,00	0,00	79.567.250,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
552	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	51.750.000,00	0,00	0,00	0,00	51.750.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
553	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	396.232.000,00	0,00	0,00	0,00	396.232.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan							
554	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	41.527.920,00	0,00	0,00	0,00	41.527.920,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
555	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	68.686.000,00	0,00	0,00	0,00	68.686.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
556	2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	13.267.000,00	0,00	0,00	0,00	13.267.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
557	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6.745.480.864,00	0,00	0,00	0,00	6.745.480.864,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah SKPD	16 Unit							
558	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	247.267.530,00	0,00	0,00	0,00	247.267.530,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
559	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	84.509.800,00	0,00	0,00	0,00	84.509.800,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen							
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
560	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.230.174,00	0,00	0,00	0,00	5.230.174,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
561	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3.200.000,00	9.970.399,00	0,00	0,00	13.170.399,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
562	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.083.300,00	0,00	0,00	0,00	1.083.300,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
563	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	396.881.958,00	0,00	0,00	0,00	396.881.958,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
564	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2.174.000,00	0,00	0,00	0,00	2.174.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
565	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	20.700.000,00	0,00	0,00	0,00	20.700.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
566	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	40.970.000,00	0,00	0,00	0,00	40.970.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Unit							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
567	2.15.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20.036.237,00	0,00	0,00	0,00	20.036.237,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan							
568	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	9.360.288,00	0,00	0,00	0,00	9.360.288,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
569	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	23.960.000,00	0,00	0,00	0,00	23.960.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah SKPD	3 Unit							
570	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	7.140.000,00	0,00	0,00	0,00	7.140.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
571	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	205.080.000,00	0,00	0,00	0,00	205.080.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		UPT PENGELOLAAN SAMPAH									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen							
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan							
572	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	846.000,00	0,00	0,00	0,00	846.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
573	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.406.280,00	0,00	0,00	0,00	4.406.280,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
574	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	2.880.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
575	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
576	2.11.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	9.700.280,00	0,00	0,00	0,00	9.700.280,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
577	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	5.177.000,00	0,00	0,00	0,00	5.177.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
578	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	27.400.000,00	0,00	0,00	0,00	27.400.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan							
579	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2.720.000,00	0,00	0,00	0,00	2.720.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
580	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	3.077.273,00	0,00	0,00	0,00	3.077.273,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah SKPD	6 Unit							
581	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	417.623.067,00	0,00	0,00	0,00	417.623.067,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
582	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2.510.900,00	0,00	0,00	0,00	2.510.900,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Keterbukaan Informasi Publik	100 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi yang Terpublikasi	100 Persen							
583	2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik									
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	50.187.000,00	0,00	0,00	0,00	50.187.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
584	2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	269.283.427,00	60.716.573,00	0,00	0,00	330.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
585	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
586	2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media									
			Jumlah Layanan Hubungan Media	1 Layanan	3.648.526.922,00	0,00	0,00	0,00	3.648.526.922,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
587	2.16.02.2.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik									
			Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	3 Orang	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
588	2.16.02.2.01.0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	30.024.400,00	43.905.162,00	0,00	0,00	73.929.562,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan SPBE Pemerintah Daerah Yang diterapkan Oleh Perangkat Daerah	92,86 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah Kab. Kep. Anambas	100 Persen							
589	2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	142.500.000,00	0,00	0,00	0,00	142.500.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
590	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah									
			Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	0 Unit	2.888.094.314,00	268.242.600,00	0,00	0,00	3.156.336.914,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Informasi/ Aplikasi Perkantoran Elektronik yang tersedia disetiap Perangkat Daerah	100 Persen							
591	2.16.03.2.02.0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik									
			Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	26.500.000,00	0,00	0,00	0,00	26.500.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
592	2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah									
			Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	43.964.387,00	57.836.962,00	0,00	0,00	101.801.349,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
593	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik									
			Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1 Unit	27.500.000,00	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Dokumen Laporan Kinerja Dilaksanakan Tepat Waktu dan Hasil Pengendalian Evaluasi Sesuai Peraturan Perudang-undangan	100 Persen							
594	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	43.237.100,00	0,00	0,00	0,00	43.237.100,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
595	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2.719.500,00	0,00	0,00	0,00	2.719.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Ketersediaan Gaji dan Tunjangan	12 Bulan							
596	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	4.411.147.767,00	0,00	0,00	0,00	4.411.147.767,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
597	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	197.040.000,00	0,00	0,00	0,00	197.040.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
598	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	100 Persen							
599	2.16.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	33.564.000,00	0,00	0,00	0,00	33.564.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Bahan Perkantoran, Kebutuhan Rapat, Aktivitas Lapangan, Pelayanan Tamu, serta Perjalanan Dinas	100 Persen							
600	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.111.623,00	0,00	0,00	0,00	5.111.623,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
601	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.912.368,00	0,00	0,00	0,00	9.912.368,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
602	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	14.752.152,00	0,00	0,00	0,00	14.752.152,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
603	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	37.880.230,00	0,00	0,00	0,00	37.880.230,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
604	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	53.673.250,00	0,00	0,00	0,00	53.673.250,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
605	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	12.520.000,00	0,00	0,00	0,00	12.520.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
606	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	368.431.000,00	0,00	0,00	0,00	368.431.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
607	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	4.218.000,00	0,00	0,00	4.218.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
608	2.16.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	25.223.712,00	0,00	0,00	0,00	25.223.712,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran dan Langganan Lainnya	100 Persen							
609	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	47.432.279,00	0,00	0,00	0,00	47.432.279,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
610	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	41.360.000,00	0,00	0,00	0,00	41.360.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
611	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	759.846.008,00	0,00	0,00	0,00	759.846.008,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Berkondisi Baik	100 Persen							
612	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	69.364.996,00	0,00	0,00	0,00	69.364.996,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
613	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	5.970.000,00	0,00	0,00	0,00	5.970.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Laju Pemanfaatan Data Sektoral	100 Persen							
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Ketersediaan Data Sektoral Untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	63,64 Persen							
614	2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral									
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
615	2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi									
			Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	3 Orang	41.000.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
616	2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral									
			Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Pelaksanaan Keamanan Digital Perangkat Daerah	19,35 Persen							
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	19,35 Persen							
617	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	182.545.834,00	62.454.000,00	0,00	0,00	244.999.834,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	53,70 Persen							
618	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	1 Perangkat Daerah	78.531.500,00	26.468.005,00	0,00	0,00	104.999.505,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase besaran kasus yang diselesaikan	62,38 %							
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya regulasi yang tersusun	64,16 %							
619	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan									
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	848.244.000,00	0,00	0,00	0,00	848.244.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil	79,03 %							
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan Fasilitasi	49 Usaha Mikro							
620	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	10 Unit Usaha	641.553.295,00	118.407.554,00	0,00	0,00	759.960.849,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %							
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan	100 %							
621	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	7.267.198.283,00	0,00	0,00	0,00	7.267.198.283,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum kantor	100 %							
622	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.584.499.722,00	0,00	0,00	0,00	1.584.499.722,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang mendapatkan pembinaan	63,33 %							
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Peningkatan jumlah usaha mikro yang mendapatkan pemberdayaan	190 Usaha Mikro							
623	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro									
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	12 Unit Usaha	150.592.208,00	0,00	0,00	0,00	150.592.208,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %							
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan	100 %							
624	2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	203.880.000,00	0,00	0,00	0,00	203.880.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum kantor	100 %							
625	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	14.709.965,00	0,00	0,00	0,00	14.709.965,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
626	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	6.812.171,00	0,00	0,00	0,00	6.812.171,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
627	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	15.483.255,00	0,00	0,00	0,00	15.483.255,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
628	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	27.404.500,00	0,00	0,00	0,00	27.404.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
629	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	42.428.057,00	0,00	0,00	0,00	42.428.057,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
630	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	389.409.640,00	0,00	0,00	0,00	389.409.640,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum kantor	100 %							
631	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	118.306.853,00	0,00	0,00	0,00	118.306.853,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
632	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	59.245.000,00	0,00	0,00	0,00	59.245.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan BMD	100 %							
633	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	48.403.082,00	0,00	0,00	0,00	48.403.082,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
634	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	14.874.000,00	0,00	0,00	0,00	14.874.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase perizinan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan	58,70 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	81 Perizinan							
635	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik									
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	135 Dokumen	37.004.802,00	0,00	0,00	0,00	37.004.802,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang dikelola dengan baik	60 %							
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Dostribusi Perdagangan	13 Unit							
636	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan									
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	390.000.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase kestabilan harga barang	0,71 undefined							
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Ketersediaan Bapokting (Hari)	13 Hari							
637	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat									
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	5 Laporan	69.453.000,00	0,00	0,00	0,00	69.453.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Industri	62 %							
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Pelaku Usaha Industri Yang tumbuh di Kawasan SIKM	62 Pelaku Usaha							
638	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	336.515.679,00	0,00	0,00	0,00	336.515.679,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rasio Peningkatan Investasi PMDN dan PMA	1,071 Pelaku usaha							
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas/insentif di Bidang Penanaman Modal yang ditetapkan atau diberikan	1 Dokumen							
639	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal									
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	31 Dokumen	257.939.825,00	0,00	0,00	0,00	257.939.825,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-	-							
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-							
640	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	50 Pelaku Usaha	334.122.000,00	0,00	0,00	0,00	334.122.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
641	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko									
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	25 Kegiatan Usaha	42.280.000,00	0,00	0,00	0,00	42.280.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Tingkat Kepatuhan Perusahaan dalam menyampaikan LKPM	80 %							
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	80 %							
642	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya									
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	5 Kegiatan Usaha.	62.276.000,00	0,00	0,00	0,00	62.276.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
643	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha									
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	149 Pelaku Usaha	228.349.000,00	0,00	0,00	0,00	228.349.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
644	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal									
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	9 Kegiatan Usaha	124.553.000,00	0,00	0,00	0,00	124.553.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan Penunjang urusan urusan Pemerintah Daerah	100 persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen							
645	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	3.767.989.590,00	0,00	0,00	0,00	3.767.989.590,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
646	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	145.080.000,00	0,00	0,00	0,00	145.080.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
647	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.021.035,00	0,00	0,00	0,00	2.021.035,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penatusahaan Barang Milik daerah pada SKPD	100 persen							
648	2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	19.056.000,00	0,00	0,00	0,00	19.056.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen							
649	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.780.740,00	0,00	0,00	0,00	3.780.740,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
650	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.505.750,00	0,00	0,00	0,00	3.505.750,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
651	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4.500.156,00	0,00	0,00	0,00	4.500.156,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
652	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	21.805.800,00	0,00	0,00	0,00	21.805.800,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
653	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.907.000,00	0,00	0,00	0,00	7.907.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
654	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	311.080.000,00	0,00	0,00	0,00	311.080.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen							
655	2.18.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	27.803.100,00	0,00	0,00	0,00	27.803.100,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen							
656	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	21.777.200,00	0,00	0,00	0,00	21.777.200,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
657	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	2.520.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
658	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	519.741.920,00	0,00	0,00	0,00	519.741.920,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen							
659	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	9.325.500,00	0,00	0,00	0,00	9.325.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
660	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	7.070.000,00	0,00	0,00	0,00	7.070.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Cakupan Layanan Keperpustakaan	67 Persen							
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	200 Eksemplar							
661	2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1 Perpustakaan	350.899.630,00	0,00	0,00	0,00	350.899.630,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
662	2.23.02.2.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4 Orang	235.445.850,00	0,00	0,00	0,00	235.445.850,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
663	2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka									
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	200 Eksemplar	52.575.000,00	0,00	0,00	0,00	52.575.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	5 Orang							
664	2.23.02.2.02.0001	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat									
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	5 Lokus	225.133.470,00	0,00	0,00	0,00	225.133.470,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
665	2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	20 Orang	46.569.740,00	0,00	0,00	0,00	46.569.740,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan							
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan							
666	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7 Orang/bulan	1.594.374.784,00	0,00	0,00	0,00	1.594.374.784,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
667	2.23.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan Dokumen	79.812.000,00	0,00	0,00	0,00	79.812.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket							
668	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	36.629.080,00	0,00	0,00	0,00	36.629.080,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
669	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	30.874.084,00	0,00	0,00	0,00	30.874.084,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
670	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	23.403.890,00	0,00	0,00	0,00	23.403.890,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
671	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	23.535.000,00	0,00	0,00	0,00	23.535.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
672	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	273.809.756,00	0,00	0,00	0,00	273.809.756,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang DisediakanJumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit							
673	2.23.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	7 Unit	0,00	48.978.089,00	0,00	0,00	48.978.089,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
674	2.23.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	300.026.363,00	0,00	0,00	0,00	300.026.363,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan							
675	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	33.235.000,00	0,00	0,00	0,00	33.235.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
676	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	401.179.702,00	0,00	0,00	0,00	401.179.702,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									
	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Tersusunnya Arsip yang sesuai standar	42 Persen							
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Laporan							
677	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis									
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	5 Berkas	44.193.677,00	0,00	0,00	0,00	44.193.677,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
678	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Laporan	45.973.597,00	0,00	0,00	0,00	45.973.597,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Konsumsi Pangan	72 Persen							
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Target Konsumsi Pangan Per Kapita	1 Dokumen							
679	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal									
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	59.509.092,00	32.301.208,00	0,00	0,00	91.810.300,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan kerawanan pangan	25,90 Persen							
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan kerawanan pangan desa kelurahan	1 Dokumen							
680	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	77.876.000,00	0,00	0,00	0,00	77.876.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Rekomendasi Pengawasan Keamanan Pangan yang diterbitkan	60 Persen							
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar	100 Persen							
681	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	21.302.200,00	0,00	0,00	0,00	21.302.200,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	4 Persen							
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KUB yang dibina, didampingi dan difasilitasi	16 KUB							
682	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil									
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	160 Orang	4.045.785.552,00	0,00	0,00	0,00	4.045.785.552,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
683	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil									
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	10 Kelompok	39.439.950,00	0,00	0,00	0,00	39.439.950,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Produksi Perikanan Budidaya	40 Persen							
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	215 Ton							
684	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	68.190.100,00	16.809.900,00	0,00	0,00	85.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
685	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	107.275.578,00	132.724.422,00	0,00	0,00	240.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
686	3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	883.778.980,00	0,00	0,00	0,00	883.778.980,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase produksi Pengolahan perikanan	73,30 Persen							
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Dokumen data pengolahan hasil perikanan dan pemasaran	120 Dokumen							
687	3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Poklahsar Terbina	15 Kelompok							
688	3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil									
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	50 Unit Usaha	39.283.200,00	5.717.039,00	0,00	0,00	45.000.239,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana olahan perikanan yang dilakukan	100 Persen							
689	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	17 Pelaku Usaha	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan keuangan dinas	100 Persen							
690	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan	8.315.130.693,00	0,00	0,00	0,00	8.315.130.693,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
691	3.25.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	254.280.000,00	0,00	0,00	0,00	254.280.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Administrasi BMD	100 Persen							
692	3.25.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	43.800.000,00	0,00	0,00	0,00	43.800.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan kepegawaian	100 Persen							
693	3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	100 Persen							
694	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.479.000,00	0,00	0,00	0,00	6.479.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
695	3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	26.531.750,00	1.561.350,00	0,00	0,00	28.093.100,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
696	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	43.448.400,00	0,00	0,00	0,00	43.448.400,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
697	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
698	3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	18.692.400,00	0,00	0,00	0,00	18.692.400,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
699	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	330.330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.330.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
700	3.25.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	20.000.000,00	31.226.999,00	0,00	0,00	51.226.999,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya BMD	100 Persen							
701	3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	1.200.000,00	13.861.831,00	0,00	0,00	15.061.831,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
702	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	5.122.700,00	51.165.021,00	0,00	0,00	56.287.721,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
703	3.25.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	345.276.095,00	0,00	0,00	0,00	345.276.095,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan Pemda	100 Persen							
704	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	138.772.521,00	0,00	0,00	0,00	138.772.521,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
705	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	49.676.445,00	0,00	0,00	0,00	49.676.445,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
706	3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	33.314.429,00	0,00	0,00	0,00	33.314.429,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
707	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.889.733.816,00	0,00	0,00	0,00	3.889.733.816,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD	100 Persen							
708	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit	13.822.515,00	0,00	0,00	0,00	13.822.515,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
709	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10.388.857,00	0,00	0,00	0,00	10.388.857,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
710	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	4.270.000,00	0,00	0,00	0,00	4.270.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan Sarana Pertanian	60 Persen							
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan,Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen							
711	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman									
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian	70,60 Persen							
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah kawasan yang menghasilkan produk pertanian, peternakan, perkebunan dan biogas untuk memenuhi kebutuhan lokal kecamatan	1 Paket							
712	3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1 Dokumen	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian	1 Paket							
713	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya									
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase kesehatan hewan ternak dan kesmavet	82 Persen							
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner	1 Laporan							
714	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner									
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan pemberdayaan kelompok tani	80 Persen							
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pelaksanaan penyuluhan pertanian	12 Kelompok							
715	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa									
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Unit	34.500.000,00	0,00	0,00	0,00	34.500.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pelaku seni untuk mengenal, memahami, menghargai dan ikut melestarikan nilai budaya	71 Persen							
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan	1 Kegiatan							
716	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan									
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	30 Orang	280.000.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase destinasi pariwisata yang dilakukan peningkatan	55 %							
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata yang dilaksanakan oleh daerah	55 %							
717	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	250.000.000,00	187.000.000,00	0,00	0,00	437.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase objek destinasi dan event pariwisata yang dipasarkan	67 %							
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pemasaran yang dilaksanakan oleh daerah	67 %							
718	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota									
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Kegiatan	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
719	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Promosi	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan Pemerintahan	100 %							
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan	100 %							
720	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	236.808.000,00	0,00	0,00	0,00	236.808.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Keuangan Di dinas Pariwsata Dan Kebudayaan	100 %							
721	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	3.638.036.916,00	0,00	0,00	0,00	3.638.036.916,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
722	3.26.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	190.920.000,00	0,00	0,00	0,00	190.920.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kualitas SDM Di dinas Pariwsata Dan Kebudayaan	100 %							
723	3.26.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang	99.050.000,00	0,00	0,00	0,00	99.050.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
724	3.26.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang	301.607.000,00	0,00	0,00	0,00	301.607.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kualitas administrasi umum Di dinas Pariwsata Dan Kebudayaan	100 %							
725	3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	14.156.908,00	5.843.092,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
726	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
727	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
728	3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	18.063.022,00	0,00	0,00	0,00	18.063.022,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
729	3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	336.464.143,00	0,00	0,00	0,00	336.464.143,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
730	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana Dan Prasarana Di dinas Pariwsata Dan Kebudayaan	100 %							
731	3.26.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	0,00	156.020.500,00	0,00	0,00	156.020.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
732	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0,00	24.559.826,00	0,00	0,00	24.559.826,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	100 %							
733	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	33.345.000,00	0,00	0,00	0,00	33.345.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
734	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	74.369.265,00	0,00	0,00	0,00	74.369.265,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
735	3.26.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	8.834.000,00	0,00	0,00	0,00	8.834.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
736	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	990.507.998,00	0,00	0,00	0,00	990.507.998,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	100 %							
737	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5.242.530,00	0,00	0,00	0,00	5.242.530,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
738	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	17.460.000,00	0,00	0,00	0,00	17.460.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
739	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		SEKRETARIAT DAERAH									
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	persentase tercapainya kegiatan kesejahteraan rakyat dalam membentuk akhlakul karimah	100 Persen							
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan	100 persen							
740	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan									
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	15 Dokumen	204.843.724,00	0,00	0,00	0,00	204.843.724,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
741	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen	100.925.200,00	0,00	0,00	0,00	100.925.200,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100 %							
742	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10 Dokumen	2.557.934.000,00	0,00	0,00	0,00	2.557.934.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
743	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	20 Dokumen	4.254.719.376,00	0,00	0,00	0,00	4.254.719.376,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	persentase pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi hukum	100 persen							
744	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah									
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	20 Dokumen	385.441.700,00	0,00	0,00	0,00	385.441.700,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
745	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum									
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	15 Kasus	592.538.000,00	0,00	0,00	0,00	592.538.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
746	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum									
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	20 Dokumen	135.465.000,00	0,00	0,00	0,00	135.465.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	jumlah kebijakan yang diterbitkan dalam pengendalian perekonomian dan pembangunan jumlah kebijakan yang diterbitkan dalam pengendalian perekonomian dan pembangunan persentase kebijakan yang diterbitkan dalam pengendalian perekonomian dan pembangunan	67 Persen 100 persen							
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	persentasen pelaksanaan kebijakan perekonomian	100 persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
747	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5 Dokumen	104.608.750,00	0,00	0,00	0,00	104.608.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
748	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian									
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	10 Laporan	206.244.360,00	0,00	0,00	0,00	206.244.360,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100 persen							
749	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	20 Dokumen	32.085.000,00	0,00	0,00	0,00	32.085.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
750	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan									
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan	575.191.200,00	0,00	0,00	0,00	575.191.200,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
751	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan									
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	20 Laporan	88.439.700,00	0,00	0,00	0,00	88.439.700,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 persen							
752	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	20 Dokumen	400.449.456,00	0,00	0,00	0,00	400.449.456,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
753	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	20 Dokumen	311.203.875,00	0,00	0,00	0,00	311.203.875,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
754	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	15 Orang	177.199.700,00	0,00	0,00	0,00	177.199.700,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	persentase pelaksanaan pemantauan kebijakan sumber daya alam	100 persen							
755	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	10 Dokumen	45.400.000,00	0,00	0,00	0,00	45.400.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
756	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	10 Dokumen	48.350.000,00	0,00	0,00	0,00	48.350.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
757	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	10 Dokumen	52.000.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan pemerintahan	100 Persen							
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Keuangan	36 Bulan							
758	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/bulan	20.210.671.207,00	0,00	0,00	0,00	20.210.671.207,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
759	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen	788.940.000,00	0,00	0,00	0,00	788.940.000,00	[object Object]	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen							
760	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	10 Paket	54.366.200,00	0,00	0,00	0,00	54.366.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Barang/ Jasa Rutinitas Perkantoran	100 persen							
761	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	123.193.255,00	0,00	0,00	0,00	123.193.255,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
762	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	210.879.421,00	0,00	0,00	0,00	210.879.421,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
763	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
764	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	1.197.825.000,00	0,00	0,00	0,00	1.197.825.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
765	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	190.765.000,00	0,00	0,00	0,00	190.765.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
766	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	995.000.000,00	0,00	0,00	0,00	995.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
767	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	1.706.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.706.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen							
768	4.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya									
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	15 Unit	264.571.644,00	248.774.994,00	0,00	0,00	513.346.638,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 persen							
769	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15 Laporan	133.489.760,00	0,00	0,00	0,00	133.489.760,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
770	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan	1.549.324.640,00	0,00	0,00	0,00	1.549.324.640,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
771	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 Laporan	8.261.182.952,00	0,00	0,00	0,00	8.261.182.952,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen							
772	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	310.750.120,00	0,00	0,00	0,00	310.750.120,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
773	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	120.350.000,00	0,00	0,00	0,00	120.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
774	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	608.255.288,00	0,00	0,00	0,00	608.255.288,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 persen							
775	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0 Orang/Bulan	194.913.655,00	0,00	0,00	0,00	194.913.655,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
776	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	0 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
777	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
778	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	400.014.935,00	0,00	0,00	0,00	400.014.935,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 persen							
779	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah									
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	0 Paket	148.000.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
780	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah									
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	0 Paket	102.744.000,00	0,00	0,00	0,00	102.744.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
781	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah									
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	5 Paket	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi	100 persen							
782	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan									
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	20 Dokumen	92.528.381,00	0,00	0,00	0,00	92.528.381,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
783	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	10 Laporan	72.279.610,00	0,00	0,00	0,00	72.279.610,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
784	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi									
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	10 Dokumen	205.278.790,00	0,00	0,00	0,00	205.278.790,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 persen							
785	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	10 Laporan	305.110.000,00	0,00	0,00	0,00	305.110.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
786	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	10 Laporan	258.308.000,00	0,00	0,00	0,00	258.308.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
787	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan									
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	30 Laporan	174.177.493,00	0,00	0,00	0,00	174.177.493,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		SEKRETARIAT DPRD									
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
	4.02	SEKRETARIAT DPRD									
	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	capaian penetapan perda	100 Persen							
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pemenuhan Pembentukan Peraturan Daerah	100 Persen							
788	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4 Dokumen	2.192.007.300,00	0,00	0,00	0,00	2.192.007.300,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
789	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen	587.197.300,00	0,00	0,00	0,00	587.197.300,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pemenuhan Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 Persen							
790	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	71.242.500,00	0,00	0,00	0,00	71.242.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
791	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	73.229.400,00	0,00	0,00	0,00	73.229.400,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
792	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	426.224.400,00	0,00	0,00	0,00	426.224.400,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
793	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	390.009.000,00	0,00	0,00	0,00	390.009.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Pemenuhan Peningkatan Kapasitas DPRD	100 Persen							
794	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD									
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen	1.521.609.000,00	0,00	0,00	0,00	1.521.609.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
795	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi									
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	10 Orang	618.036.240,00	0,00	0,00	0,00	618.036.240,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
796	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD									
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	440.883.476,00	0,00	0,00	0,00	440.883.476,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
797	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD									
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1 Dokumen	1.223.695.551,00	0,00	0,00	0,00	1.223.695.551,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Presentase Pemenuhan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 Persen							
798	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 Laporan	1.096.361.100,00	0,00	0,00	0,00	1.096.361.100,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
799	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD									
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	518.812.000,00	0,00	0,00	0,00	518.812.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
800	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses									
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	1 Dokumen	1.760.444.900,00	0,00	0,00	0,00	1.760.444.900,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Tugas DPRD	100 Persen							
801	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	4.462.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.462.500.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen							
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	8 Dokumen							
802	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	81.787.700,00	0,00	0,00	0,00	81.787.700,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
803	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.000.620,00	0,00	0,00	0,00	4.000.620,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
804	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.919.660,00	0,00	0,00	0,00	3.919.660,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
805	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.949.900,00	0,00	0,00	0,00	2.949.900,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
806	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.513.300,00	0,00	0,00	0,00	2.513.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
807	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	27.645.100,00	0,00	0,00	0,00	27.645.100,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
808	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.064.500,00	0,00	0,00	0,00	2.064.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen							
809	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	4.160.291.983,00	0,00	0,00	0,00	4.160.291.983,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
810	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	216.600.000,00	0,00	0,00	0,00	216.600.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
811	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.668.300,00	0,00	0,00	0,00	2.668.300,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen							
812	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	146.441.800,00	0,00	0,00	0,00	146.441.800,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
813	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18 Orang	203.628.000,00	0,00	0,00	0,00	203.628.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen							
814	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	58.552.926,00	0,00	0,00	0,00	58.552.926,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
815	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	0,00	108.735.842,00	0,00	0,00	108.735.842,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
816	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	61.577.245,00	0,00	0,00	0,00	61.577.245,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
817	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	177.582.040,00	0,00	0,00	0,00	177.582.040,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
818	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	95.231.000,00	0,00	0,00	0,00	95.231.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
819	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
820	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	83.100.000,00	0,00	0,00	0,00	83.100.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
821	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	494.646.000,00	0,00	0,00	0,00	494.646.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen							
822	4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	78.611.200,00	0,00	0,00	78.611.200,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah	100 Persen							
823	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	178.923.234,00	0,00	0,00	0,00	178.923.234,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
824	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	244.916.625,00	0,00	0,00	0,00	244.916.625,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
825	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.162.958.968,00	0,00	0,00	0,00	2.162.958.968,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen							
826	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	84.183.296,00	0,00	0,00	0,00	84.183.296,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
827	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	59.990.000,00	0,00	0,00	0,00	59.990.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
828	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	212.921.069,00	0,00	0,00	0,00	212.921.069,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 Persen							
829	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD									
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	20 Orang/Bulan	11.149.113.520,00	0,00	0,00	0,00	11.149.113.520,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
830	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4 Paket	563.389.800,00	0,00	0,00	0,00	563.389.800,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
831	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	20 Orang	697.095.000,00	0,00	0,00	0,00	697.095.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD	100 Persen							
832	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	152.009.700,00	0,00	0,00	0,00	152.009.700,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
833	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	251.480.300,00	0,00	0,00	0,00	251.480.300,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.01	PERENCANAAN									
	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	100 %							
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu dan sesuai konten	100 %							
834	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah									
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	11.250.000,00	0,00	0,00	0,00	11.250.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
835	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota									
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	427.869.500,00	0,00	0,00	0,00	427.869.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
836	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan									
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	10 Usulan	54.180.000,00	0,00	0,00	0,00	54.180.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
837	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	1 Dokumen	1.412.750.850,00	0,00	0,00	0,00	1.412.750.850,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data untuk perencanaan	80 %							
838	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah									
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	34 Orang	90.172.000,00	0,00	0,00	0,00	90.172.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase indikator kinerja sasaran daerah pada RPJMD yang dievaluasi capaian realisasinya	83 %							
839	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	243.744.600,00	0,00	0,00	0,00	243.744.600,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perancanaan Perangkat Daerah yang berkualitas	81 %							
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase pelaksanaan koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 %							
840	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	40 Dokumen	124.926.000,00	0,00	0,00	0,00	124.926.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
841	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan									
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	20 Laporan	45.734.800,00	0,00	0,00	0,00	45.734.800,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
842	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan									
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	20 Laporan	16.875.000,00	0,00	0,00	0,00	16.875.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
843	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan									
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
844	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	135.576.000,00	0,00	0,00	0,00	135.576.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
845	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia									
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	86.198.400,00	0,00	0,00	0,00	86.198.400,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
846	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	26.375.000,00	0,00	0,00	0,00	26.375.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
847	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase pelaksanaan koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang perekonomian	100 %							
848	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	9.317.500,00	0,00	0,00	0,00	9.317.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
849	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian									
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	43.792.000,00	0,00	0,00	0,00	43.792.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
850	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	14.410.000,00	0,00	0,00	0,00	14.410.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
851	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian									
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
852	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	54.918.310,00	0,00	0,00	0,00	54.918.310,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
853	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA									
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan	43.792.000,00	0,00	0,00	0,00	43.792.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
854	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan	12.375.000,00	0,00	0,00	0,00	12.375.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
855	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA									
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase pelaksanaan koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	100 %							
856	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	149.721.800,00	0,00	0,00	0,00	149.721.800,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
857	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur									
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	62.692.000,00	0,00	0,00	0,00	62.692.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
858	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	18.675.000,00	0,00	0,00	0,00	18.675.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
859	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur									
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	7.050.000,00	0,00	0,00	0,00	7.050.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
860	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	19.896.700,00	0,00	0,00	0,00	19.896.700,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
861	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan									
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan	2.975.000,00	0,00	0,00	0,00	2.975.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
862	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan	30.580.000,00	0,00	0,00	0,00	30.580.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
863	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %							
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perudang-undangan	100 %							
864	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	232.165.700,00	0,00	0,00	0,00	232.165.700,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
865	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	158.845.045,00	0,00	0,00	0,00	158.845.045,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	100 %							
866	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	5.847.835.704,00	0,00	0,00	0,00	5.847.835.704,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
867	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	306.960.000,00	0,00	0,00	0,00	306.960.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
868	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100 %							
869	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	64 Paket	79.690.000,00	0,00	0,00	0,00	79.690.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
870	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	26 Orang	130.656.000,00	0,00	0,00	0,00	130.656.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan rapat, aktivitas lapangan, dan pelayanan tamu, perjalanan dinas serta dukungan SPBE	100 %							
871	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	67.192.130,00	0,00	0,00	0,00	67.192.130,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
872	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	117.942.798,00	0,00	0,00	0,00	117.942.798,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
873	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24 Paket	41.516.936,00	0,00	0,00	0,00	41.516.936,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
874	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1965 Paket	131.247.625,00	0,00	0,00	0,00	131.247.625,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
875	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	117.529.852,00	0,00	0,00	0,00	117.529.852,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
876	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	66 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
877	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	683.785.000,00	0,00	0,00	0,00	683.785.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
878	5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	136.000.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah	100 %							
879	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	253.002.483,00	49.154.315,00	0,00	0,00	302.156.798,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
880	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	30.941.585,00	300.252.778,00	0,00	0,00	331.194.363,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
881	5.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	103.366.560,00	0,00	0,00	0,00	103.366.560,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran dan langganan lainnya	100 %							
882	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
883	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	120.634.858,00	0,00	0,00	0,00	120.634.858,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
884	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.830.680.936,00	0,00	0,00	0,00	1.830.680.936,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah berkondisi baik	100 %							
885	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	78.038.020,00	0,00	0,00	0,00	78.038.020,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
886	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-							
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
887	5.05.02.2.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	128.526.000,00	0,00	0,00	0,00	128.526.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase pengembangan inovasi dan teknologi yang dimanfaatkan	70 %							
888	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	19.679.250,00	0,00	0,00	0,00	19.679.250,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
889	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	185.009.944,00	0,00	0,00	0,00	185.009.944,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase silpa terhadap APBD	6,00 %							
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran	115 Dokumen							
890	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS									
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	61.410.860,00	0,00	0,00	0,00	61.410.860,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
891	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	50.700.000,00	0,00	0,00	0,00	50.700.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
892	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD									
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00	13.800.000,00	[object Object]	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
893	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD									
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00	13.800.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
894	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD									
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	64.351.150,00	0,00	0,00	0,00	64.351.150,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
895	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD									
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	54.600.000,00	0,00	0,00	0,00	54.600.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
896	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD									
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	800.900.000,00	0,00	0,00	0,00	800.900.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
897	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD									
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	733.732.000,00	0,00	0,00	0,00	733.732.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
898	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	757.933.920,00	0,00	0,00	0,00	757.933.920,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
899	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	191.459.500,00	0,00	0,00	0,00	191.459.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
900	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	122.167.500,00	0,00	0,00	0,00	122.167.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
901	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen	52.736.100,00	0,00	0,00	0,00	52.736.100,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
902	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	40 Orang	214.634.100,00	0,00	0,00	0,00	214.634.100,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	4 Dokumen							
903	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait									
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	6 Dokumen	247.525.000,00	0,00	0,00	0,00	247.525.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
904	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	115.116.000,00	0,00	0,00	0,00	115.116.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	34 Dokumen							
905	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban									
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	4 Dokumen	84.658.800,00	0,00	0,00	0,00	84.658.800,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
906	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah									
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Laporan	414.402.000,00	0,00	0,00	0,00	414.402.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
907	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota									
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	187.784.000,00	0,00	0,00	0,00	187.784.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
908	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2 Dokumen	88.090.000,00	0,00	0,00	0,00	88.090.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
909	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	102 Orang	18.761.760,00	0,00	0,00	0,00	18.761.760,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	24 Laporan							
910	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak									
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	0,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
911	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	52 Laporan	0,00	0,00	0,00	110.343.205.879,00	110.343.205.879,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah dokumen Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	1 Dokumen							
912	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	2 Dokumen	972.960.960,00	0,00	0,00	0,00	972.960.960,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan pengelolaan asset daerah	86.6 Persen							
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	13 Dokumen							
913	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga									
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	720.289.000,00	0,00	0,00	0,00	720.289.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
914	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
915	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
916	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
917	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
918	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
919	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
920	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 Laporan	891.061.000,00	0,00	0,00	0,00	891.061.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
921	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
922	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
923	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
924	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	40 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tingkat pertumbuhan PAD	4,13 Persen							
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah Laporan Pengelolaan Pendapatan Daerah	18 Dokumen 12 Laporan							
925	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	85.429.000,00	0,00	0,00	0,00	85.429.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
926	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	173.977.500,00	0,00	0,00	0,00	173.977.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
927	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5 Unit	146.099.400,00	0,00	0,00	0,00	146.099.400,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
928	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	2 Dokumen	179.000.000,00	0,00	0,00	0,00	179.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
929	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	107.824.500,00	0,00	0,00	0,00	107.824.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %							
930	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
931	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %							
932	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	12.244.547.601,00	0,00	0,00	0,00	12.244.547.601,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
933	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	820.320.000,00	0,00	0,00	0,00	820.320.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
934	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.212.000,00	0,00	0,00	0,00	1.212.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen 100 %							
935	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	48 Paket	92.000.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
936	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	42.125.000,00	0,00	0,00	0,00	42.125.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
937	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Pengadaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen 255 Paket							
938	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	49.947.133,00	171.341.708,00	0,00	0,00	221.288.841,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
939	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	115.903.380,00	0,00	0,00	0,00	115.903.380,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
940	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	118.540.000,00	0,00	0,00	0,00	118.540.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
941	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
942	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	46.200.000,00	0,00	0,00	0,00	46.200.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
943	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	329.037.000,00	0,00	0,00	0,00	329.037.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Dokumen							
944	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0,00	35.874.900,00	0,00	0,00	35.874.900,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
945	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	0,00	104.360.942,00	0,00	0,00	104.360.942,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
946	5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	225.302.445,00	0,00	0,00	0,00	225.302.445,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Tarempa Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 Laporan							
947	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100.799.600,00	0,00	0,00	0,00	100.799.600,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
948	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	121.089.028,00	0,00	0,00	0,00	121.089.028,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
949	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.417.658.184,00	0,00	0,00	0,00	2.417.658.184,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69 Unit							
950	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	73.337.500,00	0,00	0,00	0,00	73.337.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
951	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	50.780.000,00	0,00	0,00	0,00	50.780.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
952	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.094.000,00	0,00	0,00	0,00	100.094.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.03	KEPEGAWAIAN									
	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase jumlah pemenuhan ASN berdasarkan Anjab dan ABK	74 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pemenuhan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100 %							
953	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK									
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	250 Dokumen	175.381.238,00	0,00	0,00	0,00	175.381.238,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
954	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	72.588.053,00	32.316.925,00	0,00	0,00	104.904.978,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Pemenuhan Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrasi, Fungsional dan Pelaksana	78 %							
955	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 Dokumen	185.931.000,00	0,00	0,00	0,00	185.931.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
956	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN									
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	220 Dokumen	100.195.900,00	0,00	0,00	0,00	100.195.900,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang Menempuh Pendidikan Lanjutan	289 Orang							
957	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN									
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	2 Orang	153.584.000,00	0,00	0,00	0,00	153.584.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Aparatur Berkinerja Baik	95 Persen							
958	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	75.034.000,00	0,00	0,00	0,00	75.034.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
959	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN									
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	30 Orang	148.097.000,00	0,00	0,00	0,00	148.097.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai peraturan perudang-undangan	100 %							
960	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
961	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %							
962	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	5.666.024.223,00	0,00	0,00	0,00	5.666.024.223,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
963	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	160.080.000,00	0,00	0,00	0,00	160.080.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
964	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.694.884,00	0,00	0,00	0,00	2.694.884,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
965	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	69.430.524,00	0,00	0,00	0,00	69.430.524,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
966	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	8.561.742,00	0,00	0,00	0,00	8.561.742,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
967	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	26.527.660,00	0,00	0,00	0,00	26.527.660,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
968	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	17.904.000,00	0,00	0,00	0,00	17.904.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
969	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5.040.000,00	0,00	0,00	0,00	5.040.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
970	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	380.958.000,00	0,00	0,00	0,00	380.958.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
971	5.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	16.503.169,00	0,00	0,00	0,00	16.503.169,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
972	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.450.000,00	0,00	0,00	0,00	10.450.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
973	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	10.011.500,00	0,00	0,00	0,00	10.011.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
974	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	761.550.632,00	0,00	0,00	0,00	761.550.632,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
975	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	19.350.075,00	0,00	0,00	0,00	19.350.075,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
976	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	5.680.000,00	0,00	0,00	0,00	5.680.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Cakupan Pengembangan Aparatur	61 %							
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pemenuhan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	61 %							
977	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan									
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	1.278.694.200,00	0,00	0,00	0,00	1.278.694.200,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN									
	5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase terlaksananya kerjasama pembangunan Kawasan perbatasan Persentase capaian penyusunan perencanaan pembangunan berdasarkan lokpri	50 Persen 35.47 Persen							
	5.06.02.2.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	Persentase Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	100 Persen							
978	5.06.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan									
			Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	1 Dokumen	77.580.535,00	0,00	0,00	0,00	77.580.535,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5.06.02.2.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Persentase Pelaksanaan urusan Kewilayahan di Kecamatan Lokpri	100 Persen							
979	5.06.02.2.02.0003	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara									
			Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara	1 Dokumen	77.663.137,00	0,00	0,00	0,00	77.663.137,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.06.02.2.03	Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	100 Persen							
980	5.06.02.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen	110.671.970,00	0,00	0,00	0,00	110.671.970,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah Cakupan layanan pemerintahan	100 Persen 100 Persen							
	5.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	12 Dokumen							
981	5.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen							
982	5.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	2.349.722.531,00	0,00	0,00	0,00	2.349.722.531,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
983	5.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	112.440.000,00	0,00	0,00	0,00	112.440.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
984	5.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	22.634.700,00	0,00	0,00	0,00	22.634.700,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
985	5.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	7.308.000,00	0,00	0,00	0,00	7.308.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen							
986	5.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen							
987	5.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
988	5.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	9.090.625,00	0,00	0,00	0,00	9.090.625,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
989	5.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	85.480.000,00	0,00	0,00	0,00	85.480.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
990	5.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.457.805,00	0,00	0,00	0,00	14.457.805,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
991	5.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	230.206.000,00	0,00	0,00	0,00	230.206.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen							
992	5.06.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	0,00	79.614.000,00	0,00	0,00	79.614.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
993	5.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	13 Unit	0,00	40.988.859,00	0,00	0,00	40.988.859,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
994	5.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	4.575.488,00	40.377.966,00	0,00	0,00	44.953.454,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
995	5.06.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	121.155.840,00	0,00	0,00	0,00	121.155.840,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen							
996	5.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	43.971.800,00	0,00	0,00	0,00	43.971.800,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
997	5.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	34.545.000,00	0,00	0,00	0,00	34.545.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
998	5.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	186.764.464,00	0,00	0,00	0,00	186.764.464,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen							
999	5.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	6.232.650,00	0,00	0,00	0,00	6.232.650,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1000	5.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.120.000,00	0,00	0,00	0,00	5.120.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		INSPEKTORAT DAERAH									
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH									
	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Terlaksananya Program Penyelenggaran Pengawasan	67,75% (21 OPD) %							
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	80 %							
1001	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	63 Laporan	63.056.500,00	0,00	0,00	0,00	63.056.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1002	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	23 Laporan	210.000.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1003	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja									
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	24 Laporan	102.000.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1004	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan									
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	4 Laporan	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1005	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	20 Laporan	230.000.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1006	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal									
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	3 Kesepakatan	218.890.691,00	0,00	0,00	0,00	218.890.691,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1007	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP									
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	16 Dokumen	134.917.000,00	0,00	0,00	0,00	134.917.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Terlaksanannya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	80 %							
1008	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah									
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	8 Laporan	18.135.000,00	0,00	0,00	0,00	18.135.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1009	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	3 Laporan	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase perangkat daerah yang sudah dinilai SPIP	61,29% (19 OPD) %							
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	80 %							
1010	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan									
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	63 Rekomendasi	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Terlaksanannya Pendampingan dan Asistensi	80 %							
1011	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah									
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	78 perangkat daerah	119.554.118,00	0,00	0,00	0,00	119.554.118,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1012	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi									
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	83 perangkat daerah	126.492.000,00	0,00	0,00	0,00	126.492.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1013	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi									
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	64 Kegiatan	573.109.610,00	0,00	0,00	0,00	573.109.610,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1014	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	28 perangkat daerah	41.676.100,00	0,00	0,00	0,00	41.676.100,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66,67 (24 Dok) %							
1015	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	66,67 (24 Dok) Dokumen	62.474.100,00	0,00	0,00	0,00	62.474.100,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1016	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1.990.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	80 %							
1017	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	8.248.403.184,00	0,00	0,00	0,00	8.248.403.184,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1018	6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20 Dokumen	141.480.000,00	0,00	0,00	0,00	141.480.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1019	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	19.399.000,00	0,00	0,00	0,00	19.399.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksannya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	80 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1020	6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80 %							
1021	6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	57.999.900,00	0,00	0,00	0,00	57.999.900,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1022	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	104 Orang	385.000.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksanannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	80 %							
1023	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1024	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	66.216.200,00	68.338.412,00	0,00	0,00	134.554.612,00	[object Object]	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1025	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	3.870.375,00	0,00	0,00	0,00	3.870.375,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1026	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1027	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	37.011.095,00	0,00	0,00	0,00	37.011.095,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1028	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	30.655.000,00	0,00	0,00	0,00	30.655.000,00	[object Object]	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1029	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	426.766.500,00	0,00	0,00	0,00	426.766.500,00	[object Object]	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksanannya Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80 %							
1030	6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	0,00	106.152.000,00	0,00	0,00	106.152.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %							
1031	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1032	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1033	6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48 Laporan	4.197.484,00	0,00	0,00	0,00	4.197.484,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1034	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	1.318.901.372,00	0,00	0,00	0,00	1.318.901.372,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaa Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80 %							
1035	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1036	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1037	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	279.981.434,00	0,00	0,00	0,00	279.981.434,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		KECAMATAN SIANTAN									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %							
1038	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	275.144.342,00	0,00	0,00	0,00	275.144.342,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %							
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %							
1039	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	55.614.088,00	0,00	0,00	0,00	55.614.088,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %							
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %							
1040	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	33.681.150,00	0,00	0,00	0,00	33.681.150,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1041	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif									
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	10.757.300,00	0,00	0,00	0,00	10.757.300,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1042	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5 Laporan	80.769.231,00	0,00	0,00	0,00	80.769.231,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %							
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %							
1043	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	15.008.046,00	0,00	0,00	0,00	15.008.046,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1044	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.268.600,00	0,00	0,00	0,00	3.268.600,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %							
1045	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	2.678.451.038,00	0,00	0,00	0,00	2.678.451.038,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1046	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	194.076.000,00	0,00	0,00	0,00	194.076.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1047	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.046.400,00	0,00	0,00	0,00	3.046.400,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1048	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	3.068.600,00	0,00	0,00	0,00	3.068.600,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1049	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1.570.131,00	0,00	0,00	0,00	1.570.131,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %							
1050	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	40.252.500,00	0,00	0,00	0,00	40.252.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1051	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	3.721.000,00	0,00	0,00	0,00	3.721.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1052	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	27.442.000,00	0,00	0,00	0,00	27.442.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 100 %							
1053	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.938.600,00	0,00	0,00	0,00	4.938.600,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1054	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.165.127,00	0,00	0,00	0,00	15.165.127,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1055	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.550.400,00	0,00	0,00	0,00	10.550.400,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1056	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.217.400,00	0,00	0,00	0,00	18.217.400,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1057	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1058	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.423.000,00	0,00	0,00	0,00	2.423.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1059	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1060	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	76.942.000,00	0,00	0,00	0,00	76.942.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1061	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1062	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	33.128.723,00	0,00	0,00	33.128.723,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
1063	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	32.764.500,00	0,00	0,00	0,00	32.764.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1064	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	30.356.000,00	0,00	0,00	0,00	30.356.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1065	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	661.762.478,00	0,00	0,00	0,00	661.762.478,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
1066	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	13.560.000,00	0,00	0,00	0,00	13.560.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1067	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	16.530.000,00	0,00	0,00	0,00	16.530.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1068	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	12.200.000,00	0,00	0,00	0,00	12.200.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		KELURAHAN TAREMPA									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	100 %							
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 %							
1069	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	16.082.100,00	0,00	0,00	0,00	16.082.100,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1070	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	34.365.000,00	0,00	0,00	0,00	34.365.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1071	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.138.150.376,00	6.741.596,00	0,00	0,00	1.144.891.972,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Dokumen Pencegahan COVID-19 di Tingkat Desa dan kelurahan	1 Dokumen							
1072	7.01.03.2.05.0001	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan									
			Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %							
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %							
1073	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
1074	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.481.273,00	0,00	0,00	0,00	3.481.273,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1075	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	19.977.782,00	0,00	0,00	0,00	19.977.782,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1076	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.522.175,00	0,00	0,00	0,00	14.522.175,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1077	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1078	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	33.225.000,00	0,00	0,00	0,00	33.225.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1079	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	24.700.000,00	0,00	0,00	0,00	24.700.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
1080	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1081	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
1082	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	27.330.220,00	0,00	0,00	0,00	27.330.220,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1083	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	16.613.165,00	0,00	0,00	0,00	16.613.165,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
1084	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1085	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.360.000,00	0,00	0,00	0,00	5.360.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1086	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	9.100.000,00	0,00	0,00	0,00	9.100.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		KECAMATAN JEMAJA									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan (Kecamatan Jemaja)	33,3 Persen							
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 Kegiatan							
1087	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang dilaksanakan tiap kecamatan (Kecamatan Jemaja)	60 Persen							
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	4 Kegiatan							
1088	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	263.767.368,00	0,00	0,00	0,00	263.767.368,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus keamanan Ketentraman Dan Ketertiban yang ditangani (Kecamatan Jemaja)	80 Persen							
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %							
1089	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	15.197.200,00	0,00	0,00	0,00	15.197.200,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kecamatan Jemaja)	60 Persen							
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %							
1090	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	10 Orang	31.901.800,00	0,00	0,00	0,00	31.901.800,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1091	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 Dokumen	4.008.000,00	0,00	0,00	0,00	4.008.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kecamatan Jemaja)	60 Persen							
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 Kegiatan							
1092	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	3.680.000,00	0,00	0,00	0,00	3.680.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1093	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif									
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	13.146.488,00	0,00	0,00	0,00	13.146.488,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1094	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Laporan	63.746.438,00	0,00	0,00	0,00	63.746.438,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan pemerintahan	100 Persen							
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen							
1095	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.157.150,00	0,00	0,00	0,00	7.157.150,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1096	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.181.000,00	0,00	0,00	0,00	3.181.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1097	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.991.000,00	0,00	0,00	0,00	2.991.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1098	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.229.900,00	0,00	0,00	0,00	2.229.900,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1099	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.838.000,00	0,00	0,00	0,00	1.838.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1100	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	572.000,00	0,00	0,00	0,00	572.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1101	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	348.000,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %							
1102	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	3.661.162.525,00	0,00	0,00	0,00	3.661.162.525,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1103	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	172.380.000,00	0,00	0,00	0,00	172.380.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1104	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6.681.740,00	0,00	0,00	0,00	6.681.740,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1105	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	569.000,00	0,00	0,00	0,00	569.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %							
1106	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60 %							
1107	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1108	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	16.792.000,00	0,00	0,00	0,00	16.792.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
1109	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3.130.486,00	0,00	0,00	0,00	3.130.486,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1110	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	0,00	36.783.115,00	0,00	0,00	36.783.115,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1111	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	11.086.432,00	0,00	0,00	0,00	11.086.432,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1112	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	48.210.620,00	0,00	0,00	0,00	48.210.620,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1113	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	14.674.400,00	0,00	0,00	0,00	14.674.400,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1114	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	26.760.000,00	0,00	0,00	0,00	26.760.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1115	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	161.393.000,00	0,00	0,00	0,00	161.393.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
1116	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	0,00	12.882.699,00	0,00	0,00	12.882.699,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
1117	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	45.228.600,00	0,00	0,00	0,00	45.228.600,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1118	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.318.048,00	0,00	0,00	0,00	12.318.048,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1119	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.097.274.248,00	0,00	0,00	0,00	1.097.274.248,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
1120	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	3.570.000,00	0,00	0,00	0,00	3.570.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1121	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	10.880.000,00	0,00	0,00	0,00	10.880.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1122	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	900.335,00	0,00	0,00	0,00	900.335,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		KELURAHAN LETUNG									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang dilaksanakan tiap kecamatan (Kecamatan Jemaja) Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang dilaksanakan tiap kecamatan (Kecamatan Jemaja)	60 Persen 60 Persen							
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %							
1123	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	6.184.700,00	0,00	0,00	0,00	6.184.700,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Letung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1124	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	203.432.492,00	0,00	0,00	0,00	203.432.492,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Letung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1125	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	508.792.000,00	0,00	0,00	0,00	508.792.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Letung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
1126	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	4.898.000,00	0,00	0,00	0,00	4.898.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Letung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1127	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Letung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1128	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	14.020.000,00	0,00	0,00	0,00	14.020.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Letung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1129	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	5.223.220,00	0,00	0,00	0,00	5.223.220,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Letung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1130	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Letung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1131	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Letung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
1132	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	20.952.300,00	0,00	0,00	0,00	20.952.300,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Letung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1133	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6.998.928,00	0,00	0,00	0,00	6.998.928,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Letung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 %							
1134	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	3.570.000,00	0,00	0,00	0,00	3.570.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Letung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1135	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Letung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1136	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	9.820.800,00	0,00	0,00	0,00	9.820.800,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Letung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		KECAMATAN PALMATAK									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang dilaksanakan tiap kecamatan (Kecamatan Palmatak)	100 %							
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7 Desa							
1137	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	227.284.270,00	0,00	0,00	0,00	227.284.270,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %							
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %							
1138	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	300 Orang	164.297.075,00	0,00	0,00	0,00	164.297.075,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %							
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang di Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7 Desa							
1139	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif									
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	7 Dokumen	23.592.000,00	0,00	0,00	0,00	23.592.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1140	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7 Laporan	94.249.000,00	0,00	0,00	0,00	94.249.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %							
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang / Bulan							
1141	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	2.624.953.186,00	0,00	0,00	0,00	2.624.953.186,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1142	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	96.600.000,00	0,00	0,00	0,00	96.600.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	12 Laporan							
1143	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	26.760.000,00	0,00	0,00	0,00	26.760.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan							
1144	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	6.622.546,00	0,00	0,00	0,00	6.622.546,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1145	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	17.613.658,00	0,00	0,00	0,00	17.613.658,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1146	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1147	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	64.883.000,00	0,00	0,00	0,00	64.883.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1148	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	69.560.000,00	0,00	0,00	0,00	69.560.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan							
1149	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	50.695.971,00	0,00	0,00	0,00	50.695.971,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1150	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	48.268.000,00	0,00	0,00	0,00	48.268.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1151	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	1.293.188.488,00	0,00	0,00	0,00	1.293.188.488,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		KECAMATAN SIANTAN TIMUR									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen							
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persen							
1152	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	510 Orang	335.606.594,00	0,00	0,00	0,00	335.606.594,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen							
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen							
1153	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif									
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	3 Dokumen	28.696.400,00	0,00	0,00	0,00	28.696.400,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1154	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 Laporan	152.169.611,00	0,00	0,00	0,00	152.169.611,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Pemerintahan	100 Persen							
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen							
1155	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4.364.800,00	0,00	0,00	0,00	4.364.800,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1156	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	4.843.500,00	0,00	0,00	0,00	4.843.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen							
1157	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9 Orang/bulan	1.652.463.335,00	0,00	0,00	0,00	1.652.463.335,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1158	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	93.000.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1159	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 Laporan	3.560.000,00	0,00	0,00	0,00	3.560.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	100 Persen							
1160	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	18.600.000,00	0,00	0,00	0,00	18.600.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen							
1161	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.249.100,00	0,00	0,00	0,00	9.249.100,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1162	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	11.416.600,00	0,00	0,00	0,00	11.416.600,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1163	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	194.180.200,00	0,00	0,00	0,00	194.180.200,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1164	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	60.750.000,00	0,00	0,00	0,00	60.750.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1165	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	560 Laporan	225.901.000,00	0,00	0,00	0,00	225.901.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen							
1166	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	72.790.800,00	0,00	0,00	0,00	72.790.800,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1167	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	23.712.000,00	0,00	0,00	0,00	23.712.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1168	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	560.473.146,00	0,00	0,00	0,00	560.473.146,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		KECAMATAN SIANTAN SELATAN									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	100 %							
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 %							
1169	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	164.120.662,00	0,00	0,00	0,00	164.120.662,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kecamatan Siantan Selatan)	100 Persen							
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %							
1170	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	150 Orang	75.312.190,00	0,00	0,00	0,00	75.312.190,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kecamatan Siantan Selatan)	100 Persen							
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2 Kegiatan							
1171	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif									
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	14.624.400,00	0,00	0,00	0,00	14.624.400,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1172	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7 Laporan	94.505.400,00	0,00	0,00	0,00	94.505.400,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan pemerintahan	100 Persen							
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Ketersediaan Gaji dan tunjangan ASN	100 %							
1173	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1.606.534.578,00	0,00	0,00	0,00	1.606.534.578,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1174	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	93.000.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %							
1175	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	22.800.000,00	0,00	0,00	0,00	22.800.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Air Bini	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %							
1176	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	28 Paket	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Air Bini	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum	100 %							
1177	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	8.574.050,00	0,00	0,00	0,00	8.574.050,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Air Bini	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1178	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	38.231.284,00	0,00	0,00	0,00	38.231.284,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Air Bini	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1179	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	9.795.126,00	0,00	0,00	0,00	9.795.126,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Air Bini	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1180	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	10.038.960,00	0,00	0,00	0,00	10.038.960,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Air Bini	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1181	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2.022.000,00	0,00	0,00	0,00	2.022.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1182	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	21.900.000,00	0,00	0,00	0,00	21.900.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1183	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	120.210.000,00	0,00	0,00	0,00	120.210.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pegadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	100 %							
1184	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	0,00	11.741.320,00	0,00	0,00	11.741.320,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Air Bini	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1185	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	0,00	78.755.739,00	0,00	0,00	78.755.739,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Air Bini	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1186	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	11.066.000,00	0,00	0,00	0,00	11.066.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Air Bini	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1187	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	296.596.224,00	0,00	0,00	0,00	296.596.224,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Air Bini	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah/Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
1188	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	70.626.140,00	0,00	0,00	0,00	70.626.140,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Air Bini	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1189	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	8.850.000,00	0,00	0,00	0,00	8.850.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Air Bini	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1190	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	16.380.000,00	0,00	0,00	0,00	16.380.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Air Bini	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		KECAMATAN JEMAJA TIMUR									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang dilaksanakan tiap kecamatan (Jemaja Timur) Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen 100 persen							
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2 Lembaga 4 Desa							
1191	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan									
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	25 Lembaga Kemasyarakatan	165.515.400,00	0,00	0,00	0,00	165.515.400,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 persen							
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan							
1192	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan	37.600.000,00	0,00	0,00	0,00	37.600.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-							
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-							
1193	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	500 Orang	51.500.000,00	0,00	0,00	0,00	51.500.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayah	1 Dokumen 1 Laporan							
1194	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif									
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	9.515.400,00	0,00	0,00	0,00	9.515.400,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1195	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 Laporan	20.600.000,00	0,00	0,00	0,00	20.600.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Dokumen/Laporan Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen							
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen 1 Laporan							
1196	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4.832.823,00	0,00	0,00	0,00	4.832.823,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1197	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	3.761.500,00	0,00	0,00	0,00	3.761.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1198	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.855.000,00	0,00	0,00	0,00	3.855.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1199	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.932.200,00	0,00	0,00	0,00	3.932.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1200	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.855.000,00	0,00	0,00	0,00	3.855.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1201	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.840.000,00	0,00	0,00	0,00	3.840.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Smesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Smesteran SKPD Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen 1 Laporan 12 Laporan 17 Orang							
1202	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	1.951.283.210,00	0,00	0,00	0,00	1.951.283.210,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1203	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1204	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.489.400,00	0,00	0,00	0,00	4.489.400,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1205	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	6.489.400,00	0,00	0,00	0,00	6.489.400,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonlisiasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1 Laporan							
1206	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	17.565.110,00	0,00	0,00	0,00	17.565.110,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %							
1207	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	28.700.000,00	0,00	0,00	0,00	28.700.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Di Sediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang di Sediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Sediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang di Sediakan	12 Laporan 120 Laporan 5 Paket 5 Paket 5 Paket 8 Paket							
1208	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	31.219.000,00	0,00	0,00	0,00	31.219.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1209	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	16.617.235,00	0,00	0,00	0,00	16.617.235,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1210	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	26.074.700,00	0,00	0,00	0,00	26.074.700,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1211	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	9.740.000,00	0,00	0,00	0,00	9.740.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1212	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	34.500.000,00	0,00	0,00	0,00	34.500.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1213	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	135.000.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan 12 Laporan							
1214	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.072.000,00	0,00	0,00	0,00	12.072.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1215	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	602.784.224,00	0,00	0,00	0,00	602.784.224,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di Pelihara dan di Bayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesinlainya yang di Pelihara	2 Unit 12 Unit							
1216	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	4.987.704,00	0,00	0,00	0,00	4.987.704,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1217	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	1.568.000,00	0,00	0,00	0,00	1.568.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		KECAMATAN SIANTAN TENGAH									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang dilaksanakan tiap kecamatan (Siantan Tengah)	100 Persen							
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamata	6 Lemkes							
1218	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan									
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	118.611.176,00	0,00	0,00	0,00	118.611.176,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 %							
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 Persen							
1219	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan	32.032.400,00	0,00	0,00	0,00	32.032.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Siantan Tengah)	100 Persen							
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %							
1220	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	24 Orang	49.440.000,00	0,00	0,00	0,00	49.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kecamatan Siantan Tengah)	100 Persen							
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %							
1221	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	10.350.000,00	0,00	0,00	0,00	10.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan pemerintahan	100 Persen							
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Dokumen							
1222	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	6.690.000,00	0,00	0,00	0,00	6.690.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1223	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.135.000,00	0,00	0,00	0,00	7.135.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1224	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	4.280.000,00	0,00	0,00	0,00	4.280.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %							
1225	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.754.992.549,00	0,00	0,00	0,00	1.754.992.549,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1226	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	112.056.000,00	0,00	0,00	0,00	112.056.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1227	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	6.286.703,00	0,00	0,00	0,00	6.286.703,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1228	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	56.825.205,00	28.445.922,00	0,00	0,00	85.271.127,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1229	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	5.750.403,00	1.867.998,00	0,00	0,00	7.618.401,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1230	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	7.667.970,00	0,00	0,00	0,00	7.667.970,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1231	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.983.800,00	0,00	0,00	0,00	5.983.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1232	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	21.750.000,00	0,00	0,00	0,00	21.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1233	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	66.686.000,00	0,00	0,00	0,00	66.686.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1234	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan							
1235	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	37.420.450,00	0,00	0,00	0,00	37.420.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1236	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	949.555.024,00	0,00	0,00	0,00	949.555.024,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
1237	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	14.330.000,00	0,00	0,00	0,00	14.330.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1238	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	11.370.000,00	0,00	0,00	0,00	11.370.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1239	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		KECAMATAN SIANTAN UTARA									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Kecamatan Siantan Utara) Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 % 100 %							
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %							
1240	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	3.110.000,00	0,00	0,00	0,00	3.110.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Mubur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tersedianya Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	100 %							
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tersedianya Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	100 %							
1241	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	153.249.500,00	0,00	0,00	0,00	153.249.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Mubur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 %							
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 %							
1242	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5 Orang	93.650.655,00	0,00	0,00	0,00	93.650.655,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Mubur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1243	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	10.464.200,00	0,00	0,00	0,00	10.464.200,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Mubur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	100 %							
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	100 %							
1244	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Mubur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1245	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif									
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	18.203.000,00	0,00	0,00	0,00	18.203.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Mubur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1246	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	66.056.000,00	0,00	0,00	0,00	66.056.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Mubur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100 %							
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100 %							
1247	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Mubur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100 %							
1248	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1.503.816.858,00	0,00	0,00	0,00	1.503.816.858,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Mubur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1249	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen	87.000.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Mubur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100 %							
1250	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	10.788.000,00	0,00	0,00	0,00	10.788.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Mubur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100 %							
1251	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	1.673.425,00	0,00	0,00	0,00	1.673.425,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Mubur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1252	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	44.545.938,00	0,00	0,00	0,00	44.545.938,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Mubur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1253	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	4.264.000,00	0,00	0,00	0,00	4.264.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Mubur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1254	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	23.800.000,00	0,00	0,00	0,00	23.800.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Mubur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1255	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	90.802.000,00	0,00	0,00	0,00	90.802.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Mubur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-							
1256	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	50.772.885,00	0,00	0,00	0,00	50.772.885,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Mubur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100 %							
1257	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.259.940,00	0,00	0,00	0,00	15.259.940,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Mubur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1258	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.688.000,00	0,00	0,00	0,00	2.688.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Mubur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1259	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	10.037.398,00	0,00	0,00	0,00	10.037.398,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Mubur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1260	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	525.727.040,00	0,00	0,00	0,00	525.727.040,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Mubur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100 %							
1261	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	3.368.370,00	0,00	0,00	0,00	3.368.370,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Mubur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		KECAMATAN JEMAJA BARAT									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang dilaksanakan tiap kecamatan (Kecamatan Jemaja Barat)	88 Persen							
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3 Desa							
1262	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	187.520.703,00	0,00	0,00	0,00	187.520.703,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kecamatan Jemaja Barat)	75.50 Persen							
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 Rakor							
1263	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	10 Orang	43.314.000,00	0,00	0,00	0,00	43.314.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kecamatan Jemaja Barat)	90 Persen							
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 Desa							
1264	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif									
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	3 Dokumen	11.971.000,00	0,00	0,00	0,00	11.971.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1265	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3 Laporan	40.384.615,00	0,00	0,00	0,00	40.384.615,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan pemerintahan	85.50 Persen							
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen							
1266	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1267	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.035.000,00	0,00	0,00	0,00	1.035.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1268	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1269	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	828.000,00	0,00	0,00	0,00	828.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1270	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	966.000,00	0,00	0,00	0,00	966.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1271	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1272	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	2.480.000,00	0,00	0,00	0,00	2.480.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	80 %							
1273	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9 Orang/bulan	1.814.742.237,00	0,00	0,00	0,00	1.814.742.237,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1274	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	96.000.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1275	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.336.600,00	0,00	0,00	0,00	1.336.600,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1276	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1.212.400,00	0,00	0,00	0,00	1.212.400,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %							
1277	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1.235.000,00	0,00	0,00	0,00	1.235.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1278	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terlaksananya Kegiatan Yg dihasilkan	100 % 1 Laporan							
1279	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	80 %							
1280	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.006.000,00	0,00	0,00	0,00	1.006.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1281	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	9.810.959,00	0,00	0,00	0,00	9.810.959,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1282	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.456.089,00	0,00	0,00	0,00	20.456.089,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1283	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4.704.000,00	0,00	0,00	0,00	4.704.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1284	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	41.000.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1285	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	146.714.000,00	0,00	0,00	0,00	146.714.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
1286	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0,00	32.625.865,00	0,00	0,00	32.625.865,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1287	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	27.236.976,00	0,00	0,00	0,00	27.236.976,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1288	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.018.000,00	0,00	0,00	0,00	2.018.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1289	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	394.953.332,00	0,00	0,00	0,00	394.953.332,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
1290	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	6.456.506,00	0,00	0,00	0,00	6.456.506,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1291	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.521.580,00	0,00	0,00	0,00	15.521.580,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		KECAMATAN KUTE SIANTAN									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang dilaksanakan tiap kecamatan (Kecamatan Kute Siantan)	60 Persen							
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat	100 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1292	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan									
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	161.653.477,00	0,00	0,00	0,00	161.653.477,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1293	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan									
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga Kemasyarakatan	6.320.000,00	0,00	0,00	0,00	6.320.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus keamanan Ketentraman Dan Ketertiban yang ditangani (Kute Siantan)	66,66 Persen							
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 Persen							
1294	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan	20.077.090,00	0,00	0,00	0,00	20.077.090,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kecamatan Kute Siantan)	60 Persen							
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persen							
1295	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	17 Orang	53.460.000,00	0,00	0,00	0,00	53.460.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1296	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen	5.801.200,00	0,00	0,00	0,00	5.801.200,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kecamatan Kute Siantan)	60 Persen							
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen							
1297	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif									
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	8.283.200,00	0,00	0,00	0,00	8.283.200,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1298	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5 Laporan	67.474.964,00	0,00	0,00	0,00	67.474.964,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen							
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen							
1299	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	9.330.000,00	0,00	0,00	0,00	9.330.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1300	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9.116.500,00	0,00	0,00	0,00	9.116.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1301	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	5.418.500,00	0,00	0,00	0,00	5.418.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1302	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.870.000,00	0,00	0,00	0,00	5.870.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen							
1303	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	2.112.722.565,00	0,00	0,00	0,00	2.112.722.565,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1304	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	107.400.000,00	0,00	0,00	0,00	107.400.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1305	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.990.000,00	0,00	0,00	0,00	5.990.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Payalaman	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1306	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	9.160.000,00	0,00	0,00	0,00	9.160.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Laporan Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 Persen							
1307	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	4.722.900,00	0,00	0,00	0,00	4.722.900,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Payalaman	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen							
1308	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	6.930.000,00	0,00	0,00	0,00	6.930.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1309	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	13.250.000,00	0,00	0,00	0,00	13.250.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1310	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	14 Orang	7.876.200,00	0,00	0,00	0,00	7.876.200,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
1311	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	75.837.556,00	0,00	0,00	0,00	75.837.556,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1312	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	4.640.283,00	2.297.474,00	0,00	0,00	6.937.757,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1313	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	8.823.360,00	0,00	0,00	0,00	8.823.360,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1314	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	10.984.595,00	0,00	0,00	0,00	10.984.595,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Payalaman	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1315	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.955.890,00	0,00	0,00	0,00	10.955.890,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1316	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	101.480.000,00	0,00	0,00	0,00	101.480.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
1317	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0,00	55.767.320,00	0,00	0,00	55.767.320,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1318	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	125.686.875,00	0,00	0,00	0,00	125.686.875,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
1319	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.650.000,00	0,00	0,00	0,00	20.650.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1320	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Layanan Perkantoran Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Layanan	1.020.824.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.824.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kab/Kota, Pusat/Dem	Dana Transfer Umum/Dana Bebas Umum
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
1321	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	4.060.010,00	0,00	0,00	0,00	4.060.010,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum/Dana Bebas Umum
1322	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64 Unit	5.480.000,00	0,00	0,00	0,00	5.480.026,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum/Dana Bebas Umum

Kab. Kepulauan Anambas, 29 Desember 2023

Bupati

ABDUL HARIS

Lampiran V : Peraturan Daerah
Nomor : 05 Tahun 2023
Tanggal : 29 Desember 2023

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1				PELAYANAN UMUM					
1	01	1	01	Pendidikan	192.359.025.192,00	127.527.732,00	0,00	0,00	192.486.552.924,00
1	01	1	02	Kesehatan	107.792.956.483,00	658.124.751,00	0,00	0,00	108.451.081.234,00
1	01	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16.683.918.215,00	303.285.292,00	0,00	0,00	16.987.203.507,00
1	01	1	05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	31.394.272.877,00	374.257.550,00	0,00	0,00	31.768.530.427,00
1	01	1	06	Sosial	6.519.952.443,00	100.774.722,00	0,00	0,00	6.620.727.165,00
1	01	2	11	Lingkungan Hidup	477.340.800,00	0,00	0,00	0,00	477.340.800,00
1	01	2	12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.699.945.300,00	206.885.621,00	0,00	0,00	9.906.830.921,00
1	01	2	13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.837.504.625,00	208.064.090,00	0,00	0,00	6.045.568.715,00
1	01	2	14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	407.789.461,00	0,00	0,00	0,00	407.789.461,00
1	01	2	15	Perhubungan	14.574.939.313,00	120.666.176,00	0,00	0,00	14.695.605.489,00
1	01	2	16	Komunikasi dan Informatika	6.140.785.985,00	4.218.000,00	0,00	0,00	6.145.003.985,00
1	01	2	17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	9.792.654.528,00	0,00	0,00	0,00	9.792.654.528,00
1	01	2	18	Penanaman Modal	4.874.963.791,00	0,00	0,00	0,00	4.874.963.791,00
1	01	2	19	Kepemudaan dan Olahraga	137.874.937,00	0,00	0,00	0,00	137.874.937,00
1	01	2	20	Statistik	161.000.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000.000,00
1	01	2	23	Perpustakaan	2.796.879.659,00	48.978.089,00	0,00	0,00	2.845.857.748,00
1	01	2	24	Kearsipan	90.167.274,00	0,00	0,00	0,00	90.167.274,00

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1	01	3	25	Kelautan dan Perikanan	13.650.269.621,00	97.815.201,00	0,00	0,00	13.748.084.822,00
1	01	3	26	Pariwisata	6.404.864.782,00	186.423.418,00	0,00	0,00	6.591.288.200,00
1	01	4	01	Sekretariat Daerah	49.471.958.392,00	248.774.994,00	0,00	0,00	49.720.733.386,00
1	01	4	02	Sekretariat DPRD	36.979.433.753,00	187.347.042,00	0,00	0,00	37.166.780.795,00
1	01	5	01	Perencanaan	13.789.228.692,00	349.407.093,00	0,00	0,00	14.138.635.785,00
1	01	5	02	Keuangan	24.540.196.921,00	311.577.550,00	2.000.000.000,00	110.343.205.879,00	137.194.980.350,00
1	01	5	03	Kepegawaian	8.077.327.600,00	32.316.925,00	0,00	0,00	8.109.644.525,00
1	01	5	04	Pendidikan dan Pelatihan	1.278.694.200,00	0,00	0,00	0,00	1.278.694.200,00
1	01	5	05	Penelitian dan Pengembangan	333.215.194,00	0,00	0,00	0,00	333.215.194,00
1	01	5	06	Pengelolaan Perbatasan Daerah	3.544.120.545,00	160.980.825,00	0,00	0,00	3.705.101.370,00
1	01	6	01	Inspektorat	13.454.376.663,00	174.490.412,00	0,00	0,00	13.628.867.075,00
1	01	7	01	Kecamatan	39.496.584.862,00	301.037.771,00	0,00	0,00	39.797.622.633,00
1	01	8	01	Kesatuan Bangsa dan Politik	24.496.905.875,00	149.673.242,00	0,00	0,00	24.646.579.117,00
1	01	X	XX	Non Urusan	14.981.600,00	0,00	0,00	0,00	14.981.600,00
2				KETERTIBAN DAN KEAMANAN					
2	03	1	05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	862.550.894,00	418.856.895,00	0,00	0,00	1.281.407.789,00
2	03	1	06	Sosial	51.955.000,00	0,00	0,00	0,00	51.955.000,00
3				EKONOMI					
3	04	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.985.816.856,00	53.159.107.026,00	0,00	0,00	61.144.923.882,00
3	04	2	07	Tenaga Kerja	848.244.000,00	0,00	0,00	0,00	848.244.000,00
3	04	2	09	Pangan	158.687.292,00	32.301.208,00	0,00	0,00	190.988.500,00
3	04	2	15	Perhubungan	2.217.635.736,00	3.189.893.684,00	0,00	0,00	5.407.529.420,00
3	04	2	16	Komunikasi dan Informatika	7.215.580.450,00	430.701.297,00	0,00	0,00	7.646.281.747,00

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
3	04	2	17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	792.145.503,00	118.407.554,00	0,00	0,00	910.553.057,00
3	04	2	18	Penanaman Modal	1.049.519.825,00	0,00	0,00	0,00	1.049.519.825,00
3	04	2	21	Persandian	261.077.334,00	88.922.005,00	0,00	0,00	349.999.339,00
3	04	3	25	Kelautan dan Perikanan	5.248.753.360,00	155.251.361,00	0,00	0,00	5.404.004.721,00
3	04	3	27	Pertanian	189.500.000,00	0,00	0,00	0,00	189.500.000,00
3	04	3	30	Perdagangan	496.457.802,00	0,00	0,00	0,00	496.457.802,00
3	04	3	31	Perindustrian	336.515.679,00	0,00	0,00	0,00	336.515.679,00
4				PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP					
4	05	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	626.462.415,00	0,00	0,00	0,00	626.462.415,00
4	05	2	10	Pertanahan	135.151.000,00	0,00	0,00	0,00	135.151.000,00
4	05	2	11	Lingkungan Hidup	568.750.411,00	39.164.950,00	0,00	0,00	607.915.361,00
5				PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM					
5	06	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.129.356.745,00	0,00	0,00	0,00	1.129.356.745,00
5	06	1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	157.220.286,00	455.609.041,00	0,00	0,00	612.829.327,00
6				KESEHATAN					
6	07	1	02	Kesehatan	33.818.896.767,00	43.074.928.320,00	0,00	0,00	76.893.825.087,00
6	07	2	14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.075.947.000,00	0,00	0,00	0,00	2.075.947.000,00
7				PARIWISATA					
7	08	3	26	Pariwisata	750.000.000,00	187.000.000,00	0,00	0,00	937.000.000,00
8				PENDIDIKAN					
8	10	1	01	Pendidikan	21.307.263.302,00	25.051.689.444,00	0,00	0,00	46.358.952.746,00
8	10	2	19	Kepemudaan dan Olahraga	4.497.299.200,00	0,00	0,00	0,00	4.497.299.200,00
8	10	2	22	Kebudayaan	280.000.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000.000,00
8	10	2	23	Perpustakaan	910.623.690,00	0,00	0,00	0,00	910.623.690,00

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
9				PERLINDUNGAN SOSIAL					
9	11	1	06	Sosial	947.970.842,00	0,00	0,00	0,00	947.970.842,00
9	11	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.694.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.694.000.000,00
				TOTAL	741.487.810.872,00	130.764.469.281,00	2.000.000.000,00	110.343.205.879,00	984.595.176.132,00

Kab. Kepulauan Anambas, 29 Desember 2023

Bupati

ABDUL HARIS

Lampiran VI : Peraturan Daerah
Nomor : 05 Tahun 2023
Tanggal : 29 Desember 2023

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
A SPM Bidang Pendidikan			
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Pembangunan Ruang Kelas Baru	0,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	150.924.000,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	202.411.600,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.586.870.000,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	200.368.795,00
		Total	2.140.574.395,00
2.	Pendidikan Dasar	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	749.548.572,00
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	499.999.050,00
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	499.999.950,00
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	217.708.738,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	199.999.693,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	649.999.680,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	679.109.000,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	199.999.200,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	772.548.295,00
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	499.999.625,00
		Total	4.968.911.803,00
3.	Pendidikan Dasar	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	341.600.000,00
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	244.043.188,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	199.999.950,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	649.999.096,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.297.468.000,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	199.932.200,00
		Total	2.933.042.434,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
4.	Pendidikan Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	245.840.000,00
		Total	245.840.000,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan	10.288.368.632,00
B SPM Bidang Kesehatan			
1.	Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	235.197.000,00
		Total	235.197.000,00
2.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	160.555.000,00
		Total	160.555.000,00
3.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	261.200.600,00
		Total	261.200.600,00
4.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	18.400.000,00
		Total	18.400.000,00
5.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	125.400.000,00
		Total	125.400.000,00
6.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	16.320.000,00
		Total	16.320.000,00
7.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	407.075.000,00
		Total	407.075.000,00
8.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	302.597.654,00
		Total	302.597.654,00
9.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	5.280.000,00
		Total	5.280.000,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan	1.532.025.254,00
C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	911.872.745,00
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	217.484.000,00
		Total	1.129.356.745,00
2.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	309.450.000,00
		Total	309.450.000,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.438.806.745,00
D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
1.	Bencana	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	125.120.286,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
		Total	125.120.286,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	125.120.286,00
E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (K3E) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	108.201.451,00
		Total	108.201.451,00
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	98.108.675,00
		Total	98.108.675,00
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	65.109.300,00
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	154.741.000,00
		Total	219.850.300,00
4.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	98.012.000,00
		Total	98.012.000,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	524.170.426,00
F SPM Bidang Sosial			
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Pemberian Layanan Rujukan	233.045.000,00
		Total	233.045.000,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial	233.045.000,00

Kab. Kepulauan Anambas, 29 Desember 2023

Bupati

ABDUL HARIS

Lampiran VII : Peraturan Daerah
Nomor : 05 Tahun 2023
Tanggal : 29 Desember 2023

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	561.539.766.423,00	192.486.552.924,00
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	61.357.802.848,00	45.957.352.746,00
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	312.888.312,00	0,00
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	9.386.649.366,00	341.600.000,00
1	01	05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	479.762.079,00	60.000.000,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	561.539.766.423,00	108.451.081.234,00
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	79.513.135.494,00	76.341.060.887,00
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	831.340.569,00	552.764.200,00
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	41.382.182.204,00	0,00
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	290.915.730,00	0,00
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	561.539.766.423,00	16.987.203.507,00
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	87.191.543.001,00	0,00
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	9.629.702.050,00	1.129.356.745,00
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	5.214.805.203,00	0,00
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.607.402.602,00	309.450.000,00
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.496.221.897,00	10.921.951.713,00
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	10.429.610.407,00	0,00
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	10.429.610.407,00	6.902.937.756,00
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	7.937.001.312,00	0,00
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	177.905.038.486,00	43.200.038.513,00
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	177.303.377,00	119.995.900,00
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	521.480.520,00	317.012.415,00
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	312.888.312,00	125.120.286,00
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	10.429.610.407,00	0,00
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	312.888.312,00	0,00
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.042.961.041,00	487.709.041,00
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	561.539.766.423,00	31.768.530.427,00
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.809.292.997,00	332.913.600,00
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.385.340.552,00	531.880.426,00
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	3.274.897.668,00	416.613.763,00
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	561.539.766.423,00	6.620.727.165,00
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	469.332.468,00	61.790.000,00
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	693.569.092,00	233.045.000,00
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	894.217.692,00	253.135.842,00
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	511.050.910,00	51.955.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	208.592.208,00	0,00
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.658.656.404,00	0,00
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	525.810.895,00	0,00
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.605.352.453,00	848.244.000,00
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	450.000.000,00	429.000.000,00
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	389.259.500,00	520.000.000,00
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	250.000.000,00	0,00
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	486.000.000,00	250.000.000,00
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	503.259.500,00	495.000.000,00
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	270.000.000,00	91.810.300,00
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	60.000.000,00	77.876.000,00
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	130.000.000,00	21.302.200,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		
2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	100.000.000,00	0,00
2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	100.000.000,00	0,00
2	10	08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	100.000.000,00	0,00
2	10	09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	100.000.000,00	0,00
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	0,00	135.151.000,00
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	561.539.766.423,00	477.340.800,00
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	36.279.154,00
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	431.283.000,00	26.150.000,00
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	293.757.000,00	59.624.422,00
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	100.000.000,00	0,00
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	566.921.000,00	124.506.085,00
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	227.096.000,00	73.183.955,00
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	100.000.000,00	0,00
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	100.000.000,00	0,00
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	725.000.000,00	323.811.826,00
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	561.539.766.423,00	9.075.030.216,00
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	838.816.869,00	369.971.205,00
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	540.331.000,00	172.437.700,00
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	861.536.000,00	231.004.200,00
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	71.538.000,00	58.387.600,00
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	561.539.766.423,00	3.870.073.404,00
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	860.000.000,00	151.180.000,00
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.120.000.000,00	1.335.991.022,00
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.948.944.000,00	688.324.289,00
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
2	14	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	561.539.766.423,00	407.789.461,00
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	385.875.000,00	194.400.000,00
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	440.823.600,00	1.516.147.000,00
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	284.687.550,00	365.400.000,00
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	561.539.766.423,00	14.960.428.007,00
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.866.609.000,00	1.759.485.835,00
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	28.483.537.603,00	3.347.580.986,00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	561.539.766.423,00	6.145.003.985,00
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	0,00	4.191.643.484,00
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	0,00	3.454.638.263,00
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	561.539.766.423,00	9.792.654.528,00
2	17	02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	20.859.221,00	0,00
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	114.725.714,00	0,00
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	96.208.135,00	0,00
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	52.148.052,00	0,00
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	208.592.208,00	150.592.208,00
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	584.335.133,00	759.960.849,00
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	561.539.766.423,00	4.874.963.791,00
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	1.130.000.000,00	257.939.825,00
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	398.000.000,00	0,00
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.020.823.000,00	376.402.000,00
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	385.838.000,00	415.178.000,00
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	150.000.000,00	0,00
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
2	19	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	561.539.766.423,00	137.874.937,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.135.594.500,00	400.000.000,00
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	14.500.000.000,00	3.198.657.144,00
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	2.000.000.000,00	898.642.056,00
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.400.000.000,00	161.000.000,00
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	420.000.000,00	349.999.339,00
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	4.100.000.000,00	280.000.000,00
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	4.000.000.000,00	0,00
2	22	04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	430.000.000,00	0,00
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1.150.000.000,00	0,00
2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	400.000.000,00	0,00
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		
2	23	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	561.539.766.423,00	2.840.409.370,00
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.454.559.708,00	916.072.068,00
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	144.105.791,00	90.167.274,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		
3	25	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	561.539.766.423,00	13.748.084.822,00
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	7.259.008.843,00	4.085.225.502,00
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.169.358.965,00	1.208.778.980,00
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	297.243.897,00	110.000.239,00
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
3	26	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	561.539.766.423,00	6.591.288.200,00
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.525.208.317,00	437.000.000,00
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	8.917.316.898,00	500.000.000,00
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	417.184.416,00	0,00
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	959.524.157,00	25.000.000,00
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.251.553.249,00	105.000.000,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	677.924.676,00	25.000.000,00
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	469.332.468,00	0,00
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	719.643.118,00	34.500.000,00
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	137.004.802,00	37.004.802,00
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	535.000.000,00	390.000.000,00
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	494.963.000,00	69.453.000,00
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	150.000.000,00	0,00
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	195.000.000,00	0,00
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.900.000.000,00	336.515.679,00
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	54.636.350,00	0,00
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI		
3	32	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	1.140.000.000,00	0,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4	01		SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	561.539.766.423,00	39.447.694.345,00
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	34.207.004.940,00	8.231.867.000,00
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.729.881.063,00	2.041.172.041,00
4	02		SEKRETARIAT DPRD		
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	561.539.766.423,00	21.784.528.628,00
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	16.207.622.850,00	15.382.252.167,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5	01		PERENCANAAN		
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	561.539.766.423,00	10.970.438.325,00
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.184.743.857,00	2.239.966.950,00
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.450.244.290,00	928.230.510,00
5	02		KEUANGAN		
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	561.539.766.423,00	17.286.570.421,00
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	105.035.576.741,00	117.604.729.529,00
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.630.000.000,00	1.611.350.000,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.685.928.250,00	692.330.400,00
5	03		KEPEGAWAIAN		
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	561.539.766.423,00	7.166.516.409,00
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	4.744.971.748,00	943.128.116,00
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.510.228.676,00	1.278.694.200,00
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	700.000.000,00	333.215.194,00
5	06		PENGELOLAAN PERBATASAN		
5	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	561.539.766.423,00	3.439.185.728,00
5	06	02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	738.675.000,00	265.915.642,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6	01		INSPEKTORAT DAERAH		
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	561.539.766.423,00	11.401.036.056,00
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.400.000.000,00	1.346.999.191,00
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.270.000.000,00	880.831.828,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN		
7	01		KECAMATAN		
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	561.539.766.423,00	34.204.745.382,00
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	884.323.100,00	6.860.000,00
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6.072.395.223,00	3.637.035.162,00
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	749.338.600,00	104.906.690,00
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.234.116.000,00	974.369.802,00
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	573.696.390,00	869.705.597,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	561.539.766.423,00	5.354.913.310,00
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.730.000.000,00	100.000.000,00
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	857.127.718,00	18.223.572.707,00
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	260.000.000,00	0,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
6	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	980.000.000,00	200.000.000,00
6	01	08	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.458.778.000,00	768.093.100,00
X			NON URUSAN		
X	XX		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX		
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	561.536.789.423,00	14.981.800,00

Kab. Kepulauan Anambas, 29 Desember 2023

Bupati

ABDUL HARIS

Lampiran VIII : Peraturan Daerah
Nomor : 05 Tahun 2023
Tanggal : 29 Desember 2023

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2024

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.01.0000						DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	230.503.546.278,00	182.628.629.241,00	243.495.661.407,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	221.310.497.670,00	181.288.336.774,00	238.845.505.670,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	221.310.497.670,00	181.288.336.774,00	238.845.505.670,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	38.027.969.235,00	4.172.249.329,00	45.957.352.746,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	18.563.501.637,00	2.311.439.574,00	25.092.673.656,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	426.214.900,00	38.677.800,00	217.708.738,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	265.409.000,00	1.720.000,00	4.987.753.653,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6.689.442.653,00	1.254.300,00	3.258.583.497,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	249.987.800,00	155.000,00	24.992.400,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	350.000.000,00	104.000,00	28.986.600,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	355.678.400,00	97.000,00	1.941.425.541,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	2.171.451.590,00	947.564,00	1.632.042.312,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	2.751.165.500,00	436.000,00	679.109.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	200.000.000,00	200.000.000,00	249.977.850,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	700.000.000,00	281.950.000,00	199.999.200,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	649.978.800,00	550.181.716,00	649.999.680,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	100.000.000,00	100.000.000,00	199.999.693,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	246.413.878,00	246.413.878,00	8.000.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	300.000.000,00	156.000.000,00	499.999.950,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	617.849.316,00	137.849.316,00	499.999.625,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	750.000.000,00	180.000.000,00	499.999.050,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	750.000.000,00	365.250.000,00	749.548.572,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	989.909.800,00	50.403.000,00	772.548.295,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	13.800.970.098,00	1.232.000.639,00	16.966.158.249,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	224.901.526,00	1.000,00	1.741.836.778,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	310.491.805,00	2.500,00	1.320.746.220,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium	819.702.795,00	2.500,00	3.403.672.145,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.907.992.162,00	2.500,00	1.634.509.798,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	350.000.000,00	24.992.400,00	24.992.400,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	212.419.111,00	24.992.400,00	448.658.221,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.185.880.952,00	24.992,00	1.177.186.988,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	2.069.390.575,00	299.575,00	1.297.468.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0034	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	149.900.000,00	149.900.000,00	349.901.925,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	200.000.000,00	200.000.000,00	249.936.340,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	700.000.000,00	188.856.000,00	199.932.200,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	649.978.800,00	294.478.800,00	649.999.096,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	100.000.000,00	100.000.000,00	199.999.950,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	388.299.661,00	68.299.661,00	4.000.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	750.000.000,00	172.900.000,00	244.043.188,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	782.012.711,00	7.248.311,00	23.275.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	5.431.557.500,00	555.909.116,00	3.612.680.841,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.312.806.000,00	150.000,00	1.045.816.474,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	744.978.800,00	2.067.520,00	200.368.795,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD	452.559.000,00	9.000,00	20.589.326,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	515.606.600,00	1.556.600,00	55.700.646,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	203.830.000,00	20.000,00	1.586.870.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	217.559.000,00	217.559.000,00	250.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	549.978.800,00	174.978.000,00	202.411.600,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	515.328.300,00	112.500.000,00	150.924.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	100.000.000,00	45.000.000,00	100.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	818.911.000,00	2.068.996,00	0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	231.940.000,00	72.900.000,00	285.840.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	131.940.000,00	5.400.000,00	245.840.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	100.000.000,00	67.500.000,00	40.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	400.000.000,00	100.000.000,00	341.600.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	400.000.000,00	100.000.000,00	341.600.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	400.000.000,00	100.000.000,00	341.600.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	100.000.000,00	49.950.000,00	60.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100.000.000,00	49.950.000,00	60.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	05	2.02	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100.000.000,00	49.950.000,00	60.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	182.782.528.435,00	176.966.137.445,00	192.486.552.924,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.000.000,00	122.440.017,00	100.828.100,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	250.000.000,00	122.440.017,00	100.828.100,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	135.767.673.737,00	134.159.150.657,00	147.898.935.343,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	133.867.673.737,00	132.259.150.657,00	146.579.055.343,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	1.319.880.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	303.784.619,00	216.634.619,00	61.891.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	303.784.619,00	216.634.619,00	61.891.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.019.892.679,00	1.547.534.724,00	1.621.469.221,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	509.382.500,00	297.380.540,00	242.842.004,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	80.769.072,00	80.769.072,00	51.962.322,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	417.523.407,00	327.090.412,00	418.834.195,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	58.510.700,00	58.510.700,00	58.510.700,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	953.707.000,00	783.784.000,00	849.320.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.338.690.400,00	40.842.186.628,00	42.606.307.946,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	216.863.200,00	82.713.200,00	225.424.210,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44.121.827.200,00	40.759.473.428,00	42.380.883.736,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.487.000,00	78.190.800,00	197.121.314,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102.487.000,00	78.190.800,00	197.121.314,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8.934.712.722,00	1.086.836.581,00	4.635.174.137,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	8.934.712.722,00	1.086.836.581,00	4.635.174.137,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	300.000.000,00	166.950.000,00	400.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	300.000.000,00	166.950.000,00	400.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	02	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	150.000.000,00	120.750.000,00	200.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	02	2.01	0006	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	150.000.000,00	46.200.000,00	200.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	7.570.089.949,00	603.316.600,00	3.198.657.144,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	160.456.000,00	702.505.440,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	2.02	0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	250.000.000,00	160.456.000,00	702.505.440,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	220.000.000,00	220.000.000,00	221.854.592,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	2.03	0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	220.000.000,00	220.000.000,00	221.854.592,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	2.04	0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	6.900.089.949,00	22.860.600,00	2.074.297.112,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	2.05	0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	6.900.089.949,00	22.860.600,00	2.074.297.112,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	875.847.836,00	211.386.381,00	898.642.056,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	875.847.836,00	211.386.381,00	898.642.056,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	300.043.561,00	200.050.181,00	242.650.181,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	04	2.01	0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	278.850.675,00	3.960.600,00	377.939.742,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	04	2.01	0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	296.953.600,00	7.375.600,00	278.052.133,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	188.774.937,00	105.183.600,00	137.874.937,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.774.937,00	105.183.600,00	137.874.937,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	188.774.937,00	105.183.600,00	137.874.937,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	X					NON URUSAN	258.335.886,00	253.455.886,00	14.981.600,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	258.335.886,00	253.455.886,00	14.981.600,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	258.335.886,00	253.455.886,00	14.981.600,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	258.335.886,00	253.455.886,00	14.981.600,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	X	XX	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	258.335.886,00	253.455.886,00	14.981.600,00
1.02.2.14.0.00.01.0000						DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	135.889.989.526,00	123.764.639.357,00	168.317.438.147,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	135.719.989.526,00	123.764.639.357,00	166.241.491.147,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	135.719.989.526,00	123.764.639.357,00	166.241.491.147,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	27.811.203.697,00	25.477.367.428,00	71.048.949.648,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	15.890.703.697,00	14.396.248.026,00	60.335.415.905,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	2.746.248.026,00	32.790.457.622,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.500.000.000,00	0,00	13.658.390.023,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	500.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	12.732.213.697,00	11.300.000.000,00	13.488.913.430,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	158.490.000,00	100.000.000,00	147.654.830,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.920.500.000,00	11.081.119.402,00	10.713.533.743,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0,00	0,00	63.115.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	141.459.054,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	140.000.000,00	147.810.000,00	147.810.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100.000.000,00	147.043.650,00	147.043.650,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	300.000.000,00	300.000.000,00	489.152.720,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0,00	0,00	163.645.600,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	15.762.000,00	0,00	59.485.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	10.000.000,00	0,00	49.790.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	144.738.000,00	114.234.002,00	471.478.202,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	11.200.000.000,00	10.271.582.750,00	8.836.638.517,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0,00	0,00	57.950.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	10.000.000,00	100.449.000,00	77.376.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	0,00	8.590.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	35.000.000,00	60.000.000,00	552.764.200,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000,00	60.000.000,00	552.764.200,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000,00	60.000.000,00	552.764.200,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	107.873.785.829,00	98.227.271.929,00	94.639.777.299,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.762.000,00	45.762.000,00	45.762.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45.762.000,00	45.762.000,00	45.762.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	73.857.840.890,00	69.321.148.761,00	66.509.585.237,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	72.111.815.890,00	67.901.858.761,00	65.455.415.237,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.746.025.000,00	1.419.290.000,00	1.054.170.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.046.095.700,00	1.717.119.344,00	903.941.429,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.545.700,00	10.545.700,00	10.545.700,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.100.000.000,00	771.023.644,00	134.157.556,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.550.000,00	15.550.000,00	15.550.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	180.000.000,00	180.000.000,00	197.021.973,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	90.000.000,00	90.000.000,00	86.569.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	650.000.000,00	650.000.000,00	460.097.200,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.299.087.239,00	26.631.741.824,00	26.684.141.364,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	435.513.487,00	195.864.586,00	265.894.126,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	32.370.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.663.573.752,00	26.235.877.238,00	26.235.877.238,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	435.000.000,00	435.000.000,00	401.067.269,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.001.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	350.000.000,00	350.000.000,00	316.066.269,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	130.000.000,00	16.500.000,00	35.280.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	130.000.000,00	16.500.000,00	35.280.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	170.000.000,00	0,00	2.075.947.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	170.000.000,00	0,00	2.075.947.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	0,00	0,00	194.400.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	194.400.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	2	14	02	2.02	0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	0,00	0,00	194.400.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	100.000.000,00	0,00	1.516.147.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	0,00	0,00	648.120.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK	0,00	0,00	218.120.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	0,00	0,00	430.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	642.277.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	0,00	0,00	23.100.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	0,00	0,00	291.600.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.01.0000	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	0,00	0,00	327.577.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100.000.000,00	0,00	225.750.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	2	14	03	2.04	0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	100.000.000,00	0,00	225.750.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	70.000.000,00	0,00	365.400.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	70.000.000,00	0,00	365.400.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	2	14	04	2.02	0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	70.000.000,00	0,00	365.400.000,00
1.02.2.14.0.00.01.1						RSUD Tarempa	1.636.733.230,00	4.094.204.196,00	4.182.139.406,00
1.02.2.14.0.00.01.1	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.636.733.230,00	4.094.204.196,00	4.182.139.406,00
1.02.2.14.0.00.01.1	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.636.733.230,00	4.094.204.196,00	4.182.139.406,00
1.02.2.14.0.00.01.1	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	310.800.000,00	255.300.000,00	255.300.000,00
1.02.2.14.0.00.01.1	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	310.800.000,00	255.300.000,00	255.300.000,00
1.02.2.14.0.00.01.1	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	310.800.000,00	255.300.000,00	255.300.000,00
1.02.2.14.0.00.01.1	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.325.933.230,00	3.838.904.196,00	3.926.839.406,00
1.02.2.14.0.00.01.1	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	594.013.061,00	594.013.061,00	581.948.271,00
1.02.2.14.0.00.01.1	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.336.938,00	21.336.938,00	21.336.938,00
1.02.2.14.0.00.01.1	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	127.124.526,00	127.124.526,00	115.059.736,00
1.02.2.14.0.00.01.1	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	43.626.000,00	43.626.000,00	43.626.000,00
1.02.2.14.0.00.01.1	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	292.846.627,00	292.846.627,00	292.846.627,00
1.02.2.14.0.00.01.1	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60.524.970,00	60.524.970,00	60.524.970,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.01.1	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.554.000,00	48.554.000,00	48.554.000,00
1.02.2.14.0.00.01.1	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	358.074.069,00	358.074.069,00	358.074.069,00
1.02.2.14.0.00.01.1	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	97.736.269,00	97.736.269,00	97.736.269,00
1.02.2.14.0.00.01.1	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	220.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.1	1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.337.800,00	40.337.800,00	40.337.800,00
1.02.2.14.0.00.01.1	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	373.846.100,00	327.467.066,00	427.467.066,00
1.02.2.14.0.00.01.1	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.678.900,00	85.678.900,00	85.678.900,00
1.02.2.14.0.00.01.1	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	288.167.200,00	241.788.166,00	341.788.166,00
1.02.2.14.0.00.01.1	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	0,00	2.559.350.000,00	2.559.350.000,00
1.02.2.14.0.00.01.1	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	2.559.350.000,00	2.559.350.000,00
1.02.2.14.0.00.01.10						Puskesmas Siantan Timur	650.181.288,00	550.865.728,00	1.058.714.728,00
1.02.2.14.0.00.01.10	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	244.678.963,00	0,00	507.849.000,00
1.02.2.14.0.00.01.10	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	244.678.963,00	0,00	507.849.000,00
1.02.2.14.0.00.01.10	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0,00	0,00	32.020.000,00
1.02.2.14.0.00.01.10	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	6.280.000,00
1.02.2.14.0.00.01.10	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0,00	0,00	5.280.000,00
1.02.2.14.0.00.01.10	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0,00	0,00	45.520.000,00
1.02.2.14.0.00.01.10	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	0,00	11.170.000,00
1.02.2.14.0.00.01.10	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	10.920.000,00
1.02.2.14.0.00.01.10	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0,00	0,00	21.120.000,00
1.02.2.14.0.00.01.10	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0,00	0,00	10.230.000,00
1.02.2.14.0.00.01.10	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	0,00	150.705.000,00
1.02.2.14.0.00.01.10	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	0,00	5.280.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.01.10	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0,00	0,00	43.180.000,00
1.02.2.14.0.00.01.10	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	0,00	16.405.000,00
1.02.2.14.0.00.01.10	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	0,00	35.750.000,00
1.02.2.14.0.00.01.10	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	244.678.963,00	0,00	95.289.000,00
1.02.2.14.0.00.01.10	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	0,00	18.700.000,00
1.02.2.14.0.00.01.10	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	405.502.325,00	216.298.565,00	216.298.565,00
1.02.2.14.0.00.01.10	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	308.824.925,00	151.273.565,00	151.273.565,00
1.02.2.14.0.00.01.10	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	308.824.925,00	151.273.565,00	151.273.565,00
1.02.2.14.0.00.01.10	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.677.400,00	65.025.000,00	65.025.000,00
1.02.2.14.0.00.01.10	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.677.400,00	65.025.000,00	65.025.000,00
1.02.2.14.0.00.01.10	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	0,00	334.567.163,00	334.567.163,00
1.02.2.14.0.00.01.10	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	334.567.163,00	334.567.163,00
1.02.2.14.0.00.01.10	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	334.567.163,00	334.567.163,00
1.02.2.14.0.00.01.10	2	14	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	0,00	334.567.163,00	334.567.163,00
1.02.2.14.0.00.01.10	2	14	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	334.567.163,00	334.567.163,00
1.02.2.14.0.00.01.11						Balai Pengelola Farmasi dan Alat Kesehatan (BPFAK)	271.900.350,00	191.534.160,00	191.534.160,00
1.02.2.14.0.00.01.11	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	271.900.350,00	191.534.160,00	191.534.160,00
1.02.2.14.0.00.01.11	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	271.900.350,00	191.534.160,00	191.534.160,00
1.02.2.14.0.00.01.11	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	271.900.350,00	191.534.160,00	191.534.160,00
1.02.2.14.0.00.01.11	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	72.740.160,00	57.524.360,00	57.524.360,00
1.02.2.14.0.00.01.11	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.408.220,00	1.408.220,00	1.408.220,00
1.02.2.14.0.00.01.11	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.928.140,00	7.928.140,00	7.928.140,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.01.11	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.228.000,00	8.228.000,00	8.228.000,00
1.02.2.14.0.00.01.11	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.115.800,00	18.900.000,00	18.900.000,00
1.02.2.14.0.00.01.11	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.060.000,00	21.060.000,00	21.060.000,00
1.02.2.14.0.00.01.11	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.670.190,00	116.379.800,00	116.379.800,00
1.02.2.14.0.00.01.11	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.670.190,00	16.851.200,00	16.851.200,00
1.02.2.14.0.00.01.11	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.000.000,00	99.528.600,00	99.528.600,00
1.02.2.14.0.00.01.11	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.490.000,00	17.630.000,00	17.630.000,00
1.02.2.14.0.00.01.11	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00	7.140.000,00	7.140.000,00
1.02.2.14.0.00.01.11	1	02	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	10.490.000,00	10.490.000,00	10.490.000,00
1.02.2.14.0.00.01.12						Puskesmas Jemaja Barat	259.995.230,00	179.990.140,00	608.992.140,00
1.02.2.14.0.00.01.12	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0,00	0,00	429.002.000,00
1.02.2.14.0.00.01.12	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	429.002.000,00
1.02.2.14.0.00.01.12	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0,00	0,00	52.900.000,00
1.02.2.14.0.00.01.12	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	10.180.000,00
1.02.2.14.0.00.01.12	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	0,00	4.200.000,00
1.02.2.14.0.00.01.12	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	5.250.000,00
1.02.2.14.0.00.01.12	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0,00	0,00	21.380.000,00
1.02.2.14.0.00.01.12	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	0,00	4.200.000,00
1.02.2.14.0.00.01.12	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	0,00	142.414.000,00
1.02.2.14.0.00.01.12	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	0,00	4.200.000,00
1.02.2.14.0.00.01.12	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0,00	0,00	28.298.000,00
1.02.2.14.0.00.01.12	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	0,00	22.330.000,00
1.02.2.14.0.00.01.12	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	0,00	77.300.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.01.12	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	0,00	0,00	53.550.000,00
1.02.2.14.0.00.01.12	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	0,00	2.800.000,00
1.02.2.14.0.00.01.12	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	259.995.230,00	179.990.140,00	179.990.140,00
1.02.2.14.0.00.01.12	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	166.535.750,00	86.530.660,00	86.530.660,00
1.02.2.14.0.00.01.12	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.891.050,00	5.891.050,00	5.891.050,00
1.02.2.14.0.00.01.12	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.989.500,00	5.989.500,00	5.989.500,00
1.02.2.14.0.00.01.12	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	119.945.200,00	39.940.110,00	39.940.110,00
1.02.2.14.0.00.01.12	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.010.000,00	10.010.000,00	10.010.000,00
1.02.2.14.0.00.01.12	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.700.000,00	24.700.000,00	24.700.000,00
1.02.2.14.0.00.01.12	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.054.990,00	10.054.990,00	10.054.990,00
1.02.2.14.0.00.01.12	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.054.990,00	10.054.990,00	10.054.990,00
1.02.2.14.0.00.01.12	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.404.490,00	83.404.490,00	83.404.490,00
1.02.2.14.0.00.01.12	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.394.490,00	33.394.490,00	33.394.490,00
1.02.2.14.0.00.01.12	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.010.000,00	50.010.000,00	50.010.000,00
1.02.2.14.0.00.01.13						Puskesmas Siantan Utara	163.044.424,00	163.380.140,00	561.920.140,00
1.02.2.14.0.00.01.13	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0,00	0,00	398.540.000,00
1.02.2.14.0.00.01.13	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	398.540.000,00
1.02.2.14.0.00.01.13	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0,00	0,00	11.890.000,00
1.02.2.14.0.00.01.13	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	21.021.600,00
1.02.2.14.0.00.01.13	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0,00	0,00	11.412.000,00
1.02.2.14.0.00.01.13	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	0,00	6.940.000,00
1.02.2.14.0.00.01.13	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	20.361.600,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.01.13	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0,00	0,00	13.860.000,00
1.02.2.14.0.00.01.13	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	0,00	129.513.600,00
1.02.2.14.0.00.01.13	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	0,00	10.780.000,00
1.02.2.14.0.00.01.13	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0,00	0,00	8.742.000,00
1.02.2.14.0.00.01.13	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	0,00	46.195.200,00
1.02.2.14.0.00.01.13	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	0,00	45.116.000,00
1.02.2.14.0.00.01.13	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	0,00	0,00	70.728.000,00
1.02.2.14.0.00.01.13	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	0,00	1.980.000,00
1.02.2.14.0.00.01.13	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	163.044.424,00	163.380.140,00	163.380.140,00
1.02.2.14.0.00.01.13	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	109.568.224,00	89.964.479,00	89.964.479,00
1.02.2.14.0.00.01.13	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.108.856,00	1.222.325,00	1.222.325,00
1.02.2.14.0.00.01.13	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.250.429,00	11.681.085,00	11.681.085,00
1.02.2.14.0.00.01.13	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.128.700,00	7.984.389,00	7.984.389,00
1.02.2.14.0.00.01.13	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.983.200,00	26.986.680,00	26.986.680,00
1.02.2.14.0.00.01.13	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.397.039,00	2.500.000,00	2.500.000,00
1.02.2.14.0.00.01.13	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.700.000,00	39.590.000,00	39.590.000,00
1.02.2.14.0.00.01.13	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.466.200,00	49.452.961,00	49.452.961,00
1.02.2.14.0.00.01.13	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.906.200,00	46.980.961,00	46.980.961,00
1.02.2.14.0.00.01.13	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.560.000,00	2.472.000,00	2.472.000,00
1.02.2.14.0.00.01.13	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.010.000,00	23.962.700,00	23.962.700,00
1.02.2.14.0.00.01.13	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.000.000,00	3.962.700,00	3.962.700,00
1.02.2.14.0.00.01.13	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.010.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.14						Puskesmas Kute Siantan	473.380.140,00	473.379.659,00	807.676.859,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.01.14	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	300.000.000,00	300.775.019,00	635.072.219,00
1.02.2.14.0.00.01.14	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000,00	300.775.019,00	635.072.219,00
1.02.2.14.0.00.01.14	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0,00	0,00	17.700.000,00
1.02.2.14.0.00.01.14	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	22.975.000,00
1.02.2.14.0.00.01.14	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0,00	0,00	19.700.000,00
1.02.2.14.0.00.01.14	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	0,00	4.310.000,00
1.02.2.14.0.00.01.14	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	5.700.000,00
1.02.2.14.0.00.01.14	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0,00	0,00	18.400.000,00
1.02.2.14.0.00.01.14	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0,00	0,00	4.050.000,00
1.02.2.14.0.00.01.14	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	0,00	1.500.000,00
1.02.2.14.0.00.01.14	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	0,00	118.082.200,00
1.02.2.14.0.00.01.14	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	0,00	6.580.000,00
1.02.2.14.0.00.01.14	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	0,00	17.104.000,00
1.02.2.14.0.00.01.14	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	0,00	96.396.000,00
1.02.2.14.0.00.01.14	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	300.000.000,00	300.775.019,00	300.775.019,00
1.02.2.14.0.00.01.14	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	0,00	1.800.000,00
1.02.2.14.0.00.01.14	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	173.380.140,00	172.604.640,00	172.604.640,00
1.02.2.14.0.00.01.14	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	93.508.840,00	92.733.340,00	92.733.340,00
1.02.2.14.0.00.01.14	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.158.450,00	5.158.450,00	5.158.450,00
1.02.2.14.0.00.01.14	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.153.890,00	33.153.890,00	33.153.890,00
1.02.2.14.0.00.01.14	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.136.500,00	10.136.500,00	10.136.500,00
1.02.2.14.0.00.01.14	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00
1.02.2.14.0.00.01.14	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.010.000,00	9.234.500,00	9.234.500,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.01.14	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.350.000,00	27.350.000,00	27.350.000,00
1.02.2.14.0.00.01.14	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.871.300,00	24.871.300,00	24.871.300,00
1.02.2.14.0.00.01.14	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.271.300,00	18.271.300,00	18.271.300,00
1.02.2.14.0.00.01.14	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00
1.02.2.14.0.00.01.14	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.14	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.2						RSUD Jemaja	1.245.429.805,00	1.048.189.805,00	1.048.189.805,00
1.02.2.14.0.00.01.2	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	172.000.000,00	42.685.820,00	42.685.820,00
1.02.2.14.0.00.01.2	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	172.000.000,00	42.685.820,00	42.685.820,00
1.02.2.14.0.00.01.2	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	172.000.000,00	42.685.820,00	42.685.820,00
1.02.2.14.0.00.01.2	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.073.429.805,00	1.005.503.985,00	1.005.503.985,00
1.02.2.14.0.00.01.2	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	641.167.135,00	378.282.559,00	378.282.559,00
1.02.2.14.0.00.01.2	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	101.726.100,00	14.665.170,00	14.665.170,00
1.02.2.14.0.00.01.2	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	16.225.549,00	16.225.549,00
1.02.2.14.0.00.01.2	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	56.604.680,00	40.999.616,00	40.999.616,00
1.02.2.14.0.00.01.2	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	301.931.315,00	225.188.224,00	225.188.224,00
1.02.2.14.0.00.01.2	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	55.905.040,00	6.204.000,00	6.204.000,00
1.02.2.14.0.00.01.2	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.2	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	187.770.670,00	187.689.926,00	187.689.926,00
1.02.2.14.0.00.01.2	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48.367.170,00	42.638.926,00	42.638.926,00
1.02.2.14.0.00.01.2	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112.552.500,00	118.200.000,00	118.200.000,00
1.02.2.14.0.00.01.2	1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.851.000,00	26.851.000,00	26.851.000,00
1.02.2.14.0.00.01.2	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	244.492.000,00	78.531.500,00	78.531.500,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.01.2	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.462.000,00	28.380.000,00	28.380.000,00
1.02.2.14.0.00.01.2	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.030.000,00	50.151.500,00	50.151.500,00
1.02.2.14.0.00.01.2	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	0,00	361.000.000,00	361.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.2	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	361.000.000,00	361.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.3						RSUD Palmatak	1.397.925.386,00	3.799.203.725,00	3.799.203.725,00
1.02.2.14.0.00.01.3	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	921.662.548,00	494.482.225,00	494.482.225,00
1.02.2.14.0.00.01.3	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	244.690.500,00	28.189.382,00	28.189.382,00
1.02.2.14.0.00.01.3	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	145.129.200,00	138.756.640,00	138.756.640,00
1.02.2.14.0.00.01.3	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	471.332.848,00	301.286.203,00	301.286.203,00
1.02.2.14.0.00.01.3	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.510.000,00	26.250.000,00	26.250.000,00
1.02.2.14.0.00.01.3	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	276.262.838,00	196.486.400,00	196.486.400,00
1.02.2.14.0.00.01.3	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	61.813.953,00	6.105.000,00	6.105.000,00
1.02.2.14.0.00.01.3	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	214.448.885,00	190.381.400,00	190.381.400,00
1.02.2.14.0.00.01.3	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.3	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.3	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	0,00	3.058.235.100,00	3.058.235.100,00
1.02.2.14.0.00.01.3	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	3.058.235.100,00	3.058.235.100,00
1.02.2.14.0.00.01.4						Puskesmas Siantan Tengah	1.010.539.835,00	557.963.963,00	1.165.697.963,00
1.02.2.14.0.00.01.4	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	230.114.000,00	0,00	607.734.000,00
1.02.2.14.0.00.01.4	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	230.114.000,00	0,00	607.734.000,00
1.02.2.14.0.00.01.4	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0,00	0,00	61.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.4	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	8.655.000,00
1.02.2.14.0.00.01.4	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	0,00	12.170.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.01.4	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0,00	0,00	12.500.000,00
1.02.2.14.0.00.01.4	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	0,00	215.038.772,00
1.02.2.14.0.00.01.4	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	0,00	21.310.000,00
1.02.2.14.0.00.01.4	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0,00	0,00	11.725.000,00
1.02.2.14.0.00.01.4	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	0,00	20.500.000,00
1.02.2.14.0.00.01.4	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	0,00	121.540.000,00
1.02.2.14.0.00.01.4	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	230.114.000,00	0,00	119.295.228,00
1.02.2.14.0.00.01.4	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	0,00	4.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.4	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	780.425.835,00	557.963.963,00	557.963.963,00
1.02.2.14.0.00.01.4	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	717.080.360,00	226.569.778,00	226.569.778,00
1.02.2.14.0.00.01.4	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	717.080.360,00	226.569.778,00	226.569.778,00
1.02.2.14.0.00.01.4	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.345.475,00	60.119.225,00	60.119.225,00
1.02.2.14.0.00.01.4	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63.345.475,00	60.119.225,00	60.119.225,00
1.02.2.14.0.00.01.4	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	0,00	271.274.960,00	271.274.960,00
1.02.2.14.0.00.01.4	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	271.274.960,00	271.274.960,00
1.02.2.14.0.00.01.5						Puskesmas Letung	726.386.431,00	644.844.535,00	1.171.992.535,00
1.02.2.14.0.00.01.5	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	412.920.000,00	0,00	527.148.000,00
1.02.2.14.0.00.01.5	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	412.920.000,00	0,00	527.148.000,00
1.02.2.14.0.00.01.5	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0,00	0,00	20.840.000,00
1.02.2.14.0.00.01.5	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	26.360.000,00
1.02.2.14.0.00.01.5	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0,00	0,00	36.070.000,00
1.02.2.14.0.00.01.5	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	0,00	16.450.000,00
1.02.2.14.0.00.01.5	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	30.120.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.01.5	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0,00	0,00	13.760.000,00
1.02.2.14.0.00.01.5	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	0,00	190.350.000,00
1.02.2.14.0.00.01.5	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	0,00	9.330.000,00
1.02.2.14.0.00.01.5	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0,00	0,00	35.068.000,00
1.02.2.14.0.00.01.5	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	0,00	6.810.000,00
1.02.2.14.0.00.01.5	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	0,00	71.790.000,00
1.02.2.14.0.00.01.5	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	412.920.000,00	0,00	60.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.5	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	0,00	10.200.000,00
1.02.2.14.0.00.01.5	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	313.466.431,00	644.844.535,00	644.844.535,00
1.02.2.14.0.00.01.5	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	152.239.756,00	72.650.625,00	72.650.625,00
1.02.2.14.0.00.01.5	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.955.400,00	4.207.106,00	4.207.106,00
1.02.2.14.0.00.01.5	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	32.393.200,00	15.327.403,00	15.327.403,00
1.02.2.14.0.00.01.5	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.816.156,00	37.991.116,00	37.991.116,00
1.02.2.14.0.00.01.5	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.500.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00
1.02.2.14.0.00.01.5	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.575.000,00	9.225.000,00	9.225.000,00
1.02.2.14.0.00.01.5	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141.111.675,00	54.065.210,00	54.065.210,00
1.02.2.14.0.00.01.5	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	31.501.110,00	14.463.910,00	14.463.910,00
1.02.2.14.0.00.01.5	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63.840.000,00	37.570.000,00	37.570.000,00
1.02.2.14.0.00.01.5	1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.770.565,00	2.031.300,00	2.031.300,00
1.02.2.14.0.00.01.5	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.115.000,00	3.962.700,00	3.962.700,00
1.02.2.14.0.00.01.5	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.115.000,00	3.962.700,00	3.962.700,00
1.02.2.14.0.00.01.5	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	0,00	514.166.000,00	514.166.000,00
1.02.2.14.0.00.01.5	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	514.166.000,00	514.166.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.01.6						Puskesmas Jemaja Timur	487.418.310,00	392.552.410,00	835.157.410,00
1.02.2.14.0.00.01.6	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	235.614.310,00	0,00	442.605.000,00
1.02.2.14.0.00.01.6	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	235.614.310,00	0,00	442.605.000,00
1.02.2.14.0.00.01.6	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0,00	0,00	26.570.000,00
1.02.2.14.0.00.01.6	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	6.040.000,00
1.02.2.14.0.00.01.6	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	0,00	5.450.000,00
1.02.2.14.0.00.01.6	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0,00	0,00	3.300.000,00
1.02.2.14.0.00.01.6	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	0,00	185.825.000,00
1.02.2.14.0.00.01.6	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	0,00	12.385.000,00
1.02.2.14.0.00.01.6	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	0,00	34.090.000,00
1.02.2.14.0.00.01.6	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	0,00	82.635.000,00
1.02.2.14.0.00.01.6	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	235.614.310,00	0,00	82.350.000,00
1.02.2.14.0.00.01.6	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	0,00	3.960.000,00
1.02.2.14.0.00.01.6	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	251.804.000,00	392.552.410,00	392.552.410,00
1.02.2.14.0.00.01.6	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	114.584.000,00	67.081.100,00	67.081.100,00
1.02.2.14.0.00.01.6	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.646.000,00	260.225,00	260.225,00
1.02.2.14.0.00.01.6	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	83.598.000,00	49.148.000,00	49.148.000,00
1.02.2.14.0.00.01.6	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.390.000,00	8.897.875,00	8.897.875,00
1.02.2.14.0.00.01.6	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.950.000,00	8.775.000,00	8.775.000,00
1.02.2.14.0.00.01.6	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.315.600,00	48.596.900,00	48.596.900,00
1.02.2.14.0.00.01.6	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.836.000,00	22.117.300,00	22.117.300,00
1.02.2.14.0.00.01.6	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.479.600,00	26.479.600,00	26.479.600,00
1.02.2.14.0.00.01.6	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.904.400,00	46.770.000,00	46.770.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.01.6	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.060.000,00	33.350.000,00	33.350.000,00
1.02.2.14.0.00.01.6	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	37.844.400,00	13.420.000,00	13.420.000,00
1.02.2.14.0.00.01.6	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	0,00	230.104.410,00	230.104.410,00
1.02.2.14.0.00.01.6	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	230.104.410,00	230.104.410,00
1.02.2.14.0.00.01.7						Puskesmas Palmatak	270.664.690,00	799.217.213,00	1.041.432.213,00
1.02.2.14.0.00.01.7	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0,00	0,00	242.215.000,00
1.02.2.14.0.00.01.7	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	242.215.000,00
1.02.2.14.0.00.01.7	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0,00	0,00	43.870.000,00
1.02.2.14.0.00.01.7	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	21.200.000,00
1.02.2.14.0.00.01.7	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0,00	0,00	36.550.000,00
1.02.2.14.0.00.01.7	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	0,00	11.060.000,00
1.02.2.14.0.00.01.7	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	15.354.000,00
1.02.2.14.0.00.01.7	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	0,00	16.096.000,00
1.02.2.14.0.00.01.7	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	0,00	39.110.000,00
1.02.2.14.0.00.01.7	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	0,00	58.975.000,00
1.02.2.14.0.00.01.7	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	725.994.915,00	725.994.915,00
1.02.2.14.0.00.01.7	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	0,00	725.994.915,00	725.994.915,00
1.02.2.14.0.00.01.7	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	725.994.915,00	725.994.915,00
1.02.2.14.0.00.01.7	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	270.664.690,00	73.222.298,00	73.222.298,00
1.02.2.14.0.00.01.7	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	270.664.690,00	73.222.298,00	73.222.298,00
1.02.2.14.0.00.01.7	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	270.664.690,00	73.222.298,00	73.222.298,00
1.02.2.14.0.00.01.7	2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	220.664.690,00	27.704.798,00	27.704.798,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.01.7	2	14	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	220.664.690,00	27.704.798,00	27.704.798,00
1.02.2.14.0.00.01.7	2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.000.000,00	45.517.500,00	45.517.500,00
1.02.2.14.0.00.01.7	2	14	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000,00	45.517.500,00	45.517.500,00
1.02.2.14.0.00.01.8						Puskesmas Tarempa	1.023.997.121,00	1.274.913.292,00	1.913.437.292,00
1.02.2.14.0.00.01.8	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.023.997.121,00	1.274.913.292,00	1.913.437.292,00
1.02.2.14.0.00.01.8	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.023.997.121,00	1.274.913.292,00	1.913.437.292,00
1.02.2.14.0.00.01.8	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	884.735.848,00	0,00	638.524.000,00
1.02.2.14.0.00.01.8	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	884.735.848,00	0,00	638.524.000,00
1.02.2.14.0.00.01.8	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0,00	0,00	33.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.8	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	14.222.000,00
1.02.2.14.0.00.01.8	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0,00	0,00	22.200.000,00
1.02.2.14.0.00.01.8	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	0,00	76.700.000,00
1.02.2.14.0.00.01.8	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	12.600.000,00
1.02.2.14.0.00.01.8	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0,00	0,00	10.300.000,00
1.02.2.14.0.00.01.8	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	0,00	1.200.000,00
1.02.2.14.0.00.01.8	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	0,00	178.757.180,00
1.02.2.14.0.00.01.8	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	0,00	13.200.000,00
1.02.2.14.0.00.01.8	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0,00	0,00	12.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.8	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	0,00	29.248.000,00
1.02.2.14.0.00.01.8	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	0,00	123.750.000,00
1.02.2.14.0.00.01.8	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	884.735.848,00	0,00	105.346.820,00
1.02.2.14.0.00.01.8	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	0,00	6.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.01.8	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	139.261.273,00	1.274.913.292,00	1.274.913.292,00
1.02.2.14.0.00.01.8	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	53.078.000,00	34.402.233,00	34.402.233,00
1.02.2.14.0.00.01.8	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53.078.000,00	34.402.233,00	34.402.233,00
1.02.2.14.0.00.01.8	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.183.273,00	60.120.000,00	60.120.000,00
1.02.2.14.0.00.01.8	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	86.183.273,00	60.120.000,00	60.120.000,00
1.02.2.14.0.00.01.8	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	0,00	1.180.391.059,00	1.180.391.059,00
1.02.2.14.0.00.01.8	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	1.180.391.059,00	1.180.391.059,00
1.02.2.14.0.00.01.9						Puskesmas Siantan Selatan	973.773.211,00	559.680.059,00	1.125.116.259,00
1.02.2.14.0.00.01.9	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	204.773.211,00	0,00	565.436.200,00
1.02.2.14.0.00.01.9	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	204.773.211,00	0,00	565.436.200,00
1.02.2.14.0.00.01.9	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0,00	0,00	44.170.000,00
1.02.2.14.0.00.01.9	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	24.205.000,00
1.02.2.14.0.00.01.9	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0,00	0,00	63.745.000,00
1.02.2.14.0.00.01.9	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	0,00	12.105.000,00
1.02.2.14.0.00.01.9	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	13.085.000,00
1.02.2.14.0.00.01.9	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0,00	0,00	25.130.000,00
1.02.2.14.0.00.01.9	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	0,00	9.420.000,00
1.02.2.14.0.00.01.9	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	0,00	144.359.200,00
1.02.2.14.0.00.01.9	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	0,00	37.070.000,00
1.02.2.14.0.00.01.9	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	0,00	15.925.000,00
1.02.2.14.0.00.01.9	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	0,00	71.380.000,00
1.02.2.14.0.00.01.9	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	204.773.211,00	0,00	104.842.000,00
1.02.2.14.0.00.01.9	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	769.000.000,00	559.680.059,00	559.680.059,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.01.9	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	585.000.000,00	260.228.814,00	260.228.814,00
1.02.2.14.0.00.01.9	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	563.000.000,00	254.690.385,00	254.690.385,00
1.02.2.14.0.00.01.9	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.000.000,00	5.538.429,00	5.538.429,00
1.02.2.14.0.00.01.9	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.000.000,00	20.000.245,00	20.000.245,00
1.02.2.14.0.00.01.9	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000,00	20.000.245,00	20.000.245,00
1.02.2.14.0.00.01.9	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.000.000,00	5.416.800,00	5.416.800,00
1.02.2.14.0.00.01.9	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	134.000.000,00	5.416.800,00	5.416.800,00
1.02.2.14.0.00.01.9	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	0,00	274.034.200,00	274.034.200,00
1.02.2.14.0.00.01.9	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	274.034.200,00	274.034.200,00
1.03.1.04.2.10.01.0000						DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	124.971.734.786,00	61.578.996.383,00	79.642.011.856,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	111.214.609.849,00	61.125.851.846,00	78.894.031.529,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3.891.975.000,00	891.975.000,00	1.129.356.745,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	3.891.975.000,00	891.975.000,00	1.129.356.745,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	891.975.000,00	891.975.000,00	217.484.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	3.000.000.000,00	0,00	911.872.745,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1,00	1,00	309.450.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,00	1,00	309.450.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	05	2.01	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	1,00	1,00	309.450.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	0,00	0,00	10.921.951.713,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	10.921.951.713,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	06	2.01	0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	0,00	0,00	10.921.951.713,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	31.294.716.000,00	464.205.514,00	6.902.937.756,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	31.294.716.000,00	464.205.514,00	6.902.937.756,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	31.042.273.000,00	211.762.514,00	6.727.248.706,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	252.443.000,00	252.443.000,00	175.689.050,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	56.000.329.391,00	41.657.176.785,00	43.200.038.513,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	56.000.329.391,00	41.657.176.785,00	43.200.038.513,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	53.990.329.390,00	41.585.176.784,00	17.764.108.987,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan	1,00	1,00	24.992.157.827,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan	2.010.000.000,00	72.000.000,00	443.771.699,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	100.000.000,00	100.000.000,00	119.995.900,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	100.000.000,00	100.000.000,00	119.995.900,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	2.04	0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	119.995.900,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.450.000.000,00	682.374.800,00	317.012.415,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	2.200.000.000,00	432.374.800,00	200.033.300,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	2.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	200.000.000,00	200.000.000,00	99.987.300,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	2.000.000.000,00	232.374.800,00	100.046.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	250.000.000,00	116.979.115,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	2.03	0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	250.000.000,00	250.000.000,00	116.979.115,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.477.589.457,00	17.330.119.746,00	15.993.288.487,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	156.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	156.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.565.636.463,00	10.565.636.463,00	9.718.155.114,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.415.636.463,00	9.415.636.463,00	8.607.147.114,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	1.111.008.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.637.807.892,00	2.550.311.481,00	2.359.622.017,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.155.686.028,00	1.068.189.617,00	855.243.395,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.482.121.864,00	1.482.121.864,00	1.504.378.622,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.477.432.872,00	3.477.432.872,00	3.165.709.952,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.477.432.872,00	3.477.432.872,00	3.165.709.952,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	696.712.230,00	636.738.930,00	593.801.404,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	496.712.750,00	436.739.450,00	163.801.924,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199.999.480,00	199.999.480,00	429.999.480,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	13.557.124.937,00	353.020.537,00	612.829.327,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1,00	1,00	125.120.286,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1,00	1,00	125.120.286,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1,00	1,00	125.120.286,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	13.557.124.936,00	353.020.536,00	487.709.041,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	13.557.124.936,00	353.020.536,00	487.709.041,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	13.557.124.936,00	353.020.536,00	487.709.041,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	200.000.000,00	100.124.000,00	135.151.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	200.000.000,00	100.124.000,00	135.151.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	200.000.000,00	100.124.000,00	135.151.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	100.124.000,00	135.151.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	10	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	200.000.000,00	100.124.000,00	135.151.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0001						UPTD SPAM SIANTAN	936.584.000,00	936.584.000,00	993.915.020,00
1.03.1.04.2.10.01.0001	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	936.584.000,00	936.584.000,00	993.915.020,00
1.03.1.04.2.10.01.0001	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	936.584.000,00	936.584.000,00	993.915.020,00
1.03.1.04.2.10.01.0001	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	936.584.000,00	936.584.000,00	993.915.020,00
1.03.1.04.2.10.01.0001	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	936.584.000,00	936.584.000,00	993.915.020,00
1.03.1.04.2.10.01.0001	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	936.584.000,00	936.584.000,00	993.915.020,00
1.05.0.00.0.00.01.0000						DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	8.392.218.267,00	8.512.162.944,00	8.482.162.944,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	8.392.218.267,00	8.512.162.944,00	8.482.162.944,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	198.132.467,00	175.827.886,00	416.613.763,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	198.132.467,00	175.827.886,00	416.613.763,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	98.132.467,00	98.012.000,00	98.012.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	100.000.000,00	77.815.886,00	318.601.763,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.194.085.800,00	8.336.335.058,00	8.065.549.181,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.213.760.000,00	4.988.195.850,00	4.407.895.850,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.100.000.000,00	4.881.875.850,00	4.301.575.850,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	113.760.000,00	106.320.000,00	106.320.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.800.000,00	10.788.000,00	10.788.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.800.000,00	10.788.000,00	10.788.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	477.688.780,00	399.547.874,00	536.227.506,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.200.000,00	2.138.838,00	2.138.838,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000,00	95.798.354,00	143.357.805,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000,00	39.458.682,00	53.623.170,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	49.005.693,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305.488.780,00	242.152.000,00	288.102.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	395.000.000,00	310.161.974,00	270.200.674,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	135.000.000,00	59.424.564,00	59.424.564,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	70.000.000,00	60.737.410,00	60.737.410,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	190.000.000,00	190.000.000,00	150.038.700,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.062.752.000,00	2.595.540.034,00	2.799.248.095,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.000.000,00	34.758.806,00	58.410.575,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.752.000,00	24.112.000,00	24.112.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.000.000.000,00	2.536.669.228,00	2.716.725.520,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.085.020,00	32.101.326,00	41.189.056,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.635.020,00	3.990.000,00	11.915.400,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.450.000,00	28.111.326,00	29.273.656,00
1.05.0.00.0.00.04.0000						BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	10.703.906.332,00	11.802.973.263,00	12.140.941.911,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	100.000.000,00	498.296.426,00	531.880.426,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	20.000.000,00	74.617.451,00	108.201.451,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	20.000.000,00	74.617.451,00	108.201.451,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	20.000.000,00	98.106.675,00	98.106.675,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.02	0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	20.000.000,00	98.106.675,00	98.106.675,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	40.000.000,00	219.850.300,00	219.850.300,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	20.000.000,00	65.109.300,00	65.109.300,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	20.000.000,00	154.741.000,00	154.741.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	105.722.000,00	105.722.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	20.000.000,00	105.722.000,00	105.722.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.603.906.332,00	11.304.676.837,00	11.609.061.485,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000,00	89.402.000,00	89.402.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000,00	89.402.000,00	89.402.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.185.839.304,00	5.070.599.944,00	5.639.933.544,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.968.783.304,00	4.842.251.944,00	5.404.265.544,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	217.056.000,00	228.348.000,00	235.668.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	302.305.402,00	988.737.564,00	475.793.856,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.305.402,00	8.642.540,00	8.642.540,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	112.267.756,00	98.775.956,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000,00	30.058.778,00	18.193.150,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000,00	52.207.990,00	52.207.990,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000,00	43.430.000,00	39.836.680,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000,00	742.130.500,00	258.137.540,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	327.000.000,00	591.383.915,00	471.390.307,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.000.000,00	43.271.900,00	43.271.900,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	4.000.000,00	37.160.050,00	29.821.725,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	300.000.000,00	244.484.854,00	244.484.854,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	266.467.111,00	153.811.828,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.753.761.626,00	4.478.893.614,00	4.875.448.488,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000,00	46.450.000,00	51.510.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.703.761.626,00	4.432.443.614,00	4.823.938.488,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.000.000,00	85.659.800,00	57.093.290,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000.000,00	8.138.330,00	8.138.330,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	77.521.470,00	48.954.960,00
1.05.8.01.0.00.01.0000						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	14.137.277.194,00	12.078.521.547,00	12.426.833.361,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	531.380.000,00	397.747.600,00	332.913.600,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	184.435.000,00	159.137.600,00	134.095.600,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	184.435.000,00	159.137.600,00	134.095.600,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	133.945.000,00	69.876.000,00	69.876.000,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	133.945.000,00	69.876.000,00	69.876.000,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	213.000.000,00	168.734.000,00	128.942.000,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	213.000.000,00	168.734.000,00	128.942.000,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.605.897.194,00	11.680.773.947,00	12.093.919.761,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.218.500,00	53.518.300,00	43.280.300,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.574.500,00	20.574.300,00	20.836.300,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.644.000,00	32.944.000,00	22.444.000,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.738.142.584,00	4.866.477.604,00	5.072.707.604,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.577.833.084,00	4.706.168.104,00	4.940.118.104,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	156.000.000,00	156.000.000,00	128.280.000,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.309.500,00	4.309.500,00	4.309.500,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	36.000.000,00	33.564.000,00	33.564.000,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36.000.000,00	33.564.000,00	33.564.000,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	648.287.400,00	553.823.451,00	445.948.451,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.337.100,00	5.330.009,00	5.330.009,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.390.300,00	88.285.234,00	88.285.234,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.564.200,00	12.559.968,00	12.559.968,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	102.472.800,00	101.017.240,00	83.017.240,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	9.896.000,00	10.005.000,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	429.523.000,00	336.735.000,00	246.751.000,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	441.714.000,00	441.714.000,00	366.183.300,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	441.714.000,00	441.714.000,00	366.183.300,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.577.067.180,00	5.633.209.062,00	6.061.158.576,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.452.220,00	72.452.220,00	43.350.000,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.504.614.960,00	5.560.756.842,00	6.017.808.576,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.467.530,00	98.467.530,00	71.077.530,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	78.167.530,00	78.167.530,00	60.317.530,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.300.000,00	20.300.000,00	10.760.000,00
1.05.8.01.0.00.02.0000						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	25.599.669.300,00	18.154.441.213,00	24.646.579.117,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	25.599.669.300,00	18.154.441.213,00	24.646.579.117,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	25.599.669.300,00	18.154.441.213,00	24.646.579.117,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	150.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	150.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	150.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	19.000.000.000,00	12.924.253.188,00	18.223.572.707,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	19.000.000.000,00	12.924.253.188,00	18.223.572.707,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	19.000.000.000,00	12.424.253.200,00	17.023.505.400,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	03	2.01	0006	Pelaksanaan tugas Paskibraka	0,00	499.999.988,00	1.200.067.307,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	243.000.000,00	199.999.700,00	200.000.000,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	243.000.000,00	199.999.700,00	200.000.000,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	243.000.000,00	199.999.700,00	200.000.000,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.050.000.000,00	549.989.400,00	768.093.100,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.050.000.000,00	549.989.400,00	768.093.100,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	500.000.000,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00	499.989.400,00	268.093.100,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.156.669.300,00	4.330.198.925,00	5.354.913.310,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.622.500.000,00	2.974.856.874,00	3.952.558.173,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.500.000.000,00	2.810.456.874,00	3.780.838.173,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	122.500.000,00	164.400.000,00	171.720.000,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.000.000,00	16.428.000,00	16.428.000,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000,00	16.428.000,00	16.428.000,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	393.584.000,00	458.044.470,00	462.218.099,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000,00	28.670.000,00	19.995.800,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000,00	6.803.750,00	5.992.566,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000,00	50.453.220,00	69.992.982,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000,00	19.699.500,00	16.918.751,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	143.584.000,00	352.418.000,00	349.318.000,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	484.735.300,00	342.020.829,00	325.364.349,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	287.552.000,00	164.256.770,00	147.600.290,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	197.183.300,00	177.764.059,00	177.764.059,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	635.850.000,00	538.848.752,00	598.344.689,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.450.000,00	20.673.000,00	22.804.375,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.400.000,00	77.476.200,00	69.395.490,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	600.000.000,00	440.699.552,00	506.144.824,00
1.06.2.08.0.00.03.0000						DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7.377.358.800,00	7.438.356.306,00	8.914.653.007,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.223.358.800,00	7.084.356.306,00	7.220.653.007,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	7.223.358.800,00	7.084.356.306,00	7.220.653.007,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	100.000.000,00	100.000.000,00	61.790.000,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	61.790.000,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	61.790.000,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	200.000.000,00	200.000.000,00	233.045.000,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	200.000.000,00	200.000.000,00	233.045.000,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	200.000.000,00	200.000.000,00	233.045.000,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	198.905.842,00	198.905.842,00	253.135.842,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	198.905.842,00	198.905.842,00	253.135.842,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100.905.842,00	100.905.842,00	155.135.842,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	98.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	120.000.000,00	120.000.000,00	51.955.000,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	120.000.000,00	120.000.000,00	51.955.000,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	120.000.000,00	120.000.000,00	51.955.000,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.604.452.958,00	6.465.450.464,00	6.620.727.165,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.000.000,00	22.000.000,00	18.444.500,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	22.000.000,00	22.000.000,00	18.444.500,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.414.420.000,00	4.412.732.425,00	4.909.035.568,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.239.300.000,00	4.237.612.425,00	4.743.886.576,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150.120.000,00	150.120.000,00	150.120.000,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.000.000,00	25.000.000,00	15.028.992,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25.200.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.200.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	715.400.000,00	715.400.000,00	375.027.552,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	138.500.000,00	138.500.000,00	118.667.897,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.500.000,00	24.500.000,00	12.101.005,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.400.000,00	15.400.000,00	7.325.450,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	526.000.000,00	526.000.000,00	225.933.200,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	486.893.124,00	486.893.124,00	486.893.124,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	486.893.124,00	486.893.124,00	486.893.124,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	865.875.000,00	728.560.081,00	775.026.361,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	85.750.000,00	85.750.000,00	85.750.000,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000,00	60.000.000,00	100.300.000,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	720.125.000,00	582.810.081,00	588.976.361,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.664.834,00	74.664.834,00	31.100.060,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.700.000,00	38.700.000,00	14.680.060,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.964.834,00	35.964.834,00	16.420.000,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	154.000.000,00	354.000.000,00	1.694.000.000,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	154.000.000,00	354.000.000,00	1.694.000.000,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	100.000.000,00	100.000.000,00	429.000.000,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	99.000.000,00	99.000.000,00	179.000.000,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	2	08	02	2.01	0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	99.000.000,00	99.000.000,00	179.000.000,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000.000,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	2	08	02	2.03	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000.000,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	3.000.000,00	3.000.000,00	520.000.000,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	130.000.000,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	130.000.000,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	301.600.000,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	301.600.000,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	88.400.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.2.08.0.00.03.0000	2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	88.400.000,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	50.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	2	08	06	2.02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1.000.000,00	1.000.000,00	495.000.000,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	495.000.000,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	495.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000						DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10.099.453.478,00	9.551.312.021,00	9.906.830.921,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10.099.453.478,00	9.551.312.021,00	9.906.830.921,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	379.034.250,00	379.034.250,00	369.971.205,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	379.034.250,00	379.034.250,00	369.971.205,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.01	0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	197.734.250,00	197.734.250,00	188.671.205,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.01	0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	181.300.000,00	181.300.000,00	181.300.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	433.128.100,00	233.721.700,00	172.437.700,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	433.128.100,00	233.721.700,00	172.437.700,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	433.128.100,00	233.721.700,00	172.437.700,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	275.436.000,00	275.436.000,00	231.004.200,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	275.436.000,00	275.436.000,00	231.004.200,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.03	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	170.436.000,00	170.436.000,00	155.887.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.03	0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	105.000.000,00	105.000.000,00	75.117.200,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	71.538.000,00	71.538.000,00	58.387.600,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	71.538.000,00	71.538.000,00	58.387.600,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	71.538.000,00	71.538.000,00	58.387.600,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.940.317.128,00	8.591.582.071,00	9.075.030.216,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.849.153.134,00	5.803.515.046,00	5.874.569.381,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.705.493.134,00	5.659.855.046,00	5.730.909.381,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	139.560.000,00	139.560.000,00	139.560.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	78.000.000,00	78.000.000,00	88.800.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	78.000.000,00	78.000.000,00	88.800.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	614.545.858,00	480.680.957,00	692.225.151,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000,00	3.009.099,00	209.885.621,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27.956.250,00	27.956.250,00	12.998.922,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.801.000,00	37.801.000,00	19.801.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.582.608,00	29.582.608,00	29.582.608,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.750.000,00	7.750.000,00	12.375.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	301.456.000,00	364.582.000,00	397.582.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.344.138.136,00	2.177.906.068,00	2.359.082.284,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	90.718.200,00	90.704.460,00	90.704.460,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.103.419.936,00	1.937.201.608,00	2.118.377.824,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.280.000,00	43.280.000,00	52.153.400,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.280.000,00	38.280.000,00	12.810.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.000.000,00	0,00	34.343.400,00
2.13.0.00.0.00.01.0000						DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.835.517.557,00	5.029.917.655,00	6.045.568.715,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.835.517.557,00	5.029.917.655,00	6.045.568.715,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	100.000.000,00	100.000.000,00	151.180.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	151.180.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	02	2.01	0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	151.180.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.200.000.000,00	972.740.472,00	1.335.991.022,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.200.000.000,00	972.740.472,00	1.335.991.022,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	950.000.000,00	722.740.472,00	1.135.783.022,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	116.708.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	33.500.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	616.872.989,00	616.872.989,00	688.324.289,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	616.872.989,00	616.872.989,00	688.324.289,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	75.000.000,00	75.000.000,00	130.099.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	100.000.000,00	100.000.000,00	116.352.300,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	441.872.989,00	441.872.989,00	441.872.989,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.918.644.568,00	3.340.304.194,00	3.870.073.404,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.647.063.320,00	2.096.488.050,00	2.453.717.040,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.525.023.320,00	1.974.448.050,00	2.331.677.040,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	122.040.000,00	122.040.000,00	122.040.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.200.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.200.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	620.000.000,00	620.000.000,00	611.076.634,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	245.723.513,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	21.458.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	36.860.121,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000,00	400.000.000,00	302.035.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	488.381.248,00	454.016.144,00	546.422.810,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.000.000,00	30.000.000,00	88.066.370,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	428.381.248,00	394.016.144,00	428.356.440,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	42.056.920,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.000.000,00	3.000.000,00	42.056.920,00
2.15.2.11.0.00.01.0000						DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	27.550.675.350,00	18.468.141.154,00	19.765.263.914,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	1.005.000.000,00	475.000.000,00	643.555.442,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	100.000.000,00	0,00	36.279.154,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	100.000.000,00	0,00	36.279.154,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	100.000.000,00	0,00	36.279.154,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	50.000.000,00	26.150.000,00	26.150.000,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	50.000.000,00	26.150.000,00	26.150.000,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	50.000.000,00	26.150.000,00	26.150.000,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	100.000.000,00	23.015.624,00	59.624.422,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	100.000.000,00	23.015.624,00	59.624.422,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	100.000.000,00	23.015.624,00	59.624.422,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	150.000.000,00	51.623.636,00	124.506.085,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00	51.623.636,00	124.506.085,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	11	06	2.01	0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	150.000.000,00	51.623.636,00	124.506.085,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	150.000.000,00	50.360.740,00	73.183.955,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00	50.360.740,00	73.183.955,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	150.000.000,00	50.360.740,00	73.183.955,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	455.000.000,00	323.850.000,00	323.811.826,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	455.000.000,00	323.850.000,00	323.811.826,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	11	11	2.01	0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	155.000.000,00	99.870.360,00	99.870.360,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	11	11	2.01	0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	300.000.000,00	223.979.640,00	223.941.466,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	26.545.675.350,00	17.993.141.154,00	19.121.708.472,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.800.000.000,00	828.470.251,00	1.759.485.835,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.300.000.000,00	768.271.513,00	422.892.097,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	5.420.000,00	5.420.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	800.000.000,00	732.016.513,00	386.637.097,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	100.000.000,00	3.675.000,00	3.675.000,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	300.000.000,00	27.160.000,00	27.160.000,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	350.000.000,00	31.922.000,00	31.922.000,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	150.000.000,00	18.510.000,00	18.510.000,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	02	2.06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	100.000.000,00	5.162.000,00	5.162.000,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00	28.276.738,00	1.304.671.738,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	50.000.000,00	27.621.465,00	27.621.465,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	655.273,00	1.277.050.273,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	11.234.453.750,00	3.700.706.522,00	3.347.580.986,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	11.234.453.750,00	3.700.706.522,00	3.347.580.986,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	03	2.12	0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	9.637.453.750,00	3.237.808.511,00	2.884.682.975,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	03	2.12	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	497.000.000,00	437.281.408,00	437.281.408,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	03	2.12	0005	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal	1.100.000.000,00	25.616.603,00	25.616.603,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.511.221.600,00	13.463.964.381,00	14.014.641.651,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	50.000.000,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	25.000.000,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.666.540.700,00	5.578.987.159,00	5.955.483.133,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.275.160.700,00	5.228.395.159,00	5.595.891.133,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	391.380.000,00	350.592.000,00	359.592.000,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	696.630.000,00	1.092.418.912,00	808.419.404,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.500.000,00	5.100.288,00	23.333.285,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	268.000.000,00	145.651.124,00	140.663.145,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	112.000.000,00	92.287.650,00	102.073.724,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	47.200.000,00	377.097.850,00	80.317.250,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	66.930.000,00	51.750.000,00	54.250.000,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	186.000.000,00	420.532.000,00	407.782.000,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.820.610.900,00	6.490.213.310,00	6.868.961.784,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	54.715.000,00	41.527.920,00	41.527.920,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.783.300,00	68.686.000,00	68.686.000,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.112.600,00	13.267.000,00	13.267.000,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.680.000.000,00	6.366.732.390,00	6.745.480.864,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	292.440.000,00	267.345.000,00	331.777.330,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	218.560.000,00	206.345.000,00	247.267.530,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	73.880.000,00	61.000.000,00	84.509.800,00
2.15.2.11.0.00.01.1						UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI	439.924.300,00	391.414.116,00	945.786.356,00
2.15.2.11.0.00.01.1	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	254.923.300,00	296.438.791,00	680.209.831,00
2.15.2.11.0.00.01.1	2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	5.230.174,00	5.230.174,00
2.15.2.11.0.00.01.1	2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.000.000,00	13.170.399,00	13.170.399,00
2.15.2.11.0.00.01.1	2	15	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.083.300,00	1.083.300,00	1.083.300,00
2.15.2.11.0.00.01.1	2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	160.000.000,00	208.320.270,00	596.881.958,00
2.15.2.11.0.00.01.1	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.840.000,00	1.964.648,00	2.174.000,00
2.15.2.11.0.00.01.1	2	15	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	20.700.000,00	20.700.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.15.2.11.0.00.01.1	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.000.000,00	45.970.000,00	40.970.000,00
2.15.2.11.0.00.01.1	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	39.000.000,00	20.036.237,00	20.036.237,00
2.15.2.11.0.00.01.1	2	15	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.000.000,00	20.036.237,00	20.036.237,00
2.15.2.11.0.00.01.1	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.431.000,00	18.699.088,00	33.320.288,00
2.15.2.11.0.00.01.1	2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.670.500,00	8.459.088,00	9.360.288,00
2.15.2.11.0.00.01.1	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.760.500,00	10.240.000,00	23.960.000,00
2.15.2.11.0.00.01.1	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.570.000,00	56.240.000,00	212.220.000,00
2.15.2.11.0.00.01.1	2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.000.000,00	3.570.000,00	7.140.000,00
2.15.2.11.0.00.01.1	2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.570.000,00	52.670.000,00	205.080.000,00
2.15.2.11.0.00.01.2						UPT PENGELOLAAN SAMPAH	581.612.800,00	482.440.800,00	477.340.800,00
2.15.2.11.0.00.01.2	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	581.612.800,00	482.440.800,00	477.340.800,00
2.15.2.11.0.00.01.2	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	581.612.800,00	482.440.800,00	477.340.800,00
2.15.2.11.0.00.01.2	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	138.546.600,00	56.509.560,00	51.409.560,00
2.15.2.11.0.00.01.2	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	846.000,00	846.000,00	846.000,00
2.15.2.11.0.00.01.2	2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.000.000,00	4.406.280,00	4.406.280,00
2.15.2.11.0.00.01.2	2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00
2.15.2.11.0.00.01.2	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.15.2.11.0.00.01.2	2	11	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	38.270.600,00	9.700.280,00	9.700.280,00
2.15.2.11.0.00.01.2	2	11	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.550.000,00	5.177.000,00	5.177.000,00
2.15.2.11.0.00.01.2	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.000.000,00	32.500.000,00	27.400.000,00
2.15.2.11.0.00.01.2	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.808.200,00	5.797.273,00	5.797.273,00
2.15.2.11.0.00.01.2	2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.720.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00
2.15.2.11.0.00.01.2	2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.088.200,00	3.077.273,00	3.077.273,00
2.15.2.11.0.00.01.2	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	437.258.000,00	420.133.967,00	420.133.967,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.15.2.11.0.00.01.2	2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	434.578.000,00	417.623.067,00	417.623.067,00
2.15.2.11.0.00.01.2	2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.680.000,00	2.510.900,00	2.510.900,00
2.16.2.21.2.20.01.0000						DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	14.515.652.698,00	13.980.732.071,00	14.302.285.071,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	14.197.277.698,00	13.469.732.732,00	13.791.285.732,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4.378.204.069,00	4.167.107.000,00	4.191.643.484,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.378.204.069,00	4.167.107.000,00	4.191.643.484,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	02	2.01	0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	10.375.369,00	50.187.000,00	50.187.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	02	2.01	0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	300.000.000,00	330.000.000,00	330.000.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	02	2.01	0006	Pelayanan Informasi Publik	20.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	02	2.01	0007	Layanan Hubungan Media	4.037.828.700,00	3.684.920.000,00	3.648.526.922,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	02	2.01	0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	5.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	02	2.01	0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	13.000.000,00	73.929.562,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	3.527.783.000,00	3.454.638.263,00	3.454.638.263,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.352.783.000,00	3.298.836.914,00	3.298.836.914,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	03	2.01	0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	139.220.000,00	142.500.000,00	142.500.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	03	2.01	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	3.213.563.000,00	3.156.336.914,00	3.156.336.914,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	175.000.000,00	155.801.349,00	155.801.349,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	03	2.02	0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	20.000.000,00	26.500.000,00	26.500.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	03	2.02	0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	135.000.000,00	101.801.349,00	101.801.349,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	03	2.02	0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	20.000.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.291.290.629,00	5.847.987.469,00	6.145.003.985,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	102.152.200,00	45.956.600,00	45.956.600,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	51.927.600,00	43.237.100,00	43.237.100,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.224.600,00	2.719.500,00	2.719.500,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.490.455.964,00	4.417.520.631,00	4.609.787.767,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.269.775.964,00	4.218.880.631,00	4.411.147.767,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	219.080.000,00	197.040.000,00	197.040.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	36.000.000,00	33.564.000,00	33.564.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36.000.000,00	33.564.000,00	33.564.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	443.178.900,00	380.988.623,00	502.280.623,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.970.000,00	5.111.623,00	5.111.623,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	9.912.368,00	9.912.368,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.500.000,00	14.752.152,00	14.752.152,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.683.400,00	37.880.230,00	37.880.230,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	48.873.500,00	53.307.250,00	53.673.250,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	26.372.000,00	12.520.000,00	12.520.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	295.780.000,00	247.505.000,00	368.431.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.715.049,00	29.441.712,00	29.441.712,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	4.218.000,00	4.218.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.715.049,00	25.223.712,00	25.223.712,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.142.661.366,00	865.180.907,00	848.638.287,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	67.585.783,00	47.432.279,00	47.432.279,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.301.151,00	41.360.000,00	41.360.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.049.774.432,00	776.388.628,00	759.846.008,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.127.150,00	75.334.996,00	75.334.996,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.127.150,00	69.364.996,00	69.364.996,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.000.000,00	5.970.000,00	5.970.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	45.000.000,00	161.000.000,00	161.000.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	45.000.000,00	161.000.000,00	161.000.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	45.000.000,00	161.000.000,00	161.000.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	20	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	20.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	20	02	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	5.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	20	02	2.01	0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	20.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	273.375.000,00	349.999.339,00	349.999.339,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	273.375.000,00	349.999.339,00	349.999.339,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	208.375.000,00	244.999.834,00	244.999.834,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	208.375.000,00	244.999.834,00	244.999.834,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000,00	104.999.505,00	104.999.505,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000,00	104.999.505,00	104.999.505,00
2.17.2.07.3.30.01.0000						DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	10.146.206.602,00	10.170.058.316,00	10.459.902.854,00
2.17.2.07.3.30.01.0000	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	1.047.051.600,00	770.760.000,00	848.244.000,00
2.17.2.07.3.30.01.0000	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.047.051.600,00	770.760.000,00	848.244.000,00
2.17.2.07.3.30.01.0000	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.047.051.600,00	770.760.000,00	848.244.000,00
2.17.2.07.3.30.01.0000	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	1.047.051.600,00	770.760.000,00	848.244.000,00
2.17.2.07.3.30.01.0000	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	9.099.155.002,00	9.399.298.316,00	9.611.658.854,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.17.2.07.3.30.01.0000	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.190.000.000,00	779.710.849,00	759.960.849,00
2.17.2.07.3.30.01.0000	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1.190.000.000,00	779.710.849,00	759.960.849,00
2.17.2.07.3.30.01.0000	2	17	08	2.01	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	1.190.000.000,00	779.710.849,00	759.960.849,00
2.17.2.07.3.30.01.0000	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.909.155.002,00	8.619.587.467,00	8.851.698.005,00
2.17.2.07.3.30.01.0000	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.332.743.970,00	7.161.818.249,00	7.267.198.283,00
2.17.2.07.3.30.01.0000	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.332.743.970,00	7.161.818.249,00	7.267.198.283,00
2.17.2.07.3.30.01.0000	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.576.411.032,00	1.457.769.218,00	1.584.499.722,00
2.17.2.07.3.30.01.0000	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.576.411.032,00	1.457.769.218,00	1.584.499.722,00
2.17.3.30.2.07.01.0000						DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	1.387.380.374,00	936.678.822,00	1.588.006.533,00
2.17.3.30.2.07.01.0000	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	150.592.208,00	150.592.208,00	150.592.208,00
2.17.3.30.2.07.01.0000	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	150.592.208,00	150.592.208,00	150.592.208,00
2.17.3.30.2.07.01.0000	2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	150.592.208,00	150.592.208,00	150.592.208,00
2.17.3.30.2.07.01.0000	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.130.330.363,00	679.628.811,00	940.956.523,00
2.17.3.30.2.07.01.0000	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	237.320.000,00	203.880.000,00	203.880.000,00
2.17.3.30.2.07.01.0000	2	17	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	237.320.000,00	203.880.000,00	203.880.000,00
2.17.3.30.2.07.01.0000	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	438.833.181,00	241.024.876,00	496.247.588,00
2.17.3.30.2.07.01.0000	2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.456.040,00	4.852.665,00	14.709.965,00
2.17.3.30.2.07.01.0000	2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.613.463,00	6.812.171,00	6.812.171,00
2.17.3.30.2.07.01.0000	2	17	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	31.520.408,00	15.483.255,00	15.483.255,00
2.17.3.30.2.07.01.0000	2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.093.940,00	7.200.000,00	27.404.500,00
2.17.3.30.2.07.01.0000	2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	52.879.330,00	29.216.785,00	42.428.057,00
2.17.3.30.2.07.01.0000	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	233.270.000,00	177.460.000,00	389.409.640,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.17.3.30.2.07.01.0000	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	322.353.137,00	171.446.853,00	177.551.853,00
2.17.3.30.2.07.01.0000	2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	207.243.137,00	112.201.853,00	118.306.853,00
2.17.3.30.2.07.01.0000	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	115.110.000,00	59.245.000,00	59.245.000,00
2.17.3.30.2.07.01.0000	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.824.045,00	63.277.082,00	63.277.082,00
2.17.3.30.2.07.01.0000	2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.573.045,00	48.403.082,00	48.403.082,00
2.17.3.30.2.07.01.0000	2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.251.000,00	14.874.000,00	14.874.000,00
2.17.3.30.2.07.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	106.457.803,00	106.457.803,00	496.457.802,00
2.17.3.30.2.07.01.0000	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	106.457.803,00	106.457.803,00	496.457.802,00
2.17.3.30.2.07.01.0000	3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	37.004.802,00	37.004.802,00	37.004.802,00
2.17.3.30.2.07.01.0000	3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	37.004.802,00	37.004.802,00	37.004.802,00
2.17.3.30.2.07.01.0000	3	30	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	37.004.802,00	37.004.802,00	37.004.802,00
2.17.3.30.2.07.01.0000	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1,00	1,00	390.000.000,00
2.17.3.30.2.07.01.0000	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1,00	1,00	390.000.000,00
2.17.3.30.2.07.01.0000	3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1,00	1,00	390.000.000,00
2.17.3.30.2.07.01.0000	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	69.453.000,00	69.453.000,00	69.453.000,00
2.17.3.30.2.07.01.0000	3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	69.453.000,00	69.453.000,00	69.453.000,00
2.17.3.30.2.07.01.0000	3	30	04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	69.453.000,00	69.453.000,00	69.453.000,00
2.17.3.31.3.32.01.0000						DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	1.000.000.000,00	550.000.000,00	336.515.679,00
2.17.3.31.3.32.01.0000	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.000.000.000,00	550.000.000,00	336.515.679,00
2.17.3.31.3.32.01.0000	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.000.000.000,00	550.000.000,00	336.515.679,00
2.17.3.31.3.32.01.0000	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00	550.000.000,00	336.515.679,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.17.3.31.3.32.01.0000	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.000.000.000,00	550.000.000,00	336.515.679,00
2.18.0.00.0.00.01.0000						DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6.140.887.677,00	5.233.635.991,00	5.924.483.616,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.140.887.677,00	5.233.635.991,00	5.924.483.616,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6.140.887.677,00	5.233.635.991,00	5.924.483.616,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	250.000.000,00	0,00	257.939.825,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	0,00	257.939.825,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	250.000.000,00	0,00	257.939.825,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	115.000.000,00	457.003.000,00	376.402.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	115.000.000,00	457.003.000,00	376.402.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	50.000.000,00	392.003.000,00	334.122.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	65.000.000,00	65.000.000,00	42.280.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	355.000.000,00	0,00	415.178.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	355.000.000,00	0,00	415.178.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	120.000.000,00	0,00	62.276.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	115.000.000,00	0,00	228.349.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	120.000.000,00	0,00	124.553.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.420.887.677,00	4.776.632.991,00	4.874.963.791,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.244.109.965,00	3.785.315.614,00	3.915.090.625,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.107.779.965,00	3.633.534.579,00	3.767.989.590,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	134.280.000,00	149.760.000,00	145.080.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.050.000,00	2.021.035,00	2.021.035,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19.800.000,00	19.056.000,00	19.056.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.800.000,00	19.056.000,00	19.056.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	423.807.000,00	361.867.445,00	352.579.446,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.451.000,00	3.780.740,00	3.780.740,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	380.000,00	4.908.050,00	3.505.750,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.819.000,00	5.885.055,00	4.500.156,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.449.000,00	25.380.800,00	21.805.800,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	43.730.000,00	13.364.800,00	7.907.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	308.978.000,00	308.548.000,00	311.080.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.935.000,00	27.803.100,00	27.803.100,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.935.000,00	27.803.100,00	27.803.100,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	673.235.712,00	560.875.132,00	544.039.120,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35.000.000,00	26.633.700,00	21.777.200,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.800.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	635.435.712,00	531.721.432,00	519.741.920,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.000.000,00	21.715.700,00	16.395.500,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.000.000,00	12.695.700,00	9.325.500,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	9.020.000,00	7.070.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000						DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	4.582.374.499,00	3.866.648.712,00	3.846.648.712,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	4.353.374.499,00	3.776.481.439,00	3.756.481.438,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.094.453.912,00	1.013.186.870,00	916.072.068,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	757.691.000,00	690.246.534,00	644.368.858,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.01	0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	497.070.000,00	402.163.541,00	350.899.630,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.01	0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	154.800.000,00	235.507.993,00	240.894.228,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	105.821.000,00	52.575.000,00	52.575.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	336.762.912,00	322.940.336,00	271.703.210,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.02	0001	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	261.694.322,00	272.949.470,00	225.133.470,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	75.068.590,00	49.990.866,00	46.569.740,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.258.920.587,00	2.763.294.569,00	2.840.409.370,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.832.502.000,00	1.551.238.983,00	1.674.186.784,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.739.502.000,00	1.459.306.983,00	1.594.374.784,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	93.000.000,00	91.932.000,00	79.812.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	510.201.587,00	426.968.058,00	384.887.854,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.907.787,00	44.229.080,00	36.629.080,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.031.000,00	33.263.158,00	30.874.084,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.044.000,00	34.853.890,00	23.403.890,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	38.538.000,00	35.150.000,00	23.535.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	326.680.800,00	279.471.930,00	270.445.800,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	450.874.000,00	387.476.988,00	349.004.452,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	140.874.000,00	77.476.988,00	48.978.089,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	310.000.000,00	310.000.000,00	300.026.363,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	465.343.000,00	397.610.540,00	432.330.280,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.640.442,00	30.345.000,00	33.235.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	418.702.558,00	367.265.540,00	399.095.280,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	229.000.000,00	90.167.273,00	90.167.274,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	229.000.000,00	90.167.273,00	90.167.274,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	229.000.000,00	90.167.273,00	90.167.274,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	154.000.000,00	44.193.677,00	44.193.677,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	75.000.000,00	45.973.596,00	45.973.597,00
3.25.3.27.2.09.01.0000						DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN	28.223.274.607,00	13.710.093.043,00	19.532.578.043,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	639.726.900,00	190.988.500,00	190.988.500,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	316.988.500,00	91.810.300,00	91.810.300,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	316.988.500,00	91.810.300,00	91.810.300,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	316.988.500,00	91.810.300,00	91.810.300,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	138.707.100,00	77.876.000,00	77.876.000,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	138.707.100,00	77.876.000,00	77.876.000,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	138.707.100,00	77.876.000,00	77.876.000,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	184.031.300,00	21.302.200,00	21.302.200,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	184.031.300,00	21.302.200,00	21.302.200,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	184.031.300,00	21.302.200,00	21.302.200,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	27.583.547.707,00	13.519.104.543,00	19.341.589.543,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	25.384.876.326,00	13.359.604.543,00	19.152.089.543,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	6.679.055.637,00	84.439.950,00	4.085.225.502,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.679.055.637,00	84.439.950,00	4.085.225.502,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	5.649.421.012,00	45.000.000,00	4.045.785.552,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	1.029.634.625,00	39.439.950,00	39.439.950,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.323.919.114,00	120.000.000,00	1.208.778.980,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.323.919.114,00	120.000.000,00	1.208.778.980,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	122.582.490,00	85.000.000,00	85.000.000,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.121.259.824,00	35.000.000,00	240.000.000,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	04	2.04	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	80.076.800,00	0,00	883.778.980,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.058.337.139,00	110.000.239,00	110.000.239,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	141.064.979,00	30.000.000,00	30.000.000,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	06	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	141.064.979,00	30.000.000,00	30.000.000,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	299.043.360,00	45.000.239,00	45.000.239,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	06	2.02	0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	299.043.360,00	45.000.239,00	45.000.239,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	618.228.800,00	35.000.000,00	35.000.000,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	618.228.800,00	35.000.000,00	35.000.000,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.323.564.436,00	13.045.164.354,00	13.748.084.822,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.646.800.000,00	8.101.921.187,00	8.569.410.693,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.300.000.000,00	7.909.046.874,00	8.315.130.693,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	346.800.000,00	192.874.313,00	254.280.000,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	43.800.000,00	43.800.000,00	43.800.000,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	43.800.000,00	43.800.000,00	43.800.000,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.062.548.400,00	528.269.899,00	528.269.899,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.479.000,00	6.479.000,00	6.479.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	28.093.100,00	28.093.100,00	28.093.100,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53.448.400,00	43.448.400,00	43.448.400,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	57.751.500,00	50.000.000,00	50.000.000,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.692.400,00	18.692.400,00	18.692.400,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	798.084.000,00	330.330.000,00	330.330.000,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100.000.000,00	51.226.999,00	51.226.999,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.687.999.015,00	416.625.647,00	416.625.647,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	100.000.000,00	15.061.831,00	15.061.831,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000,00	56.287.721,00	56.287.721,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.437.999.015,00	345.276.095,00	345.276.095,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.652.470.021,00	3.876.066.249,00	4.111.497.211,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	138.772.521,00	138.772.521,00	138.772.521,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63.697.500,00	49.676.445,00	49.676.445,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	33.314.429,00	33.314.429,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.400.000.000,00	3.654.302.854,00	3.889.733.816,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179.947.000,00	28.481.372,00	28.481.372,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.563.500,00	13.822.515,00	13.822.515,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	58.563.500,00	10.388.857,00	10.388.857,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62.820.000,00	4.270.000,00	4.270.000,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	2.198.671.381,00	159.500.000,00	189.500.000,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	450.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	450.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	450.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.393.303.592,00	75.000.000,00	105.000.000,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	170.000.000,00	50.000.000,00	80.000.000,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	27	03	2.01	0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	170.000.000,00	50.000.000,00	80.000.000,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	1.223.303.592,00	25.000.000,00	25.000.000,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.223.303.592,00	25.000.000,00	25.000.000,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	236.390.391,00	25.000.000,00	25.000.000,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	236.390.391,00	25.000.000,00	25.000.000,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	236.390.391,00	25.000.000,00	25.000.000,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	118.977.398,00	34.500.000,00	34.500.000,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	118.977.398,00	34.500.000,00	34.500.000,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	118.977.398,00	34.500.000,00	34.500.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000						DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	8.962.420.218,00	6.934.198.200,00	7.808.288.200,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	200.000.000,00	0,00	280.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	200.000.000,00	0,00	280.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	200.000.000,00	0,00	280.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	0,00	280.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	200.000.000,00	0,00	280.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	8.762.420.218,00	6.934.198.200,00	7.528.288.200,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	8.762.420.218,00	6.934.198.200,00	7.528.288.200,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.006.868.140,00	0,00	437.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.006.868.140,00	0,00	437.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.006.868.140,00	0,00	437.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	880.000.000,00	200.000.000,00	500.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	880.000.000,00	200.000.000,00	500.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	580.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.875.552.078,00	6.734.198.200,00	6.591.288.200,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300.000.000,00	300.000.000,00	236.808.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	300.000.000,00	300.000.000,00	236.808.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.931.613.838,00	3.763.264.916,00	3.828.956.916,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.741.353.838,00	3.572.344.916,00	3.638.036.916,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	190.260.000,00	190.920.000,00	190.920.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	543.217.069,00	543.217.069,00	400.657.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	137.629.000,00	137.629.000,00	99.050.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	405.588.069,00	405.588.069,00	301.607.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	124.500.000,00	424.500.000,00	464.527.165,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000,00	10.000.000,00	18.063.022,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.500.000,00	304.500.000,00	336.464.143,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	298.834.000,00	226.503.098,00	180.580.326,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	157.222.400,00	156.020.500,00	156.020.500,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	141.611.600,00	70.482.598,00	24.559.826,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.304.684.641,00	1.104.010.587,00	1.107.056.263,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	33.345.000,00	33.345.000,00	33.345.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.369.265,00	74.369.265,00	74.369.265,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.834.000,00	8.834.000,00	8.834.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.188.136.376,00	987.462.322,00	990.507.998,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	372.702.530,00	372.702.530,00	372.702.530,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.242.530,00	5.242.530,00	5.242.530,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.460.000,00	17.460.000,00	17.460.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000						SEKRETARIAT DAERAH	51.921.659.308,00	48.995.656.532,00	49.720.733.386,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	51.921.659.308,00	48.995.656.532,00	49.720.733.386,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01				SEKRETARIAT DAERAH	51.921.659.308,00	48.995.656.532,00	49.720.733.386,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	10.027.557.319,00	6.965.873.169,00	8.231.867.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	395.327.513,00	339.863.405,00	305.768.924,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	263.327.513,00	225.036.556,00	204.843.724,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	132.000.000,00	114.826.849,00	100.925.200,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	8.980.000.000,00	6.004.267.564,00	6.812.653.376,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3.000.000.000,00	2.499.458.200,00	2.557.934.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	5.980.000.000,00	3.504.809.364,00	4.254.719.376,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	652.229.806,00	621.742.200,00	1.113.444.700,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	200.000.000,00	214.439.700,00	385.441.700,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	230.000.000,00	224.800.000,00	592.538.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	222.229.806,00	182.502.500,00	135.465.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.289.242.125,00	2.163.349.521,00	2.041.172.041,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	208.000.000,00	325.112.860,00	310.853.110,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	150.000.000,00	160.050.000,00	104.608.750,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	58.000.000,00	165.062.860,00	206.244.360,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	615.808.774,00	613.432.100,00	695.715.900,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	45.000.000,00	39.225.000,00	32.085.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	238.000.000,00	436.167.400,00	575.191.200,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	332.808.774,00	138.039.700,00	88.439.700,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.240.433.351,00	1.042.654.561,00	888.853.031,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	522.966.971,00	454.487.456,00	400.449.456,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	330.000.000,00	311.204.055,00	311.203.875,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	387.466.380,00	276.963.050,00	177.199.700,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	225.000.000,00	182.150.000,00	145.750.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	80.000.000,00	63.400.000,00	45.400.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	60.000.000,00	59.000.000,00	48.350.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	85.000.000,00	59.750.000,00	52.000.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	39.604.859.864,00	39.866.433.842,00	39.447.694.345,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.800.000.000,00	20.088.295.805,00	20.999.611.207,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.000.000.000,00	19.288.295.805,00	20.210.671.207,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	800.000.000,00	800.000.000,00	788.940.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	54.366.200,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100.000.000,00	100.000.000,00	54.366.200,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.523.000.000,00	5.546.608.678,00	4.523.662.676,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	250.000.000,00	250.000.000,00	123.193.255,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	228.000.000,00	228.000.000,00	210.879.421,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	1.197.825.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	270.000.000,00	270.000.000,00	190.765.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	995.000.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.175.000.000,00	2.198.608.678,00	1.706.000.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	400.000.000,00	211.800.000,00	513.346.638,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	400.000.000,00	211.800.000,00	513.346.638,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.037.859.864,00	10.165.751.454,00	9.943.997.352,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200.000.000,00	200.000.000,00	133.489.760,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.549.324.640,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.637.859.864,00	8.765.751.454,00	8.261.182.952,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	851.000.000,00	951.000.000,00	1.039.355.408,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	330.000.000,00	330.000.000,00	310.750.120,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	121.000.000,00	121.000.000,00	120.350.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	400.000.000,00	500.000.000,00	608.255.288,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	920.000.000,00	914.913.655,00	714.928.590,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	200.000.000,00	194.913.655,00	194.913.655,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000,00	600.000.000,00	400.014.935,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	583.000.000,00	583.000.000,00	550.744.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	148.000.000,00	148.000.000,00	148.000.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	135.000.000,00	135.000.000,00	102.744.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	420.000.000,00	448.523.090,00	370.086.781,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	130.000.000,00	138.572.690,00	92.528.381,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	90.000.000,00	147.679.610,00	72.279.610,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	200.000.000,00	162.270.790,00	205.278.790,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	970.000.000,00	856.541.160,00	737.595.493,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	350.000.000,00	346.965.000,00	305.110.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	300.000.000,00	306.200.000,00	258.308.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	320.000.000,00	203.376.160,00	174.177.493,00
4.02.0.00.0.00.01.0000						SEKRETARIAT DPRD	32.402.987.434,00	32.697.211.247,00	37.166.780.795,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02				SEKRETARIAT DPRD	32.402.987.434,00	32.697.211.247,00	37.166.780.795,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	10.992.566.549,00	11.507.553.127,00	15.382.252.167,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	2.090.167.200,00	2.090.167.200,00	2.779.204.600,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.502.969.900,00	1.502.969.900,00	2.192.007.300,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	587.197.300,00	587.197.300,00	587.197.300,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	752.751.900,00	834.641.300,00	960.705.300,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	22.432.500,00	63.392.500,00	71.242.500,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	45.317.000,00	51.279.400,00	73.229.400,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD	343.125.400,00	378.092.400,00	426.224.400,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	341.877.000,00	341.877.000,00	390.009.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	3.254.230.549,00	3.429.729.627,00	3.804.224.267,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	1.116.040.000,00	1.291.540.000,00	1.521.609.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	616.887.600,00	616.887.600,00	618.036.240,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	297.606.949,00	297.606.476,00	440.883.476,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1.223.696.000,00	1.223.695.551,00	1.223.695.551,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.801.876.900,00	3.059.475.000,00	3.375.618.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	659.999.900,00	917.598.100,00	1.096.361.100,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	470.680.000,00	470.680.000,00	518.812.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	1.671.197.000,00	1.671.196.900,00	1.760.444.900,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	2.093.540.000,00	2.093.540.000,00	4.462.500.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	2.093.540.000,00	2.093.540.000,00	4.462.500.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.410.420.885,00	21.189.658.120,00	21.784.528.628,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	101.819.200,00	101.760.360,00	124.880.780,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	83.416.800,00	83.416.800,00	81.787.700,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.000.800,00	4.000.800,00	4.000.620,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.919.700,00	3.919.660,00	3.919.660,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.949.900,00	2.949.900,00	2.949.900,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.513.600,00	2.513.600,00	2.513.300,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.953.500,00	2.895.100,00	27.645.100,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.064.900,00	2.064.500,00	2.064.500,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.981.451.969,00	4.205.843.318,00	4.379.560.283,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.708.535.869,00	3.932.927.318,00	4.160.291.983,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	270.320.000,00	270.320.000,00	216.600.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.596.100,00	2.596.000,00	2.668.300,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	238.232.000,00	416.360.000,00	350.069.800,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	146.564.000,00	146.564.000,00	146.441.800,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	91.668.000,00	269.796.000,00	203.628.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.462.750.400,00	1.084.691.822,00	1.094.425.053,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	84.689.300,00	84.686.768,00	58.552.926,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	479.500.000,00	101.471.714,00	108.735.842,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	65.998.000,00	65.983.800,00	61.577.245,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	203.515.600,00	203.502.040,00	177.582.040,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	139.232.500,00	139.232.500,00	95.231.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000,00	50.000.000,00	15.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.010.000,00	100.010.000,00	83.100.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	339.805.000,00	339.805.000,00	494.646.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	78.611.200,00	78.611.200,00	78.611.200,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	78.611.200,00	78.611.200,00	78.611.200,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.674.672.017,00	2.430.361.601,00	2.586.798.827,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	179.630.400,00	179.630.400,00	178.923.234,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	244.916.625,00	244.916.625,00	244.916.625,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.250.124.992,00	2.005.814.576,00	2.162.958.968,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	428.413.299,00	428.413.299,00	357.094.365,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	84.225.030,00	84.225.030,00	84.183.296,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.507.200,00	60.507.200,00	59.990.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	283.681.069,00	283.681.069,00	212.921.069,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	12.040.320.800,00	12.039.466.520,00	12.409.598.320,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	11.013.913.520,00	11.013.913.520,00	11.149.113.520,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	355.814.280,00	354.960.000,00	563.389.800,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	670.593.000,00	670.593.000,00	697.095.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	404.150.000,00	404.150.000,00	403.490.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	152.009.700,00	152.009.700,00	152.009.700,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	252.140.300,00	252.140.300,00	251.480.300,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.01.5.05.0.00.01.0000						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	15.692.097.193,00	16.309.449.525,00	14.471.850.979,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	15.692.097.193,00	16.309.449.525,00	14.471.850.979,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01				PERENCANAAN	15.051.821.193,00	15.592.100.181,00	14.138.635.785,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.935.937.200,00	1.935.937.200,00	2.239.966.950,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.483.270.100,00	1.630.628.100,00	1.906.050.350,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	34.570.000,00	17.535.000,00	11.250.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	508.450.200,00	356.580.125,00	427.869.500,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	54.180.000,00	54.180.000,00	54.180.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	886.069.900,00	1.202.332.975,00	1.412.750.850,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	201.440.000,00	90.852.000,00	90.172.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	201.440.000,00	90.852.000,00	90.172.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	251.227.100,00	214.457.100,00	243.744.600,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	251.227.100,00	214.457.100,00	243.744.600,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.391.191.724,00	1.409.452.378,00	928.230.510,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	582.410.362,00	582.410.078,00	445.685.200,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	223.491.162,00	223.490.878,00	124.926.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	57.004.800,00	57.004.800,00	56.324.800,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	16.875.000,00	16.875.000,00	16.875.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	141.481.600,00	141.481.600,00	104.681.600,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	107.182.800,00	107.182.800,00	106.502.800,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	26.375.000,00	26.375.000,00	26.375.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	244.778.200,00	262.793.100,00	185.954.810,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	82.933.200,00	147.527.100,00	9.317.500,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	49.351.600,00	35.692.000,00	43.792.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	16.448.000,00	14.410.000,00	14.410.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	5.000.000,00	20.350.000,00	2.350.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	59.001.600,00	18.900.000,00	54.918.310,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	12.493.800,00	8.539.000,00	43.792.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	14.550.000,00	12.375.000,00	12.375.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	564.003.162,00	564.249.200,00	296.590.500,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	127.237.162,00	169.185.500,00	149.721.800,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	49.781.600,00	125.684.000,00	62.692.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	114.350.000,00	33.765.000,00	18.675.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	5.000.000,00	46.650.000,00	7.050.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	56.448.000,00	41.582.700,00	19.896.700,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	175.636.400,00	103.042.000,00	2.975.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	30.550.000,00	39.340.000,00	30.580.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.724.692.269,00	12.246.710.603,00	10.970.438.325,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99.679.500,00	587.081.185,00	391.010.745,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	83.614.500,00	370.966.460,00	232.165.700,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.065.000,00	216.114.725,00	158.845.045,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.989.426.250,00	5.692.794.811,00	6.234.795.704,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.623.226.250,00	5.326.594.811,00	5.847.835.704,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	286.200.000,00	286.200.000,00	306.960.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	363.590.000,00	363.590.000,00	210.346.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	135.590.000,00	135.590.000,00	79.690.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	228.000.000,00	228.000.000,00	130.656.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.736.079.415,00	1.915.579.415,00	1.305.214.341,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.732.000,00	147.732.000,00	67.192.130,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	133.976.900,00	133.976.900,00	117.942.798,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	79.389.000,00	79.389.000,00	41.516.936,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	124.413.000,00	173.913.000,00	131.247.625,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	115.400.000,00	115.400.000,00	117.529.852,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.584.515,00	16.584.515,00	10.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	882.584.000,00	882.584.000,00	683.785.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	366.000.000,00	366.000.000,00	136.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.633.126.219,00	1.633.126.219,00	736.717.721,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	689.760.119,00	689.760.119,00	302.156.798,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	285.782.100,00	285.782.100,00	331.194.363,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	657.584.000,00	657.584.000,00	103.366.560,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.823.257.458,00	1.975.005.546,00	1.978.315.794,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	149.154.858,00	119.734.858,00	120.634.858,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.647.102.600,00	1.828.270.688,00	1.830.680.936,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.533.427,00	79.533.427,00	114.038.020,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.533.427,00	43.533.427,00	78.038.020,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	640.276.000,00	717.349.344,00	333.215.194,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	640.276.000,00	717.349.344,00	333.215.194,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	120.276.000,00	128.526.000,00	128.526.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	2.01	0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	120.276.000,00	128.526.000,00	128.526.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	520.000.000,00	588.823.344,00	204.689.194,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	250.000.000,00	319.679.400,00	19.679.250,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	270.000.000,00	269.143.944,00	185.009.944,00
5.02.0.00.0.00.01.0000						BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	152.947.749.036,00	111.059.435.483,00	137.194.980.350,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02				KEUANGAN	152.947.749.036,00	111.059.435.483,00	137.194.980.350,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	130.701.477.094,00	79.874.195.609,00	117.604.729.529,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	3.701.238.400,00	3.104.261.170,00	3.132.225.130,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	116.530.500,00	111.754.300,00	61.410.860,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	113.511.000,00	58.200.000,00	50.700.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	56.080.000,00	24.325.000,00	13.800.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	45.080.000,00	24.325.000,00	13.800.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	195.807.500,00	120.455.750,00	64.351.150,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	116.827.500,00	68.250.000,00	54.600.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	826.680.700,00	710.748.000,00	800.900.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	792.355.200,00	694.448.000,00	733.732.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	749.107.000,00	707.557.920,00	757.933.920,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	198.359.000,00	192.259.500,00	191.459.500,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	186.843.000,00	124.567.500,00	122.167.500,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.01	0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	91.193.000,00	52.736.100,00	52.736.100,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	212.864.000,00	214.634.100,00	214.634.100,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	358.590.000,00	267.591.000,00	362.641.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	131.674.000,00	107.700.000,00	247.525.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	226.916.000,00	159.891.000,00	115.116.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	763.708.000,00	922.856.400,00	793.696.560,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	104.216.000,00	104.216.000,00	84.658.800,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	456.530.000,00	456.530.000,00	414.402.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	58.575.000,00	255.262.400,00	187.784.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	118.329.000,00	80.790.000,00	88.090.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	26.058.000,00	26.058.000,00	18.761.760,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	125.111.177.694,00	74.717.148.079,00	112.343.205.879,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	123.111.177.694,00	72.717.148.079,00	110.343.205.879,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	766.763.000,00	862.338.960,00	972.960.960,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	766.763.000,00	862.338.960,00	972.960.960,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.630.000.000,00	2.060.000.000,00	1.611.350.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.630.000.000,00	2.060.000.000,00	1.611.350.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	520.000.000,00	520.000.000,00	720.289.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	460.000.000,00	250.000.000,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	300.000.000,00	150.000.000,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	140.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	200.000.000,00	150.000.000,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	150.000.000,00	100.000.000,00	891.061.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	150.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100.000.000,00	80.000.000,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.685.928.250,00	958.956.400,00	692.330.400,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.685.928.250,00	958.956.400,00	692.330.400,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	565.064.000,00	249.998.000,00	85.429.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	101.826.000,00	101.825.900,00	173.977.500,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	207.102.500,00	207.102.000,00	146.099.400,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	559.875.000,00	250.000.000,00	179.000.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	252.060.750,00	150.030.500,00	107.824.500,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.930.343.692,00	28.166.283.474,00	17.286.570.421,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.620.000,00	4.445.000,00	3.700.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.950.000,00	3.775.000,00	3.150.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	670.000,00	670.000,00	550.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.789.727.179,00	24.224.838.387,00	13.066.079.601,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.943.213.179,00	23.379.102.387,00	12.244.547.601,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	843.360.000,00	843.360.000,00	820.320.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.154.000,00	2.376.000,00	1.212.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	132.000.000,00	132.000.000,00	154.125.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	92.000.000,00	92.000.000,00	92.000.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000,00	20.000.000,00	42.125.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	767.945.700,00	752.154.196,00	833.369.221,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	80.624.800,00	73.198.816,00	221.288.841,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120.868.900,00	115.903.380,00	115.903.380,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	123.340.000,00	118.540.000,00	118.540.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	49.000.000,00	50.400.000,00	46.200.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	391.712.000,00	391.712.000,00	329.037.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	358.379.281,00	365.538.287,00	365.538.287,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.000.000,00	35.874.900,00	35.874.900,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	104.901.400,00	104.360.942,00	104.360.942,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	215.477.881,00	225.302.445,00	225.302.445,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.630.494.032,00	2.441.130.104,00	2.639.546.812,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	97.490.780,00	97.490.780,00	100.799.600,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	124.747.900,00	124.189.900,00	121.089.028,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.408.255.352,00	2.219.449.424,00	2.417.658.184,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	246.177.500,00	246.177.500,00	224.211.500,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.477.500,00	80.477.500,00	73.337.500,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.500.000,00	56.500.000,00	50.780.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	109.200.000,00	109.200.000,00	100.094.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000						BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	8.857.039.816,00	8.778.338.725,00	9.388.338.725,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03				KEPEGAWAIAN	7.842.965.616,00	7.772.963.525,00	8.109.644.525,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.314.027.950,00	974.869.699,00	943.128.116,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	343.327.950,00	328.660.799,00	280.286.216,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	220.045.150,00	205.395.150,00	175.381.238,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	123.282.800,00	123.265.649,00	104.904.978,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	410.664.000,00	235.906.900,00	286.126.900,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	183.411.000,00	102.127.000,00	185.931.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	227.253.000,00	133.779.900,00	100.195.900,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	214.688.000,00	187.168.000,00	153.584.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	214.688.000,00	187.168.000,00	153.584.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	345.348.000,00	223.134.000,00	223.131.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	148.284.000,00	75.034.000,00	75.034.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	197.064.000,00	148.100.000,00	148.097.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.528.937.666,00	6.798.093.826,00	7.166.516.409,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.942.900,00	5.750.000,00	5.750.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.700.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.242.900,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.026.171.122,00	5.504.905.888,00	5.826.104.223,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.865.131.122,00	5.344.825.888,00	5.666.024.223,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	161.040.000,00	160.080.000,00	160.080.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	566.324.000,00	529.645.185,00	511.116.810,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.966.000,00	2.694.884,00	2.694.884,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.312.200,00	68.956.839,00	69.430.524,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.649.800,00	8.561.742,00	8.561.742,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.918.000,00	43.800.720,00	26.527.660,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.640.000,00	17.433.000,00	17.904.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.250.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	401.588.000,00	383.158.000,00	380.958.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.538.872,00	16.538.872,00	16.503.169,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.538.872,00	16.538.872,00	16.503.169,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	873.681.272,00	715.666.246,00	782.012.132,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	10.450.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.503.000,00	10.011.500,00	10.011.500,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	850.178.272,00	695.654.746,00	761.550.632,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.279.500,00	25.587.635,00	25.030.075,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19.919.500,00	15.527.635,00	19.350.075,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.360.000,00	10.060.000,00	5.680.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.014.074.200,00	1.005.375.200,00	1.278.694.200,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.014.074.200,00	1.005.375.200,00	1.278.694.200,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.014.074.200,00	1.005.375.200,00	1.278.694.200,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.014.074.200,00	1.005.375.200,00	1.278.694.200,00
5.06.0.00.0.00.04.0000						BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	4.165.581.229,00	3.705.101.370,00	3.705.101.370,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06				PENGELOLAAN PERBATASAN	4.165.581.229,00	3.705.101.370,00	3.705.101.370,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	02			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	350.000.000,00	322.850.000,00	265.915.642,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	02	2.01		Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	100.000.000,00	100.000.000,00	77.580.535,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	100.000.000,00	100.000.000,00	77.580.535,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	02	2.02		Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	150.000.000,00	122.850.000,00	77.663.137,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	02	2.02	0003	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	150.000.000,00	122.850.000,00	77.663.137,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	02	2.03		Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	100.000.000,00	100.000.000,00	110.671.970,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	02	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	100.000.000,00	100.000.000,00	110.671.970,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.815.581.229,00	3.382.251.370,00	3.439.185.728,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.257.500,00	16.500.000,00	16.500.000,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.257.500,00	16.500.000,00	16.500.000,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.770.736.696,00	2.457.306.575,00	2.484.797.231,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.638.961.996,00	2.322.231.875,00	2.349.722.531,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	105.120.000,00	112.440.000,00	112.440.000,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	26.654.700,00	22.634.700,00	22.634.700,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.000.000,00	7.308.000,00	7.308.000,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000,00	7.308.000,00	7.308.000,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	120.910.700,00	18.000.000,00	20.000.000,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	120.910.700,00	18.000.000,00	20.000.000,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	324.681.453,00	337.994.109,00	347.234.430,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.225.753,00	8.225.753,00	9.090.625,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.030.000,00	79.342.656,00	85.480.000,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.449.700,00	15.449.700,00	14.457.805,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	226.976.000,00	226.976.000,00	230.206.000,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	348.883.952,00	275.547.844,00	286.712.153,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	77.700.000,00	77.700.000,00	79.614.000,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	50.000.000,00	50.000.000,00	40.988.859,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.028.112,00	26.692.004,00	44.953.454,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	121.155.840,00	121.155.840,00	121.155.840,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	214.110.928,00	250.012.192,00	265.281.264,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	43.683.100,00	43.683.100,00	43.971.800,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.918.900,00	34.545.000,00	34.545.000,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	151.508.928,00	171.784.092,00	186.764.464,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.000.000,00	19.582.650,00	11.352.650,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6.000.000,00	13.372.650,00	6.232.650,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00	6.210.000,00	5.120.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000						INSPEKTORAT DAERAH	13.725.299.780,00	13.658.867.075,00	13.628.867.075,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	13.725.299.780,00	13.658.867.075,00	13.628.867.075,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01				INSPEKTORAT DAERAH	13.725.299.780,00	13.658.867.075,00	13.628.867.075,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.362.082.191,00	1.346.999.191,00	1.346.999.191,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.093.947.191,00	1.078.864.191,00	1.078.864.191,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	63.056.500,00	63.056.500,00	63.056.500,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	102.000.000,00	102.000.000,00	102.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa	230.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	218.890.691,00	218.890.691,00	218.890.691,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	150.000.000,00	134.917.000,00	134.917.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	268.135.000,00	268.135.000,00	268.135.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	18.135.000,00	18.135.000,00	18.135.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	880.831.828,00	880.831.828,00	880.831.828,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	860.831.828,00	860.831.828,00	860.831.828,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	119.554.118,00	119.554.118,00	119.554.118,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	126.492.000,00	126.492.000,00	126.492.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	573.109.610,00	573.109.610,00	573.109.610,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	41.676.100,00	41.676.100,00	41.676.100,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.482.385.761,00	11.431.036.056,00	11.401.036.056,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.465.000,00	64.464.100,00	64.464.100,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	62.475.000,00	62.474.100,00	62.474.100,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.990.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.561.057.137,00	8.439.282.184,00	8.409.282.184,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.400.178.137,00	8.278.403.184,00	8.248.403.184,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	141.480.000,00	141.480.000,00	141.480.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19.399.000,00	19.399.000,00	19.399.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	443.000.000,00	442.999.900,00	442.999.900,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	58.000.000,00	57.999.900,00	57.999.900,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	385.000.000,00	385.000.000,00	385.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	659.933.000,00	644.357.582,00	639.357.582,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.000.000,00	134.554.612,00	134.554.612,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.000.000,00	3.870.375,00	3.870.375,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000,00	29.999.595,00	37.011.095,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.655.000,00	30.655.000,00	30.655.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	438.778.000,00	438.778.000,00	426.766.500,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,00	106.152.000,00	106.152.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1,00	106.152.000,00	106.152.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.356.341.752,00	1.362.298.856,00	1.362.298.856,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.200.000,00	4.197.484,00	4.197.484,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.312.941.752,00	1.318.901.372,00	1.318.901.372,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	349.588.871,00	323.481.434,00	328.481.434,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.000.000,00	34.000.000,00	39.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	306.088.871,00	279.981.434,00	279.981.434,00
7.01.0.00.0.00.01.0000						KECAMATAN SIANTAN	4.827.289.000,00	4.295.637.123,00	4.376.408.654,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	4.827.289.000,00	4.295.637.123,00	4.376.408.654,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01				KECAMATAN	4.827.289.000,00	4.295.637.123,00	4.376.408.654,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	250.000.000,00	265.144.342,00	275.144.342,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	250.000.000,00	265.144.342,00	275.144.342,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	250.000.000,00	265.144.342,00	275.144.342,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	34.531.100,00	55.614.088,00	55.614.088,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	34.531.100,00	55.614.088,00	55.614.088,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	34.531.100,00	55.614.088,00	55.614.088,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	76.604.308,00	102.128.400,00	125.207.681,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	76.604.308,00	102.128.400,00	125.207.681,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8.154.700,00	33.681.150,00	33.681.150,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	10.757.300,00	10.757.300,00	10.757.300,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	57.692.308,00	57.689.950,00	80.769.231,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.466.153.592,00	3.872.750.293,00	3.920.442.543,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.265.000,00	18.276.646,00	18.276.646,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000,00	15.008.046,00	15.008.046,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.265.000,00	3.268.600,00	3.268.600,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.877.748.192,00	2.706.897.584,00	2.875.573.438,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.673.581.792,00	2.509.775.184,00	2.678.451.038,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	201.120.000,00	194.076.000,00	194.076.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.046.400,00	3.046.400,00	3.046.400,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.359.300,00	4.638.731,00	4.638.731,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.068.600,00	3.068.600,00	3.068.600,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.290.700,00	1.570.131,00	1.570.131,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	230.663.000,00	136.015.500,00	71.415.500,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	199.500.000,00	104.852.500,00	40.252.500,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.721.000,00	3.721.000,00	3.721.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	27.442.000,00	27.442.000,00	27.442.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	215.071.400,00	159.655.627,00	150.236.527,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.938.600,00	4.938.600,00	4.938.600,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.000.000,00	24.584.227,00	15.165.127,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.550.400,00	10.550.400,00	10.550.400,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.217.400,00	18.217.400,00	18.217.400,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.423.000,00	2.423.000,00	2.423.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76.942.000,00	76.942.000,00	76.942.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	131.224.200,00	72.434.323,00	33.128.723,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.000.000,00	39.305.600,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	91.224.200,00	33.128.723,00	33.128.723,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	885.732.500,00	720.341.882,00	724.882.978,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	32.764.500,00	32.764.500,00	32.764.500,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.968.000,00	30.356.000,00	30.356.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	836.000.000,00	657.221.382,00	661.762.478,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.090.000,00	54.490.000,00	42.290.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.560.000,00	13.560.000,00	13.560.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.530.000,00	16.530.000,00	16.530.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.000.000,00	24.400.000,00	12.200.000,00
7.01.0.00.0.00.01.01						KELURAHAN TAREMPA	2.226.127.158,00	1.345.144.687,00	1.355.144.687,00
7.01.0.00.0.00.01.01	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.967.671.300,00	1.185.439.072,00	1.195.439.072,00
7.01.0.00.0.00.01.01	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.967.271.300,00	1.185.339.072,00	1.195.339.072,00
7.01.0.00.0.00.01.01	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	30.135.900,00	16.082.100,00	16.082.100,00
7.01.0.00.0.00.01.01	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	34.465.700,00	34.365.000,00	34.365.000,00
7.01.0.00.0.00.01.01	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.902.669.700,00	1.134.891.972,00	1.144.891.972,00
7.01.0.00.0.00.01.01	7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	400.000,00	100.000,00	100.000,00
7.01.0.00.0.00.01.01	7	01	03	2.05	0001	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	400.000,00	100.000,00	100.000,00
7.01.0.00.0.00.01.01	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	258.455.858,00	159.705.615,00	159.705.615,00
7.01.0.00.0.00.01.01	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.01.0.00.0.00.01.01	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.01.0.00.0.00.01.01	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.943.893,00	100.906.230,00	100.906.230,00
7.01.0.00.0.00.01.01	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.492.000,00	3.481.273,00	3.481.273,00
7.01.0.00.0.00.01.01	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.996.093,00	19.977.782,00	19.977.782,00
7.01.0.00.0.00.01.01	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.522.800,00	14.522.175,00	14.522.175,00
7.01.0.00.0.00.01.01	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.01	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	33.225.000,00	33.225.000,00	33.225.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.01.01	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.708.000,00	24.700.000,00	24.700.000,00
7.01.0.00.0.00.01.01	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.000.000,00	200.000,00	200.000,00
7.01.0.00.0.00.01.01	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.000.000,00	100.000,00	100.000,00
7.01.0.00.0.00.01.01	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	100.000,00	100.000,00
7.01.0.00.0.00.01.01	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.943.965,00	43.943.385,00	43.943.385,00
7.01.0.00.0.00.01.01	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.330.800,00	27.330.220,00	27.330.220,00
7.01.0.00.0.00.01.01	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.613.165,00	16.613.165,00	16.613.165,00
7.01.0.00.0.00.01.01	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.468.000,00	14.556.000,00	14.556.000,00
7.01.0.00.0.00.01.01	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.008.000,00	96.000,00	96.000,00
7.01.0.00.0.00.01.01	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.360.000,00	5.360.000,00	5.360.000,00
7.01.0.00.0.00.01.01	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000						KECAMATAN JEMAJA	5.950.403.433,00	5.624.387.612,00	5.769.991.592,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	39.000.000,00	6.900.000,00	3.750.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	39.000.000,00	6.900.000,00	3.750.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	39.000.000,00	6.900.000,00	3.750.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	480.840.000,00	281.691.468,00	263.767.368,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	480.840.000,00	281.691.468,00	263.767.368,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	480.840.000,00	281.691.468,00	263.767.368,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	19.084.500,00	8.776.400,00	15.197.200,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	19.084.500,00	8.776.400,00	15.197.200,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	19.084.500,00	8.776.400,00	15.197.200,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	52.363.000,00	45.858.000,00	35.909.800,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	52.363.000,00	45.858.000,00	35.909.800,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	39.084.500,00	39.082.400,00	31.901.800,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	13.278.500,00	6.775.600,00	4.008.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	71.520.000,00	64.423.606,00	80.572.926,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	71.520.000,00	64.423.606,00	80.572.926,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.250.000,00	6.244.000,00	3.680.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	17.270.000,00	10.459.888,00	13.146.488,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	48.000.000,00	47.719.718,00	63.746.438,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.287.595.933,00	5.216.738.138,00	5.370.794.298,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.456.000,00	32.075.710,00	18.317.050,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.283.000,00	7.157.150,00	7.157.150,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.209.000,00	6.900.800,00	3.181.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.842.000,00	4.306.900,00	2.991.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.451.000,00	2.229.900,00	2.229.900,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.321.000,00	1.838.000,00	1.838.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.482.000,00	4.065.300,00	572.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.868.000,00	5.577.660,00	348.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.670.290.907,00	3.669.256.055,00	3.840.793.265,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.478.103.707,00	3.478.119.575,00	3.661.162.525,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	176.900.000,00	176.420.000,00	172.380.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.843.000,00	8.272.740,00	6.681.740,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.444.200,00	6.443.740,00	569.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.500.000,00	6.585.000,00	5.100.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.500.000,00	6.585.000,00	5.100.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	51.937.000,00	40.323.000,00	21.492.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	6.739.000,00	6.739.000,00	4.700.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45.198.000,00	33.584.000,00	16.792.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	334.073.588,00	330.881.224,00	302.038.053,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.009.200,00	7.008.344,00	3.130.486,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.000.000,00	59.923.390,00	36.783.115,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.335.500,00	11.334.370,00	11.086.432,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.228.888,00	44.227.220,00	48.210.620,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.500.000,00	7.499.900,00	14.674.400,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.000.000,00	40.000.000,00	26.760.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.000.000,00	160.888.000,00	161.393.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000,00	34.818.105,00	12.882.699,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	34.818.105,00	12.882.699,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.092.219.438,00	1.066.940.044,00	1.154.820.896,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.000.000,00	40.836.600,00	45.228.600,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.190.062,00	12.318.048,00	12.318.048,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.028.029.376,00	1.013.785.396,00	1.097.274.248,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.119.000,00	35.859.000,00	15.350.335,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7.500.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.010.000,00	11.680.000,00	10.880.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.609.000,00	20.609.000,00	900.335,00
7.01.0.00.0.00.02.01						KELURAHAN LETUNG	880.748.728,00	880.748.728,00	862.352.440,00
7.01.0.00.0.00.02.01	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	723.931.000,00	723.931.000,00	718.409.192,00
7.01.0.00.0.00.02.01	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	723.931.000,00	723.931.000,00	718.409.192,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.02.01	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.184.700,00	6.184.700,00	6.184.700,00
7.01.0.00.0.00.02.01	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	208.954.300,00	208.954.300,00	203.432.492,00
7.01.0.00.0.00.02.01	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	508.792.000,00	508.792.000,00	508.792.000,00
7.01.0.00.0.00.02.01	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	156.817.728,00	156.817.728,00	143.943.248,00
7.01.0.00.0.00.02.01	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	105.118.000,00	105.118.000,00	101.141.220,00
7.01.0.00.0.00.02.01	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.898.000,00	4.898.000,00	4.898.000,00
7.01.0.00.0.00.02.01	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.01	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.020.000,00	14.020.000,00	14.020.000,00
7.01.0.00.0.00.02.01	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	5.223.220,00
7.01.0.00.0.00.02.01	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.200.000,00	15.200.000,00	13.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.01	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.01	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.998.928,00	31.998.928,00	27.951.228,00
7.01.0.00.0.00.02.01	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000,00	25.000.000,00	20.952.300,00
7.01.0.00.0.00.02.01	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.998.928,00	6.998.928,00	6.998.928,00
7.01.0.00.0.00.02.01	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.700.800,00	19.700.800,00	14.850.800,00
7.01.0.00.0.00.02.01	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.880.000,00	5.880.000,00	3.570.000,00
7.01.0.00.0.00.02.01	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	1.460.000,00
7.01.0.00.0.00.02.01	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.820.800,00	9.820.800,00	9.820.800,00
7.01.0.00.0.00.03.0000						KECAMATAN PALMATAK	5.772.313.937,00	4.700.016.425,00	4.811.567.194,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	798.700.000,00	294.288.214,00	227.284.270,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	798.700.000,00	294.288.214,00	227.284.270,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	798.700.000,00	294.288.214,00	227.284.270,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	150.000.000,00	148.539.675,00	164.297.075,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	150.000.000,00	148.539.675,00	164.297.075,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	150.000.000,00	148.539.675,00	164.297.075,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	117.307.300,00	53.058.600,00	117.841.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	117.307.300,00	53.058.600,00	117.841.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	50.000.000,00	28.023.800,00	23.592.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	67.307.300,00	25.034.800,00	94.249.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.706.306.637,00	4.204.129.936,00	4.302.144.849,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.860.432.977,00	2.638.330.127,00	2.721.553.186,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.745.432.977,00	2.532.010.127,00	2.624.953.186,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	115.000.000,00	106.320.000,00	96.600.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	28.200.000,00	26.760.000,00	26.760.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	28.200.000,00	26.760.000,00	26.760.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	278.104.196,00	255.711.530,00	161.679.204,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.311.000,00	11.809.872,00	6.622.546,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.417.800,00	25.345.658,00	17.613.658,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.002.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	109.373.396,00	94.320.000,00	64.883.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.000.000,00	119.236.000,00	69.560.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.539.569.464,00	1.283.328.279,00	1.392.152.459,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72.669.200,00	63.976.471,00	50.695.971,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.220.000,00	58.108.000,00	48.268.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.427.680.264,00	1.161.243.808,00	1.293.188.488,00
7.01.0.00.0.00.04.0000						KECAMATAN SIANTAN TIMUR	3.325.744.163,00	3.371.007.855,00	3.451.777.086,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	157.180.800,00	335.606.594,00	335.606.594,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	157.180.800,00	335.606.594,00	335.606.594,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	157.180.800,00	335.606.594,00	335.606.594,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	129.196.400,00	129.196.400,00	180.866.011,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	129.196.400,00	129.196.400,00	180.866.011,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	28.696.400,00	28.696.400,00	28.696.400,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	100.500.000,00	100.500.000,00	152.169.611,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.039.366.963,00	2.906.204.861,00	2.935.304.481,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.208.300,00	9.208.300,00	9.208.300,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.364.800,00	4.364.800,00	4.364.800,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.843.500,00	4.843.500,00	4.843.500,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.818.973.335,00	1.719.923.715,00	1.749.023.335,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.722.413.335,00	1.623.363.715,00	1.652.463.335,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	93.000.000,00	93.000.000,00	93.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.560.000,00	3.560.000,00	3.560.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	512.490.200,00	501.496.900,00	501.496.900,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.307.000,00	9.249.100,00	9.249.100,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.666.600,00	11.416.600,00	11.416.600,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	194.265.600,00	194.180.200,00	194.180.200,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	61.850.000,00	60.750.000,00	60.750.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	233.401.000,00	225.901.000,00	225.901.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	680.095.128,00	656.975.946,00	656.975.946,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72.804.800,00	72.790.800,00	72.790.800,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.712.000,00	23.712.000,00	23.712.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	583.578.328,00	560.473.146,00	560.473.146,00
7.01.0.00.0.00.05.0000						KECAMATAN SIANTAN SELATAN	3.214.878.668,00	2.662.453.304,00	2.797.684.073,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	170.000.000,00	150.852.254,00	164.120.662,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	170.000.000,00	150.852.254,00	164.120.662,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	170.000.000,00	150.852.254,00	164.120.662,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	120.000.000,00	75.312.190,00	75.312.190,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	120.000.000,00	75.312.190,00	75.312.190,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	120.000.000,00	75.312.190,00	75.312.190,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	90.000.000,00	84.299.800,00	109.129.800,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	90.000.000,00	84.299.800,00	109.129.800,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	20.000.000,00	14.624.400,00	14.624.400,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	70.000.000,00	69.675.400,00	94.505.400,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.834.878.668,00	2.351.989.060,00	2.449.121.421,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.783.881.668,00	1.630.421.797,00	1.699.534.578,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.690.881.668,00	1.537.421.797,00	1.606.534.578,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	93.000.000,00	93.000.000,00	93.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25.200.000,00	25.200.000,00	22.800.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.200.000,00	25.200.000,00	22.800.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	20.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	294.000.000,00	202.221.420,00	210.771.420,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.000.000,00	8.574.050,00	8.574.050,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.000.000,00	38.231.284,00	38.231.284,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.000.000,00	9.795.126,00	9.795.126,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.000.000,00	10.038.960,00	10.038.960,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000,00	5.022.000,00	2.022.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.000.000,00	10.350.000,00	21.900.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110.000.000,00	120.210.000,00	120.210.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	120.000.000,00	69.072.221,00	90.497.059,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	25.000.000,00	24.954.925,00	11.741.320,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.000.000,00	44.117.296,00	78.755.739,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	464.072.000,00	310.817.482,00	307.662.224,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.072.000,00	12.072.000,00	11.066.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	440.000.000,00	298.745.482,00	296.596.224,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127.725.000,00	92.256.140,00	95.856.140,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.725.000,00	67.026.140,00	70.626.140,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	8.850.000,00	8.850.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,00	16.380.000,00	16.380.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000						KECAMATAN JEMAJA TIMUR	3.882.041.182,00	3.258.051.152,00	3.321.897.306,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0,00	165.515.400,00	165.515.400,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	0,00	165.515.400,00	165.515.400,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	0,00	165.515.400,00	165.515.400,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	50.000.000,00	27.600.000,00	37.600.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	50.000.000,00	27.600.000,00	37.600.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	50.000.000,00	27.600.000,00	37.600.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	74.470.668,00	51.500.000,00	51.500.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	74.470.668,00	51.500.000,00	51.500.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	74.470.668,00	51.500.000,00	51.500.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	157.683.538,00	30.115.400,00	30.115.400,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	157.683.538,00	30.115.400,00	30.115.400,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	27.222.000,00	9.515.400,00	9.515.400,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	130.461.538,00	20.600.000,00	20.600.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.599.886.976,00	2.983.320.352,00	3.037.166.506,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.468.500,00	24.076.523,00	24.076.523,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.999.700,00	4.832.823,00	4.832.823,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.459.400,00	3.761.500,00	3.761.500,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.855.000,00	3.855.000,00	3.855.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.459.400,00	3.932.200,00	3.932.200,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.855.000,00	3.855.000,00	3.855.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.840.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.296.840.800,00	2.038.415.856,00	2.092.262.010,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.155.862.000,00	1.897.437.056,00	1.951.283.210,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.489.400,00	4.489.400,00	4.489.400,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.489.400,00	6.489.400,00	6.489.400,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.565.110,00	17.565.110,00	17.565.110,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	17.565.110,00	17.565.110,00	17.565.110,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	28.700.000,00	28.700.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	28.700.000,00	28.700.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	328.012.566,00	253.150.935,00	253.150.935,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.834.066,00	31.219.000,00	31.219.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000,00	16.617.235,00	16.617.235,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.128.500,00	26.074.700,00	26.074.700,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000,00	9.740.000,00	9.740.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.050.000,00	34.500.000,00	34.500.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	825.000.000,00	614.856.224,00	614.856.224,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000,00	12.072.000,00	12.072.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	800.000.000,00	602.784.224,00	602.784.224,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.000.000,00	6.555.704,00	6.555.704,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000,00	4.987.704,00	4.987.704,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00	1.568.000,00	1.568.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000						KECAMATAN SIANTAN TENGAH	3.518.364.292,00	3.222.077.690,00	3.312.858.600,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	153.450.400,00	117.584.734,00	118.611.176,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	153.450.400,00	117.584.734,00	118.611.176,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	153.450.400,00	117.584.734,00	118.611.176,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	50.006.386,00	30.320.400,00	32.032.400,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	50.006.386,00	30.320.400,00	32.032.400,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	50.006.386,00	30.320.400,00	32.032.400,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	57.193.000,00	47.308.698,00	49.440.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	57.193.000,00	47.308.698,00	49.440.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	57.193.000,00	47.308.698,00	49.440.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.218.500,00	11.218.500,00	10.350.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.218.500,00	11.218.500,00	10.350.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	11.218.500,00	11.218.500,00	10.350.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.246.496.006,00	3.015.645.358,00	3.102.425.024,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.178.700,00	33.342.700,00	18.105.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.733.000,00	12.733.000,00	6.690.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.068.500,00	11.250.400,00	7.135.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.377.200,00	9.359.300,00	4.280.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.770.668.326,00	1.772.223.526,00	1.867.048.549,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.658.908.326,00	1.660.167.526,00	1.754.992.549,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	111.760.000,00	112.056.000,00	112.056.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	275.342.800,00	252.696.360,00	201.264.001,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.786.200,00	6.433.685,00	6.286.703,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.954.600,00	48.346.325,00	85.271.127,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.591.100,00	5.079.040,00	7.618.401,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.423.100,00	12.937.510,00	7.667.970,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.683.800,00	5.683.800,00	5.983.800,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	53.634.000,00	66.250.000,00	21.750.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.270.000,00	107.966.000,00	66.686.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	211.834.100,00	0,00	3.150.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	211.834.100,00	0,00	3.150.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	905.222.080,00	902.132.772,00	986.975.474,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.024.000,00	33.024.000,00	37.420.450,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	872.198.080,00	869.108.772,00	949.555.024,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.250.000,00	55.250.000,00	25.882.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.760.000,00	10.760.000,00	14.330.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.360.000,00	5.360.000,00	11.370.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.130.000,00	39.130.000,00	182.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000						KECAMATAN SIANTAN UTARA	2.947.045.916,00	2.673.142.594,00	2.723.527.209,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.000.000,00	3.110.000,00	3.110.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	10.000.000,00	3.110.000,00	3.110.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.000.000,00	3.110.000,00	3.110.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	145.003.400,00	165.882.500,00	153.249.500,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	145.003.400,00	165.882.500,00	153.249.500,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	145.003.400,00	165.882.500,00	153.249.500,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	56.000.000,00	104.903.655,00	104.114.855,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	56.000.000,00	104.903.655,00	104.114.855,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50.000.000,00	93.650.655,00	93.650.655,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6.000.000,00	11.253.000,00	10.464.200,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	38.150.000,00	47.793.080,00	87.509.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	38.150.000,00	47.793.080,00	87.509.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.000.000,00	2.500.000,00	3.250.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	6.300.000,00	18.203.000,00	18.203.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	28.850.000,00	27.090.080,00	66.056.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.697.892.516,00	2.351.453.359,00	2.375.543.854,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.759.249.473,00	1.534.387.533,00	1.590.816.858,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.679.249.473,00	1.447.387.533,00	1.503.816.858,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	80.000.000,00	87.000.000,00	87.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.800.000,00	10.788.000,00	10.788.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.800.000,00	10.788.000,00	10.788.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	229.454.055,00	183.989.633,00	165.085.363,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.838.000,00	1.673.425,00	1.673.425,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.231.000,00	44.858.208,00	44.545.938,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.000.000,00	4.264.000,00	4.264.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.750.000,00	23.800.000,00	23.800.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	146.635.055,00	109.394.000,00	90.802.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	57.872.000,00	50.662.885,00	50.772.885,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	57.872.000,00	50.662.885,00	50.772.885,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	631.016.988,00	568.023.038,00	553.712.378,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.500.000,00	20.976.940,00	15.259.940,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.635.740,00	2.688.000,00	2.688.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	30.000.000,00	10.037.398,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	557.881.248,00	514.358.098,00	525.727.040,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.500.000,00	2.602.270,00	3.368.370,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7.500.000,00	2.602.270,00	3.368.370,00
7.01.0.00.0.00.09.0000						KECAMATAN JEMAJA BARAT	3.395.042.738,00	2.885.664.247,00	2.936.048.862,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	335.000.000,00	200.051.903,00	187.520.703,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	335.000.000,00	200.051.903,00	187.520.703,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	335.000.000,00	200.051.903,00	187.520.703,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	43.696.000,00	43.314.000,00	43.314.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	43.696.000,00	43.314.000,00	43.314.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	43.696.000,00	43.314.000,00	43.314.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	58.000.000,00	24.471.000,00	52.355.615,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	58.000.000,00	24.471.000,00	52.355.615,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	40.000.000,00	11.971.000,00	11.971.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	18.000.000,00	12.500.000,00	40.384.615,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.958.346.738,00	2.617.827.344,00	2.652.858.544,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.942.000,00	14.563.000,00	9.449.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.752.000,00	2.752.000,00	1.380.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.434.000,00	2.070.000,00	1.035.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.203.000,00	1.550.000,00	1.380.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.678.000,00	1.487.500,00	828.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.583.000,00	2.000.000,00	966.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.792.000,00	2.203.500,00	1.380.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	2.480.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.025.675.730,00	1.803.880.772,00	1.913.291.237,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.926.352.130,00	1.704.557.172,00	1.814.742.237,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	96.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.111.200,00	2.111.200,00	1.336.600,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.212.400,00	1.212.400,00	1.212.400,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.849.000,00	17.737.500,00	2.615.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	1.235.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.849.000,00	15.737.500,00	1.380.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.000.000,00	26.000.000,00	25.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	35.000.000,00	26.000.000,00	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	314.175.000,00	240.165.278,00	223.691.048,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.183.000,00	2.012.000,00	1.006.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000,00	12.276.189,00	9.810.959,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.371.000,00	23.606.089,00	20.456.089,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.871.000,00	6.871.000,00	4.704.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	62.750.000,00	46.500.000,00	41.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000,00	148.900.000,00	146.714.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	62.441.486,00	37.147.430,00	32.625.865,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62.441.486,00	37.147.430,00	32.625.865,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	461.949.522,00	456.355.278,00	424.208.308,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29.427.500,00	27.236.976,00	27.236.976,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.018.000,00	2.018.000,00	2.018.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	430.504.022,00	427.100.302,00	394.953.332,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.314.000,00	21.978.086,00	21.978.086,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.570.000,00	6.456.506,00	6.456.506,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.744.000,00	15.521.580,00	15.521.580,00
7.01.0.00.0.00.10.0000						KECAMATAN KUTE SIANTAN	5.067.351.045,00	3.984.247.238,00	4.078.364.930,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	637.845.000,00	200.628.320,00	167.973.477,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	637.845.000,00	200.628.320,00	167.973.477,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	352.250.000,00	191.558.320,00	161.653.477,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	285.595.000,00	9.070.000,00	6.320.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	57.250.500,00	57.250.500,00	20.077.090,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	57.250.500,00	57.250.500,00	20.077.090,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	57.250.500,00	57.250.500,00	20.077.090,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	58.100.500,00	44.631.200,00	59.261.200,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	58.100.500,00	44.631.200,00	59.261.200,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	35.200.000,00	33.850.000,00	53.460.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	22.900.500,00	10.781.200,00	5.801.200,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	82.376.500,00	37.955.976,00	75.758.164,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	82.376.500,00	37.955.976,00	75.758.164,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	16.526.500,00	10.193.200,00	8.283.200,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	65.850.000,00	27.762.776,00	67.474.964,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.231.778.545,00	3.643.781.242,00	3.755.294.999,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.437.125,00	46.655.500,00	29.735.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.485.525,00	18.760.000,00	9.330.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.422.800,00	8.198.500,00	9.116.500,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11.999.550,00	8.868.500,00	5.418.500,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.529.250,00	10.828.500,00	5.870.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.109.967.623,00	2.001.502.009,00	2.235.272.565,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.987.064.368,00	1.878.352.009,00	2.112.722.565,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	108.000.000,00	108.000.000,00	107.400.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.549.075,00	5.990.000,00	5.990.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	9.354.180,00	9.160.000,00	9.160.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.762.900,00	4.722.900,00	4.722.900,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.762.900,00	4.722.900,00	4.722.900,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	61.643.400,00	31.526.200,00	28.056.200,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	6.839.000,00	6.930.000,00	6.930.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	44.562.000,00	16.720.000,00	13.200.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10.242.400,00	7.875.200,00	7.875.200,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	384.091.827,00	258.476.857,00	215.019.158,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	197.856.875,00	110.388.556,00	75.937.556,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.154.500,00	9.239.231,00	8.937.757,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.310.600,00	11.032.440,00	8.823.360,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.520.152,00	13.288.240,00	10.984.595,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.084.500,00	10.955.890,00	10.955.890,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133.965.000,00	103.590.950,00	101.460.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	509.788.350,00	291.557.458,00	181.454.195,89
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	303.088.350,00	141.599.389,00	99.767.320,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	154.700.000,00	149.958.073,00	125.686.875,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.080.487.520,00	899.276.288,00	1.051.474.906,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.429.000,00	22.144.000,00	20.650.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.057.058.520,00	877.132.288,00	1.030.824.906,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.600.000,00	18.070.030,00	9.560.015,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.500.000,00	4.590.030,00	4.080.015,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.100.000,00	5.480.000,00	5.480.000,00
						TOTAL	1.013.286.796.160,00	806.837.132.782,00	804.866.176.132,89

Kab. Kepulauan Anambas, 29 Desember 2023

Bupati

ABDUL HARIS

Lampiran IX : Peraturan Daerah
Nomor : 05 Tahun 2023
Tanggal : 29 Desember 2023

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	88.417.000,00	0,00	0,00	0,00	88.417.000,00
2	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	150.038.700,00	0,00	0,00	0,00	150.038.700,00
3	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	58.451.700,00	0,00	0,00	0,00	58.451.700,00
4	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KECAMATAN JEMAJA BARAT	11.971.000,00	0,00	0,00	0,00	11.971.000,00
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	8.590.000,00	0,00	0,00	0,00	8.590.000,00
6	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	17.370.544.817,00	29.342.726.665,00	0,00	0,00	46.713.271.482,00
7	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Kute Siantan	334.297.200,00	0,00	0,00	0,00	334.297.200,00
8	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN JEMAJA BARAT	1.910.742.237,00	0,00	0,00	0,00	1.910.742.237,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
9	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	1.611.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.611.350.000,00
10	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	0,00	140.235.842,00	0,00	0,00	140.235.842,00
11	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN JEMAJA BARAT	3.951.600,00	32.625.865,00	0,00	0,00	36.577.465,00
12	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN SIANTAN UTARA	54.141.255,00	0,00	0,00	0,00	54.141.255,00
13	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	121.719.000,00	0,00	0,00	0,00	121.719.000,00
14	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN JEMAJA BARAT	41.000.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000.000,00
15	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN JEMAJA BARAT	43.314.000,00	0,00	0,00	0,00	43.314.000,00
16	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	972.960.960,00	0,00	0,00	0,00	972.960.960,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
17	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	692.330.400,00	0,00	0,00	0,00	692.330.400,00
18	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN JEMAJA BARAT	35.977.048,00	0,00	0,00	0,00	35.977.048,00
19	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	185.009.944,00	0,00	0,00	0,00	185.009.944,00
20	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.260.396.272,00	0,00	0,00	0,00	3.260.396.272,00
21	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	309.174.600,00	0,00	0,00	0,00	309.174.600,00
22	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	910.811.191,00	32.316.925,00	0,00	0,00	943.128.116,00
23	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.278.694.200,00	0,00	0,00	0,00	1.278.694.200,00
24	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	7.166.516.409,00	0,00	0,00	0,00	7.166.516.409,00
25	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	45.762.000,00	0,00	0,00	0,00	45.762.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
26	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6.545.806.449,00	0,00	0,00	0,00	6.545.806.449,00
27	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	90.172.000,00	0,00	0,00	0,00	90.172.000,00
28	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN KUTE SIANTAN	20.077.090,00	0,00	0,00	0,00	20.077.090,00
29	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN KUTE SIANTAN	1.343.780.969,00	2.297.474,00	0,00	0,00	1.346.078.443,00
30	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN KUTE SIANTAN	59.261.200,00	0,00	0,00	0,00	59.261.200,00
31	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN JEMAJA BARAT	187.520.703,00	0,00	0,00	0,00	187.520.703,00
32	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	67.609.800,00	0,00	0,00	0,00	67.609.800,00
33	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	11.915.400,00	0,00	0,00	0,00	11.915.400,00
34	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN JEMAJA BARAT	16.556.580,00	0,00	0,00	0,00	16.556.580,00
35	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	514.226.702,00	0,00	0,00	0,00	514.226.702,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
36	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN JEMAJA BARAT	3.860.000,00	0,00	0,00	0,00	3.860.000,00
37	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN SIANTAN UTARA	153.249.500,00	0,00	0,00	0,00	153.249.500,00
38	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN SIANTAN UTARA	10.464.200,00	0,00	0,00	0,00	10.464.200,00
39	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	117.573.400,00	0,00	0,00	0,00	117.573.400,00
40	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	0,00	48.978.089,00	0,00	0,00	48.978.089,00
41	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN JEMAJA BARAT	2.760.000,00	0,00	0,00	0,00	2.760.000,00
42	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN JEMAJA TIMUR	28.700.000,00	0,00	0,00	0,00	28.700.000,00
43	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN PALMATAK	227.284.270,00	0,00	0,00	0,00	227.284.270,00
44	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN PALMATAK	2.658.335.732,00	0,00	0,00	0,00	2.658.335.732,00
45	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN PALMATAK	164.297.075,00	0,00	0,00	0,00	164.297.075,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
46	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN JEMAJA BARAT	394.953.332,00	0,00	0,00	0,00	394.953.332,00
47	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	3.925.921.690,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	5.925.921.690,00
48	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	64.525.000,00	0,00	0,00	0,00	64.525.000,00
49	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN JEMAJA BARAT	35.487.482,00	0,00	0,00	0,00	35.487.482,00
50	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN KUTE SIANTAN	167.973.477,00	0,00	0,00	0,00	167.973.477,00
51	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KECAMATAN KUTE SIANTAN	75.758.164,00	0,00	0,00	0,00	75.758.164,00
52	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KECAMATAN PALMATAK	117.841.000,00	0,00	0,00	0,00	117.841.000,00
53	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN PALMATAK	1.626.195.459,00	0,00	0,00	0,00	1.626.195.459,00
54	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN SIANTAN UTARA	180.231.303,00	0,00	0,00	0,00	180.231.303,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
55	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN SIANTAN UTARA	3.110.000,00	0,00	0,00	0,00	3.110.000,00
56	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KECAMATAN SIANTAN UTARA	87.509.000,00	0,00	0,00	0,00	87.509.000,00
TOTAL					55.069.118.510,00	29.599.180.860,00	2.000.000.000,00	0,00	87.168.299.370,00

Kab. Kepulauan Anambas, 29 Desember 2023

Bupati

ABDUL HARIS

Lampiran X : Peraturan Daerah
Nomor : 05 Tahun 2023
Tanggal : 29 Desember 2023

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

GOLONGAN / RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IVe								
Golongan IVd		1						1
Golongan IVc		18					1	19
Golongan IVb		9	16			7	1	33
Golongan IVa		2	34	1		27	4	68
Golongan IIIa								
Golongan IIId			59	56		122	12	249
Golongan IIIc			8	54		253	16	331
Golongan IIIb				45		308	48	401
Golongan IIIa				8		530	186	722
Golongan IIe								
Golongan IId						87	89	176
Golongan IIc						159	49	208
Golongan IIb							19	19
Golongan IIa						38	4	42
Golongan Ie								
Golongan Id							2	2
Golongan Ic							2	2
Golongan Ib								
Golongan Ia								
PPPK						400		400

Kab. Kepulauan Anambas, 29 Desember 2023

Bupati

ABDUL HARIS

Lampiran XI : Peraturan Daerah
Nomor : 05 Tahun 2023
Tanggal : 29 Desember 2023

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang sampai dengan Tahun N-2	Perkiraan Penambahan Tahun N-1	Perkiraan Pengurangan Tahun N-1	Perkiraan Saldo Akhir Tahun N-1
1	Kurang Bayar DBH Tahun 2021	2022	63.792.820.422,00	0,00	0,00	63.792.820.422,00
2	Kurang Bayar DBH Tahun 2022	2022	238.041.196.326,00	0,00	0,00	238.041.196.326,00
3	Kurang Bayar DBH Tahun 2023	2023	0,00	160.157.714.066,00	0,00	160.157.714.066,00
4	Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	2023	951.940.000,00	2.736.369.681,00	2.736.369.681,00	951.940.000,00
5	Piutang Pajak Air Permukaan (PAP)	2023	12.487.710,00	10.647.862,00	10.647.862,00	12.487.710,00
6	Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	2023	4.182.828.717,00	6.966.236.503,00	6.966.236.503,00	4.182.828.717,00
7	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	2023	2.993.251.876,00	3.150.477.043,00	3.150.477.043,00	2.993.251.876,00
8	Piutang Pajak Rokok	2023	536.895.776,00	1.322.894.010,00	1.322.894.010,00	536.895.776,00
		Total	310.511.120.827,00	174.375.336.165,00	14.217.824.099,00	470.668.634.803,00

Kab. Kepulauan Anambas, 29 Desember 2023

Bupati

ABDUL HARIS